



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2022

AUDITED 



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 11 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	x
RINGKASAN	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
NERACA	xiv
LAPORAN OPERASIONAL	xv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	6
A.6. Kebijakan Akuntansi	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	18
B.2. Belanja	23
B.3. Belanja Pegawai	25
B.4. Belanja Barang	26
B.5. Belanja Modal	28
B.5.1. Belanja Modal Tanah	28
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
B.5.5. Belanja Modal Lainnya	31
B.6. Belanja Terdampak COVID-19	31
B.7. Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022	32
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	35
C.1. Aset Lancar	35
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	37

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	39
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	40
C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	43
C.1.5. Piutang Bukan Pajak.....	46
C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.....	48
C.1.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.....	50
C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.....	50
C.1.9. Persediaan.....	51
C.2. Aset Tetap.....	53
C.2.1. Tanah.....	55
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	57
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	59
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	62
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	63
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	65
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	68
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	69
C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR.....	70
C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR.....	72
C.4. Aset Lainnya.....	73
C.4.1. Aset Tak Berwujud.....	75
C.4.2. Aset Lain-Lain.....	77
C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	79
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	80
C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	81
C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka.....	83
C.5.3. Uang Muka dari KPPN.....	86
C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	86
C.6. Ekuitas.....	87
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	88
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	88
D.2. Beban Pegawai.....	93

D.3. Beban Persediaan	97
D.4. Beban Barang dan Jasa	98
D.5. Beban Pemeliharaan	109
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	112
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	113
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	117
D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	118
D.10. Pos-Pos Luar Biasa	126
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	127
E.1. Ekuitas Awal	127
E.2. Surplus/Defisit-LO	127
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	127
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset.....	127
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan.....	127
E.4.3. Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.....	129
E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	130
E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	130
E.4.6. Koreksi Lain-lain.....	132
E.5. Transaksi Antar Entitas	133
E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	134
E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	134
E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	136
E.6. Ekuitas Akhir.....	150
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	151
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	151
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	151
F.3. Rekening Pemerintah	156
F.4. Pengungkapan Penting Lain-lain	156
F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.....	156
F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri	183
F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI.....	183
F.4.2.1.1. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan.....	202
F.4.2.1.1.1. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang	206
F.4.2.1.1.2. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa	206



F.4.2.1.1.3. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) 206

F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Belum Disahkan 214



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA	5
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN	20
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	23
Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program	23
Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja	24
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai.....	26
Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....	27
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal	28
Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah.....	29
Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	29
Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	30
Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	31
Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya	31
Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun	36
Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I	37
Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I.....	37
Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja	38
Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I.....	39
Tabel 21. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan	39
Tabel 22. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja	40
Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I.....	41
Tabel 24. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I.....	41
Tabel 25. Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas.....	41
Tabel 26. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satuan Kerja	42
Tabel 27. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Eselon I.....	43
Tabel 28. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Jenis Akun	44
Tabel 29. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I.....	46
Tabel 30. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja	47
Tabel 31. Mutasi Piutang Bukan Pajak	48
Tabel 32. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Eselon I	48
Tabel 33. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja.....	49
Tabel 34. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I.....	50

Tabel 35. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar	
Tagihan TP/TGR Per Eselon I.....	51
Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I	51
Tabel 37. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun	52
Tabel 38. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2022 ...	52
Tabel 39. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun.....	53
Tabel 40. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI	54
Tabel 41. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I.....	55
Tabel 42. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I	55
Tabel 43. Mutasi Transaksi Tanah.....	56
Tabel 44. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I	57
Tabel 45. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin.....	58
Tabel 46. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I.....	60
Tabel 47. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	60
Tabel 48. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I	62
Tabel 49. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63
Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I	64
Tabel 51. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya	64
Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	66
Tabel 53. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	66
Tabel 54. Mutasi Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	67
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	68
Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun.....	69
Tabel 57. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I	70
Tabel 58. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I	70
Tabel 59. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur	71
Tabel 60. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I	73
Tabel 61. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur	73
Tabel 62. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun	74
Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I.....	75
Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I.....	75
Tabel 65. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud	76
Tabel 66. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain	77
Tabel 67. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I	77

Tabel 68. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain.....	78
Tabel 69. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	79
Tabel 70. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun.....	80
Tabel 71. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I.....	81
Tabel 72. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I	81
Tabel 73. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja	82
Tabel 74. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I.....	84
Tabel 75. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I.....	86
Tabel 76. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I.....	87
Tabel 77. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I	87
Tabel 78. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN	88
Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Pegawai.....	94
Tabel 80. Perbandingan Rincian Beban Persediaan.....	97
Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa.....	99
Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	109
Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	113
Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	114
Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	117
Tabel 86. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	119
Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	128



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2023
**Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**

SUGIYANTO



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 11 Mei 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



RINGKASAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahunan Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp105.590.154.119,00 atau mencapai 135 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp78.474.597.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.278.927.068.631,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.514.469.985.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.571.764.455.628,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp55.905.353.442,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.482.273.236.416,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp33.585.865.770,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp46.078.179.636,00 dan Rp30.525.686.275.992,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.741.764.356,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp10.444.286.890.893,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.351.545.126.537,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp6.435.298.055,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 10.357.980.424.592,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp29.529.218.827.065,00, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp10.357.980.424.592,00), kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, koreksi lain-lain, dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp0,00, Rp98.435.003.799,00, (Rp271.426.058,00) dan Rp 11.256.012.869.720,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp30.525.686.275.992,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrua.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022				TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	78.474.597.000,00	105.590.154.119,00	27.115.557.119,00	135	96.521.922.988,00
JUMLAH PENDAPATAN		78.474.597.000,00	105.590.154.119,00	27.115.557.119,00	135	96.521.922.988,00
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	7.221.624.128.000,00	7.048.276.739.941,00	(173.347.388.059,00)	98	6.780.138.260.234,00
Belanja Barang	B.3	2.678.566.650.000,00	2.634.148.576.563,00	(44.418.073.437,00)	98	2.136.635.079.145,00
Belanja Modal	B.4	1.614.279.207.000,00	1.596.501.752.127,00	(17.777.454.873,00)	99	1.592.533.967.690,00
JUMLAH BELANJA		11.514.469.985.000,00	11.278.927.068.631,00	(235.542.916.369,00)	98	10.509.307.307.069,00



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



NERACA

NERACA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1.	271.770.124,00	151.248.877,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 1.2.	4.894.000,00	111.492.300,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.3.	6.064.885.817,00	328.806.675,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.4.	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.6.	5.493.589.931,00	1.506.868.229,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.7.	(27.220.491,00)	(7.534.341,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		5.466.369.440,00	1.499.333.888,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.8.	0,00	110.693.622,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.9.	0,00	(553.468,00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	110.140.154,00
Persediaan	C. 1.10.	19.665.022.585,00	21.944.823.818,00
Jumlah Aset Lancar		55.905.353.442,00	40.898.131.778,00
ASET TETAP	C. 2		
Tanah	C. 2.1.	19.986.074.179.582,00	19.805.288.980.810,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2.	4.462.524.660.536,00	3.808.622.153.369,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3.	10.461.107.316.949,00	9.582.390.434.389,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C. 2.4.	262.312.858.137,00	258.176.969.852,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.5.	52.090.395.576,00	68.004.058.842,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.6.	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.7.	(5.398.139.826.271,00)	(4.659.713.856.206,00)
Jumlah Aset Tetap		30.482.273.236.416,00	29.480.165.355.628,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C. 3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.1.	48.752.226,00	51.752.226,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.2.	(48.752.226,00)	(51.752.226,00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 4		
Aset Tak Berwujud	C. 4.1.	66.705.847.914,00	65.269.905.024,00
Aset Lain-Lain	C. 4.2.	147.118.278.231,00	159.843.755.689,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 4.3.	(180.238.260.375,00)	(188.038.494.197,00)
Jumlah Aset Lainnya		33.585.865.770,00	37.075.166.516,00
Jumlah Aset		30.571.764.455.628	29.558.138.653.922
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C. 5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 5.1.	42.970.421.804,00	25.691.256.213,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 5.2.	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00
Uang Muka dari KPPN	C. 5.3.	271.770.124,00	151.248.877,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 5.4.	4.706.430,00	1.072.735,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		46.078.179.636,00	28.919.826.857,00
Jumlah Kewajiban		46.078.179.636,00	28.919.826.857,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 6	30.525.686.275.992,00	29.529.218.827.065,00
Jumlah Ekuitas		30.525.686.275.992,00	29.529.218.827.065,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		30.571.764.455.628,00	29.558.138.653.922,00



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	92.741.764.356,00	86.793.728.206,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		92.741.764.356,00	86.793.728.206,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 2	7.048.043.385.423,00	6.780.962.599.442,00
Beban Persediaan	D. 3	94.286.979.901,00	95.503.112.886,00
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.592.628.939.888,00	1.301.888.339.402,00
Beban Pemeliharaan	D. 5	478.941.136.468,00	373.677.670.889,00
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	497.057.765.025,00	366.131.582.680,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	733.312.551.506,00	619.706.020.768,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D. 8	16.132.682,00	(1.036.637,00)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		10.444.286.890.893,00	9.537.868.289.430,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.351.545.126.537,00)	(9.451.074.561.224,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.021.596.684,00	3.824.572.872,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		29.335.903.099,00	16.618.102.338,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(25.314.306.415,00)	(12.793.529.466,00)
DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		40.327.424.415,00	4.206.050.761,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.448.416.055,00	510.992.763,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		18.879.008.360,00	3.695.057.998,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(6.435.298.055,00)	(9.098.471.468,00)
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(10.357.980.424.592,00)	(9.460.173.032.692,00)


 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E. 1	29.529.218.827.065,00	28.772.957.024.392,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E. 2	(10.357.980.424.592,00)	(9.460.173.032.692,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		98.435.003.799,00	-241.377.789.918,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	737.584.260,00	36.134.712,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	(134.596.433,00)	(32.664.518.258,00)
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	155.857.561,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	98.103.442.030,00	(209.195.042.665,00)
Lain-Lain	E. 4.6	(271.426.058,00)	289.778.732,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	11.256.012.869.720,00	10.457.812.625.283,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		996.467.448.927,00	756.261.802.673,00
EKUITAS AKHIR	E. 6	30.525.686.275.992,00	29.529.218.827.065,00



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

18. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut: **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**.

Penjelasan:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Tujuan

Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point, single database*, multi *user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada Periode Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*), Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi 7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 1.827 Satuan Kerja. Dari jumlah tersebut Satuan Kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan sejumlah 1.827 Satuan Kerja (100%).

Rincian Satuan Kerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satuan Kerja
			KP		KD		
			M	TM	M	TM	
1	01	Badan Urusan Administrasi	1	0	910	0	911
2	02	Kepaniteraan	1	0	0	0	1
3	03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	0	412	0	413
4	04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1	0	441	0	442
5	05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1	0	57	0	58
6	06	Badan Litbang Diklat Kumdil	1	0	0	0	1
7	07	Badan Pengawasan	1	0	0	0	1
Jumlah			7	0	1820	0	1827

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Basis

Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar***A.5. Dasar Pengukuran***Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan***A.6. Kebijakan Akuntansi***Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-***(1) Pendapatan–LRA***LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. **Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2019 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2019.

Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

ASET TETAP	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran belanja dari PNBP yang dapat digunakan kembali sebesar 21% dari PNBP yang telah disetorkan ke kas negara.

Sesuai peraturan perundangan, sebagian dana PNBP dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu. Mahkamah Agung mengajukan permohonan penggunaan PNBP bertujuan untuk belanja:

1. Operasional Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Mahkamah Agung.
2. Non Operasional antara lain:
 - a. Pelaksanaan pembinaan, monitoring PNBP, dan sosialisasi peraturan PNBP;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kepaniteraan dan kesekretariatan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - c. Pengadaan kebutuhan fasilitas pendukung perkantoran untuk pelayanan pada pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Alokasi pagu anggaran pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran Mahkamah Agung TA 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp11.820.133.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan per program

(*Dalam Rupiah*)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,00
005.WA	Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00
Jumlah		11.820.133.400.000,00

Berdasarkan Unit Eselon I*(Dalam Rupiah)*

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.127.467.300.000,00
005.02	Kepaniteraan	189.994.752.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	117.755.347.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.554.757.000,00
005.06	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan	174.752.945.000,00
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	40.160.741.000,00
Jumlah		11.820.133.400.000,00

Berdasarkan Jenis Belanja*(Dalam Rupiah)*

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
51	Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00
52	Belanja Barang	2.590.670.906.000,00
53	Belanja Modal	1.743.460.173.000,00
Jumlah		11.820.133.400.000,00

Berdasarkan Sumber Dana*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	Pagu
	Rupiah Murni	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	164.251.799.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00
	Jumlah Pagu Rupiah Murni	11.805.074.364.000,00
	PNBP	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.059.036.000,00
	Jumlah Pagu PNBP	15.059.036.000,00
Total Pagu		11.820.133.400.000,00

- a. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja operasional yaitu pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja untuk ASN dan Hakim serta operasional Satuan Kerja pengadilan;
 - b. Pagu anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu untuk memenuhi:
 - 1) Pembayaran belanja pegawai atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021;
 - 2) Peningkatan Layanan Operasional Satuan Kerja
Penambahan anggaran operasional Satuan Kerja daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
 - 3) Peningkatan Pelayanan Peradilan
Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan peradilan menuju modernisasi peradilan berbasis elektronik, pembebasan biaya perkara, sidang keliling, posbakum, dan *zitting plaats*;
 - 4) Pengadaan Tanah
Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pada Tahun 2022 dilakukan pengadaan tanah.
2. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Perubahan Rincian Anggaran
- a. Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, BAS (termasuk segmen akun) digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-KL dan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, maka Mahkamah Agung dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, Hal : Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Adapun rincian penggunaan akun khusus Covid-19 pada Mahkamah Agung per tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1) 521131 - Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

Pembelian alat-alat kesehatan berupa masker/*hand sanitizer* (habis pakai) yang diperuntukkan bagi pegawai dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik termasuk yang diadakan dalam rangka mendukung pelayanan (secara sewajarnya) dan tidak menghasilkan persediaan, dan penyemprotan disinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan dengan swakelola;

2) 521241 - Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

Diperuntukan untuk penyelenggaraan tugas fungsi dan pencapaian target kinerja berupa pengadaan APD/*rapid test* dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap-Peralatan dan Mesin/Persediaan;

3) 521841 - Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19

Pengadaan *hand sanitizer*, masker, sarung tangan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan yang diniatkan untuk disimpan sebagai persediaan;

4) 522192 - Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19;

Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan *rapid test* COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan *rapid test* COVID-19).

b. Perubahan Rincian Anggaran

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara per 31 Desember 2022 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Pengurangan pagu sebesar Rp3.559.364.000,00 berupa pengalihan anggaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan dari Mahkamah Agung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Pengurangan Pagu Belanja Pegawai (alokasi Tunjangan Kinerja) Mahkamah Agung RI yang berasal dari Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung sebesar Rp262.789.287.000,00.

- Realokasi anggaran ke BA-BUN dari anggaran yang diblokir untuk pengadaan Server 13 Pengadilan Tingkat Banding baru menjadi sebesar Rp43.639.261,00.
- Penambahan pagu berasal dari Penerimaan Hibah Uang berdasarkan data SPAN sebesar Rp4.333.497.000,00 pada 6 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai Perolehan Register	Data Revisi SPAN Menambah Pagu 2022	Selisih
Pengadilan Negeri Cibinong (005.01.0200.401915)	1.404.540.848,00	1.404.580.000,00	(39.152,00)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (005.01.2100.401971)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang (005.01.1100.526750)	2.186.000.000,00	2.024.227.000,00	161.773.000,00
Pengadilan Negeri Kuningan (005.01.0200.097709)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Singkawang (005.01.1300.099070)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Cikarang (005.01.0200.613519)	6.000.000.000,00	4.690.000,00	5.995.310.000,00
Jumlah	10.490.540.848,00	4.333.497.000,00	6.157.043.848,00

Terdapat perbedaan antara nilai perolehan register dengan nilai pada SPAN yang menambah Pagu tahun 2022 pada 3 satuan kerja, antara lain:

- Pengadilan Negeri Cibinong (005.01.0200.613519), perbedaan nilai disebabkan oleh kesalahan input nilai pada SP2D oleh Pemda selaku pemberi hibah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (005.01.1100.526750). Perbedaan nilai disebabkan oleh adanya pagu yang tidak dapat direalisasikan.
- Pengadilan Negeri Cikarang (005.01.0200.401915), selisih nilai sebesar Rp5.995.310.000,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Hibah pada Tahun 2022 yang belum direalisasikan.

Pagu Penyesuaian Anggaran Tahun 2022 per Program sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

Program	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,00	(97.342.000,00)	179.213.493.000,00
Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00	(305.566.073.000,00)	11.335.256.492.000,00
Jumlah	11.820.133.400.000,00	(305.663.415.000,00)	11.514.469.985.000,00

Pagu Penyesuaian Anggaran Tahun 2022 per Kelompok Belanja sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

Jenis Belanja	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00	(264.378.193.000,00)	7.221.624.128.000,00
Belanja Barang	2.590.670.906.000,00	87.895.744.000,00	2.678.566.650.000,00
Belanja Modal	1.743.460.173.000,00	(129.180.966.000,00)	1.614.279.207.000,00
Jumlah	11.820.133.400.000,00	(305.663.415.000,00)	11.514.469.985.000,00

Berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	7.270.515.000,00	7.270.515.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	70.951.947.000,00	70.951.947.000,00
Pendapatan Denda	153.140.000,00	153.140.000,00
Pendapatan Lain-Lain	98.995.000,00	98.995.000,00
Jumlah Pendapatan	78.474.597.000,00	78.474.597.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00	7.221.624.128.000,00
Belanja Barang	2.590.670.906.000,00	2.678.566.650.000,00
Belanja Modal	1.743.460.173.000,00	1.614.279.207.000,00
Jumlah Belanja	11.820.133.400.000,00	11.514.469.985.000,00

Realisasi

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal

Negara Bukan

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp105.590.154.119,00 atau mencapai 134,55

Pajak

persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp78.474.597.000,00.

Rp105.590.154

.119,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	2022				
		Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	0,00	18.818.000,00	0,00	18.818.000,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	57.340.000,00	1.495.799.657,00	0,00	1.495.799.657,00	2.608,65
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.838.000,00	2.506.979.027,00	0,00	2.506.979.027,00	31.984,93
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	7.205.337.000,00	8.167.908.143,00	9.837.628,00	8.158.070.515,00	113,22
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	236.670.000,00	172.160.000,00	0,00	172.160.000,00	72,74
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	2.803.121.000,00	2.875.580.000,00	0,00	2.875.580.000,00	102,58
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.170.714.000,00	24.898.990.000,00	0,00	24.898.990.000,00	107,46
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	44.741.442.000,00	51.894.595.893,00	7.320.000,00	51.887.275.893,00	115,97
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	159.516.500,00	0,00	159.516.500,00	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	16.575.000,00	0,00	16.575.000,00	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	110.693.622,00	0,00	110.693.622,00	0,00
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153.140.000,00	4.448.754.045,00	0,00	4.448.754.045,00	2.905,02
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	468.000,00	527.168.234,00	0,00	527.168.234,00	112.642,79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.573.000,00	4.847.014.441,00	0,00	4.847.014.441,00	56.538,14
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	89.953.000,00	3.179.744.552,00	0,00	3.179.744.552,00	3.534,90
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Persiapan PNS	0,00	281.795.607,00	0,00	281.795.607,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	5.219.026,00	0,00	5.219.026,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	78.474.597.000,00	105.607.311.747,00	17.157.628,00	105.590.154.119,00	134,55

Estimasi yang ditetapkan sebesar Rp78.474.597.000,00 dengan kondisi penerimaan tersebut maka PNPB Mahkamah Agung per 31 Desember 2022 sudah mencapai 134,55 persen capaian atas estimasi tersebut.

Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp9.068.231.131,00 atau 9,39 persen. Kenaikan tersebut secara umum disebabkan oleh peningkatan pada Pendapatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu, dan Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu.

Terdapat perubahan realisasi pendapatan pada pelaporan *audited* atas akun:

- 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Lolak (005.04.1700.401996) berkurang sebesar Rp2.275.000,00 merupakan ralat/koreksi setoran atas kesalahan kode Satuan Kerja dan kode akun penyetoran PPN POSBAKUM Tahun 2021 yang seharusnya

menggunakan kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211 (Pendapatan PPN Dalam Negeri).

- b. 425931 – Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (005.01.0199.663157) bertambah sebesar Rp128.898.547,00 merupakan perbaikan atas kesalahan penyetoran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode Satuan Kerja inaktif.

Perbandingan rincian Realisasi PNBPN Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi PNBPN		Kenaikan/ Penurunan	
		2022	2021	(Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	18.818.000,00	305.784.500,00	(286.966.500,00)	(93,85)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00	1.707.342.248,00	(211.542.591,00)	(12,39)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00	1.811.446.124,00	695.532.903,00	38,40
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	8.158.070.515,00	10.306.111.382,00	(2.148.040.867,00)	(20,84)
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	172.160.000,00	182.880.000,00	(10.720.000,00)	(5,86)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000,00	2.829.782.501,00	45.797.499,00	1,62
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.898.990.000,00	24.395.260.028,00	503.729.972,00	2,06
425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	51.887.275.893,00	48.884.186.640,00	3.003.089.253,00	6,14
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425699	Pendapatan Jasa lainnya	0,00	1.416,00	(1.416,00)	(100,00)
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.516.500,00	98.186.302,00	61.330.198,00	62,46
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	16.575.000,00	34.622.974,00	(18.047.974,00)	(52,13)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	110.693.622,00	66.300.000,00	44.393.622,00	66,96
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00	1.740.462.541,00	2.708.291.504,00	155,61
4259	Pendapatan Lain-Lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	527.168.234,00	1.226.175.779,00	(699.007.545,00)	(57,01)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.847.014.441,00	2.061.381.039,00	2.785.633.402,00	135,13
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.179.744.552,00	543.119.259,00	2.636.625.293,00	485,46
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00	277.369.054,00	4.426.553,00	1,60
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	45.318.483,00	(45.318.483,00)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.219.026,00	6.192.718,00	(973.692,00)	(15,72)
	Jumlah	105.590.154.119,00	96.521.922.988,00	9.068.231.131,00	9,39

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terdapat Realisasi Akun PNBPN yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, antara lain:

- 425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp159.516.500,00 pada 15 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Keterangan
1	005.01 3100 401892	Pengadilan Agama Suwawa	1.634,00	Pendapatan jasa giro yang berasal dari rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2019, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
2	005.03 0100 099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	74.891.500,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
3	005.03 1200 614884	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	5.200,00	
4	005.03 1200 663027	Pengadilan Negeri Menggala	60.750.050,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara akibat perpindahan rekening dari Bank Mandiri ke BTN karena kesalahan Bank yang belum mendaftarkan rekening untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) sehingga saldo giro terhitung pada rekening, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
5	005.03 1600 402028	Pengadilan Negeri Penajam	1.935.348,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara akibat perpindahan rekening dari BRI ke BTN karena kesalahan Bank yang belum mendaftarkan rekening untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) sehingga saldo giro terhitung pada rekening, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
6	005.03 1700 670211	Pengadilan Negeri Airmadidi	10.138.279,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
7	005.03 2200 099817	Pengadilan Negeri Klungkung	11.314.664,00	
8	005.03 3100 099362	Pengadilan Negeri Gorontalo	57.321,00	Pendapatan yang berasal dari pembukaan rekening baru atas penampungan uang perkara per November 2022, namun belum didaftarkan dalam program Treasury Notional Polling (TNP). Satuan Kerja telah mendaftarkan rekening tersebut untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) pada tanggal 4 Januari 2023.
9	005.04 0200 652063	Pengadilan Agama Depok	301.000,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
10	005.04 0300 401062	Pengadilan Agama Purwokerto	54.092,00	
11	005.04 0500 401272	Pengadilan Agama Jombang	38.974,00	
12	005.04 0700 401784	Pengadilan Agama Binjai	710,00	
13	005.04 0700 403084	Pengadilan Agama Simalungun	500,00	
14	005.04 0900 402082	Pengadilan Agama Rengat	27.088,00	
15	005.04 1400 402469	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	140,00	
Jumlah			159.516.500,00	

- 425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp5.219.026,00 terdapat pada 9 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Keterangan
1	005.01 0100 663267	Pengadilan Militer II - 08 Di Jakarta	12.353,00	Kesalahan penggunaan akun saat menyetorkan Pengembalian UP. Satuan Kerja menggunakan akun 532111 (Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin), kemudian Satuan Kerja melakukan penyetoran kembali menggunakan akun 815111 (Pengembalian UP Rupiah Murni) sehingga terjadi double penyetoran. Atas kelebihan penyetoran tersebut, satuan kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).
2	005.01 0300 097844	Pengadilan Negeri Jepara	489.150,00	Selisih kelebihan setoran pengembalian TUP atas uang makan. Satuan Kerja telah melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
3	005.01 1900 099507	Pengadilan Negeri Enrekang	37.166,00	Kesalahan akun potongan Taperum atas pembayaran Kekurangan THR, sehingga Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
4	005.01 1900 307602	Pengadilan Agama Sidenreng	29.263,00	Kelebihan penyetoran sisa UP Tahun 2022. Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
5	005.01 2900 400817	Pengadilan Agama Rangkas Bitung	493.894,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Muka sehingga lebih setor. Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
6	005.03 0500 626157	Pengadilan Negeri Kab.Malang, Jawa Timur	600,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Persediaan yang seharusnya dikembalikan sebesar Rp9.233.400,00 namun terinput sebesar Rp9.234.000,00 (lebih setor sebesar Rp600,00). Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun dari 815111 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan) menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
7	005.03 1800 099383	Pengadilan Negeri Toli-Toli	32.100,00	Transaksi yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran unit organisasi 01 atas sisa dana TUP Tahun berjalan, namun terjadi kesalahan penyetoran ke kode unit organisasi 03 dan Satuan Kerja kembali menyetorkan dengan menggunakan kode unit organisasi 01 sehingga terjadi double penyetoran baik di unit organisasi 01 dan 03, atas kesalahan penyetoran pada kode unit organisasi 03 KPPN mengarahkan untuk mengajukan ralat/koreksi akun dari 815111 (Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)) menjadi 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
8	005.04 0500 401495	Pengadilan Agama Magetan	4.035.000,00	Pendapatan diperoleh atas kelebihan pembayaran biaya perkara yang melebihi standar biaya yang ditentukan. Satuan kerja telah melakukan penyetoran menggunakan akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).
9	005.05 0199 663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	89.500,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Persediaan yang seharusnya dikembalikan sebesar Rp21.155.415,00 namun terinput sebesar Rp21.244.915,00 (lebih setor sebesar Rp89.500,00). Atas kelebihan setor tersebut solusi dari KPPN Jakarta VI adalah melakukan ralat/koreksi akun dari 815111 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan) menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
Jumlah			5.219.026,00	

Realisasi belanja penggunaan dana PNPB Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.416.198.005,00 atau 95,73% dari Anggaran Belanja PNPB sebesar Rp15.059.036.000,00.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNPB Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu PNPB	Realisasi Belanja PNPB	% Realisasi
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30.056.000,00	26.628.900,00	88,60
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.676.507.000,00	3.389.405.540,00	92,19
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11.177.719.000,00	10.847.581.673,00	97,05
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174.754.000,00	152.581.892,00	87,31
Jumlah Belanja		15.059.036.000,00	14.416.198.005,00	95,73

*Realisasi***B.2. Belanja***Belanja*

Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2022

Negara

adalah sebesar Rp11.278.927.068.631,00 atau 97,95 persen dari Anggaran Belanja

Rp11.278.927.

sebesar Rp11.514.469.985.000,00.

068.631,00

Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.221.624.128.000,00	7.050.179.580.080,00	97,63
Belanja Barang	2.678.566.650.000,00	2.636.564.540.020,00	98,43
Belanja Modal	1.614.279.207.000,00	1.596.514.944.027,00	98,90
Total Belanja Bruto	11.514.469.985.000,00	11.283.259.064.127,00	97,99
Pengembalian Belanja	0,00	4.331.995.496,00	0,00
Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.927.068.631,00	97,95

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 berdasarkan Program adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
01 Rupiah Murni			
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	164.154.457.000,00	160.210.960.631,00	97,60
WA Program Dukungan Manajemen	11.330.922.995.000,00	11.100.013.097.833,00	97,96
Jumlah Belanja Rupiah Murni	11.495.077.452.000,00	11.260.224.058.464,00	97,96
04 PNBPN			
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.059.036.000,00	14.416.198.005,00	95,73
Jumlah Belanja PNBPN	15.059.036.000,00	14.416.198.005,00	95,73
08 Hibah Dalam Negeri			
WA Program Dukungan Manajemen	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah Dalam Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
10 Hibah Langsung Dalam Negeri			
WA Program Dukungan Manajemen	4.183.497.000,00	4.136.812.162,00	98,88
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	4.183.497.000,00	4.136.812.162,00	98,88
Jumlah	11.514.469.985.000,00	11.278.927.068.631,00	97,95

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
Belanja Pegawai	7.048.276.739.941,00	6.780.138.260.234,00	268.138.479.707,00	3,95
Belanja Barang	2.634.148.576.563,00	2.136.635.079.145,00	497.513.497.418,00	23,28
Belanja Modal	1.596.501.752.127,00	1.592.533.967.690,00	3.967.784.437,00	0,25
Jumlah Belanja	11.278.927.068.631,00	10.509.307.307.069,00	769.619.761.562,00	7,32

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp769.619.391.562,00 atau sebesar 7,32 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai

Secara umum kenaikan belanja pegawai disebabkan karena hal-hal berikut, antara lain:

- Adanya penambahan jumlah pegawai dari formasi CPNS Tahun 2021 yang mulai melaksanakan tugas di tahun 2022 sehingga belanja gaji pegawai dan uang makan serta tunjangan kinerja pegawai mengalami kenaikan;

- Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Eselon II dan Hakim yang dibayarkan pada Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
2. Belanja Barang
- Kenaikan belanja operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas dikarenakan antara lain:
- Realisasi akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya) pada tahun 2022 merupakan program baru pada Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung (MA), yakni program Duta Peradilan Indonesia yang bertujuan mencari insan muda untuk memberikan citra positif dan meningkatkan interaksi masyarakat pada Mahkamah Agung.
 - Pembayaran honorarium penanganan perkara bagi hakim agung yang diselesaikan tepat waktu;
 - Pembayaran transport hakim dan bantuan sewa rumah dinas;
 - Sewa kendaraan dinas dan sewa mesin *fotocopy* dibayar dimuka;
 - Kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2022 yang menyebabkan kenaikan tagihan listrik; dan
 - Mulai dilaksanakannya kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pembinaan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Kesekretariatan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
3. Belanja Modal
- Kenaikan realisasi Belanja Modal Tanah disebabkan karena adanya pengadaan Tanah pada tahun 2022;
 - Pembangunan gedung kantor pada Satuan Kerja masih dalam proses perencanaan dan masih tahap awal pembangunan;
 - Alokasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan pada Tahun 2022 disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin untuk satuan kerja baru serta pengadaan peralatan dan mesin pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi untuk ditransfer ke seluruh satuan kerja.

*Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp7.048.276.7
39.941,00*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.048.276.739.941,00 dan Rp6.780.138.260.234,00.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp268.138.479.707,00 atau 3,95 persen dari Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.692.781.023.786,00	4.711.629.306.250,00	(18.848.282.464,00)	(0,40)
5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	40.184.563.711,00	43.602.286.929,00	(3.417.723.218,00)	(7,84)
5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	72.929.143.474,00	68.919.530.980,00	4.009.612.494,00	5,82
5122 Belanja Lembur	603.274.000,00	217.706.000,00	385.568.000,00	177,10
5124 Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.243.681.575.109,00	1.956.746.926.624,00	286.934.648.485,00	14,66
Realisasi Belanja Bruto	7.050.179.580.080,00	6.781.115.756.783,00	269.063.823.297,00	3,97
Pengembalian Belanja	(1.902.840.139,00)	(977.496.549,00)	(925.343.590,00)	94,66
Realisasi Belanja Neto	7.048.276.739.941,00	6.780.138.260.234,00	268.138.479.707,00	3,95

Terdapat penurunan realisasi pengembalian belanja pada periode pelaporan audited atas akun 511119 – Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang (005.01.0500.604730) berkurang sebesar Rp370.000,00 merupakan kesalahan penggunaan akun untuk potongan PFK dimana sebelumnya satuan kerja menggunakan akun 511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS yang seharusnya menggunakan akun 811132 - Penerimaan setoran/ptongan PFK 8% gaji PNS Pusat.

Realisasi

Belanja

Barang

Rp2.634.148.5

76.563,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.634.148.576.563,00 dan Rp2.136.635.079.145,00.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp497.513.497.418,00 atau 23,28 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
5211 Belanja Barang Operasional	947.066.191.827,00	732.500.438.574,00	214.565.753.253,00	29,29
5212 Belanja Barang Non Operasional	55.427.193.620,00	96.298.359.946,00	(40.871.166.326,00)	(42,44)
5218 Belanja Barang Persediaan	95.142.490.963,00	101.178.354.986,00	(6.035.864.023,00)	(5,97)
5221 Belanja Jasa	567.930.018.528,00	469.906.709.427,00	98.023.309.101,00	20,86
5231 Belanja Pemeliharaan	471.669.491.996,00	364.728.053.273,00	106.941.438.723,00	29,32
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	493.892.460.201,00	375.748.967.112,00	118.143.493.089,00	31,44
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.436.692.885,00	0,00	5.436.692.885,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	2.636.564.540.020,00	2.140.360.883.318,00	496.203.656.702,00	23,18
Pengembalian Belanja	(2.415.963.457,00)	(3.725.804.173,00)	1.309.840.716,00	(35,16)
Realisasi Belanja Neto	2.634.148.576.563,00	2.136.635.079.145,00	497.513.497.418,00	23,28

Pada periode Tahunan Tahun 2022 terdapat realisasi belanja barang melebihi pagu pada Satuan Kerja 00504.0600.401583 Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp5.969.000,00 pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Biasa. Hal ini dikarenakan oleh:

1. SPM Nomor 00004A tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp143.481.000,00 merupakan pagu yang berasal dari PNBPN. Transaksi tersebut merupakan MP (Maksimum Pencairan) PNBPN Tahap ke II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-165/PB/2022.
2. Terjadi kesalahan pembebanan akun, pada saat diajukan ke KPPN yaitu akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp143.481.000,00 seharusnya pembebanan pada 2 akun, yaitu : akun 521211 - Belanja Bahan sebesar Rp5.969.000,00 sedangkan akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp137.512.000,00. Kondisi tersebut menyebabkan pagu minus pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Terhadap kondisi tersebut, Satuan Kerja sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan pagu minus, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan ralat SPM, tetapi terjadi penolakan dari KPPN Banda Aceh karena untuk akun 521211 – Belanja Bahan hanya bisa dibayarkan melalui mekanisme non gaji (kepada rekening pihak ketiga/rekanan) dan dasar pembayarannya kwitansi/faktur, sedangkan SPM koreksi ini melalui mekanisme non gaji (LS Bendahara Pengeluaran).

2. Melakukan Revisi Anggaran, tetapi revisi pada SAKTI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki pagu, hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan revisi, realisasi anggaran sudah mencapai 100%. Sedangkan revisi antar Satuan Kerja tidak dapat dilakukan karena RO dan KRO yang berbeda serta sumber anggaran yang berbeda yaitu dari PNBK.

Realisasi**Belanja****Modal**

Rp1.596.501.7

52.127,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.596.501.752.127,00 dan Rp1.592.533.967.690,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.967.784.437,00 atau 0,25 persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
5311 Belanja Modal Tanah	120.665.501.668,00	1.298.970.000,00	119.366.531.668,00	9.189,32
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	647.516.644.141,00	437.678.377.774,00	209.838.266.367,00	47,94
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	826.617.586.474,00	1.145.599.478.878,00	(318.981.892.404,00)	(27,84)
5341 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	94.456.560,00	297.285.835,00	(202.829.275,00)	(68,23)
5361 Belanja Modal Lainnya	1.620.755.184,00	8.433.422.860,00	(6.812.667.676,00)	(80,78)
Realisasi Belanja Bruto	1.596.514.944.027,00	1.593.307.535.347,00	3.207.408.680,00	0,20
Pengembalian Belanja	(13.191.900,00)	(773.567.657,00)	760.375.757,00	(98,29)
Realisasi Belanja Neto	1.596.501.752.127,00	1.592.533.967.690,00	3.967.784.437,00	0,25

Realisasi**Belanja****Modal Tanah**

Rp120.665.50

1.668,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp120.665.501.668,00 dan Rp1.298.970.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp119.366.531.668,00 atau 9.189,32 persen dari Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
531111 Belanja Modal Tanah	118.438.782.400,00	1.273.160.000,00	117.165.622.400,00	9.202,74
531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	122.804.472,00	0,00	122.804.472,00	0,00
531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	9.000.000,00	25.810.000,00	(16.810.000,00)	(65,13)
531115 Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	1.979.570.607,00	0,00	1.979.570.607,00	0,00
531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	115.344.189,00	0,00	115.344.189,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	120.665.501.668,00	1.298.970.000,00	119.366.531.668,00	9.189,32
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	120.665.501.668,00	1.298.970.000,00	119.366.531.668,00	9.189,32

Belanja

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Modal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp647.514.818.141,00 dan Rp437.667.359.774,00.

Peralatan dan

Mesin

Rp647.514.818

.141,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember mengalami kenaikan sebesar Rp209.847.458.367,00 atau 47,95 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut antara lain:

Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	646.946.798.641,00	437.678.377.774,00	209.268.420.867,00	47,81
532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	23.962.000,00	0,00	23.962.000,00	0,00
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	545.883.500,00	0,00	545.883.500,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	647.516.644.141,00	437.678.377.774,00	209.838.266.367,00	47,94
Pengembalian Belanja	(1.826.000,00)	(11.018.000,00)	9.192.000,00	(83,43)
Realisasi Belanja Neto	647.514.818.141,00	437.667.359.774,00	209.847.458.367,00	47,95

*Realisasi***B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan***Belanja*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 dan 31

Modal Gedung

Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp826.606.220.574,00 dan

dan Bangunan

Rp1.144.836.929.221,00.

*Rp826.606.220**.574,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp318.230.708.647,00 atau 27,80 persen dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut antara lain:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	677.720.256.706,00	831.375.325.263,00	(153.655.068.557,00)	(18,48)
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	148.897.329.768,00	314.224.153.615,00	(165.326.823.847,00)	(52,61)
Realisasi Belanja Bruto	826.617.586.474,00	1.145.599.478.878,00	(318.981.892.404,00)	(27,84)
Pengembalian Belanja	(11.365.900,00)	(762.549.657,00)	751.183.757,00	(98,51)
Realisasi Belanja Neto	826.606.220.574,00	1.144.836.929.221,00	(318.230.708.647,00)	(27,80)

*Realisasi***B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan***Belanja Modal*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2022 dan 31

Jalan, Irigasi

Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp94.456.560,00 dan Rp0,00.

*dan Jaringan**Rp94.456.560,**00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp202.829.275,00 atau 68,23 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 antara lain:

Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
534131 Belanja Modal Jaringan	94.456.560,00	97.289.500,00	(2.832.940,00)	(2,91)
534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	199.996.335,00	(199.996.335,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	94.456.560,00	297.285.835,00	(202.829.275,00)	(68,23)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	94.456.560,00	297.285.835,00	(202.829.275,00)	(68,23)

*Realisasi***B.5.5. Belanja Modal Lainnya***Belanja*

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.620.755.184,00 dan Rp8.433.422.860,00.

*Modal Lainnya**Rp1.620.755.1**84,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.812.667.676,00 atau 80,78 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 antara lain:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
536111 Belanja Modal Lainnya	1.437.743.500,00	8.323.422.860,00	(6.885.679.360,00)	(82,73)
536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	183.011.684,00	110.000.000,00	73.011.684,00	66,37
Realisasi Belanja Bruto	1.620.755.184,00	8.433.422.860,00	(6.812.667.676,00)	(80,78)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	1.620.755.184,00	8.433.422.860,00	(6.812.667.676,00)	(80,78)

*Realisasi***B.6. Belanja Terdampak COVID-19***Belanja***Belanja Barang***Barang*

Mahkamah Agung mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp26.665.655.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp25.581.309.412,00 atau 95,93 persen dengan rincian sebagai berikut:

*Terdampak**COVID-19**Rp25.581.309.**412,00*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.357.189.000,00	6.402.006.203,00	100,70
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.416.583.000,00	737.010.584,00	30,50
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.313.458.000,00	528.238.845,00	22,83
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.827.433.000,00	17.914.053.780,00	62,14
Jumlah		39.914.663.000,00	25.581.309.412,00	64,09

Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional

B.7. Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk 3 (tiga) PN, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III);
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI);
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII);

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target, dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 Pagu Anggaran PN III adalah Rp4.779.898.000,00 dan total realisasi sebesar Rp4.655.781.446,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	RO Prioritas	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
PP : Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan					
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan					
Sasaran : Meningkatnya Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan					
Pro PN : Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan					
Ditjen Badan Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.658 Perkara	2.588.588.000,00	11.534 Perkara (150,73%)	2.473.953.950,00 (95,57%)
PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda					
KP : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak					
Sasaran : Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak					
Pro PN : Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya					
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	2.191.310.000,00	168 orang (105%)	2.181.827.496,00 (99,57%)

PN VI : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu Anggaran PN VI adalah Rp2.176.218.000,00 dan total realisasi sebesar Rp2.176.152.969,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VI ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	RO Prioritas	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
PP : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
Sasaran : Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
Pro PN : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	160 Orang	2.176.218.000,00	161 orang (100,63%)	2.176.152.969,00 (100%)

PN VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Pagu Anggaran PN VII adalah Rp78.504.722.000,00 dan total realisasi sebesar Rp76.516.995.641,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	RO Prioritas	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
PP : Penegakan Hukum Nasional					
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata					
Sasaran : Terlaksananya Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata					
Pro PN : Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha					
Badan Urusan Administrasi	Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)	1NSPK	800.000.000,00	4 NSPK (400%)	792.339.085,00 (99%)
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	50 Orang	936.000.000,00	52 Orang (104%)	929.560.274,00 (99,3%)
	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	280 Orang	2.284.000.000,00	286 orang (102,14%)	2.174.039.954,00 (95,19%)
Pro PN : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan					
Sasaran Pro PN : Terwujudnya Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan					
Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1Sistem Informasi	2.200.000.000,00	1Sistem Informasi (100%)	2.136.649.162,00 (97%)
Pro PN : Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif					
Ditjen Badan Peradilan Umum	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	300 orang	1500.000.000,00	330 orang (110%)	1496.379.233,00 (99,76%)
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan					
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan					
Pro PN : Penguatan Layanan Keadilan					
Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penguatan Layanan Keadilan					
Ditjen Badan Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	111.368 Orang	11.136.800.000,00	110.210 orang (98,96%)	11021055.786,00 (98,96%)
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	4.628 Perkara	6.317.295.000,00	4.593 perkara (99,21%)	6.267.387.197,00 (99,2%)
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara	106.350.000,00	50 perkara (30,6%)	32.522.000,00 (30,6%)
Ditjen Badan Peradilan Agama	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	234.469 Orang	22.413.120.000,00	372.834 orang (159,01%)	22.257.091.347,00 (99,30%)
	Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.1413 Perkara	9.952.839.000,00	3.1063 perkara (145,07%)	8.764.795.153,00 (88,06%)
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	32.918 Perkara	20.858.318.000,00	56.039 perkara (170,24%)	20.643.526.667,00 (99,97%)
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.880 Orang	990.000.000,00	1.741 Orang (60,45%)	641938.000,00 (64,79%)
	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	66 Perkara	49.860.000,00	11Perkara (16,67%)	5.890.000,00 (11,8%)



PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET***Aset Lancar**Rp55.905.353.**442,00***C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp55.905.353.442,00 dan Rp40.898.131.778,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp15.007.221.664,00 atau 36,69%.

Adapun kenaikan dan penurunan yang terjadi pada saldo Aset Lancar sebesar Rp15.007.221.664,00 tersebut disebabkan sebagai berikut:

- a. Adanya penurunan pada Aset Lancar untuk akun-akun:
 1. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp106.598.300,00 .
 2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp110.693.622,00.
 3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp553.468,00.
 4. Persediaan sebesar Rp2.279.801.233,00.
- b. Selain itu, terdapat kenaikan pada Aset Lancar untuk akun-akun:
 1. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp120.521.247,00.
 2. Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5.736.079.142,00.
 3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp7.680.125.410,00.
 4. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp3.986.721.702,00.
 5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sebesar Rp19.686.150,00.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

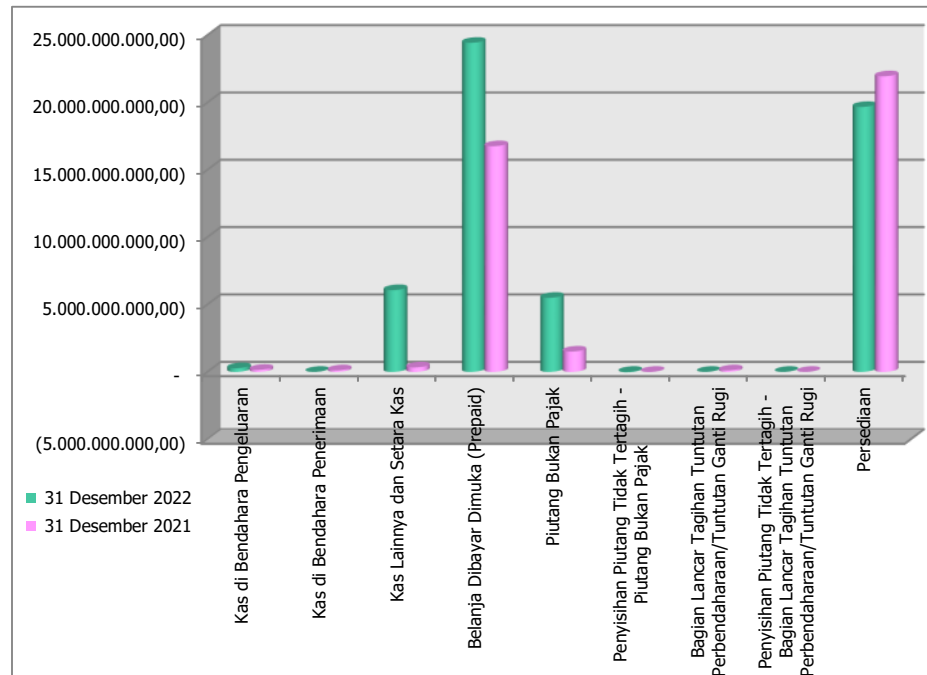
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.894.000,00	111.492.300,00	(106.598.300,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	6.064.885.817,00	328.806.675,00	5.736.079.142,00
4	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00	7.680.125.410,00
5	Piutang Bukan Pajak	5.493.589.931,00	1.506.868.229,00	3.986.721.702,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(27.220.491,00)	(7.534.341,00)	(19.686.150,00)
7	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	110.693.622,00	(110.693.622,00)
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(553.468,00)	553.468,00
9	Persediaan	19.665.022.585,00	21.944.823.818,00	(2.279.801.233,00)
Jumlah Aset Lancar		55.905.353.442,00	40.898.131.778,00	15.007.221.664,00

Komposisi Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Aset Lancar



Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	44.299.963.662,00	28.577.557.629,00	15.722.406.033,00
2	005.02	Kepaniteraan	1.343.987.114,00	1.655.186.280,00	(311.199.166,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	7.604.169.567,00	8.053.287.586,00	(449.118.019,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.436.515.251,00	1.703.707.952,00	(267.192.701,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	168.529.278,00	198.587.220,00	(30.057.942,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	696.919.367,00	514.845.893,00	182.073.474,00
7	005.07	Badan Pengawasan	355.269.203,00	194.959.218,00	160.309.985,00
Jumlah			55.905.353.442,00	40.898.131.778,00	15.007.221.664,00

Kas di**Bendahara****Pengeluaran**

Rp271.770.12

4,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp271.770.124,00 dan Rp151.248.877,00, terjadi kenaikan sebesar Rp120.521.247,00 atau 79,68%.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	268.160.124,00	150.618.877,00	117.541.247,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	630.000,00	(630.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran*(Dalam Rupiah)*

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Tahun 2023
1	005.01	BUA	268.160.124,00	(268.160.124,00)	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	(3.610.000,00)	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			271.770.124,00	(271.770.124,00)	0,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor		
						Tgl Dok.	NTPN	
Kas Di Bendahara Pengeluaran UP								
005.01	BUA	0800	400333	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	16.834.000,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 5 Januari 2023	05/01/2023	B5F5FD2CNR1833GSE
		0800	401947	Pengadilan Agama Batusangkar	17.192.370,00	Sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	0DA896QRA640LSH3
		1300	402669	Pengadilan Agama Mempawah	10,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada Tgl. 18 Januari 2023	18/01/2023	AAB510J3RC3NRJG
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP 005.01 BUA				34.026.380,00				
005.04	Ditjen. Badilag	0800	401979	Pengadilan Agama Sijunjung	145.000,00	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 2 Januari 2023	02/01/2023	AF5D1451QMCP5MUI
		1700	401996	Pengadilan Agama Lolak	3.395.000,00	Sudah dilakukan Penyetoran Sisa UP ke Kas Negara	04/01/2023	9DB1A7N8QMDRFN4
		0900	402623	Pengadilan Agama Dumai	70.000,00	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	2F90B6QRA6413F51
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP 005.04 Ditjen. Badilag				3.610.000,00				
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP				37.636.380,00				
Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP								
005.01	BUA	0200	097514	Pengadilan Negeri Bandung	88.452.000,00	sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 06 Januari 2023	06/01/2023	05F88395ARQHCL93
		1700	401888	Pengadilan Agama Lolak	51.265.000,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	04/01/2023	7ED860J3RC39Q8FA
		1700	531872	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	37.214.139,00	Adanya permasalahan pada aplikasi sakti pengguna (satker) di akhir tahun 2022 yang menyebabkan penyetoran sisa dana TUP RM ke kas negara dilakukan pada awal bulan Januari 2023	06/01/2023	1C0CF0J3RC3BULF4
		199	663157	Badan Urusan Administrasi	57.202.605,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	12/01/2023	782198N3E9VNN1NL
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP 005.01 BUA				234.133.744,00				
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP				234.133.744,00				
Jumlah				271.770.124,00				

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp4.894.000,0
0*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.894.000,00 dan Rp111.492.300,00, terjadi penurunan sebesar Rp106.598.300 atau 95,61%, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku Wajib Pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon

I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	4.874.000,00	10.950.500,00	(6.076.500,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	20.000,00	100.541.800,00	(100.521.800,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			4.894.000,00	111.492.300,00	(106.598.300,00)

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Tahun 2023
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	4.874.000,00	(4.874.000,00)	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			4.904.000,00	(4.894.000,00)	10.000,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl. Dok.	NTPN
005.03 Ditjen. Badilum	2900	099074	Pengadilan Negeri Serang	2.846.500,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425232, 425233, dan 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	10/01/2023	1. 8F5173C1FAH8C5D 2. 123D38N9E9WMDIQR 3. 5F8D51NFLCPSQC1 4. 011388N9E9LUKE1 5. 620941NFLGNVZT 6. 4E14E6UEKQ76OKN 7. 556728N3E9VT4513
	0300	099090	Pengadilan Tinggi Semarang	20.000,00	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya yang berasal dari putusan perkara pada 31 Desember 2022 namun disetor di Januari 2023	02/01/2023	012C63C1FAH5VB3C
	0500	099152	Pengadilan Negeri Malang	1.947.500,00	PNBP diterima pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.00 sehingga penyetoran baru terekam pada tanggal 2 Januari 2023 (lewat tahun anggaran).	03/01/2023	1. FF2FA2G4VFUN9IEK 2. 623FF1NFLCAS8B 3. 924F51LQ88TVU 4. FF24C8N3E9VE4J0F 5. 8170255DEVL5GF1L 6. 00C3B48V453G3HHI 7. 8F17961LQ88STE6 8. CA3910N9VQPUFEUC 9. 551DC0N9VQPUFESQ 10. 90AC96UEKQ4AE9F 11. D299C8N3E9VE4EQJ 12. 04F6C1NFLCASH27 13. A49266UEKQ4AE9 14. 913531NFLCASH27 15. CC 2248N3E9VE4EQ3 16. DE3D261LQ88TGPV 17. B15B73C1FAH3MGNL 18. 889FF3E9V4S6E5 19. 7D7FB3C1FAH3MEKS 20. 61D3C1NFLCASGDJ 21. 6ACFA61LQ88TGT26
	0700	099198	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	10.000,00	PNBP diterima pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.00 sehingga penyetoran baru terekam pada tanggal 2 Januari 2023 (lewat tahun anggaran).	06/01/2023	5546E3C1FAH70USD
	1100	099226	Pengadilan Negeri Palembang	50.000,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425233 dan 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	03/01/2023	1. 637123C1FAH4O0EF 2. DAAE61LQ88V0E1
	Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan UP 005.03 Ditjen. Badilum				4.874.000,00		
	1300	403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	10.000,00	PNBP Tahun 2022 tanggal 30 Desember namun disetor di awal Januari 2023	11/01/2023	209ED0N9VQ6G89U
	1600	402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	10.000,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	03/01/2023	60A5F61LQ88TV9P
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan UP 005.04 Ditjen. Badilag				20.000,00			
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan				4.894.000,00			

Terdapat pergeseran nilai Kas Di Bendahara Penerimaan pada Neraca 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.650.000 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sengeti (005.04.1000.652035) berkurang sebesar Rp1.650.000,00 dimana pada Neraca 31 Desember 2022 (*Unaudited*) terdapat Kesalahan pencatatan transaksi uang masuk dengan SBS Nomor 00130/SBS/652035/2022 yang telah dihapuskan dari Modul Bendahara. Penghapusan transaksi tersebut tidak terposting oleh sistem, satuan kerja terkait melaporkan permasalahan tersebut kepada DJPB Kementerian Keuangan melalui platform Hai DJPB dengan nomor tiket 20230209-4VVJK8. Sampai dengan laporan *Unaudited* disusun (28 Februari 2023 pukul 11:54) satuan kerja terkait belum menerima respon atas pelaporan terhadap permasalahan tersebut. Perbaikan telah dilakukan oleh sistem pada pelaporan *Audited*.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp6.064.885.817,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.064.885.817,00 dan Rp328.806.675,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.736.079.142,00 atau 1.744,51%.

Perbandingan rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	6.038.412.512,00	328.731.675,00	5.709.680.837,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	75.000,00	(75.000,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	0,00	412.880,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	26.060.425,00	0,00	26.060.425,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			6.064.885.817,00	328.806.675,00	5.736.079.142,00

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	69.575.817,00	328.806.675,00
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5.995.310.000,00	0,00
Jumlah		6.064.885.817,00	328.806.675,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara dan diserahkan kepada pegawai pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Januari 2023
1	005.01	BUA	6.038.412.512,00	(43.102.512,00)	5.995.310.000,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	(412.880,00)	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	26.060.425,00	(26.060.425,00)	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			6.064.885.817,00	(69.575.817,00)	5.995.310.000,00

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl. Dok.	NTPN
005.01 BUA	0500	098221	Pengadilan Negeri Situbondo	1.511.550,00	Pembayaran Pajak Uang Makan Bulan Desember 2022 yang disetor/dibayarkan pada Bulan Januari 2023	10/01/2023	537EA67NBQHQ6975
	0800	402050	Pengadilan Agama Payakumbuh	1.190.000,00	Pajak belum di setor, telah ditindaklanjuti dengan menyeter pajak trs pada bulan Januari 2023	02/01/2023	721CAP1PJKP5SCNQ
	1000	402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	3B6E91PJKNSUGKQ
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	F651E7440K67RP10
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	4C6333IEP98LVM4K
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	D9C6A67NBPJRKGD
				35.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	D8F451PJKNU7H4Q
				30.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	D4B8D7440K68TQ08
				521.600,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	02/01/2023	9AF462M19FAAF439
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	12.805.000,00	kelebihan tukin Badan Litbang Diklat Kumdil TA 2022	12/01/2023	D14B17QLUFD9DG0E
				26.003.962,00	kelebihan Tunjangan Kinerja Tahun 2022	21/03/2023	A95E28N3EA5UCVHR
	2900	663398	Pengadilan Tinggi Banten	231.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	24/01/2023	B016A67N8RPI885L
				246.400,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	24/01/2023	CC8592M19HG1B89T
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.01 BUA				43.102.512,00			
005.05	0199	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	412.880,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan Januari 2023	17/01/2023	1. 0AB6900Q1DMEV9C 2. CBEAD744OMOR2CT4
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.05 Ditjen. Badilmitun				412.880,00			
005.06	0199	309055	Badan Litbang Diklat Kumdil	660.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	BA6B31JNFLCHAP51
				780.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	33C7D7QLUFD85PCE
				960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	AC8DC61QUQ8FBPDA
				896.633,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	85DFB7QLUFD85PEK
				11.960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2023	4A15A7QLUFD89VAI
				2.748.400,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2023	2E0B00N9VQQ51V60
				8.055.392,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	6828561QUQ8FFV1D
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.04 Ditjen. Badilag				26.060.425,00			
005.01	0200	401915	Penerimaan Hibah pada Tahun 2022, saldo di rekening adalah yg belum dilakukan realisasi & pengesahan dari KPPN	5.995.310.000,00	Penerimaan Hibah pada Tahun 2022, saldo di rekening adalah yg belum dilakukan realisasi & pengesahan dari KPPN	31/12/2022	-
Jumlah Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah				5.995.310.000,00			
Jumlah				6.064.885.817,00			

Terdapat pergeseran nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca 31 Desember 2022 (Audited) yang bertambah sebesar Rp26.003.962,00 pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (005.01.0199.663157). Hal tersebut disebabkan terdapat tambahan setoran pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2022 yang telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2023 melalui SSBP dengan NTPN: A95E28N3EA5UCVHR tanggal 21 Maret 2023.

*Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid)
Rp24.432.411.
476,00*

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa (sewa *Hosting*, lisensi *Zoom Meeting*, sewa *Domain*, sewa rumah dinas, dan sewa mesin *fotocopy*) dan pembayaran dimuka atas belanja modal (jaminan atas pekerjaan yang belum yang belum *final* sampai dengan akhir tahun anggaran).

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.432.411.476,00 dan Rp16.752.286.066,00, terjadi kenaikan sebesar Rp7.680.125.410,00 atau 45,85%.

Perbandingan rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Per Eselon I

(*Dalam Rupiah*)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00	7.680.125.410,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			24.432.411.476,00	16.752.286.066,00	7.680.125.410,00

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 per Jenis Akun disajikan sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Jenis Akun

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran	245.933.176,00
Pembayaran Belanja Sewa	17.776.443.531,00
Pembayaran Operasional Lainnya	366.667,00
Jaminan Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum Final sampai dengan TA 2022 berakhir	6.409.668.102,00
Jumlah	24.432.411.476,00

Rincian Belanja Modal Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja sebesar Rp6.409.668.102,00, sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1	005.01.099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	218.396.000,00	Merupakan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) atas pekerjaan konstruksi revitalisasi gedung cagar budaya kantor Pengadilan Negeri Makassar TA 2022 yang diperpanjang sampai dengan 21 Maret 2023. Pekerjaan telah diselesaikan pada tanggal 6 Januari 2023.
2	005.01.099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	3.303.445.154,00	Merupakan Jaminan Pembayaran (SPTJM) sebesar Rp35.845.700 atas pekerjaan konsultan pengawasan (CV. Cipta Estetika) dan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) atas pekerjaan konstruksi pembangunan fisik gedung kantor Pengadilan Negeri Mamuju (CV. Asri Nusa) yang diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.
3	005.01.401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	1.637.735.008,00	Merupakan jaminan bank (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Berkibar Bersama Bendera sebesar Rp.5.618.020.100, pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Alocita Mandiri sebesar Rp.127.972.350, pelaksanaan pekerjaan pembayaran pengadaan jasa konsultasi perencanaan gedung kantor baru gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Skala Pilar Lima sebesar Rp.53.251.397, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 19 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 30 Januari 2023
4	005.01.401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	1.250.091.940,00	Merupakan jaminan bank (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan sarana lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Antazena sebesar Rp.935.404.250, dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi finishing gedung kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Dwi Karya Bakti sebesar Rp.250.458.500, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 22 Desember 2022 s.d. 23 Januari 2023, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 22 Februari 2023, BAST CV Antazena tanggal 21 Januari 2023 dan BAST CV Dwi Karya Bakti tanggal 23 Januari 2023, sehingga bank garansi tersebut sudah diklaim per tanggal BAST, denda wanprestasi tersebut sudah dibayar per 26 Januari 2023 sebesar Rp.10.672.000 (CV Antazena) dan Rp.869.000 (CV Dwi Karya Bakti).
Jumlah			6.409.668.102,00	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

Terdapat pergeseran nilai Neraca periode 31 Desember 2022 (*Audited*) pada Belanja Barang Dibayar Dimuka bertambah sebesar Rp2.552.137.747,00, dan pada Belanja Modal Dibayar Dimuka berkurang sebesar Rp4.161.508.839,00 pada beberapa satuan kerja sebagai berikut :

1. Pada 19 Satuan Kerja terdapat pergeseran nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp2.552.137.747,00 yang disebabkan terdapat koreksi nilai akibat kurang catat atau lebih catat akrual atas Belanja Dibayar Dimuka dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	(176.458,00)	Kesalahan penyajian Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting
2	099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	(1.692.790,00)	Koreksi atas Lebih Catat Belanja Dibayar Dimuka sewa Web Hosting
3	307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	(2.500.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka sewa Domain dan Hosting
4	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	16.869.688,00	Belanja Sewa (522141) untuk sewa Webhosting berdasarkan No. Faktur 010.003-22.4736911 senilai Rp40.487.250,00 dari tanggal 13 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023 belum dicatat sebagai Belanja sewa dibayar Dimuka sebesar Rp16.869.688,00
5	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	212.864.750,00	Koreksi atas lebih Catat Belanja Dibayar Dimuka
6	400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	2.916.696,00	Koreksi atas kurang catat belanja dibayar dimuka atas sewa Video Conference (ZM)
7	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	875.000,00	Koreksi Kurang Catat Sewa Hosting Dibayar Dimuka Rp875.000,00 atas pembayaran sewa sebesar Rp2.625.000 selama 1 tahun (18/4/2022 s.d 18/4/2023)
8	401895	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	280.000,00	Koreksi kurang Catat Belanja Sewa Hosting Dibayar Dimuka
9	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	(1.145.833,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting yang seharusnya tidak disajikan sebagai akrual karena pembayaran hanya untuk 1 bulan pada bulan Desember 2022
10	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	3.277.250,00	Koreksi atas belanja sewa (MAK 522141) untuk Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data dan Informasi senilai Rp39.327.000,00 sesuai Surat Perjanjian Nomor : W16-U1175/PL.030102022 tanggal 3 Januari 2022 dengan periode sewa 24 Januari 2022 s.d. 23 Januari 2023. Belum diperhitungkan Belanja Sewa Dibayar Dimuka untuk Periode 1 Januari 2023 s.d. 24 Januari 2023 senilai Rp3.277.250,00.
11	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	(687.500,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
12	402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	2.459.167,00	Koreksi kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting
13	402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	(776.245,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting (nilai Realisasi tidak sesuai dengan besar tagihan yang tertera di invoice)
14	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	(20.000,00)	Koreksi nilai akrual belanja barang dibayar di muka atas sewa mesin fotocopy
15	477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	7.166.718,00	Koreksi jurnal Akrual GLP atas Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk langganan Zoom Meeting
16	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	(333.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
17	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	(2.063.780,00)	Koreksi kesalahan penyajian nilai Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Cloud Storage
18	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.315.769.114,00	Koreksi kurang catat Belanja Dibayar Dimuka atas: 1. Kesalahan Perhitungan atas Pengakuan BDD pada 1 paket Belanja Sewa Kendaraan 2. Belum diakuralkan untuk Belanja Dibayar Dimuka atas 2 paket Belanja Sewa Kendaraan
19	670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	(945.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
Jumlah			2.552.137.747,00	

2. Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Rumbia (005.01.2000.401887) terdapat pergeseran nilai Belanja Modal Dibayar Dimuka berkurang sebesar Rp4.161.508.839,00 yang disebabkan terdapat Koreksi Jurnal atas pengembalian belanja modal ke kas negara dari pencairan Bank Garansi. Adapun pengembalian perencanaan PT. Skala Pilar Lima sebesar Rp39.172.805,00; pelaksanaan PT Berkibar Bersama Bendera Rp4.031.309.018,00 dan pengawasan PT Alucita Mandiri Rp91.027.016,00.

Piutang Bukan Pajak Rp5.493.589.931,00

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.493.589.931,00 dan Rp1.506.868.229,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.986.721.702,00 atau 264,57%.

Perbandingan rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	5.491.007.201,00	1.466.904.229,00	4.024.102.972,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	39.964.000,00	(39.964.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	2.582.730,00	0,00	2.582.730,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			5.493.589.931,00	1.506.868.229,00	3.986.721.702,00

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak	Keterangan	Bukti Setor			
						Nilai Setoran	Tanggal Dibayarkan	NTPN	
Piutana Penerimaan Negara Bukan Pajak									
005.01. BUA	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3.550.000,00	Sewa Fotocopy an Rika Fatmawati (Perpanjangannya), perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026. Bukti setor tahun 1 Rp1.100.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)	0,00	-	-	
				12.500.000,00	Sewa Kantin a.n. Rosida, perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026. Harga sewa sebesar Rp25.000.000/tahun, bukti setor tahun ke-1 Rp25.000.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)	0,00	-	-	
				18.900.000,00	Sewa BTS Shorvanet, perjanjian sewa ditandatangani 1 Okt 2021, jangka waktu sewa 3 tahun dari 1 Okt 2021 s.d. 30 Sept 2024. Harga sewa sebesar Rp18.900.000/tahun atau Rp56.700.000 selama 3 tahun. Bukti setor tgl 19 Jan 2023 sebesar Rp56.700.000 untuk jangka waktu sewa 3 tahun. Pembayaran atas sewa Tahun 2022 baru dibayarkan pada Tahun 2023	56.700.000,00	19/01/2023	B79370NFWQQBHJ0	
	0500	098281	Pengadilan Negeri Padang	6.218.400,00	Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa ditandatangani 22 Des 2021, jangka waktu sewa dari 31 Agust 2022 s.d. 30 Agast 2024 (2 tahun), PNPB sewa baru disetorkan tanggal 20 Jan 2023 Rp6.218.400 untuk sewa 3 tahun. Sesuai Surat KP/NL S 119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022. Nilai sewa Rp6.218.400 per tahun. Pembayaran atas sewa tersebut baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.	6.218.400,00	20/01/2023	BOC258N3E9VQE03	
				8.323.200,00	Sewa Kantin Pak Kamid dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNPB sewa baru disetorkan tanggal 16 Jan 2023 masing-masing Rp 4.161.600 untuk sewa 3 tahun. Sesuai surat KP/NL S 119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022	8.323.200,00	16/01/2023	720R60NFWQ8ACU2	
	1900	099600	Pengadilan Negeri Palopo	551.886,00	Pengakuan piutang atas sewa rumah apartemen (pembelian) bulan Juli September 2022) yang baru dibayarkan pada Desember 2022 + Februari 2023 melalui potongan SPN (Piutang diakui sebesar 2 bulan: Januari dan Februari)	551.886,00	1. 01/01/2023 2. 01/02/2023	1. SPJ2 Nomor :230581506000032 2. SPJ2 Nomor :230581506000044	
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	287.155.079,00	Sewa Kantin Medan Merdeka Utara bulan April 2017 s.d Mei 2019.	0,00	-	-	
				136.169.450,00	Sewa Kantin Sekretariat Mahkamah Agung (A Yani) selama tahun 2020.	0,00	-	-	
	Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak				473.368.015,00				
	Piutana Lainnya								
005.01. BUA	2000	401887	Pengadilan Agama Rumbia	4.161.508.839,00	Pengembalian belanja modal ke kas negara dari pencairan Bank Garansi. Adapun pengembalian pencairan PT. Skala Pilar Lima sebesar Rp39.172.605,00; pelaksanaan PT Berkebar Bersama Bendera Rp4.021.309.016,00 dan pengembalian PT Alucita Mandiri Rp91.027.016,00	4.161.508.839,00	27/01/2023	DC91448V547KTC8	
				1400	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	789.000,00	Pengembalian uang makan bulan Desember 2022.	0,00
	0500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	26.952.000,00	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d. November 2022 (5 bulan x Rp5.390.400,00).	24.952.000,00	-	Pengembalian melalui potongan TASPEN bulan Desember 2022 s.d. Juni 2023.	
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	584.212.277,00	Kelebihan atas pembayaran sewa kendaraan dinas sesuai Adendum III dengan Kontrak Nomor: 318/KA/ADU-SP/11/2022 tanggal 14 November 2022	0,00	-	-	
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	244.177.070,00	Kelebihan bayar atas kontrak pengadaan BBM (kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina, berdasarkan Perjanjian No.22/BLA.7/SP/11/2022 tgl 1 Januari 2022.	0,00	-	-	
005.05. Djejen. Badimlitun	0199	663122	Direktoral Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	2.582.730,00	Pengembalian atas kelebihan pembayaran transport kegiatan Rakernas di Semarang Tahun 2022.	2.582.730,00	16/01/2023	OC7B2G4VFWU9UH	
Jumlah Piutang Lainnya				5.020.221.916,00					
Jumlah				5.493.589.931,00					

Sedangkan mutasi saldo Piutang PNPB pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	1.506.868.229,00
Mutasi Tambah :	
- Piutang PNPB Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	34.950.000,00
- Piutang PNPB Pengadilan Negeri Malang	14.541.600,00
- Piutang PNPB Pengadilan Negeri Palopo	551.886,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Agama Rumbia	4.161.508.839,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Negeri Kuala Kurun	789.000,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	26.952.000,00
- Piutang Lainnya BUA	828.389.347,00
- Piutang Lainnya Ditjen. Badilum	2.582.730,00
Jumlah Mutasi Tambah	5.070.265.402,00
Mutasi Kurang :	
- Piutang PNPB Pengadilan Agama Giri Menang	131.563,00
- Piutang PNPB Ditjen. Badilum	39.964.000,00
- Piutang Lainnya BUA	1.035.343.467,00
- Piutang Lainnya PTA Bandung	72.776,00
- Piutang Lainnya PT Semarang	7.012.476,00
- Piutang Lainnya PT Denpasar	738.800,00
- Piutang Lainnya PN Negara	280.600,00
- Piutang Lainnya PN Gianyar	18,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.083.543.700,00
Jumlah Mutasi	3.986.721.702,00
Saldo per 31 Desember 2022	5.493.589.931,00

*Penyisihan**Piutang Tidak**Tertagih-**Piutang Bukan**Pajak*

(Rp27.220.491,00)

C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp27.220.491,00) dan (Rp7.534.341,00), terjadi kenaikan sebesar Rp19.686.150,00 atau 261,29%.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(27.207.577,00)	(7.334.521,00)	(19.873.056,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	(199.820,00)	199.820,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	(12.914,00)	0,00	(12.914,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			(27.220.491,00)	(7.534.341,00)	(19.686.150,00)

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak							
005.01 BUA	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Lancar	3.550.000,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	0100			Lancar	12.500.000	0,50%	0,00
005.01 BUA	0100			Lancar	18.900.000	0,50%	0,00
005.01 BUA	0500	098281	Pengadilan Negeri Malang	Lancar	6.218.400,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	0500	098281	Pengadilan Negeri Malang	Lancar	8.323.200,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	1900	099600	Pengadilan Negeri Palopo	Lancar	551.886,00	0,50%	(2.759,00)
005.01 BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	287.155.079,00	0,50%	(1.435.775,00)
005.01 BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	136.169.450,00	0,50%	(680.847,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Bukan Pajak					473.368.015,00		(2.119.381,00)
Piutang Lainnya							
005.01 BUA	2000	401887	Pengadilan Agama Rumbia	Lancar	4.161.508.839,00	0,50%	(20.807.544,00)
	1400	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Lancar	789.000,00	0,50%	(3.945,00)
	0500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Lancar	26.952.000,00	0,50%	(134.760,00)
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	584.212.277,00	0,50%	(2.921.061,00)
		663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	244.177.070,00	0,50%	(1.220.885,00)
		663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Lancar	2.582.730,00	0,50%	(12.914,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya					5.020.221.916,00	
Jumlah					5.493.589.931,00		(27.220.490,00)

Terdapat koreksi *audited* atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya bertambah sebesar Rp22.182.807,00 pada 6 Satuan Kerja yaitu PN Palopo (005.01.1900.099600), PA Rumbia (005.01.2000.401887), PN Kuala Kurun (005.01.1400.401918), PTTUN Surabaya (005.01.0500.548940), BUA (005.01.0199.663157), dan Ditjen. Badilmiltun (005.05.0199.663122) dikarenakan terdapat tambahan Piutang Bukan Pajak yang belum disajikan pada Neraca periode 31 Desember 2022 (*Unaudited*), sehingga menambah nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak yang sebelumnya belum dicatat perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Atas hal tersebut, sudah dilakukan perbaikan pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*).

Bagian Lancar C.1.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Tagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)

Perbendaharaan/Tuntutan bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp110.693.622,00, terjadi penurunan sebesar Rp110.693.622,00 atau 100,00%.

Perbandingan rincian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	110.693.622,00	(110.693.622,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badimiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	110.693.622,00	(110.693.622,00)

Penyisihan C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan

Piutang Tidak Tertagih- **TP/TGR**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Perbendaharaan/Tuntutan Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp553.468,00), terjadi penurunan sebesar Rp553.468,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan adanya setoran pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara di Tahun 2021.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	(553.468,00)	553.468,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	(553.468,00)	553.468,00

Persediaan

Rp19.665.022.585,00

C.1.9. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.665.022.585,00 dan Rp21.944.823.818,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.279.801.233,00 atau 10,39%.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	8.097.179.926,00	9.776.211.149,00	(1.679.031.223,00)
2	005.02	Kepaniteraan	1.343.987.114,00	1.655.186.280,00	(311.199.166,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	7.599.295.567,00	8.001.942.906,00	(402.647.339,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.432.885.251,00	1.603.091.152,00	(170.205.901,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	165.546.582,00	198.587.220,00	(33.040.638,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	670.858.942,00	514.845.893,00	156.013.049,00
7	005.07	Badan Pengawasan	355.269.203,00	194.959.218,00	160.309.985,00
Jumlah			19.665.022.585,00	21.944.823.818,00	(2.279.801.233,00)

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun*(Dalam Rupiah)*

No	Kode Perkiraan	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	117111	Barang Konsumsi	18.602.549.741,00	20.889.488.455,00
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.062.329.844,00	1.055.335.363,00
3	117131	Bahan Baku	143.000,00	1.055.335.363,00
Jumlah			19.665.022.585,00	23.000.159.181,00

Terdapat persediaan Bahan Baku disebabkan kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen. Koreksi reklasifikasi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan sudah dihabispakaikan di periode januari 2023. Sudah mengajukan tiket ke haidjpb untuk pembatalan transaksi habispakai tetapi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan pada januari 2023 sudah terdapat transaksi TKTM.

Penyajian persediaan per 31 Desember 2022 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang, sedangkan kondisi usang dan rusak tidak terakumulasi pada Laporan Barang Persediaan tingkat Kementerian/Lembaga pada aplikasi SAKTI.

Tabel 38. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2022*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	Usang	Rusak
1	005.01	BUA	718.282.620,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	63.120.882,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00
Jumlah			781.403.502,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan koreksi persediaan pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah terdapat layer persediaan 2023 yang terbentuk, adapun tindak

lanjut terhadap ini adalah dengan melakukan opname fisik pada tahun anggaran 2023.

Terdapat koreksi audited atas Persediaan bertambah sebesar Rp3.539.802,00 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00503.1400.402024) dikarenakan terdapat pemakaian persediaan berupa Barang Konsumsi pada bulan Desember 2022 yang belum diinput pemakaian tersebut pada Modul Persediaan sehingga dilakukan penginputan pada periode 14 Tahun 2022.

Aset Tetap

Rp30.482.273.236.416,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.482.273.236.416,00 dan Rp29.480.165.355.628,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.002.107.880.788,00 atau 3,40%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

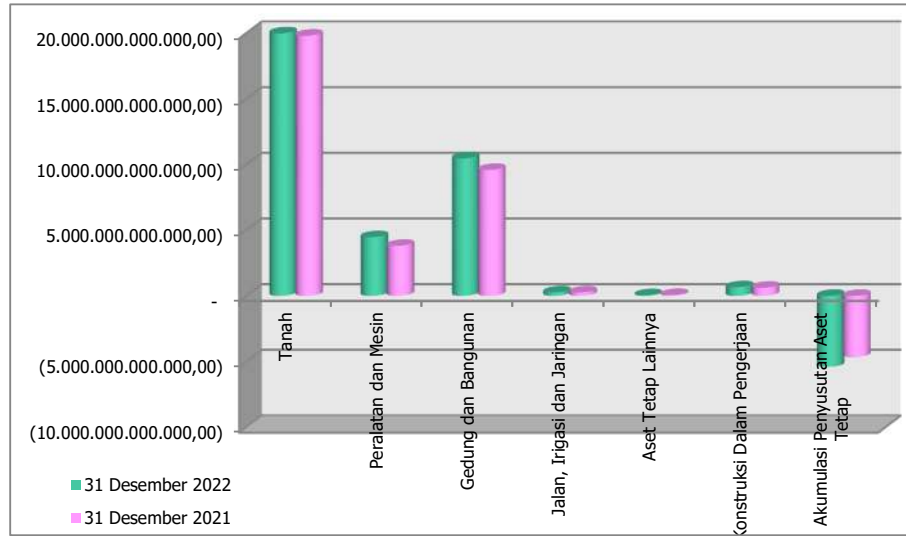
Tabel 39. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Tanah	19.986.074.179.582,00	19.805.288.980.810,00	180.785.198.772,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	3.808.622.153.369,00	653.902.507.167,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	9.582.390.434.389,00	878.716.882.560,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	262.312.858.137,00	258.176.969.852,00	4.135.888.285,00
5.	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	68.004.058.842,00	(15.913.663.266,00)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00
	Jumlah	35.880.413.062.687,00	34.139.879.211.834,00	1.740.533.850.853,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.398.139.826.271,00)	(4.659.713.856.206,00)	(738.425.970.065,00)
	Jumlah Aset Tetap	30.482.273.236.416,00	29.480.165.355.628,00	1.002.107.880.788,00

Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik
Komposisi Aset Tetap



Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca Modul GLP SAKTI	Aset Tetap dalam Neraca Modul Aset SAKTI	Selisih
1	Tanah	19.986.074.179.582,00	19.986.074.179.582,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	4.462.524.660.536,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	10.461.107.316.949,00	0,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	262.312.858.137,00	262.312.858.137,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	52.090.395.576,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	656.303.651.907,00	656.303.651.907,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.398.139.826.271,00)	(5.398.139.826.271,00)	0,00
	Jumlah	30.482.273.236.416,00	30.482.273.236.416,00	0,00

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	29.460.640.573.754,00	28.300.834.602.919,00	1.159.805.970.835,00
2	005.02	Kepaniteraan	5.047.702.891,00	5.447.835.796,00	(400.132.905,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	661.513.100.985,00	657.551.890.337,00	3.961.210.648,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	2.536.938.563,00	1.934.664.281,00	602.274.282,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	21.395.013.160,00	179.351.803.436,00	(157.956.790.276,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	328.832.807.256,00	332.681.981.341,00	(3.849.174.085,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	2.307.099.807,00	2.362.577.518,00	(55.477.711,00)
Jumlah			30.482.273.236.416,00	29.480.165.355.628,00	1.002.107.880.788,00

*Tanah***C.2.1. Tanah**

Rp19.986.074.179.582,00

Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.986.074.179.582,00 dan Rp19.805.288.980.810,00, terjadi kenaikan sebesar Rp180.785.198.772,00 atau 0,91%.

Perbandingan rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	19.230.014.289.253,00	18.891.927.223.481,00	338.087.065.772,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	643.493.036.329,00	643.493.036.329,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	19.218.950.000,00	176.520.817.000,00	(157.301.867.000,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	93.347.904.000,00	93.347.904.000,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			19.986.074.179.582,00	19.805.288.980.810,00	180.785.198.772,00

Mutasi transaksi Tanah pada 31 Desember Tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 43. Mutasi Transaksi Tanah*(Dalam Rupiah)*

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		19.805.288.980.810,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	169.972.021.336,00
101	Pembelian	54.744.936.338,00
102	Transfer Masuk	217.431.521.000,00
103	Hibah Masuk	17.659.656.646,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	64.535.458.461,00
106	Pembatalan Penghapusan	83.800.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	180.555.991.650,00
111	Pertukaran	613.523.000,00
112	Perolehan Lainnya	36.413.888.000,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	243.470.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	11.794.090.000,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	41.061.237.645,00
208	Pengembangan Melalui KDP	2.321.054.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		797.430.648.076,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.765.409.930,00)
301	Penghapusan	(83.800.000,00)
302	Transfer Keluar	(217.076.534.000,00)
303	Hibah Keluar	(5.696.251.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(181.555.665.650,00)
305	Koreksi Pencatatan	(209.093.040.724,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(374.748.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(616.645.449.304,00)
Jumlah Mutasi		180.785.198.772,00
Saldo per 31 Desember 2022		19.986.074.179.582,00

Terdapat koreksi audited atas Tanah berkurang sebesar Rp929.546.250,00 pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Muara Bungo (00501.1000.098900) berkurang sebesar Rp41.946.250,00 dikarenakan:
 - a) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana lebih catat koreksi nilai bertambah Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi *audited* dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas kelebihan catat tersebut sebesar Rp39.946.250,00.
 - b) Terdapat kesalahan pencatatan saldo awal Tanah senilai Rp2.000.000,00 sehingga terjadi *double* NUP yang seharusnya tidak perlu dilakukan input saldo awal. Telah dilakukan koreksi *Audited* dengan melakukan koreksi pencatatan pada NUP saldo awal tersebut.
2. Pengadilan Negeri Tebo (00501.1000.477368) berkurang sebesar Rp887.600.000,00 dikarenakan:

- a) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana lebih catat koreksi nilai bertambah Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi audited dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas kelebihan catat tersebut sebesar Rp862.500.000,00.
- b) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana kurang catat koreksi nilai berkurang Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi audited dengan melakukan koreksi nilai berkurang sebesar Rp25.100.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp4.462.524.660.536,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.462.524.660.536,00 dan Rp3.808.622.153.369,00, terjadi kenaikan sebesar Rp653.902.507.167,00 atau 17,17%.

Perbandingan rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	4.234.632.303.694,00	3.588.138.755.701,00	646.493.547.993,00
2	005.02	Kepaniteraan	25.800.025.149,00	24.046.869.067,00	1.753.156.082,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	24.401.336.062,00	24.263.382.962,00	137.953.100,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	15.389.507.853,00	15.858.489.294,00	(468.981.441,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	12.719.028.641,00	14.064.590.210,00	(1.345.561.569,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	134.327.244.318,00	127.236.706.710,00	7.090.537.608,00
7	005.07	Badan Pengawasan	15.255.214.819,00	15.013.359.425,00	241.855.394,00
Jumlah			4.462.524.660.536,00	3.808.622.153.369,00	653.902.507.167,00

Mutasi transaksi Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 45. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin*(Dalam Rupiah)*

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		3.808.622.153.369,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	19.345.965.263,00
101	Pembelian	484.092.090.590,00
102	Transfer Masuk	309.660.079.408,00
103	Hibah Masuk	27.770.975.527,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	27.717.521.961,00
106	Pembatalan Penghapusan	823.745.191,00
107	Reklasifikasi Masuk	25.521.551.905,00
112	Perolehan Lainnya	283.085.676.994,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	201.861.600,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	399.900.000,00
193	Batal Transfer Keluar	2.843.040.000,00
197	Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN	713.108.510,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	85.924.362,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	24.243.940.627,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.779.515.122,00
208	Pengembangan Melalui KDP	24.219.084.949,00
209	Koreksi Manual	680.000,00
214	Koreksi Susulan	41.171.785,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.834.712.672,00
-	Penyesuaian Jurnal Pasca Migrasi karena Perbedaan Mapping Kode Barang VS Akun terkait BMN	5.453.607.750,00
Jumlah Mutasi Tambah :		1.244.834.154.216,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(9.332.502.251,00)
301	Penghapusan	(1.803.075.278,00)
302	Transfer Keluar	(312.503.119.408,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(25.161.718.665,00)
305	Koreksi Pencatatan	(201.347.529.605,00)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(229.000.000,00)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(41.769.500,00)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(40.512.932.342,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(590.931.647.049,00)
Jumlah Mutasi		653.902.507.167,00
Saldo Per 31 Desember 2022		4.462.524.660.536,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		(3.377.493.230.256,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		1.085.031.430.280,00

Terdapat koreksi *audited* atas Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp2.251.181.946,00 pada 951 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai bertambah maupun berkurang Peralatan dan Mesin berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 12 Satuan Kerja sebesar (Rp369.947.907,00). Telah dilakukan koreksi nilai bertambah maupun berkurang pada modul Aset Tetap periode 14 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Koreksi Pencatatan	Penggunaan Kembali	Total
1	401664	MAHKAMAH SYARITYAH LHOK SEUMAWA	8.164.117,00	(16.328.234,00)			(8.164.117,00)
2	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO		(59.866.590,00)	(11.800.000,00)		(71.666.590,00)
3	098900	PENGADILAN NEGERI MUJARA BUNGO		(1.492.000,00)			(1.492.000,00)
4	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG			(280.950.000,00)	1.500.000,00	(279.450.000,00)
5	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA		(900,00)			(900,00)
6	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA			(9.191.000,00)		(9.191.000,00)
7	098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	4.540.800,00	(5.556.200,00)			(1.015.400,00)
8	614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	4.729.800,00	(2.667.700,00)			2.062.100,00
9	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN		(70.000,00)			(70.000,00)
10	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR		(2.520.000,00)			(2.520.000,00)
11	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1.560.000,00				1.560.000,00
12	400239	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR			(46.832.800,00)	46.832.800,00	-
Total							(369.947.907,00)

2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 7 Satuan Kerja sebesar Rp700.921.110,00 yang belum melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Unaudited*, dengan rincian sebagai berikut:.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Total Nilai Koreksi
1	097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	1.500.000,00	1.500.000,00
2	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	11.277.000,00	11.277.000,00
3	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	330.468.049,00	330.468.049,00
4	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	316.163.561,00	316.163.561,00
5	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	23.175.000,00	23.175.000,00
6	099401	PENGADILAN NEGERI POSO	2.200.000,00	2.200.000,00
7	670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	16.137.500,00	16.137.500,00
Total				700.921.110,00

3. Terdapat koreksi Audited peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 932 Satuan Kerja sebesar Rp1.920.208.743,00. Telah dilakukan perbaikan pada modul Aset Tetap pada periode pelaporan *Audited* Tahun Anggaran 2022. Rincian penjelasan koreksi *Audited* Peralatan dan Mesin terlampir.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp10.461.107.316.949,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp10.461.107.316.949,00 dan Rp9.582.390.434.389,00, terjadi kenaikan sebesar Rp878.716.882.560,00 atau 9,17%.

Perbandingan rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	10.232.025.158.645,00	9.363.034.594.607,00	868.990.564.038,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	22.975.619.434,00	17.068.042.734,00	5.907.576.700,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	714.703.416,00	714.703.416,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	205.391.835.454,00	201.573.093.632,00	3.818.741.822,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			10.461.107.316.949,00	9.582.390.434.389,00	878.716.882.560,00

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 47. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		9.582.390.434.389,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	63.820.138.212,00
101	Pembelian	32.988.267.001,00
102	Transfer Masuk	76.861.540.996,00
103	Hibah Masuk	38.185.884.033,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	500.035.970.295,00
106	Pembatalan Penghapusan	463.702.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	72.501.639.503,00
111	Pertukaran	230.629.000,00
112	Perolehan Lainnya	40.246.171.338,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.620.291.390,00
197	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	598.331.000,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	95.507.506,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	11.108.142.910,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	173.355.511.131,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	6.348.283.254,00
208	Pengembangan Melalui KDP	305.827.664.944,00
209	Koreksi Manual	224.763.994,00
214	Koreksi Susulan	1.926.256.792,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.892.798.500,00
Jumlah Mutasi Tambah :		1.330.331.493.799,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(42.574.241.150,00)
301	Penghapusan	(3.094.150.220,00)
302	Transfer Keluar	(77.196.015.996,00)
303	Hibah Keluar	(930.813.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(71.238.258.917,00)
305	Koreksi Pencatatan	(224.705.924.956,00)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(24.120.500,00)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(26.351.242.800,00)
-	Penyesuaian Jurnal Pasca Migrasi karena Perbedaan Mapping Kode Barang VS Akun terkait BMN	(5.499.843.700,00)
Jumlah Mutasi Kurang :		(451.614.611.239,00)
Jumlah Mutasi		878.716.882.560,00
Saldo Per 31 Desember 2022		10.461.107.316.949,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		(1.905.558.878.012,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		8.555.548.438.937,00

Terdapat koreksi *audited* atas Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp9.746.752.519,00 pada 20 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi nilai bertambah maupun berkurang Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 6 Satuan Kerja sebesar Rp6.716.522.065,00. Telah dilakukan koreksi nilai bertambah maupun berkurang pada modul Aset Tetap periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No.	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Total
1	401664	MAHKAMAH SYARITYAH LHOK SEUMAWA	1.637.322.882,00	(1.645.487.000,00)	(8.164.118,00)
2	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	8.587.884.183,00	(1.418.118.000,00)	7.169.766.183,00
3	098900	PENGADILAN NEGERI MUJARA BUNGO	104.662.000,00	(609.037.000,00)	(504.375.000,00)
4	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	158.377.000,00		158.377.000,00
5	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	30.000.000,00		30.000.000,00
6	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN		(129.082.000,00)	(129.082.000,00)
Total					6.716.522.065,00

2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 2 Satuan Kerja sebesar Rp140.957.000,00. Yang belum melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan Unaudited.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Penghentian Penggunaan	Total Nilai Koreksi
1	099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	123.000.000,00		123.000.000,00
2	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	17.957.000,00		17.957.000,00
Total					140.957.000,00

3. Terdapat koreksi *Audited* peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 12 Satuan Kerja 2.889.273.454,00. Telah dilakukan perbaikan pada modul Aset Tetap periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No.	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Penghapusan dari sistem	Total
1	099837	PENGADILAN NEGERI KARANGSEM		(145.688.968,00)			(145.688.968,00)
2	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU			2.004.048.834,00		2.004.048.834,00
3	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	37.640.100,00				37.640.100,00
4	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA		(23.635.061,03)			(23.635.061,00)
5	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA		(2.535.000,00)			(2.535.000,00)
6	526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	39.655.000,00				39.655.000,00
7	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	294.460.174,00				294.460.174,00
8	401582	MAHKAMAH SYARITYAH ACEH	105.063.000,00				105.063.000,00
9	401591	MAHKAMAH SYARITYAH BANDA ACEH	49.000.000,00				49.000.000,00
10	098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	49.994.400,00				49.994.400,00
11	547699	PENGADILAN AGAMA BATAM				571.224.000,00	571.224.000,00
12	097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO		(28,00)			(28,00)
13	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUJE		(89.952.997,00)			(89.952.997,00)
Total							2.889.273.454,00

Terdapat kurang catat Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00501.1400.401918) sebesar Rp.31.727.099.924,00 yang berasal dari transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp262.312.858
.137,00*

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp262.312.858.137,00 dan Rp258.176.969.852,00, terjadi kenaikan sebesar Rp4.135.888.285,00 atau 1,60%.

Perbandingan rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	221.266.221.800,00	217.394.693.338,00	3.871.528.462,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	245.290.636,00	245.290.636,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	40.801.345.701,00	40.536.985.878,00	264.359.823,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			262.312.858.137,00	258.176.969.852,00	4.135.888.285,00

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 49. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan*(Dalam Rupiah)*

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		258.176.969.852,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	37.384.050,00
101	Pembelian	1.739.444.302,00
103	Hibah Masuk	655.896.934,00
106	Pembatalan Penghapusan	114.947.500,00
112	Perolehan Lainnya	2.974.681.578,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	182.050.915,00
197	Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN	81.737.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	229.618.263,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	271.641.400,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	657.876.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		6.945.278.442,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(17.500.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(553.196.850,00)
305	Koreksi Pencatatan	(1.689.253.807,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(549.439.500,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(2.809.390.157,00)
Jumlah Mutasi		4.135.888.285,00
Saldo Per 31 Desember 2022		262.312.858.137,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		(114.518.871.690,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022		147.793.986.447,00

Terdapat koreksi *Audited* atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jalan khusus kompleks bertambah sebesar Rp81.737.000,00 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (00501.1000.578839), yang disebabkan tidak lanjut normalisasi pada To Do List MONSAKTI.

*Aset Tetap**Lainnya**Rp52.090.395.**576,00***C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp52.090.395.576,00 dan Rp68.004.058.842,00, terjadi penurunan sebesar Rp15.913.663.266,00 atau 23,40%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	50.385.026.060,00	66.006.647.076,00	(15.621.621.016,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	128.459.011,00	128.459.011,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	15.000.000,00	307.042.250,00	(292.042.250,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmitun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	1.026.506.820,00	1.026.506.820,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	535.403.685,00	535.403.685,00	0,00
Jumlah			52.090.395.576,00	68.004.058.842,00	(15.913.663.266,00)

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 51. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		68.050.294.792,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	4.400.000,00
101	Pembelian	6.271.788.808,00
102	Transfer Masuk	555.399.247,00
103	Hibah Masuk	749.154.027,00
106	Pembatalan Penghapusan	23.670.320,00
107	Reklasifikasi Masuk	32.645.000,00
112	Perolehan Lainnya	5.844.533.989,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	605.147.255,00
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	4.597.750,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	635.000,00
955	Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi	143.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		14.234.971.396,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(175.311.362,00)
301	Penghapusan	(292.042.250,00)
302	Transfer Keluar	(8.895.855.454,00)
303	Hibah Keluar	(1.416.203.925,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(103.369.510,00)
305	Koreksi Pencatatan	(18.539.316.111,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(772.772.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(30.194.870.612,00)
Jumlah Mutasi		(15.959.899.216,00)
Saldo Per 31 Desember 2022		52.090.395.576,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		(568.846.313,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		51.521.549.263,00

Terdapat koreksi audited atas Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp276.170.788,00 pada 7 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai berkurang Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebo sebesar Rp385.362,00. Telah dilakukan koreksi nilai berkurang pada modul Aset Tetap periode 14 Tahun 2022.
2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 5 Satuan Kerja sebesar Rp4.597.750,00. Yang telah melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Total Nilai Koreksi
1	097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	9.000,00	9.000,00
2	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	750.000,00	750.000,00
3	403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	3.750.000,00	3.750.000,00
4	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	50.000,00	50.000,00
5	099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	38.750,00	38.750,00
Total				4.597.750,00

3. Terdapat koreksi Audited peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebesar Rp271.958.400,00 dikarenakan Koreksi untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang direalisasikan untuk pembuatan partisi Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh yang memenuhi batas minimum kapitalisasi.

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp656.303.651

.907,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp656.303.651.907,00 dan Rp617.396.614.572,00, terjadi kenaikan sebesar Rp38.907.037.335,00 atau 6,30%, diantaranya pembangunan Gedung dan Bangunan tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Per Eselon I**

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	005.01	BUA	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Wilayah adalah sebagai berikut:

**Tabel 53. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Per Wilayah**

(Dalam Rupiah)

Kode Wilayah	Koordinator Wilayah	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan
0199	BUA	36.460.994.468,00	12.028.411.350,00	24.432.583.118,00
0100	Korwil DKI Jakarta	0,00	113.358.912.890,00	(113.358.912.890,00)
0200	Korwil Jabar	634.971.500,00	0,00	634.971.500,00
0300	Korwil Jateng	2.376.813.247,00	5.642.394.497,00	(3.265.581.250,00)
0400	Korwil DIY	0,00	0,00	0,00
0500	Korwil Jatim	0,00	14.545.507.768,00	(14.545.507.768,00)
0600	Korwil Aceh	100.010.540.501,00	53.556.436.372,00	46.454.104.129,00
0700	Korwil Sumut	21.332.158.482,00	0,00	21.332.158.482,00
0800	Korwil Sumbar	51.017.533.238,00	44.089.669.344,00	6.927.863.894,00
0900	Korwil Riau	0,00	28.474.706.172,00	(28.474.706.172,00)
1000	Korwil Jambi	0,00	0,00	0,00
1100	Korwil Sumsel	66.809.239.025,00	42.039.741.421,00	24.769.497.604,00
1200	Korwil Lampung	24.475.375.304,00	30.804.665.952,00	(6.329.290.648,00)
1300	Korwil Kalbar	16.264.863.119,00	0,00	16.264.863.119,00
1400	Korwil Kalteng	113.386.385.921,00	30.678.816.633,00	82.707.569.288,00
1500	Korwil Kalsel	7.876.835.650,00	33.225.612.827,00	(25.348.777.177,00)
1600	Korwil Kaltim	4.986.852.314,00	21.222.318.445,00	(16.235.466.131,00)
1700	Korwil Sultra	10.056.323.327,00	0,00	10.056.323.327,00
1800	Korwil Sulteng	20.802.954.529,00	0,00	20.802.954.529,00
1900	Korwil Sulsel	9.918.446.529,00	15.993.568.749,00	(6.075.122.220,00)
2000	Korwil Sultra	57.893.691.307,00	54.230.514.837,00	3.663.176.470,00
2100	Korwil Maluku	11.615.316.698,00	51.252.973.237,00	(39.637.656.539,00)
2200	Korwil Bali	0,00	0,00	0,00
2300	Korwil NTB	0,00	0,00	0,00
2400	Korwil NTT	0,00	0,00	0,00
2500	Korwil Papua	0,00	0,00	0,00
2600	Korwil Bengkulu	31.234.360.781,00	0,00	31.234.360.781,00
2800	Korwil Maluku	23.217.805.999,00	0,00	23.217.805.999,00
2900	Korwil Banten	0,00	0,00	0,00
3000	Korwil Babel	0,00	47.518.877.596,00	(47.518.877.596,00)
3100	Korwil Gorontalo	25.029.747.598,00	18.733.486.482,00	6.296.261.116,00
3200	Korwil Kepri	0,00	0,00	0,00
3300	Korwil Pabar	14.412.561.440,00	0,00	14.412.561.440,00
3400	Korwil Sulbar	6.489.880.930,00	0,00	6.489.880.930,00
3500	Korwil Kaltara	0,00	0,00	0,00
Jumlah		656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00

Mutasi transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54. Mutasi Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		617.396.614.572,00
Mutasi Tambah :		
501	Saldo Awal KDP	22.658.798.266,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	258.341.073.280,00
503	Pengembangan KDP	692.009.459.651,00
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	132.442.463.821,00
508	Hibah Masuk KDP	169.250.000,00
510	Perolehan Lainnya KDP	140.493.641.528,00
514	Reklasifikasi Masuk KDP	4.175.414.220,00
597	Perolehan Tinjuc Normalisasi KDP	5.642.394.497,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.255.932.495.263,00
Mutasi Kurang :		
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(73.417.633.497,00)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(4.175.414.220,00)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(192.949.525.025,00)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(16.001.263.648,00)
579	Normalisasi KDP	(5.642.394.497,00)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(924.839.227.041,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(1.217.025.457.928,00)
Jumlah Mutasi		38.907.037.335,00
Saldo per 31 Desember 2022		656.303.651.907,00

Terdapat koreksi audited atas Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp2.793.848.834,00 pada 2 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi *audited* pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau (00501.1400.401920) berkurang sebesar Rp2.004.048.834,00 yang merupakan pendefinitifan KDP menjadi Gedung dan Bangunan.
2. Terdapat koreksi *audited* pada Satuan Kerja Pengadilan Militer I-01 di Banda Aceh (00501.0600.663182) berkurang sebesar Rp789.800.000,00 yang merupakan pendefinitifan KDP menjadi Peralatan dan Mesin.

Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00501.1400.401918) terdapat lebih catat KDP sebesar Rp31.727.099.924,00 yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp5.398.139.
826.271,00)*

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp5.398.139.826.271,00) dan (Rp4.659.713.856.206,00), terjadi kenaikan sebesar Rp738.425.970.065,00 atau 15,85%.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(*Dalam Rupiah*)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	(3.377.493.230.256,00)	1.085.031.430.280,00
2	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	(1.905.558.878.012,00)	8.555.548.438.937,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	262.312.858.137,00	(114.518.871.690,00)	147.793.986.447,00
4	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	(568.846.313,00)	51.521.549.263,00
Jumlah		15.238.035.231.198,00	(5.398.139.826.271,00)	9.839.895.404.927,00

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun

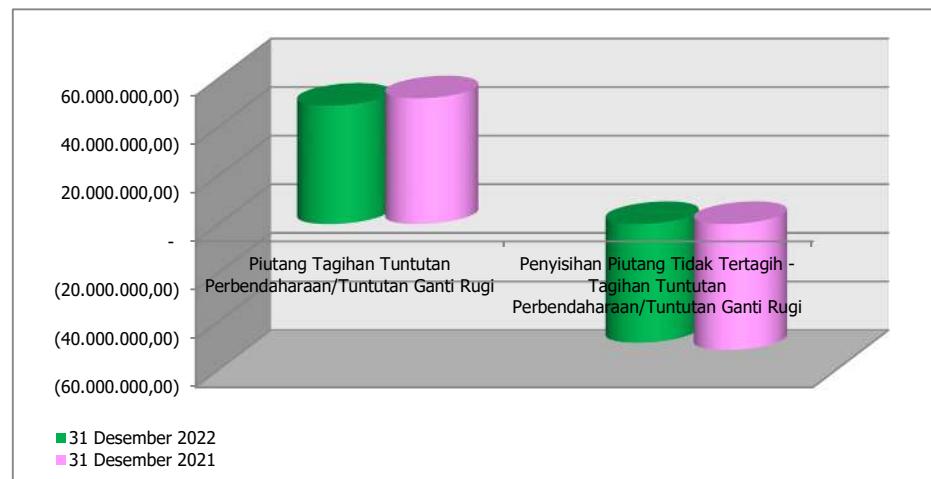
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(48.752.226,00)	(51.752.226,00)	3.000.000,00
Jumlah Piutang Jk. Panjang		0,00	0,00	0,00

Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik

Komposisi Piutang Jangka Panjang



Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

*Piutang**Tagihan**Tuntutan**Perbendaharaan**n/Tuntutan**Ganti Rugi**(TP/TGR)**Rp48.752.226,00***C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR**

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.752.226,00 dan Rp51.752.226,00. Terdapat penurunan sebesar Rp3.000.000,00 dikarenakan adanya pelunasan TGR atas nama Martini Soegito (PN. Bogor).

Perbandingan rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)

Berikut disajikan rincian perhitungan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur:

Tabel 59. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR
1	00501 BUA	2300	417844	PN Sumbawa Besar	I Made Subagyo W	Macet	36.252.226,00
2		2900	098281	PN Pandelwang	Syamsudin UP	Macet	12.500.000,00
Jumlah							48.752.226,00

Berdasarkan data diatas, terdapat 4 Tuntutan Ganti Rugi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Syamsudin UP, S.H.,
 - Telah terbit Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banten Nomor PSBDT-01/PUPNC.14.01/2018 tanggal 23 April 2018, serta telah mengajukan permintaan untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/KU.02/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 akan tetapi sampai dengan saat ini belum terbit rekomendasinya;
 - Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sjamsudin UP, S.H.,M.H. kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan Nomor 691A/SEK/KU.02/3/2022 tanggal 7 Maret 2022;
 - Proses Penggalian Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbandaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022;
2. I Made Subagio Wiryono
 - Kerugian negara senilai Rp64.973.646,78 telah diangsur sebesar Rp6.746.000,00, sehingga sisa kerugian negara yang dilimpahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTB adalah sebesar Rp58.227.646,78, dan telah dicantumkan dalam Surat Kesanggupan Membayar tanggal 4 Januari 2016 (terlampir);
 - Sekretaris Mahkamah Agung akan memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meminta PUPN Cabang NTB menerbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. WIDYA KENCANA. Adapun CV. DWI TUNGGAL, dan CV. ANA JAYA telah diterbitkan PSBDT (terlampir), sedangkan CV. TANJUNG ALANG, dan CV. AS.

SYIFA telah melakukan pelunasan piutang (terlampir), dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	Sisa Kerugian	Angsuran	Sisa Kerugian
CV. TANJUNG ALANG	15.822.403,00	15.822.403,00	0,00
CV. WIDYA KENCANA	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00
CV. AS. SYIFA	3.754.850,00	3.754.850,00	0,00
CV. DWI TUNGGAL	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
CV. ANA JAYA	27.875.393,78	2.398.168,00	25.477.225,78
Total	58.227.646,78	21.975.421,00	36.252.225,78

- Pengadilan Negeri Sumbawa telah menyerahkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. Widya Kencana dengan Nomor PSBDT-17/PUPNC21.02/2016;
- Setelah seluruh PSBDT diperoleh, Sekretaris Mahkamah Agung akan mengajukan Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara kepada BPK;
- Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat ke Ketua BPK atas nama I Made Subagio Wiryo pada PN Sumbawa Besar, berdasar Surat Sekretaris MA Nomor 2631/SEK/KU.02/11/2022 tanggal 15 November 2022;
- Proses Penggalan Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbandaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022.

Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih-

Tagihan

Tuntutan

Perbandaharaa

n/Tuntutan

Ganti Rugi

(TP/TGR)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbandaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbandaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

(Rp48.752.226,00) Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp48.752.226,00) dan (Rp51.752.226,00).

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)

Berikut disajikan rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur:

Tabel 61. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR	Penyisihan	Nilai Penyisihan	
1	00501	BUA	2300	417844	PN Sumbawa Besar	I Made Subaqyo W	Macet	36.252.226,00	100,00%	(36.252.226,00)
2			2900	098281	PN Pandelwang	Svamsudin UP	Macet	12.500.000,00	100,00%	(12.500.000,00)
Jumlah							48.752.226,00		(48.752.226)	

Aset Lainnya

Rp33.585.865,770,0

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp33.585.865.770,00 dan Rp37.075.166.516,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.489.300.746,00 atau 9,41%.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

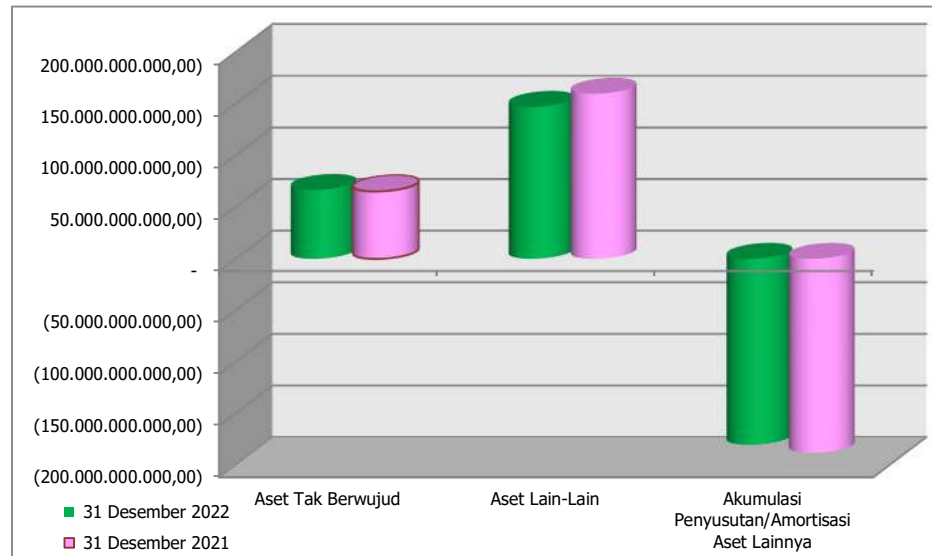
Tabel 62. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tak Berwujud	66.705.847.914,00	65.269.905.024,00	1.435.942.890,00
2	Aset Lain-Lain	147.118.278.231,00	159.843.755.689,00	(12.725.477.458,00)
Jumlah		213.824.126.145,00	225.113.660.713,00	(11.289.534.568,00)
3	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(180.238.260.375,00)	(188.038.494.197,00)	7.800.233.822,00
Jumlah Aset Lainnya		33.585.865.770,00	37.075.166.516,00	(3.489.300.746,00)

Komposisi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik Komposisi Aset Lainnya



Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	30.808.472.111,00	33.697.042.900,00	(2.888.570.789,00)
2	005.02	Kepaniteraan	58.292.687,00	78.441.875,00	(20.149.188,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	93.680.812,00	200.326.640,00	(106.645.828,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	-
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	71.250.000,00	101.250.000,00	(30.000.000,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	2.554.170.160,00	2.734.090.550,00	(179.920.390,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	264.014.551,00	(264.014.551,00)
Jumlah			33.585.865.770,00	37.075.166.516,00	(3.489.300.746,00)

Aset Tak Berwujud Rp66.705.847.914,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp66.705.847.914,00 dan Rp65.269.905.024,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.435.942.890,00 atau 2,20%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	55.274.816.789,00	54.040.257.924,00	1.234.558.865,00
2	005.02	Kepaniteraan	170.257.000,00	150.332.500,00	19.924.500,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	2.545.455.294,00	2.545.455.294,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	113.285.000,00	113.285.000,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.533.280.130,00	1.533.280.130,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	3.814.420.521,00	3.632.960.996,00	181.459.525,00
7	005.07	Badan Pengawasan	3.254.333.180,00	3.254.333.180,00	0,00
Jumlah			66.705.847.914,00	65.269.905.024,00	1.435.942.890,00

Mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 65. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud*(Dalam Rupiah)*

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		65.269.905.024,00
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	743.898.650,00
101	Pembelian	1.129.816.500,00
103	Hibah Masuk	49.692.500,00
106	Pembatalan Penghapusan	47.190.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	34.650.000,00
112	Perolehan Lainnya	202.400.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	206.864.684,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	219.320.625,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	51.865.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		2.685.697.959,00
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.552.159,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(34.650.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(108.780.000,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.104.772.910,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(1.249.755.069,00)
Jumlah Mutasi		1.435.942.890,00
Saldo per 31 Desember 2022		66.705.847.914,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		(46.192.270.449,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		20.513.577.465,00

Terdapat koreksi audited atas Aset Tak Berwujud berkurang sebesar Rp22.401.525,00 pada 2 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (00501.0100.400214) terdapat barang hasil Kemitraan BTN berupa Software ATP belum didaftarkan sebagai barang hibah maupun dicatat sebagai BMN dengan BAST No. 96/S/JKK-UT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp 10.327.500,00 yang diinput sebagai saldo awal pada periode pelaporan *Audited*.
2. Pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya (00501.1400.400358) Terdapat 9 (Sembilan) NUP software senilai Rp32.729.025,00 yang sudah usang, sehingga dilakukan koreksi dengan melakukan penghentian dari penggunaan.

Aset Lain-Lain
Rp147.118.278
.231,00

C.4.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp147.118.278.231,00 dan Rp159.843.755.689,00, terjadi penurunan sebesar Rp12.725.477.458,00 atau 7,96%.

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 66. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	145.364.364.071,00	158.165.584.539,00	(12.801.220.468,00)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1.753.914.160,00	1.678.171.150,00	75.743.010,00
Jumlah		147.118.278.231,00	159.843.755.689,00	(12.725.477.458,00)

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	145.015.661.137,00	156.918.698.629,00	(11.903.037.492,00)
2	005.02	Kepaniteraan	253.331.868,00	0,00	253.331.868,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	110.384.000,00	818.817.302,00	(708.433.302,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	193.830.000,00	255.990.000,00	(62.160.000,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmitun	1.276.671.226,00	685.543.426,00	591.127.800,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	268.400.000,00	1.164.706.332,00	(896.306.332,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			147.118.278.231,00	159.843.755.689,00	(12.725.477.458)

Mutasi transaksi Aset Lain-Lain pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 68. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain*(Dalam Rupiah)*

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		159.843.755.689,00
Mutasi Tambah :		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset	69.665.907.552,00
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.898.764.062,00
Jumlah Mutasi Tambah		73.564.671.614,00
Mutasi Kurang :		
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(7.437.252.672,00)
301	Penghapusan	(1.345.895.025,00)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(77.507.001.375,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(86.290.149.072,00)
Jumlah Mutasi		(12.725.477.458,00)
Saldo Per 31 Desember 2022		147.118.278.231,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		(134.045.989.926,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		13.072.288.305,00

Terdapat koreksi audited atas Aset Lain-Lain bertambah sebesar Rp699.677.912,00 pada 6 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai berkurang Aset Lain-Lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 2 Satuan Kerja yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (00501.1200.547678) sebesar Rp1.500.000,00, dan Pengadilan Negeri Arga Makmur (00501.2600.400239) sebesar Rp46.832.800,00 telah dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap pada periode pelaporan *Audited*.
2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pagar Alam (00501.1100.672969) sebesar Rp457.374.000,00 yang telah melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.
3. Terdapat koreksi *Audited* Aset Lain-Lain yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	32.729.025,00	Koreksi atas 9 (Sembilan) NUP software senilai Rp32.729.025,00 yang sudah tidak terpakai/usang Telah dilakukan penghentian penggunaan atas aset tersebut.
2			245.057.687,00	Koreksi atas BMN Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi BMN No. W16-U/2669/PL.05/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp245.057.687,00.
3	578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	12.850.000,00	Koreksi untuk mencatat reklasifikasi nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lain-Lain atas dua unit printer (NUP 3 dan NUP 9) serta dua unit AC Split (NUP 8 dan NUP 9) sudah tidak digunakan karena rusak
Jumlah			290.636.712,00	

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

(Rp180.238.26

0.375,00)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp180.238.260.375,00) dan (Rp188.038.494.197,00), terjadi penurunan sebesar Rp7.800.233.822,00 atau 4,15%.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 69. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			
	Software	45.585.850.298,00	(42.092.126.197,00)	3.493.724.101,00
	Lisensi	19.315.129.016,00	(4.100.144.252,00)	15.214.984.764,00
	Hasil Kajian/Penelitian	1.804.868.600,00	0,00	1.804.868.600,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	66.705.847.914,00	(46.192.270.449,00)	20.513.577.465,00
2	Aset Lain-Lain			
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	145.364.364.071,00	(132.294.325.766,00)	13.070.038.305,00
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.753.914.160,00	(1.751.664.160,00)	2.250.000,00
	Jumlah Aset Lain-lain	147.118.278.231,00	(134.045.989.926,00)	13.072.288.305,00
	Jumlah	213.824.126.145,00	(180.238.260.375,00)	33.585.865.770,00

KEWAJIBAN*Kewajiban***C.5. Kewajiban Jangka Pendek***Jangka Pendek
Rp46.078.179.
636,00,00*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

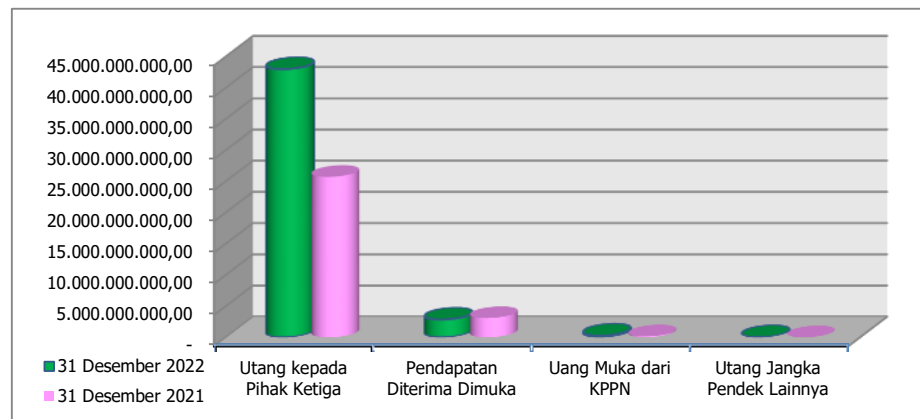
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp46.078.179.636,00,00 dan Rp28.919.826.857,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.158.352.779,00 atau 59,33%.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 70. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	42.970.421.804,00	25.691.256.213,00	17.279.165.591,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00	(244.967.754,00)
3	Uang Muka dari KPPN	271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.706.430,00	1.072.735,00	3.633.695,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		46.078.179.636,00	28.919.826.857,00	17.158.352.779,00

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik**Komposisi Kewajiban Jangka Pendek**

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	41.540.061.126,00	24.926.174.711,00	16.613.886.415,00
2	005.02	Kepaniteraan	14.893.573,00	122.575.875,00	(107.682.302,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	266.633.335,00	672.970.491,00	(406.337.156,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	4.061.437.466,00	3.002.483.240,00	1.058.954.226,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.412.880,00	22.695.419,00	(21.282.539,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	156.133.064,00	(156.133.064,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	193.741.256,00	16.794.057,00	176.947.199,00
Jumlah			46.078.179.636,00	28.919.826.857,00	17.158.352.779,00

Utang kepada Pihak Ketiga Rp42.970.421.804,00

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.970.421.804,00 dan Rp25.691.256.213,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.279.165.591,00 atau 67,26%.

Perbandingan rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	38.436.326.174,00	21.698.234.067,00	16.738.092.107,00
2	005.02	Kepaniteraan	14.893.573,00	122.575.875,00	(107.682.302,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	266.633.335,00	672.340.491,00	(405.707.156,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	4.057.827.466,00	3.002.483.240,00	1.055.344.226,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.000.000,00	22.695.419,00	(21.695.419,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	156.133.064,00	(156.133.064,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	193.741.256,00	16.794.057,00	176.947.199,00
Jumlah			42.970.421.804,00	25.691.256.213,00	17.279.165.591,00

Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	8.718.469.347,00	9.022.237.836,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34.239.146.457,00	16.667.503.377,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	12.805.000,00	1.515.000,00
Dana Pihak Ketiga	1.000,00	0,00
Jumlah	42.970.421.804,00	25.691.256.213,00

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahunan Tahun 2022 berasal dari:

- Saldo akrual Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dilakukan jurnal balik sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2022;
- Transaksi belanja pegawai yang belum dibayarkan ke pegawai dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan periode 31 Desember 2022;
- Dana pihak ketiga berasal dari jurnal yang tidak sesuai dalam rangka untuk mengeliminasi kas di bendahara penerimaan yang memiliki saldo kredit akibat jurnal otomatis dimana seharusnya terbentuk pada saat input kas masuk pada Modul Bendahara Penerimaan tidak terposting (sumber informasi dari KPPN Kediri).
- Terdapat koreksi lebih catat (*overstated*) maupun kurang catat (*understated*) akrual Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Nilai
005.01.307729	Pengadilan Agama Bau-Bau	Jurnal Eliminasi Perbaikan Saldo Akrual Akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	6.173.920,00
005.01.4663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Koreksi Jurnal Akhir tahun terkait tunggakan biaya Mutasi tenaga teknis tahun 2021.	(15.435.600,00)
005.01.400678	Pengadilan Agama Sumedang	Koreksi Jurnal Akrual Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan gaji pegawai bulan April Tahun 2021 s.d. Desem ber 2021 yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023	(909.810,00)
Jumlah			(10.171.490,00)

Terdapat koreksi *Audited* akun Utang Kepada Pihak Ketiga bertambah sebesar Rp915.519.041,00 pada 13 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	(14.510.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal baik (20 Januari 2022) atas akrual Belanja Belanja Uang Makan PNS TA 2021
2	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	(50.000.000,00)	Jurnal baik atas jurnal koreksi belanja barang yang masih harus dibayar terkait belanja gaji hakim adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem dan telah diperbaiki oleh sistem.
3	099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	(76.000.000,00)	Jurnal baik atas jurnal koreksi belanja barang yang masih harus dibayar terkait belanja gaji hakim adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem dan telah diperbaiki oleh sistem.
4	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	(140.775.000,00)	Koreksi kesalahan pembentukan jurnal otomatis atas belanja Gaji Hakim AdHoc pada saat pencatatan SPM Nomor 00107T. (Perbaikan dilakukan oleh sistem)
5	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	(1.640.000,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja pegawai masih harus dibayar atas uang makan, beberapa orang pegawai yang sudah dibayarkan di satuan kerja lama, seharusnya sebesar Rp51.540.000
6			(1.500,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja barang masih harus dibayar atas langganan telepon sebesar Rp1.500
7	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	2.122.974,00	Koreksi atas Kekurangan gaji Pegawai bulan April 2021 s.d. bulan Februari 2023. Realisasi atas kekurangan belanja pegawai tersebut pada tahun 2023
8	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	(80,00)	Koreksi kurang catat atas jurnal baik langganan air.
9	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	2.683.800,00	Koreksi atas Tagihan Air sebesar bulan Desember 2022 belum diakrualkan sebagai hutang pihak ketiga sebesar Rp2.683.800,00 (Koreksi Hutang Pihak Ketiga).
10			185.000,00	Koreksi atas Kekurangan bayar uang makan 1 orang pegawai pada bulan Desember 2022 Rp185.000,00, yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023.
11	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	(170.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal baik (3 Januari 2022) atas akrual Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TA 2021
12	400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	14.069.681,00	Jurnal Akrual GLP atas belanja pengiriman pos pusat Tahun 2022 yang baru direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023.
13	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	1.179.554.166,00	Koreksi kurang catat utang pihak ketiga berupa tunggakan biaya pindah tenaga teknis tahun 2022
Jumlah			915.619.041,00	

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp2.831.281.278,00*

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.831.281.278,00 dan Rp3.076.249.032,00, terjadi penurunan sebesar Rp244.967.754,00 atau 7,96%.

Perbandingan rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon**I***(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00	(244.967.754,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
8	005.55	Konsolidasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.831.281.278,00	3.076.249.032,00	(244.967.754,00)

Terdapat koreksi *Audited* pada Pendapatan Diterima Dimuka bertambah sebesar Rp395.153.754,00 pada 35 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No.	Kode Subunit/Kategori	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1			101.083.140.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa ruangan Kantor Kas dan ATM P1 B11 Peningkatan No. M-10-10201/KC-004/2022 Ditandatangani 24 Juni 2022, jangka waktu sewa 3 tahun dari 29 Des 2021 s.d. 29 Des 2024, nilai sewa, yaitu 3 tahun sebesar Rp151.624.710. PNBSP sewa baru disetorkan tanggal 27 Sep 2022
2	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	5.097.500.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa coffee shop The Kuningan perijinan sewa ditandatangani 20 Mei 2022, berakhir pelaksanaan jangka waktu sewa dari 1 Juni 2022 s.d. 31 Mei 2023 menjadi 27 Okt 2022 s.d. 27 Okt 2023. Harga sewa sebesar Rp6.117.000/tahun. Bukti setor tgl 29 Okt 2022 sebesar Rp6.117.000 untuk jangka waktu sewa 1 tahun.
3			12.350.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Flatsa jangka waktu 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026, pembayaran sewa per tahun.
4			62.769.833.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BTN 1 Agustus 2022 s.d. 31 Juli 2025
5	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	51.300.000.00	Koreksi jurnal akrual Sewa tanah bangunan dan sewa Bangunan kantor (ATM) BRI 21 Jun 2022 s.d. 21 Jun 2025
6			40.900.417.00	Koreksi jurnal akrual Sewa tanah bangunan dan sewa Bangunan kantor.
7	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	1.109.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 6 Sept 2022 s.d. 6 Sept 2023
8	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	362.667.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 14 Maret 2022 s.d. 13 Maret 2023
9	098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	100.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Tahun 2022 tgl 19 Jan 2022 s.d. 18 Jan 2023
10			(5.182.000.00)	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa Ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 31 Agustus 2022 s.d. 30 Agustus 2024 (2 tahun). PNBSP sewa baru disetorkan tanggal 29 Jan 2023
11	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	(6.936.000.00)	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Pak Kantin dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNBSP sewa baru disetorkan tanggal tgl 16 Jan 2023
12	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	250.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 14 Feb 2022 s.d. 14 Feb 2023
13	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	3.712.500.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 12 Apr 2022 s.d. 12 Apr 2024
14	098771	PENGADILAN NEGERI BATUANGKAR	395.000.00	Koreksi jurnal akrual atas sewa kantin atas nama Meghi Cikta Adiputra
15	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	1.440.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 12 Sept 2022 s.d. 11 Sept 2023
16	099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARUNG	29.863.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BRI 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025
17			1.654.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 22 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2025, sewa per tahun Rp2.836.000
18	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	4.385.625.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Tanah s.n. Jufian Afriyandi untuk kegiatan rumah makan Sempoa Bangunan Kantor Pengadilan kelas 4SSM2 dan Bangunan Gedung kantor Danurat seluas 60M2
19	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2.631.667.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 17 Okt 2022 s.d. 16 Okt 2023
20	099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	2.590.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Nov 2022 s.d. 31 Okt 2023
21	099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	2.547.617.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 17 Okt 2022 s.d. 16 Okt 2023
22			12.488.250.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BNI 1 Okt 2022 s.d. 30 Sept 2023
23	108306	PENGADILAN NEGERI BATAM	13.755.750.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 1 tahun 5 Okt 2022 s.d. 4 Okt 2023
24	400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	182.667.00	Koreksi jurnal akrual atas Kurang catat pendapatan sewa Kantin Dibayar dimuka sebesar Rp2.150.000 dari tanggal 21 Januari 2022 s.d. 20 Januari 2023 selama 1 tahun
25	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	885.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 18 Maret 2022 s.d. 17 Maret 2023
26	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	977.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 12 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
27	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARUNG	29.863.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa ATM, perjanjian sewa ditandatangani 1 Juli 2022 dengan nilai Rp25.836.000, dengan jangka waktu sewa dari 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025 (3 tahun) Bukti setor tgl 8 September 2022 sebesar Rp25.836.000 untuk jangka waktu sewa 3 tahun
28	400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	2.032.875.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin tgl 8 Feb 2022 s.d. 8 Feb 2024
29	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	1.728.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 18 Okt 2022 s.d. 17 Okt 2023
30	400503	PENGADILAN TINGGI JAMB	(40.404.00)	Koreksi jurnal akrual atas lebih catat sewa kantin tgl 11 May 2022 s.d. 10 May 2023
31	400704	PENGADILAN AGAMA TASHKIMALAYA	1.698.826.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin per tahun, jangka waktu sewa 1 Okt 2022 s.d. 30 Sep 2025
32	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	2.347.333.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Mei 2022 s.d. 30 Apr 2025
33	401591	MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH	3.125.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin dan fotocopy di MG Banda Aceh, Surat Perijinan sewa No.W-1-1493/KS.002/2022 ditandatangani tgl 9 Februari 2022, jangka waktu sewa 5 Februari 2022 s.d. 31 Jan 2025. Sewa dicatat selama tanggal 15 Januari selama tahunnya. Penyewa sudah menyerahkan biaya sewa untuk 3 tahun sebesar Rp3.000.000 s.d. 29 Jan 2022
34	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	130.725.00	Koreksi jurnal akrual atas sewa sebagian tanah untuk kantin tgl 27 Jan 2022 s.d. 31 Des 2024. Pembayaran PNBSP 1 tahunan
35	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	710.737.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 10 May 2022 s.d. 9 May 2023
36	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNGGARUNG	97.167.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 8 Feb 2022 s.d. 8 Feb 2023
37	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARUNG SELOR	1.006.667.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa tgl 20 Okt 2022 s.d. 20 Okt 2023
38	477236	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	352.500.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin per tahun, jangka waktu sewa 17 Maret 2022 s.d. Feb 2025
39			684.833.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2023
40	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	587.417.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2023
41	528732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	7.101.000.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Tahun 2022 an. KCPPEG FTUR JAKARTA 30 Des 2022 s.d. 30 Des 21
42	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - 1 DI MEDAN	928.667.00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Agust 2022 s.d. 1 Agust 2023
43	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	2.034.806.00	Koreksi jurnal akrual atas sewa tanah 3 tahun tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2025
Jumlah			368.183.764.00	

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 per Satuan Kerja terlampir.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp271.770.124,00*

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp271.770.124,00 dan Rp151.248.877,00, terjadi kenaikan sebesar Rp120.521.247,00 atau 79,68%, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Perbandingan rincian saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	268.160.124,00	150.618.877,00	117.541.247,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	630.000,00	(630.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp4.706.430,00*

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.706.430,00 dan Rp1.072.735,00, merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Tabel 76. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon**I***(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	4.293.550,00	1.072.735,00	3.220.815,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	0,00	412.880,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			4.706.430,00	1.072.735,00	3.633.695,00

EKUITAS*Ekuitas**Rp30.525.686.275.992,00***C.6. Ekuitas**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.525.686.275.992,00 dan Rp29.529.218.827.065,00, terjadi kenaikan sebesar Rp996.467.458.927,00 atau 3,37%.

Perbandingan rincian saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I*(Dalam Rupiah)*

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	005.01	BUA	29.494.208.948.401,00	28.338.183.028.737,00	1.156.025.919.664,00
2	005.02	Kepaniteraan	6.435.089.119,00	7.058.888.076,00	(623.798.957,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	668.944.318.029,00	665.132.534.072,00	3.811.783.957,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	(87.983.652,00)	635.888.993,00	(723.872.645,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	21.633.379.558,00	179.628.945.237,00	(157.995.565.679,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	332.083.896.783,00	335.774.784.720,00	(3.690.887.937,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	2.468.627.754,00	2.804.757.230,00	(336.129.476,00)
Jumlah			30.525.686.275.992,00	29.529.218.827.065,00	996.467.448.927,00

Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN OPERASIONAL**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL*Pendapatan**PNBP**Rp92.741.764.**356,00***D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.741.764.356,00 dan Rp86.793.728.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.410.705.820,00	8.513.495.833,00	(1,21)
425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(9.837.628,00)	(3.067.406,00)	220,71
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	172.160.000,00	182.880.000,00	(5,86)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.873.419.700,00	2.831.762.801,00	1,47
425232	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	(190.000,00)	(100,00)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.858.158.500,00	24.438.595.028,00	1,72
425233	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.830.988.393,00	48.944.569.140,00	5,90
425239	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	(7.320.000,00)	(2.378.000,00)	207,82
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	1.416,00	(100,00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.516.500,00	98.005.652,00	62,76
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00	1.740.462.541,00	155,61
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	45.318.483,00	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.219.026,00	6.192.718,00	(15,72)
Jumlah		92.741.764.356,00	86.793.728.206,00	6,85

Terdapat koreksi audited atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp371.769.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	12.350.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Farida dengan jangka waktu 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026
			(18.900.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBPN atas Sewa BTS Storvanet, perjanjian sewa ditandatangani 1 Oktober 2021, jangka waktu sewa 3 tahun dari 1 Oktober 2021 s.d 30 September 2024. Atas sewa di Tahun 2022 baru disetorkan tgl 19 Januari 2023
			(12.500.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBPN atas Sewa Kantin a.n Rosida, perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026. Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)
			5.097.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima di Muka atas Sewa Coffee Shop The Locus, perjanjian sewa ditandatangani 30 Mei 2022, terdapat addendum jangka waktu sewa dari 1 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023 menjadi 27 Oktober 2022 s.d 27 Oktober 2023. Harga sewa sebesar Rp6.117.000/tahun. Bukti setor tgl 25 Oktober 2022 sebesar Rp6.117.000 untuk jangka waktu sewa 1 tahun. (PDD = 10/12x 6.117.000 = 5.097.500)
			(3.550.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBPN atas Sewa Fotocopy an. Rika Fatmawati (Perpanjangan), perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026. Bukti setor tahun 1 Rp7.100.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2023). (Sewa Fotokopi yg seharusnya masih diterima th 2022 6/12 x 7.100.000 = 3.550.000)
			101.083.140,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima di Muka atas sewa ruangan Kantor Kas dan ATM PT BTN, Perpanjangan ke-1, No. W10-VI/301/KS.00/VI/2022, Ditandatangani 24 Juni 2022, jangka waktu sewa 3 tahun dari 29 Desember 2021 s.d 29 Desember 2024. Nilai sewa untuk 3 tahun sebesar Rp151.624.710. PNBPN sewa baru disetorkan tanggal tgl 27 September 2022. (PDD = 2/3x 151.624.710= 101.083.140)

2	097598	Pengadilan Negeri Tangerang	40.900.417,00	Kurang Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin	
			62.769.833,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa BTN dengan jangka waktu 1 Agustus 2022 s.d 31 Juli 2025	
			51.350.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BRI dengan jangka waktu 21 Juni 2022 s.d 21 Juni 2025	
3	097631	Pengadilan Negeri Subang	1.109.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 6 September 2022 s.d 6 September 2023	
4	097670	Pengadilan Negeri Cirebon	362.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 14 Maret 2022 s.d. 13 Maret 2023	
5	098260	Pengadilan Negeri Trenggalek	100.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 19 Januari 2022 s.d. 18 Januari 2023	
6	098281	Pengadilan Negeri Malang	8.323.200,00	Sewa Kantin Pak Kamid dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNPB sewa baru disetorkan tanggal tgl 16 Jan 2023 masing-masing Rp 4.161.600 untuk sewa 3 tahun. Sesuai surat KPKNL S-119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022	
			(8.323.200,00)		
			6.936.000,00		
			(6.936.000,00)		
			5.182.000,00		Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa Ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 31 Agust 2022 s.d. 30 Agust 2024 (2 tahun), PNPB sewa baru disetorkan tanggal 20 Jan 2023 Rp6.218.400 untuk sewa 2 tahun. Sesuai Surat KPKNL S-119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022. Nilai sewa Rp6.218.400 per tahun. Pembayaran atas sewa tersebut baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.
			(5.182.000,00)		
			6.218.400,00		
			(6.218.400,00)		
7	098633	Pengadilan Negeri Binjai	250.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 14 Februari 2022 s.d 14 Februari 2023	
8	098682	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	3.712.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 April 2022 s.d 12 April 2024	
9	098771	Pengadilan Negeri Batusangkar	395.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Meghi Okta Adpelra	
10	098917	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	1.440.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 September 2022 s.d 11 September 2023	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

11	099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	29.863.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BRI dengan jangka waktu 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025
12	099070	Pengadilan Negeri Singkawang	1.654.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 22 Juli 2022 s.d 22 Juli 2025
			4.385.625,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Rumah Makan a.n. Julfian Afriyandi dengan jangka waktu 11 Juli 2022 s.d 11 Juli 2025
13	099176	Pengadilan Negeri Sampit	2.631.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Oktober 2022 s.d 16 Oktober 2023
14	099600	Pengadilan Negeri Palopo	(551.886,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNPB atas sewa rumah dinas (pemakaian bulan Juli s.d September 2022), belum ada pembayaran bulan Januari s.d Februari 2023
15	099731	Pengadilan Negeri Ternate	2.590.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 November 2022 s.d 31 Oktober 2023
16	099748	Pengadilan Negeri Tobelo	2.547.917,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Oktober 2022 s.d 16 Oktober 2023
17	108309	Pengadilan Negeri Batam	12.488.250,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BNI dengan jangka waktu 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2023
			13.755.750,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin 1 tahun dengan jangka waktu 5 Oktober 2022 s.d 4 Oktober 2023
18	400007	Pengadilan Negeri Larantuka	182.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 21 Januari 2022 s.d 20 Januari 2023
19	400126	Pengadilan Negeri Curup	885.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 18 Maret 2022 s.d 17 Maret 2023
20	400172	Pengadilan Negeri Bantul	977.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023
21	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	29.863.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM dengan jangka waktu 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025
22	400389	Pengadilan Negeri Kisaran	2.032.875,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2024
23	400452	Pengadilan Negeri Kalianda	1.728.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 18 Oktober 2022 s.d 17 Oktober 2023

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

24	400503	Pengadilan Tinggi Jambi	(710.737,00)	Koreksi Lebih Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 11 Mei 2022 s.d 10 Mei 2023
			670.333,00	
25	400704	Pengadilan Agama Tasikmalaya	1.698.829,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2025
26	400905	Pengadilan Agama Batang	2.347.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Mei 2022 s.d 30 April 2025
27	401591	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	3.125.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dan fotocopy dengan jangka waktu 9 Februari 2022 s.d Januari 2025
28	401910	Pengadilan Negeri Mukomuko	130.729,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 27 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024
29	401924	Pengadilan Negeri Penajam	710.737,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 10 Mei 2022 s.d 9 Mei 2023
30	402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang	97.167,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2023
31	417722	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	1.006.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa dengan jangka waktu 20 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2023
32	477230	Pengadilan Negeri Lembata	352.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Maret 2022 s.d Februari 2025
533	477306	Pengadilan Negeri Kota Agung	587.417,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Beni dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023
			684.833,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Kusrini Sewa kantin dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023
34	526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	7.101.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. KOPPEG PTUN JAKARTA dengan jangka waktu 30 Desember 2022 s.d 30 Desember 23
35	663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Di Medan	928.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Agustus 2022 s.d 1 Agustus 2023
36	673020	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	2.034.806,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Tanah dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2025
Jumlah			371.769.868,00	

2. Koreksi berkurang akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp1.650.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 652035 Pengadilan Agama Sengeti merupakan kesalahan pencatatan transaksi uang masuk dengan SBS Nomor 00130/SBS/652035/2022 yang telah dihapuskan dari Modul Bendahara. Penghapusan transaksi tersebut tidak terposting oleh sistem, Satuan Kerja telah melaporkan permasalahan tersebut kepada DJPB Kementerian Keuangan melalui platform Hai DJPB dengan nomor tiket 20230209-4VVJK8.

Beban Pegawai **D.2. Beban Pegawai**

Rp7.048.043.385.423,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.048.043.385.423,00 dan Rp6.780.962.599.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.605.316.870.348,00	1.575.651.125.140,00	1,88
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(195.456.478,00)	(91.094.221,00)	114,57
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.532.463,00	22.027.812,00	47,69
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(413.021,00)	(241.514,00)	71,01
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.723.797.526,00	117.600.489.379,00	(1,60)
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(27.235.889,00)	(27.622.143,00)	(1,40)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	32.799.326.639,00	33.366.726.813,00	(1,70)
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(7.597.041,00)	(5.625.588,00)	35,04
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.395.552.521,00	37.189.874.900,00	(2,14)
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(55.613.202,00)	(46.615.382,00)	19,30
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.067.265.960.588,00	2.102.061.396.815,00	(1,66)
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(769.160.296,00)	(286.957.736,00)	168,04
511125	Beban Tunj. PPh PNS	304.638.370.941,00	314.218.798.564,00	(3,05)
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(17.052.475,00)	(193.213,00)	8.725,74
511126	Beban Tunj. Beras PNS	85.331.633.250,00	84.757.565.100,00	0,68
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(8.651.928,00)	(4.257.759,00)	103,20
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	20.250.000,00	0,00	0,00
511129	Beban Uang Makan PNS	258.645.276.958,00	254.889.880.669,00	1,47
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(58.595.200,00)	(45.656.150,00)	28,34
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70.725.000,00	70.850.000,00	(0,18)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.704.973.750,00	4.864.986.250,00	(3,29)
511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	(2.640.000,00)	(15.070.000,00)	(82,48)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19.358.968.630,00	14.587.431.500,00	32,71
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(158.696.047,00)	(153.727.425,00)	3,23
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	60.173.630.312,00	65.846.561.798,00	(8,62)
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	(39.000.000,00)	(72.550.000,00)	(46,24)
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	101.850.575.000,00	106.705.029.902,00	(4,55)
511158	Pengembalian Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	0,00	(197.435.418,00)	(100,00)
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36.614.898.457,00	39.943.834.534,00	(8,33)
511224	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0,00	(30.450.000,00)	(100,00)
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	3.484.585.254,00	3.567.592.395,00	(2,33)
511225	Pengembalian Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	(1.952.370,00)	0,00	0,00
511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	70.200.000,00	78.300.000,00	(10,34)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2.937.480.000,00	2.684.010.000,00	9,44
511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	39.100,00	35.640,00	9,71
511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	283.248.000,00	262.521.000,00	7,90
511321	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	(1.260.000,00)	0,00	0,00
511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	9.828.000,00	9.408.000,00	4,46
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	51.626.076.000,00	47.423.832.000,00	8,86
511323	Pengembalian Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	(218.562.000,00)	0,00	0,00
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	12.972.014.974,00	11.397.277.387,00	13,82
511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	106.457.400,00	98.201.520,00	8,41
511325	Pengembalian Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	(217.260,00)	0,00	0,00
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.994.000.000,00	6.995.000.000,00	(28,61)
511332	Pengembalian Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	(33.900.833,00)	0,00	0,00
512211	Beban Uang Lembur	604.650.000,00	217.706.000,00	177,74
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.243.900.584.451,00	1.957.415.912.873,00	14,64
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(306.836.099,00)	0,00	0,00
	Jumlah	7.048.043.385.423,00	6.780.962.599.442,00	3,94

Terdapat koreksi audited atas Beban Pegawai pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 511111 Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp34.321.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511111 Beban Gaji Pokok PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	1.102.800,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji Pokok PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(13.672.387,00)	Koreksi Lebih Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas Gaji Terusan Keempat bulan November 2021 utk 1 Pegawai/2 Jiwa
3	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(21.752.125,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Gaji Pokok PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			(34.321.712,00)	

2. Koreksi berkurang akun 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp376,00 dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	84,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Pembulatan Gaji PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(460,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Pembulatan Gaji PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			(376,00)	

3. Koreksi berkurang akun 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp370.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 604730 Pengadilan Agama Malang Kab. Malang merupakan kesalahan penggunaan akun untuk potongan PFK dimana sebelumnya Satuan Kerja menggunakan akun 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS seharusnya menggunakan akun 811132 Penerimaan setoran/potongan PFK 8% gaji PNS Pusat. Satuan Kerja melakukan koreksi/ralat akun tersebut ke KPPN.
4. Koreksi berkurang akun 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp2.064.935,00 dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	110.280,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Tunjangan Suami/Istri PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(2.175.215,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Suami/Istri PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			(2.064.935,00)	

5. Koreksi berkurang akun 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS sebesar Rp2.300.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 548940 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022.
6. Koreksi berkurang akun 511126 Beban Tunj. Beras PNS sebesar Rp724.200,00 terdapat pada Satuan Kerja 548940 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Beras PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022.
7. Koreksi berkurang akun 511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 663403 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan Jurnal Balik GLP atas kesalahan input dalam kode akun 511127 (Beban Tunjangan kemahalan PNS) seharusnya kode akun 511157 (Beban Tunjangan Kemahalan Hakim) atas kekurangan tunjangan kemahalan KPT Bulan Desember 2022 dan kekurangan tunjangan kemahalan WKPT bulan Juli 2022.
8. Koreksi berkurang akun 511129 Beban Uang Makan PNS sebesar Rp16.754.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511129 Beban Uang Makan PNS	Keterangan
1	098608	Pengadilan Negeri Singkel	(14.510.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal balik (20 Januari 2022) atas akrual Belanja Uang Makan PNS TA 2021
2	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	51.540.000,00	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas uang makan, beberapa orang pegawai yang sudah dibayarkan di Satuan Kerja lama
3	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	(53.180.000,00)	
4	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(789.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya atas Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2022
5	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	185.000,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Uang Makan 1 orang pegawai bulan Desember 2022)
Jumlah			(16.754.000,00)	

9. Koreksi berkurang akun 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS sebesar Rp170.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 402882 Pengadilan Agama Sorong merupakan kesalahan input jurnal balik (3 Januari 2022) atas akrual Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TA 2021.
10. Koreksi bertambah akun 511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 663403 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan Jurnal Akrual GLP atas kekurangan tunjangan kemahalan KPT bulan Desember 2022 dan kekurangan tunjangan kemahalan WKPT bulan Juli 2022.

11. Koreksi berkurang akun 511158 Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc sebesar Rp126.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511158 Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	Keterangan
1	099773	Pengadilan Tinggi Denpasar	(50.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar terkait Belanja Gaji Hakim Adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem
2	099780	Pengadilan Negeri Denpasar	(76.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar terkait Belanja Gaji Hakim Adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem
Jumlah			(126.000.000,00)	

12. Koreksi berkurang akun 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp26.003.962,00 terdapat pada Satuan Kerja 663157 Badan Urusan Administrasi merupakan pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2022 pada BUA yang sudah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2023.

Beban

Persediaan

Rp94.286.979.901,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp94.286.979.901,00 dan Rp95.503.112.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	94.286.979.901,00	95.503.112.886,00	(1,27)
Jumlah		94.286.979.901,00	95.503.112.886,00	(1,27)

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Persediaan pada beberapa Satuan Kerja, yaitu Koreksi berkurang pada akun 593111 Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp99.253,00 pada beberapa Satuan Kerja, antara lain:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	593111 Beban Persediaan Konsumsi	Keterangan
1	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	1.200.000,00	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian tiga buah tinta printer
2	401591	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	7.896.000,00	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian toner dan cartridge printer
3	400529	Pengadilan Tinggi Samarinda	(12.735.055,00)	Koreksi jurnal pada modul GLP terkait selisih TKTM
4	402024	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	1.034.550,00	Merupakan pemakaian persediaan bulan Desember 2022 yang belum diinput sehingga dilakukan penginputan pada periode 14 Tahun 2022
			50.710,00	
			48.920,00	
			49.305,00	
			98.610,00	
			59.950,00	
			44.786,00	
			113.300,00	
			48.920,00	
			49.720,00	
			44.786,00	
			52.800,00	
			47.080,00	
			43.670,00	
			239.580,00	
			49.720,00	
			94.160,00	
			147.915,00	
			47.300,00	
			209.440,00	
			271.590,00	
209.440,00				
49.720,00				
106.700,00				
66.000,00				
66.000,00				
48.920,00				
49.720,00				
51.700,00				
44.790,00				
Jumlah			(99.253,00)	

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.628.939.888,00 dan Rp1.301.888.339.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	682.235.860.396,00	534.779.520.228,00	27,57
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(79.916.954,00)	(51.466.708,00)	55,28
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.198.500,00	0,00	0,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.312.434.969,00	15.595.116.195,00	23,84
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(2.734.580,00)	(1.962.480,00)	39,34
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.994.006.178,00	45.703.627.794,00	(1,55)
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(5.598.000,00)	(27.222.500,00)	(79,44)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	207.555.430.897,00	127.630.642.182,00	62,62
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(70.891.165,00)	(17.490.000,00)	305,32
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.369.221.562,00	8.457.115.999,00	(24,69)
521211	Beban Bahan	47.701.065.242,00	40.335.976.188,00	18,26
521211	Pengembalian Beban Bahan	(2.153.318,00)	(2.491.300,00)	(13,57)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	710.691.500,00	349.362.000,00	103,43
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0,00	(4.452.500,00)	(100,00)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.886.586.390,00	50.336.069.803,00	(92,28)
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	(89.024.250,00)	(100,00)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	715.210.584,00	5.176.691.055,00	(86,18)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.053.170.361,00	0,00	0,00
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	259.472.965,00	0,00	0,00
521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	14.291.250,00	0,00	0,00
522111	Beban Langganan Listrik	148.118.365.851,00	122.753.050.219,00	20,66
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	(14.317.504,00)	(9.507.807,00)	50,59
522112	Beban Langganan Telepon	3.134.086.240,00	3.329.961.352,00	(5,88)
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	(590,00)	(1.033.790,00)	(99,94)
522113	Beban Langganan Air	6.175.064.559,00	6.009.621.798,00	2,75
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0,00	(8.778.170,00)	(100,00)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	669.273.540,00	780.047.896,00	(14,20)
522131	Beban Jasa Konsultan	35.795.815.267,00	30.556.507.876,00	17,15
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(3.292.479,00)	(944.000,00)	248,78
522141	Beban Sewa	266.043.051.125,00	260.260.917.625,00	2,22
522141	Pengembalian Beban Sewa	(88.678.227,00)	(120.644.712,00)	(26,50)
522151	Beban Jasa Profesi	13.492.732.450,00	15.730.266.003,00	(14,22)
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(6.228.000,00)	(66.367.500,00)	(90,62)
522191	Beban Jasa Lainnya	81.804.850.162,00	13.978.486.331,00	485,22
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(39.778.390,00)	0,00	0,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.949.515.570,00	19.136.394.124,00	(6,20)
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	3.948.133.537,00	1.403.100.451,00	181,39
	Jumlah	1.592.628.939.888,00	1.301.888.339.402,00	22,33

Penjelasan:

- 595112 - Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.948.133.537,00 pada 139 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
1	005.01.097467	Pengadilan Tinggi Jakarta	6.112.500,00
2	005.01.097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	555.000,00
3	005.01.097514	Pengadilan Negeri Bandung	4.858.000,00
4	005.01.097521	Pengadilan Negeri Sumedang	9.329.650,00
5	005.01.097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	35.211.400,00
6	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	7.650.000,00
7	005.01.097598	Pengadilan Negeri Tangerang	102.854.500,00
8	005.01.097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	3.596.000,00
9	005.01.097610	Pengadilan Negeri Bekasi	1.000.000,00
10	005.01.097645	Pengadilan Negeri Bogor	960.500,00
11	005.01.097709	Pengadilan Negeri Kuningan	1.480.000,00
12	005.01.097713	Pengadilan Tinggi Semarang	680.000,00
13	005.01.097762	Pengadilan Negeri Pati	545.000,00
14	005.01.097780	Pengadilan Negeri Pemalang	500.000,00
15	005.01.097797	Pengadilan Negeri Kendal	600.000,00
16	005.01.097802	Pengadilan Negeri Demak	2.440.000,00
17	005.01.097872	Pengadilan Negeri Batang	13.473.311,00
18	005.01.097912	Pengadilan Negeri Temanggung	4.940.000,00
19	005.01.098015	Pengadilan Negeri Cilacap	1.300.000,00
20	005.01.098132	Pengadilan Negeri Tuban	2.402.400,00
21	005.01.098214	Pengadilan Negeri Banyuwangi	2.025.000,00
22	005.01.098281	Pengadilan Negeri Malang	3.085.800,00
23	005.01.098310	Pengadilan Negeri Lumajang	3.100.000,00
24	005.01.098420	Pengadilan Negeri Sampang	1.102.000,00
25	005.01.098612	Pengadilan Tinggi Medan	33.976.800,00
26	005.01.098750	Pengadilan Negeri Padang	6.882.000,00
27	005.01.098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	1.242.000,00
28	005.01.098895	Pengadilan Negeri Jambi	1.457.000,00
29	005.01.098938	Pengadilan Tinggi Palembang	4.050.000,00
30	005.01.098942	Pengadilan Negeri Palembang	15.850.800,00
31	005.01.098959	Pengadilan Negeri Kayuagung	5.506.800,00
32	005.01.099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	14.630.000,00
33	005.01.099120	Pengadilan Negeri Palangkaraya	7.050.000,00
34	005.01.099162	Pengadilan Negeri Buntok	9.000.000,00
35	005.01.099197	Pengadilan Negeri Banjarmasin	1.272.000,00
36	005.01.099223	Pengadilan Negeri Barabai	1.570.000,00
37	005.01.099230	Pengadilan Negeri Martapura	1.100.000,00
38	005.01.099290	Pengadilan Negeri Tenggara	2.597.400,00
39	005.01.099340	Pengadilan Negeri Tahuna	3.790.000,00
40	005.01.099375	Pengadilan Negeri Palu	28.475.000,00
41	005.01.099396	Pengadilan Negeri Luwuk	2.000.000,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
42	005.01.099471	Pengadilan Negeri Maros	25.650.000,00
43	005.01.099574	Pengadilan Negeri Sinjai	2.375.150,00
44	005.01.099731	Pengadilan Negeri Ternate	4.570.000,00
45	005.01.099752	Pengadilan Negeri Labuha	1.200.000,00
46	005.01.099858	Pengadilan Negeri Bangli	888.000,00
47	005.01.099879	Pengadilan Negeri Raba/Bima	3.909.975,00
48	005.01.099926	Pengadilan Negeri Kupang	4.650.000,00
49	005.01.099951	Pengadilan Negeri Kefamenanu	14.836.250,00
50	005.01.099968	Pengadilan Negeri Waingapu	3.748.800,00
51	005.01.307122	Pengadilan Agama Kotabaru	19.813.500,00
52	005.01.307271	Pengadilan Agama Kodya Palu	9.828.000,00
53	005.01.307885	Pengadilan Agama Mataram	1.200.000,00
54	005.01.308021	Pengadilan Agama Curup	275.300,00
55	005.01.400013	Pengadilan Negeri Ruteng	6.840.000,00
56	005.01.400022	Pengadilan Tinggi Jayapura	9.157.500,00
57	005.01.400220	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	2.497.500,00
58	005.01.400239	Pengadilan Negeri Arga Makmur	800.000,00
59	005.01.400282	Pengadilan Negeri Pleihari	14.100.000,00
60	005.01.400311	Pengadilan Negeri Bangko	6.355.000,00
61	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	1.980.000,00
62	005.01.400421	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	3.000.000,00
63	005.01.400622	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2.480.824,00
64	005.01.400781	Pengadilan Agama Kuningan	32.100.000,00
65	005.01.400797	Pengadilan Agama Serang	1.665.000,00
66	005.01.400823	Pengadilan Agama Tangerang	410.700,00
67	005.01.400832	Pengadilan Agama Bekasi	600.000,00
68	005.01.400951	Pengadilan Agama Purwodadi	846.000,00
69	005.01.400982	Pengadilan Agama Jepara	680.000,00
70	005.01.400998	Pengadilan Agama Rembang	3.547.500,00
71	005.01.401137	Pengadilan Agama Boyolali	5.600.000,00
72	005.01.401180	Pengadilan Agama Surakarta	1.420.000,00
73	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	2.836.000,00
74	005.01.401338	Pengadilan Agama Jember	2.200.000,00
75	005.01.401369	Pengadilan Agama Banyuwangi	4.505.900,00
76	005.01.401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	3.655.000,00
77	005.01.401602	Mahkamah Syar'Iyah Sabang	2.500.000,00
78	005.01.401611	Mahkamah Syar'Iyah Sigli	14.031.150,00
79	005.01.401633	Mahkamah Syar'Iyah Bireuen	1.200.000,00
80	005.01.401877	Pengadilan Agama Penajam	1.645.975,00
81	005.01.401907	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	12.155.565,00
82	005.01.401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	23.307.778,00
83	005.01.401910	Pengadilan Negeri Mukomuko	2.640.000,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
84	005.01.401922	Pengadilan Agama Solok	2.850.000,00
85	005.01.401936	Pengadilan Agama Pulau Punjung	9.945.525,00
86	005.01.401946	Pengadilan Agama Pagar Alam	5.675.000,00
87	005.01.401949	Pengadilan Agama Prabumulih	124.956.232,00
88	005.01.401956	Pengadilan Agama Sukadana	56.960.400,00
89	005.01.401965	Mahkamah Syar'Iyah Blangpidie	13.000.000,00
90	005.01.401967	Mahkamah Syar'Iyah Kota Subulussalam	16.815.000,00
91	005.01.402072	Pengadilan Agama Pekanbaru	9.324.000,00
92	005.01.402123	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	9.324.000,00
93	005.01.402154	Pengadilan Agama Dabo Singkep	909.090,00
94	005.01.402185	Pengadilan Agama Jambi	1.241.000,00
95	005.01.402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	2.015.650,00
96	005.01.402355	Pengadilan Agama Metro	4.610.152,00
97	005.01.402370	Pengadilan Agama Sambas	2.800.000,00
98	005.01.402421	Pengadilan Agama Palangkaraya	3.500.000,00
99	005.01.402468	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	4.550.000,00
100	005.01.402474	Pengadilan Agama Sampit	680.000,00
101	005.01.402669	Pengadilan Agama Mempawah	899.800,00
102	005.01.402763	Pengadilan Agama Klungkung	1.101.000,00
103	005.01.402788	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	1.800.000,00
104	005.01.403052	Pengadilan Agama Muara Bulian	1.870.000,00
105	005.01.417657	Pengadilan Agama Tanjung Selor	9.463.860,00
106	005.01.417844	Pengadilan Negeri Pandeglang	602.175,00
107	005.01.526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaramedan	12.348.000,00
108	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	3.400.000,00
109	005.01.531844	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	3.840.600,00
110	005.01.531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	39.600.000,00
111	005.01.578839	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	8.001.000,00
112	005.01.578871	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	12.670.000,00
113	005.01.613519	Pengadilan Negeri Kab.Bogor Di Cibinong, Jawa Barat	812.000,00
114	005.01.614684	Pengadilan Agama Tulang Bawang	4.544.636,00
115	005.01.614691	Pengadilan Agama Tanggamus	1.630.000,00
116	005.01.614769	Pengadilan Agama Sentani	4.862.418,00
117	005.01.632001	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	3.000.000,00
118	005.01.632018	Pengadilan Agama Sarolangun	3.050.000,00
119	005.01.652034	Pengadilan Agama Sengeti	15.559.500,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
120	005.01.652041	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2.700.000,00
121	005.01.652076	Pengadilan Agama Cilegon	3.441.000,00
122	005.01.663026	Pengadilan Negeri Menggala	9.250.000,00
123	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	2.831.367.451,00
124	005.01.663161	Pengadilan Militer Utama	4.426.000,00
125	005.01.663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Di Medan	6.404.000,00
126	005.01.663211	Pengadilan Militer I - 04 Di Palembang	28.470.000,00
127	005.01.663232	Pengadilan Militer I - 06 Di Banjarmasin	6.932.600,00
128	005.01.663250	Pengadilan Militer Tinggi II Di Jakarta	4.426.000,00
129	005.01.663267	Pengadilan Militer II - 08 Di Jakarta	4.426.000,00
130	005.01.663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	7.055.000,00
131	005.01.663321	Pengadilan Militer III - 13 Di Madiun	243.000,00
132	005.01.663335	Pengadilan Militer III - 14 Di Denpasar	4.995.000,00
133	005.01.672927	Pengadilan Negeri Masamba	4.459.980,00
134	005.01.672973	Pengadilan Negeri Kasongan	200.000,00
135	005.01.682150	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	3.885.000,00
136	005.01.682185	Pengadilan Agama Marisa	3.000.000,00
137	005.01.682228	Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong	6.040.000,00
138	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5.053.440,00
139	005.06.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	5.194.800,00
Jumlah			3.948.133.537,00

Merupakan transaksi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Barang dan Jasa pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 521111 Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp14.610.838,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521111 Beban Keperluan Perkantoran	Keterangan
1	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(4.500.000,00)	Jurnal Koreksi untuk mencatat Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa pembelian kursi jati sidang (3 buah)
2	400477	Pengadilan Negeri Sumber	291.667,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual sewa Zoom Meeting
			(3.208.333,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas Sewa Zoom Meeting periode 23 November 2022 s.d 22 November 2023
3	401915	Pengadilan Negeri Cikarang	1.145.833,00	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas kesalahan perhitungan nilai akrual sewa Web Hosting yang seharusnya tidak disajikan sebagai akrual karena sewa hanya 1 bulan di Desember 2022
4	402349	Pengadilan Agama Kotabumi	1.475.500,00	Jurnal Balik atas kesalahan penggunaan akun pencatatan Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk sewa Web Hosting
5	477352	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	(1.833.385,00)	Kurang Catat Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk sewa Zoom Meeting
6	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(3.900.000,00)	Jurnal Koreksi atas Belanja Barang Ekstrakomptabel untuk pembelian printer second/epson an. Rizqy Computer NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00705/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
			(1.900.000,00)	Jurnal Koreksi atas Perolehan Lainnya Ekstrakomptabel untuk pembelian Rak Souvenir An. Asy'ari sesuai Kuitansi No. 00180/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
			(3.374.400,00)	Jurnal Koreksi atas Belanja Barang Ekstrakomptabel untuk pembelian kursi rapat aula An. Darma Karya Barokah NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi No. 00736/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
7	604719	Pengadilan Agama Cibinong	2.104.598,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka Sewa Cloud Storage
			(701.533,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas sewa Cloud Storage periode 17 Maret 2022 s.d 16 Maret 2023
			2.312.500,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka sewa Web Hosting
			(1.651.785,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting periode 18 Mei 2022 s.d 17 Mei 2023
8	663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	(871.500,00)	Jurnal Koreksi atas pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
Jumlah			(14.610.838,00)	

2. Koreksi bertambah akun 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp14.069.681,00 terdapat pada Satuan Kerja 400023 Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan kurang catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas langganan Pengiriman Surat Dinas Pos.
3. Koreksi berkurang akun 521119 Beban Barang Operasional Lainnya sebesar Rp8.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521119 Beban Barang Operasional Lainnya	Keterangan
1	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(4.531.000,00)	Koreksi Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa pembelian papan pengumuman (rangka spanduk besi) menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(4.080.000,00)	Koreksi Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa papan nama untuk gapura an. Ragil Reklame sesuai Kuitansi No. 00160/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya
Jumlah			(8.611.000,00)	

4. Koreksi berkurang akun 521211 Beban Bahan sebesar Rp11.875.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 400365 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya atas pembelian Peralatan dan Mesin berupa rak aluminium 2 buah menggunakan akun Belanja Bahan.
5. Koreksi bertambah akun 521252 Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar Rp55.703.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521252 Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	Keterangan
1	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	17.509.350,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk perolehan Peralatan dan Mesin berupa hordeng (16 set) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
2	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	17.600.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pengadaan Pemasangan Gordyn sebanyak 20 buah menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
3	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	330.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian Web Camera Logitech sesuai kuitansi no. 00589/KW/526767/2022 tanggal 30-12-22 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang seharusnya Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			994.500,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian AF Gordyn sesuai kuitansi no. 00479/KW/526767/2022 tanggal 07-09-22 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
4	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	11.145.500,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pengadaan Gordyn untuk Gedung Kantor An. Aris sesuai kuitansi no. 00091/KW/548940/2022 tanggal 22-02-2022 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			3.900.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian printer second/epson An. Rizqy Computer NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00705/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			850.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian mesin chain saw an. Cahaya Nusantara NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00534/KW/548940/2022 tanggal 19-10-2022 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			3.374.400,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian kursi rapat aula an. Darma Karya Barokah NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00736/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
Jumlah			55.703.750,00	

6. Koreksi bertambah akun 521253 Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel sebesar Rp46.950.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 401918 Pengadilan Negeri Kuala Kurun merupakan Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pembangunan Bidang Kolam Ikan dan Taman Hijau sesuai kuitansi no. W16-U9/1819/PL.01/11/2022 tanggal 16-11-2022) dan Tanaman Indoor sesuai kuitansi no. W16-U9/1809/PL.01/11/2022 tanggal 14-11-2022) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel (521253).
7. Koreksi berkurang akun 522112 Beban Langganan Telepon sebesar Rp1.500,00 terdapat pada Satuan Kerja 400483 Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas langganan telepon.
8. Koreksi bertambah akun 522113 Beban Langganan Air sebesar Rp2.683.720,00 dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	522113 Beban Langganan Air	Keterangan
1	401898	Pengadilan Agama Namlea	(80,00)	Koreksi Kurang Catat Jurnal Balik Awal Tahun 2022 atas Langganan Air
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	2.683.800,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas Beban Langganan Air Tahun 2022
Jumlah			2.683.720,00	

9. Koreksi berkurang akun 522141 Beban Sewa sebesar Rp2.579.420.809,00 dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	522141 Beban Sewa	Keterangan
1	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	176.458,00	Koreksi atas kesalahan Penyajian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
2	099600	Pengadilan Negeri Palopo	(307.780,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
			1.846.680,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akruai Web Hosting
			307.780,00	Koreksi atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akruai Web Hosting
3	307839	Pengadilan Agama Singaraja	3.000.000,00	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Web Hosting (Exabytes periode 13 Februari 2022 s.d 12 Februari 2023)
			(500.000,00)	Jurnal Balik atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akruai Belanja Sewa Dibayar Dimuka Domain dan Web Hosting
4	400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(16.869.688,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Web Hosting periode 21 Pebruari 2022 s.d 20 Pebruari 2023
5	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	312.500,00	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting berdasarkan faktur no. 010.003-22.47369811 periode 13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2023
			(213.177.250,00)	Koreksi lebih catat atas Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Web Hosting periode 15 November 2022 s.d 14 November 2023
6	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(29.700.000,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy periode 1 Januari s.d 18 Maret 2023
			2.352.000,00	Merupakan sewa rumah untuk Hakim Tahun 2021 yang baru dibayarkan pada Tahun 2022
7	401887	Pengadilan Agama Rumbia	(875.000,00)	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk mencatat sewa AC (3 buah) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Sewa (522141)
8	401895	Pengadilan Agama Dataran Hunimoo	(280.000,00)	Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Hosting periode 19 April 2022 s.d 18 April 2023
9	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(3.277.250,00)	Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Hosting
10	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	(687.500,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Alat Pengolah Data dan Informasi sesuai Surat Perjanjian Nomor : W16-U11/75/PL.03/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan periode sewa 24 Januari 2022 s.d 23 Januari 2023
			1.375.000,00	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting Periode 16 Juni 2022 s.d. 15 Juni 2023
11	402349	Pengadilan Agama Kotabumi	(3.934.667,00)	Jurnal Balik atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) untuk sewa Web Hosting
12	402386	Pengadilan Agama Ketapang	830.412,00	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
			(54.167,00)	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2023
13	402681	Pengadilan Tinggi Agama Manado	(60.446.760,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy
			60.466.760,00	Kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy
14	477352	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	(5.333.333,00)	Kurang Catat Belanja Barang Dibayar Dimuka (Prepaid) untuk langganan Domain Hosting
15	531851	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	(666.000,00)	Koreksi atas kesalahan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 21 Agustus 2022 s.d 20 Agustus 2023
			999.000,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
16	663157	Badan Urusan Administrasi	12.928.714.504,00	Jurnal balik atas koreksi BPK (Kesalahan Perhitungan atas Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada 1 paket Belanja Sewa Kendaraan)
			(15.244.483.618,00)	Koreksi atas Pemeriksaan BPK (audited) (Belum diakruaikan untuk Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas 2 paket Belanja Sewa Kendaraan
17	670231	Pengadilan Negeri Bengkayang	(675.000,00)	Koreksi atas Kesalahan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 23 Mei 2022 s.d 22 Mei 2023
			1.620.000,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akruai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
Jumlah			(2.579.420.809,00)	

Beban**D.5. Beban Pemeliharaan**

Pemeliharaan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Rp478.941.136.468,00 Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp478.941.136.468,00 dan Rp373.677.670.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256.660.216.934,00	178.952.229.995,00	43,42
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(221.712.730,00)	(14.676.721,00)	1.410,64
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	0,00	26.789.284,00	(100,00)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	36.117.272,00	(100,00)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38.553.466.033,00	37.432.950.053,00	2,99
523119	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	(3.225.252,00)	(236.513,00)	1.263,67
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.015.104.485,00	147.839.444.814,00	17,71
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(49.586.390,00)	(35.959.223,00)	37,90
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	(100,00)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	25.622.060,00	78.264.250,00	(67,26)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	35.002.100,00	(100,00)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	9.302.841.563,00	9.173.957.578,00	1,40
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	658.409.765,00	93.788.000,00	602,02
Jumlah		478.941.136.468,00	373.677.670.889,00	28,17

Penjelasan:

- 595113 - Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp658.409.765,00 pada 20 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
1	005.01.097691	Pengadilan Negeri Majalengka	18.002.600,00
2	005.01.098015	Pengadilan Negeri Cilacap	400.000,00
3	005.01.098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	21.500.000,00
4	005.01.099223	Pengadilan Negeri Barabai	44.626.780,00
5	005.01.307491	Pengadilan Agama Sungguminasa	9.000.000,00
6	005.01.400163	Pengadilan Negeri Kalabahi	89.775.967,00
7	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	17.236.000,00
8	005.01.400879	Pengadilan Agama Pemalang	29.117.000,00
9	005.01.400936	Pengadilan Agama Kendal	8.980.000,00
10	005.01.401055	Pengadilan Agama Kebumen	5.150.000,00
11	005.01.401307	Pengadilan Agama Bojonegoro	9.500.000,00
12	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	111.026.218,00
13	005.01.401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	12.767.900,00
14	005.01.402421	Pengadilan Agama Palangkaraya	30.000.000,00
15	005.01.402593	Pengadilan Agama Ambarawa	8.950.000,00
16	005.01.402860	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	19.700.000,00
17	005.01.531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	119.250.000,00
18	005.01.578843	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	40.882.000,00
19	005.01.614691	Pengadilan Agama Tanggamus	10.000.000,00
20	005.01.673062	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	52.545.300,00
JUMLAH			658.409.765

Merupakan transaksi belanja modal Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Pemeliharaan pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.188.448.024,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	(294.460.174,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai gedung atas: - Pengadaan Jasa Konstruksi Climbing berupa pemasangan railing besi keliling sebesar Rp31.567.704 - Pengadaan Jasa Perbaikan Instalasi Air Kotor dan Air Hujan sebesar Rp78.747.840 - Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Sarana dan Ruangannya sebesar Rp74.770.630 - Pengadaan Jasa Konstruksi Relokasi Ruang Mediasi sebesar Rp79.374.000
			(69.900.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan atas Pengadaan Jasa Perbaikan Sistem Pompa STP yang seharusnya dicatat sebagai peralatan mesin sebesar Rp69.900.000
2	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	(8.350.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lemari/rak wastafel senilai Rp8.350.000
3	098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	(49.994.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah Nilai Gedung dan Bangunan
4	098281	Pengadilan Negeri Malang	(3.981.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa CCTV
5	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(271.958.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh
6	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	(4.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin
7	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	(16.592.200,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Partisi untuk pembuatan Pembatas Ruang Perustakaan senilai Rp16.592.200,00
			(17.509.350,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan peralatan dan mesin berupa bording (16 set) senilai Rp17.509.350
8	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(3.800.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lampu tembak kantor (2 buah) senilai Rp3.800.000
			(1.200.000,00)	Koreksi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan Perolehan Peralatan dan Mesin berupa mesin kolam (1 buah) senilai Rp1.200.000
9	401582	Mahkamah Syar'iyah Aceh	(105.063.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan, dengan rincian: - Pekerjaan pemasangan pintu otomatis dengan nilai Rp70.200.000 - Renovasi gedung dan renovasi ruang disabilitas dengan nilai Rp34.863.000
10	401591	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	(49.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan berupa pembuatan ruang gedung anak
			(23.400.000,00)	Koreksi Beban Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Tanaman Indoor yang seharusnya menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakompabel (521253)
11	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(23.550.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan Bidang Kolam Ikan Taman Hijau yang seharusnya menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakompabel (521253)
			(62.562.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Vertikal Blind Blok out sebesar Rp 19.934.100, Ventilasi Blind 5034 ukuran 35,38 sebesar Rp18.928.300, dan 3 unit Partisi sebesar Rp23.700.000
12	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(17.600.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Pemasangan Gordyn sebanyak 20 buah senilai Rp17.600.000
13	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	(994.500,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk pembelian AF Gordyn senilai Rp994.500,00 seharusnya Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompabel (521252)
			(39.655.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp39.655.000,00
			(10.050.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Peralatan dan Mesin berupa CCTV
			(37.640.100,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan Backdrop Lobby
			(1.443.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa pembelian 1 (satu) unit Pompa Air Tandon Gedung
14	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(8.085.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit Tandon Atap senilai Rp8.085.000
			(850.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin - Ekstrakompabel berupa pembelian mesin chain saw
			(11.145.500,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Gordien Untuk Gedung Kantor senilai Rp11.145.500
15	663300	Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya	(24.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lampu sebesar Rp24.000.000
			(55.000,00)	Korupsi pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan realisasinya pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) pada tahun 2022 sebesar Rp55.000
			(20.059.200,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp20.059.200
16	672973	Pengadilan Negeri Kasongan	(11.549.800,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Pemindahan Peralatan dan Mesin berupa Pemindahan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp11.549.800,00
Jumlah			(1.188.448.024,00)	

2. Koreksi berkurang akun 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp431.654.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Nb.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Keterangan
1	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(1.200.000,00)	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian barang persediaan berupa tiga buah tinta printer
2	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(2.352.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya menggunakan Belanja Sewa atas sewa AC (3 buah) senilai Rp2.352.000
			(1.935.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Audio Equalizer in/out door 30 band (1 buah) senilai Rp1.935.000
3	401426	Pengadilan Agama Malang	(10.515.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya menambah nilai Peralatan dan Mesin berupa Hardisk untuk server senilai Rp8.765.000 serta SSD dan RAM untuk laptop senilai 1.750.000
4	401591	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	(7.896.000,00)	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian barang persediaan berupa toner dan cartridge printer
5	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	(330.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa pembelian Webcam Logitech
6	663157	Badan Urusan Administrasi	(189.948.750,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa set top box dan server IPTV
			(244.177.070,00)	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina berdasarkan Perjanjian No.22/BUA.7/SP/1/2022 tgl 1 Januari 2022 sebesar Rp244.177.070
7	663300	Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya	(4.909.500,00)	Merupakan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan realisasinya pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) tahun 2022 pada Dilmilti Surabaya sebesar Rp4.909.500
8	672973	Pengadilan Negeri Kasongan	20.059.200,00	Koreksi menambah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin atas kesalahan penggunaan akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemeliharaan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp20.059.200
			11.549.800,00	Koreksi menambah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin atas kesalahan penggunaan akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemindahan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp11.549.800
Jumlah			(431.654.320,00)	

*Beban***D.6. Beban Perjalanan Dinas***Perjalanan*

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

*Dinas**Rp497.057.765**.025,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp497.057.765.025,00 dan Rp366.131.582.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
524111	Beban Perjalanan Biasa	278.969.628.929,00	198.066.864.218,00	40,85
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.114.769.046,00)	(2.191.081.818,00)	(49,12)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	130.108.019.275,00	120.152.139.570,00	8,29
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(423.748.937,00)	(596.162.465,00)	(28,92)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.405.379.036,00	22.235.611.834,00	36,74
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(67.620.213,00)	(95.002.969,00)	(28,82)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	21.350.996,00	(100,00)
524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	(3.159.000,00)	(100,00)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.965.724.778,00	28.892.820.022,00	86,78
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(221.525.073,00)	(351.797.708,00)	(37,03)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.391.002.344,00	0,00	0,00
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(16.609,00)	0,00	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	45.690.541,00	0,00	0,00
Jumlah		497.057.765.025,00	366.131.582.680,00	35,76

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Perjalanan Dinas pada beberapa Satuan Kerja, yaitu Koreksi bertambah pada akun 524111 Beban Perjalanan Biasa sebesar Rp1.179.554.166,00 terdapat pada Satuan Kerja 663712 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merupakan Kurang Catat Jurnal Akrual Tahun 2022 terkait tunggakan Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2022.

Beban

Penyusutan dan Amortisasi Rp733.312.551.506,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp733.312.551.506,00 dan Rp619.706.020.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374.731.496.009,00	300.977.593.843,00	24,50
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	342.302.974.181,00	302.644.618.645,00	13,10
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.344.087.296,00	3.656.878.549,00	(8,55)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.399.372.403,00	1.311.138.215,00	6,73
591313	Beban Penyusutan Jaringan	4.873.410.143,00	5.033.187.275,00	(3,17)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	176.825.087,00	299.497.753,00	(40,96)
592115	Beban Amortisasi Software	3.392.595.231,00	3.626.993.089,00	(6,46)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	1.872.274.899,00	1.060.849.503,00	76,49
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.562.500,00	3.903.743,00	(34,36)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.216.953.757,00	1.091.360.153,00	11,51
Jumlah		733.312.551.506,00	619.706.020.768,00	18,33

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Penyusutan dan Amortisasi pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

- Koreksi bertambah akun 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp178.532.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5.642.856,00	Perolehan Lainnya Sumersible Pump
			4.342.858,00	Perolehan Lainnya Sumersible Pump
2	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga	(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
3	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	1.670.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Kayu
4	098281	Pengadilan Negeri Malang	796.200,00	Perolehan Lainnya CCTV - Camera Control Television System
5	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	800.000,00	Perolehan Lainnya Treng Air/Tandon Air
6	098629	Pengadilan Negeri Medan	(17.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Lap Top
7	400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	3.997.000,00	Saldo Awal Meja Komputer
			1.092.000,00	Saldo Awal Microphone
			(310.800,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Sofa
			728.000,00	Saldo Awal Microphone
			1.049.500,00	Saldo Awal Audio Converter
			949.200,00	Saldo Awal Mixer Sound Sistem
			(194.250,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Alat Kantor Lainnya
			4.050.200,00	Saldo Awal Loudspeaker
			1.113.000,00	Saldo Awal A.C. Split
			1.144.500,00	Saldo Awal Microphone
310.800,00	Perolehan Lainnya Sofa			
68.498.000,00	Saldo Awal Cable			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

8	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	237.032,00	Perolehan Lainnya Partisi
			1.422.186,00	Perolehan Lainnya Partisi
9	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	900.000,00	Perolehan Lainnya Kursi Kayu
			760.000,00	Perolehan Lainnya Lampu
			387.000,00	Perolehan Lainnya Equalizer
			240.000,00	Perolehan Lainnya Mesin Pompa air PMK
10	401426	Pengadilan Agama Malang	437.500,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Note Book
11	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	476.686,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			2.370.000,00	Perolehan Lainnya Partisi
			246.100,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			173.340,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			1.993.410,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
12	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	996.705,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			2.100.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
13	401924	Pengadilan Negeri Penajam	453.100,00	Perolehan Lainnya Papan Visual/Papan Nama
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			14.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			14.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
14	477368	Pengadilan Negeri Tebo	10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
15	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	1.617.000,00	Perolehan Lainnya Treng Air/Tandon Air
			380.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Display
			2.010.000,00	Perolehan Lainnya CCTV - Camera Control Television System
			103.071,00	Perolehan Lainnya Pompa Air
			816.000,00	Perolehan Lainnya Papan Visual/Papan Nama
16	663157	Badan Urusan Administrasi	15.109.875,00	Perolehan Lainnya TV Connector
			4.856.250,00	Perolehan Lainnya Server
17	663182	Pengadilan Militer I - 01 Di Banda Aceh	39.490.000,00	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Genset
18	663300	Pengadilan Militer Tinggi Iii Di Surabaya	700.000,00	Perolehan Lainnya Lampu
			2.800.000,00	Perolehan Lainnya Lampu-lampu Kristal
			1.300.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Kayu
19	400365	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1.187.500,00	Perolehan Lainnya Meubelair Lainnya
Jumlah			178.532.319,00	

2. Koreksi bertambah akun 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp284.949.866,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	6.134.587,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	097929	Pengadilan Negeri Wonosobo	(1,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	3.562.698,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
4	098701	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	370.815.350,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(135.127.425,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(57.087.857,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(932.955,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
5	098900	Pengadilan Negeri Muara Bungo	(24.568.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(727.640,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen
			(9.838.513,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
			573.600,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Rumah Tahanan Lainnya

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

			143.840,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
			1.265.560,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gudang Tertutup Permanen
			110.240,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya
6	099003	Pengadilan Negeri Sekayu	15.190.804,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(7.394.700,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
7	099070	Pengadilan Negeri Singkawang	5.454.546,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
8	099396	Pengadilan Negeri Luwuk	780.000,00	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
			1.680.000,00	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	099837	Pengadilan Negeri Karangasem	(2.995.334,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
10	400600	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	(7.376.114,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen
11	401582	Mahkamah Syar'iyah Aceh	2.562.512,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
12	401591	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	597.561,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
13	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe	32.746.458,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(32.909.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
14	401904	Pengadilan Negeri Suka Makmue	(1.799.060,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
15	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	40.080.977,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
16	402732	Pengadilan Agama Negara	9.316.294,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
17	417844	Pengadilan Negeri Pandeglang	359.140,00	Perolehan Tinjau Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
18	477368	Pengadilan Negeri Tebo	(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.574.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(2.922.680,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Pagur Permanen
			120.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			81.158.295,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			456.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			820.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			9.608.260,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			60.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(2.663.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(850.240,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.700.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Tempat Parkir
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(8.470.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
19	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	862.065,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
20	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	965.131,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

			(15.052,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Rumah Genset
			(301.123,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(30.548,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
21	663300	Pengadilan Militer Tinggi Iii Di Surabaya	(32.922,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
22	672969	Pengadilan Negeri Pagar Alam	9.147.480,00	Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
Jumlah			284.949.866,00	

3. Koreksi bertambah akun 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.275.350,00 terdapat pada Satuan Kerja 578839 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN.

Beban

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi

Piutang Tak

ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode.

Tertagih

Rp16.132.682,

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.132.682,00 dan (Rp1.036.637,00) dengan rincian sebagai berikut:

00

Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	(199.122,00)	52.376,00	(480,18)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19.885.272,00	(1.158.887,00)	(1.815,89)
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(3.000.000,00)	69.874,00	(4.393,44)
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(553.468,00)	0,00	0,00
Jumlah		16.132.682,00	(1.036.637,00)	(1.656,25)

Terdapat Beban Penyisihan Piutang PNPB pada Satuan Kerja 005.01.1900.099600 Pengadilan Negeri Palopo, Satuan Kerja 005.01.2200.099802 Pengadilan Negeri Negara, Satuan Kerja 005.01.2300.614727 Pengadilan Agama Giri Menang dan Satuan Kerja 005.03.097450 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas Piutang Lainnya sebesar (Rp199.122,00), seharusnya akun yang terbentuk yaitu Beban Penyisihan Piutang Lainnya, hal ini timbul akibat dari pencatatan settlement piutang pada Modul Piutang.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

- 594211 Beban Penyisihan Piutang PNPB sebesar Rp2.759,00 pada Satuan Kerja 099600 Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengakuan beban penyisihan piutang atas sewa rumah dinas (pemakaian bulan Juli s.d September 2022) yang baru dibayarkan pada Desember 2022 s.d Februari 2023 melalui potongan SPM.
- 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp22.180.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Keterangan
1	401887	Pengadilan Agama Rumbia	20.807.544,00	Jurnal Beban Penyisihan atas Piutang Lainnya dari Pengembalian Belanja Modal ke Kas Negara atas Pencairan Bank Garansi
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	3.945,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Uang Makan PNS Ke Kas Negara
3	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	134.760,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d. November 2022
4	663157	Badan Urusan Administrasi	1.220.885,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Kelebihan Bayar Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina, berdasarkan Perjanjian No.22/BUA.7/SP/1/2022 tgl 1 Januari 2022
5	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	12.914,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya
Jumlah			22.180.048,00	

Surplus/Defisit

Dari Kegiatan

Non

Operasional

(Rp6.435.298.

055,00)

D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp6.435.298.055,00) dan (Rp9.098.471.468,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.818.000,00	305.784.500,00	(93,85)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00	1.707.342.248,00	(12,39)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00	1.811.446.124,00	38,40
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	13.575.000,00	31.750.000,00	(57,24)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	66.300.000,00	(100,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	424.161.712,00	1.224.195.771,00	(65,35)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.913.067.958,00	599.733.541,00	552,47
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	778.240.450,00	543.119.259,00	43,29
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00	277.369.054,00	1,60
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	9.319.394.177,00	1.462.543.000,00	537,20
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	25.597.189.511,00	1.040.136,00	2.460.846,41
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(20.667.012.553,00)	(223.366,00)	9.252.432,86
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	(29.335.903.099,00)	(16.618.102.338,00)	76,53
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	(781.403.502,00)	(510.769.397,00)	52,99
Jumlah		(6.435.298.055,00)	(9.098.471.468,00)	(29,27)

Penjelasan:

- 491429 - Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp9.319.394.177,00 pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Keterangan
1	005.01.401055	Pengadilan Agama Kebumen	808.518.000,00	- Merupakan tanah bangunan rumah negara gol. 1 atas perolehan tanah idle berdasarkan penetapan dari KPKNL karena tidak ada ADK dari Satuan Kerja pemberi sehingga masuk ke perolehan lainnya sebesar Rp803.368.000,00 - Adanya kesalahan kode akun pada saat penginputan pengembangan melalui kdp berupa gedung dan bangunan. Yang semula memakai akun pembentukan kdp kemudian dilakukan koreksi pencatatan menjadi pengembangan melalui kdp sebesar Rp5.150.000,00
2	005.01.401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	8.510.876.177,00	Merupakan Paket Meubelair yang diperoleh dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai Pada Periode 13 adalah Rp5.536.194.599,00, dan Paket Pekerjaan Sarana Lingkungan yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai pada Periode 13 adalah Rp2.974.681.578,00 terdiri dari Jalan Khusus Lainnya Rp1.514.655.890,00, Jembatan Penyeberangan Kendaraan Rp946.789.100,00, Saluran Sekunder Pembuangan (Saluran Pembuang Pasang Surut) Rp513.236.588,00. Perlu Adanya Koreksi Kembali atas Perolehan Lainnya tersebut akibat nilai harga satuan yang termultiplikasi hasil generate Aplikasi SAKTI sehingga nilai keseluruhan Perolehan Lainnya melampaui nilai Perolehan yang diperoleh dari hasil pemecahan KDP
Jumlah			9.319.394.177,00	

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 491511 - Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp25.597.189.511,00 pada 47 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
1	005.01.097631	Pengadilan Negeri Subang	855.000,00
2	005.01.098061	Pengadilan Negeri Wates	864.695.500,00
3	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	217.002.850,00
4	005.01.098200	Pengadilan Negeri Jember	324.000.000,00
5	005.01.098303	Pengadilan Negeri Probolinggo	4.341.600,00
6	005.01.098551	Pengadilan Negeri Kutacane	5.628.510.000,00
7	005.01.099485	Pengadilan Negeri Jenepono	11.236.000.000,00
8	005.01.099710	Pengadilan Negeri Masohi	530.000,00
9	005.01.099769	Pengadilan Negeri Soasiu	2.745.000,00
10	005.01.099993	Pengadilan Negeri Maumere	1.605.000,00
11	005.01.307761	Pengadilan Agama Tual	4.865.000,00
12	005.01.400879	Pengadilan Agama Pematang	38.000,00
13	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	3.765.384.000,00
14	005.01.401880	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	63.952.000,00
15	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	99.960.000,00
16	005.01.401900	Pengadilan Tinggi Agama Padang	432.000,00
17	005.01.401949	Pengadilan Agama Prabumulih	200.000,00
18	005.01.401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	934.000,00
19	005.01.401969	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	462.164.000,00
20	005.01.401973	Pengadilan Negeri Bobong	2.260.000,00
21	005.01.402004	Pengadilan Agama Painan	2.303.520.000,00
22	005.01.402101	Pengadilan Agama Bangkinang	40.000,00
23	005.01.402267	Pengadilan Agama Baturaja	260.000,00
24	005.01.402386	Pengadilan Agama Ketapang	207.500,00
25	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandangan	66.000,00
26	005.01.402839	Pengadilan Agama Kefamenanu	750.004,00
27	005.01.402989	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	200.783.885,00
28	005.01.526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	136.740.000,00
29	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	190.000,00
30	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	975.275,00
31	005.01.663012	Pengadilan Negeri Sengeti	260.000,00
32	005.01.663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	180.000,00
33	005.01.663377	Pengadilan Militer III - 18 Di Ambon	500.000,00
34	005.03.099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	519.000,00
35	005.03.099092	Pengadilan Negeri Semarang	22.500,00
36	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	9.320.750,00
37	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	2.845.000,00
38	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	242.765.100,00
39	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkulu	180.000,00
40	005.03.099218	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	896.000,00
41	005.03.099273	Pengadilan Negeri Tarakan	3.498.000,00
42	005.04.309114	Pengadilan Agama Dompur	43.747,00
43	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	8.925.000,00
44	005.04.401294	Pengadilan Agama Gresik	1.736.000,00
45	005.04.401521	Pengadilan Agama Pacitan	100.000,00
46	005.04.401696	Mahkamah Syariah Kuala Simpang	1.139.800,00
47	005.04.690182	Pengadilan Agama Arso	252.000,00
Jumlah			25.597.189.511,00

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 593311 - Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar (Rp20.667.012.553,00) pada 42 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
1	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	(279.000,00)
2	005.01.098061	Pengadilan Negeri Wates	(864.695.500,00)
3	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	(286.593.050,00)
4	005.01.098200	Pengadilan Negeri Jember	(324.000.000,00)
5	005.01.098303	Pengadilan Negeri Probolinggo	(4.281.600,00)
6	005.01.099141	Pengadilan Negeri Muara Tewe	(600.000,00)
7	005.01.099485	Pengadilan Negeri Jeneponto	(11.236.000.000,00)
8	005.01.099837	Pengadilan Negeri Karangasem	(15.000,00)
9	005.01.307122	Pengadilan Agama Kotabaru	(7.380.230,00)
10	005.01.307300	Pengadilan Agama Luwuk	(50.000,00)
11	005.01.307761	Pengadilan Agama Tual	(4.865.000,00)
12	005.01.400879	Pengadilan Agama Pematang	(987.974,00)
13	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	(3.765.384.000,00)
14	005.01.401880	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	(59.545.000,00)
15	005.01.401900	Pengadilan Tinggi Agama Padang	(432.000,00)
16	005.01.401969	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	(462.164.000,00)
17	005.01.402004	Pengadilan Agama Painan	(2.303.520.000,00)
18	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandungan	(1.666.999,00)
19	005.01.402839	Pengadilan Agama Kefamenanu	(750.004,00)
20	005.01.402911	Pengadilan Agama Manokwari	(330.000,00)
21	005.01.402989	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	(200.783.885,00)
22	005.01.403077	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	(32.224.150,00)
23	005.01.440740	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	(50.000,00)
24	005.01.526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	(136.740.000,00)
25	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	(19.000,00)
26	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	(520.750,00)
27	005.01.663377	Pengadilan Militer Iii - 18 Di Ambon	(750.000,00)
28	005.01.670191	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	(4.552.000,00)
29	005.03.099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	(1.814.404,00)
30	005.03.099092	Pengadilan Negeri Semarang	(22.500,00)
31	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	(939.106.460,00)
32	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	(1.950.000,00)
33	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	(8.302.500,00)
34	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	(120.000,00)
35	005.03.099218	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	(896.000,00)
36	005.03.099273	Pengadilan Negeri Tarakan	(3.498.000,00)
37	005.04.309114	Pengadilan Agama Dompu	(43.747,00)
38	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	(8.925.000,00)
39	005.04.401294	Pengadilan Agama Gresik	(1.736.000,00)
40	005.04.401696	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	(1.124.800,00)
41	005.04.402002	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	(42.000,00)
42	005.04.690182	Pengadilan Agama Arso	(252.000,00)
Jumlah			(20.667.012.553,00)

- 596111 - Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar (Rp29.335.903.099,00) pada 61 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)*(Dalam Rupiah)*

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Kerugian Pelepasan Aset
1	005.01.097467	Pengadilan Tinggi Jakarta	(4.474.000,00)
2	005.01.097560	Pengadilan Negeri Serang	(4.687.500,00)
3	005.01.097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	(12.554.200,00)
4	005.01.097734	Pengadilan Negeri Tegal	(1.610.400,00)
5	005.01.097865	Pengadilan Negeri Rembang	(76.500,00)
6	005.01.098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(5.281.913.424,00)
7	005.01.098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	(1.441.682.081,00)
8	005.01.098586	Pengadilan Negeri Sinabang	(431.322.870,00)
9	005.01.098633	Pengadilan Negeri Binjai	(70.848.400,00)
10	005.01.098832	Pengadilan Negeri Payakumbuh	(19.236.362,00)
11	005.01.098895	Pengadilan Negeri Jambi	(490.000,00)
12	005.01.099176	Pengadilan Negeri Sampit	(30.575.000,00)
13	005.01.099202	Pengadilan Negeri Kandangan	(12.494.846,00)
14	005.01.099230	Pengadilan Negeri Martapura	(71.000,00)
15	005.01.099244	Pengadilan Negeri Tanjung	(812.500,00)
16	005.01.099265	Pengadilan Negeri Rantau	(2.120.051.967,00)
17	005.01.099532	Pengadilan Negeri Watampone	(10.500.000,00)
18	005.01.099581	Pengadilan Negeri Bulukumba	(5.666.669,00)
19	005.01.099802	Pengadilan Negeri Negara	(555.060,00)
20	005.01.099862	Pengadilan Negeri Mataram	(584.331.000,00)
21	005.01.099972	Pengadilan Negeri Waikabubak	(82.501.454,00)
22	005.01.307452	Pengadilan Agama Ujung Pandang	(990.200,00)
23	005.01.307509	Pengadilan Agama Watampone	(227.631.418,00)
24	005.01.308014	Pengadilan Agama Manna	(3.811.020,00)
25	005.01.400245	Pengadilan Tinggi Kupang	(5.370.275,00)
26	005.01.400260	Pengadilan Negeri Marabahan	(314.582.220,00)
27	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	(650.000,00)
28	005.01.400415	Pengadilan Negeri Janthoi	(13.540.950,00)
29	005.01.400503	Pengadilan Tinggi Jambi	(2.875.000,00)
30	005.01.400512	Pengadilan Tinggi Bengkulu	(67.509.350,00)
31	005.01.400534	Pengadilan Tinggi Palu	(261.129.280,00)
32	005.01.400565	Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi	(5.642.394.497,00)
33	005.01.400678	Pengadilan Agama Sumedang	(182.684.000,00)
34	005.01.400823	Pengadilan Agama Tangerang	(10.000.000,00)
35	005.01.400848	Pengadilan Agama Karawang	(408.000,00)
36	005.01.400891	Pengadilan Agama Brebes	(85.389.000,00)
37	005.01.400942	Pengadilan Agama Demak	(1.633.338.462,00)
38	005.01.400967	Pengadilan Agama Pati	(110.055.419,00)
39	005.01.401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	(2.230.255,00)
40	005.01.401915	Pengadilan Negeri Cikarang	(4.931.000,00)

41	005.01.401966	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	(6.256.120,00)
42	005.01.402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	(308.908.888,00)
43	005.01.402412	Pengadilan Agama Putussibau	(50.000,00)
44	005.01.402474	Pengadilan Agama Sampit	(5.573.301.790,00)
45	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandangan	(1.141.000,00)
46	005.01.402690	Pengadilan Agama Limboto	(1.851.000,00)
47	005.01.477368	Pengadilan Negeri Tebo	(3.159.272,00)
48	005.01.526711	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraujung Pandang	(100.830.000,00)
49	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	(24.822.000,00)
50	005.01.531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	(7.600.000,00)
51	005.01.578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	(3.522.535.072,00)
52	005.01.613519	Pengadilan Negeri Kab.Bogor Di Cibinong, Jawa Barat	(372.128.420,00)
53	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	(403.584.261,00)
54	005.01.663292	Pengadilan Militer II - 11 Di Yogyakarta	(2.227.500,00)
55	005.01.663403	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	(1.402.148,00)
56	005.01.673062	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	(1.070.000,00)
57	005.01.682185	Pengadilan Agama Marisa	(6.410.000,00)
58	005.01.682207	Pengadilan Agama Andoolo	(400.000,00)
59	005.03.097450	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	(14.756.503,00)
60	005.04.401370	Pengadilan Agama Banyuwangi	(1.806.296,00)
61	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	(295.687.250,00)
Jumlah			(29.335.903.099,00)

Merupakan transaksi penghapusan Persediaan dan Aset yang masih menyisakan nilai buku.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Kerugian Pelepasan Aset sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 596121 - Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar (Rp781.403.502,00) pada 13 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Persediaan Rusak/ Usang	Keterangan
1	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	(718.282.620,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, SK SEKMA No. 2027
2	005.04.309054	Pengadilan Agama Tanah Grogot	(2.734.443,00)	Merupakan transaksi usang persediaan dalam rangka usulan pemusnahan barang persediaan yang sudah usang/rusak, dan sudah mendapatkan SK SEKMA tentang Pemusnahan No. 1454
3	005.04.400751	Pengadilan Agama Cirebon	(2.186.921,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, Peretujuan SEKMA No. 2889
4	005.04.40073	Pengadilan Agama Majalengka	(11.257.244,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak
5	005.04.400849	Pengadilan Agama Karawang	(9.730.072,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
6	005.04.401202	Pengadilan Agama Sleman	(3.155.301,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, SK SEKMA No. 1561
7	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	(4.744.849,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dan terdapat perbedaan nilai karena adanya perbedaan harga pada persediaan tapi sama dalam kuantitas
8	005.04.401339	Pengadilan Agama Jember	(9.522.923,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
9	005.04.401382	Pengadilan Agama Tulungagung	(8.391.793,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
10	005.04.402082	Pengadilan Agama Rengat	(4.830.144,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
11	005.04.402102	Pengadilan Agama Bangkinang	(1.745.100,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
12	005.04.402623	Pengadilan Agama Dumai	(3.853.256,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
13	005.04.690140	Pengadilan Agama Batu Licin	(968.836,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
Jumlah			(781.403.502,00)	

Terdapat koreksi *audited* atas Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp277.285.705,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Keterangan
1	097929	Pengadilan Negeri Wonosobo	184.517.708,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
2	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga	540.000,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
3	401904	Pengadilan Negeri Suka Makmue	89.952.997,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
4	401996	Pengadilan Agama Lolak	2.275.000,00	Merupakan kesalahan kode Satuan Kerja dan kode akun atas penyetoran PPN POSBAKUM Tahun 2021 yang seharusnya menggunakan kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211 (Pendapatan PPN Dalam Negeri), Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211
Jumlah			277.285.705,00	

2. Koreksi bertambah akun 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp128.898.547,00 terdapat pada Satuan Kerja 663157 Badan Urusan Administrasi merupakan kesalahan penyetoran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode satker inaktif.

*Pos-pos Luar
Biasa Rp0,00*

D.10. Pos-Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak terdapat Pos-Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal**Rp29.529.218.827.065,00***E.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.529.218.827.065,00 dan Rp28.772.957.024.392,00.

*Defisit LO**(Rp10.357.980.424.592,00)***E.2. Surplus/Defisit-LO**

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa.

Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp10.357.980.424.592,00) dan (Rp9.460.173.032.692,00).

*Dampak**Kumulatif**Perubahan**Kebijakan**Akuntansi Rp0,00***E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai**Aset Rp0,00***E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai**Persediaan**Rp737.584.260,00***E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp737.584.260,00 dan Rp36.134.712,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi Nilai Persediaan
Barang Konsumsi	737.584.260,00
Jumlah	737.584.260,00

Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp737.584.260,00 terdapat pada 15 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Wilayah	KODE	SATKER	31 Desember 2022	Penjelasan
1	Aceh	005.01.098551	Pengadilan Negeri Kutacane	40.000,00	Koreksi nilai atas persediaan dikarenakan adanya 11951971.Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Cantrig Cannon Pixma MG2570S Warna Hitam senilai -40.000
2	Banten	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	278.500,00	Terdapat akun 391113 Koreksi Nilai Persediaan dikarenakan adanya penginputan saldo awal persediaan. Dikarenakan operator persediaan menginput saldo akhir persediaan di tahun lalu dan telah dilakukan koreksi nilai persediaan
3	Bengkulu	005.03.400513	Pengadilan Tinggi Bengkulu	433.000,00	Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Catridge hitam G2000
4	Jawa Timur	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	(895.000,00)	Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Keluar Label
5	Kepulauan Riau	005.01.614670	Pengadilan Agama Natuna	(56.000,00)	Koreksi Nilai Kurang Map Gobi dikarenakan nilai beli berbeda (barang sudah habis pakai)
6	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	235.950,00	Koreksi Kuantitas Tambah atas Reklasifikasi Masuk Lem Povinal - 11.950, Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Lem Povinal -1.375, Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk PORSTEK -201.000, Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar isi Hekter HD 10 -3.625, Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Masuk So Klin Lantai 82.500 dan Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar Tissue roll -100.500.
7	Papua	005.01.402876	Pengadilan Agama Jayapura	24.500,00	Koreksi Nilai Tambah karena perbedaan nilai atas Reklasifikasi Keluar Pelubang kertas kecil sebesar 8.500 dan Reklasifikasi Masuk PELUBANG KERTAS BESAR sebesar 33.000
8	Riau	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	(60.000,00)	Koreksi Kuantitas Kurang atas Reklasifikasi Masuk Agenda Surat Masuk Perdata 120.000 dan Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar Agenda Surat Keluar Perdata -60.000.
9	Sulawesi Tenggara	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	10.000,00	Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Hasil Migrasi F4
10	Sumatera Selatan	005.01.098970	Pengadilan Negeri Lubuk Lingau	(29.860.000,00)	koreksi nilai atas persediaan senilai 29.860.000 (merupakan nilai gedung dan bangunan untuk pengadaan sarana disabilitas di input di menu koreksi nilai bertambah, di karenakan salah input detail barang pada modul komitmen sehingga menghasilkan nilai persediaan)
11	Sumatera Selatan	005.01.402236	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	(50.000,00)	koreksi nilai atas persediaan karena adanya salah pencatatan atas pembelian covid sarung tangan sebanyak 10 buah seharga 50.000 semestinya pencatatan barang konsumsi.
12	Sumatera Utara	005.01.098675	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2.570.000,00	satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Dan telah dilakukan perbaikan dengan cara opname fisik semester I untuk menyesuaikan dengan sisa kuantitas antara fisik barang persediaan dengan aplikasi SAKTI modul persediaan.
13	Sumatera Utara	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	(234.462.600,00)	Koreksi nilai kurang atas perbedaan nilai reklas keluar dan reklas masuk
14	Yogyakarta	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	69.590.200,00	Koreksi nilai atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
15	Yogyakarta	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	929.785.710,00	Merupakan koreksi nilai atas perbedaan nilai saat rekas keluar dan reklas masuk
JUMLAH				737.584.260,00	

Koreksi Nilai Persediaan merupakan nilai koreksi tambah kurang nilai Persediaan yang berasal dari penginputan dan pengiriman Modul Persediaan dan adanya penginputan saldo awal pada menu persediaan masuk.

E.4.3. Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi (Rp134.596.433,00)

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan transaksi pencatatan/penghapusan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain/sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp134.596.433,00) dan (Rp32.664.518.258,00).

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar (Rp134.596.433,00) terdapat pada 9 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Kode Wilayah	KODE	Nama Satker	Jumlah	Penjelasan
1	Jawa Tengah	005.01.097823	Pengadilan Negeri Salatiga	2.800.000,00	Terdapat 26659052.Reklasifikasi ke Aset Jam Dinding Extra, 26659054.Reklasifikasi ke Aset Hardisk Extra, 26659051.Reklasifikasi ke Aset Jam Mekanis Extra dan 26659053.Reklasifikasi ke Aset Kipas Angin Extra
2	Jawa Timur	005.01.098104	Pengadilan Tinggi Surabaya	21.000.000,00	Satuan kerja melakukan Reklas Keluar Peralatan Mesin berupa Genset senilai 21.000.000 kemudian dilakukan Reklas Masuk berupa Rumah Genset dengan nilai Ekstrakomtabel Gedung Bangunan senilai Rp21.000.000
3	Sumatera Selatan	005.01.098942	Pengadilan Negeri Palembang	4.870.000,00	Terdapat reklas keluar intrakomtabel berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sebesar 99.347.000 dan Tanah untuk Taman Lainnya sebesar 4.600.000 kemudian dilakukan reklas masuk ekstrakomtabel ke Pagar Permanen sebanyak 8 buah sebesar 103.947.000; Terdapat reklas keluar persediaan ke aset tetap berupa Administrasi Belanja Modal Renovasi Pagar Rumah Dinas yang tercatat sebagai persediaan, sudah dilakukan reklas masuk ke aset tetap sehingga membentuk 2 NUP baru pagar permanen (12813) sebesar 5.648.000
4	Maluku Utara	005.01.099731	Pengadilan Negeri Ternate	109.595.000,00	1. Merupakan Reklasifikasi Keluar Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sebesar 99,347,000; 2. Reklasifikasi Keluar Tanah Untuk Taman Lainnya 4,600,000; 3. Reklasifikasi dari persediaan ke aset berupa bahan bangunan dan konstruksi lainnya 4,900; Flash disk 85,000; kertas HVS 195,000; binder clips 200 28,000; tinta print epson hitam 440,000
5	Nusa Tenggara Timur	005.01.400007	Pengadilan Negeri Lantuka	(1.687.500,00)	Kesalahan Penginputan Kodefikasi Barang Laboratorium Pertanian Sehingga di Reklas keluar ke Persediaan kemudian di Reklas Masuk sebagai Personal Komputer di Aset. Nilai tersebut merupakan nilai penyusutan yang tidak ikut saat dilakukan reklas masuk berupa Personal Komputer sebanyak 2 kail.
6	Jawa Timur	005.01.401344	Pengadilan Agama Bondowoso	702.000,00	Satuan kerja melakukan Reklas Keluar Barang Persediaan berupa thermogun senilai 720.000 kemudian dilakukan Reklas Masuk berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai Ekstrakomtabel senilai 720.000
7	Jawa Timur	005.01.401381	Pengadilan Agama Tulungagung	(6.666.667,00)	Terdapat 391151 Koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya sebesar (6.666.667,00) adalah akumulasi penyusutan aset tetap atas kesalahan reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan.
8	Jawa Timur	005.01.401463	Pengadilan Agama Kraksaan	1.301.000,00	Koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya sebesar Rp1.3001.000,00 adalah reklas dari persediaan ke aset tetap dengan nilai ekstrakomtable yaitu 2 unit APAR @600.000,00 dan 1 unit standmic @1.001.000,00
9	Sulawesi Tengah	005.01.578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	2.682.600,00	Koreksi kesalahan pencatatan yang seharusnya aset tetap tetapi dicatat sebagai persediaan
TOTAL				134.596.433	

Merupakan nilai yang timbul akibat adanya transaksi reklas masuk dan reklas keluar baik Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya kiriman dari Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00*

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp155.857.561,00).

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp98.103.442.030
,00*

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp98.103.442.030,00 dan (Rp209.195.042.665,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.531.352.646,00	(204.808.397.833,00)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	572.089.384,00	(4.386.644.832,00)
JUMLAH		98.103.442.030,00	(209.195.042.665,00)

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

AKUN	URAIAN	KOREKSI		JUMLAH
		TAMBAH	KURANG	
131111	Tanah	211.143.109.707,00	(212.233.198.654,00)	(1.090.088.947,00)
132111	Peralatan dan Mesin	29.021.673.555,00	(251.234.733.698,00)	(222.213.060.143,00)
133111	Gedung dan Bangunan	246.611.717.985,00	(296.353.940.256,00)	(49.742.222.271,00)
134111	Jalan dan Jembatan	739.613.500,00	(404.983.675,00)	334.629.825,00
134112	Irigasi	90.988.000,00	(207.185.500,00)	(116.197.500,00)
134113	Jaringan	218.037.450,00	(1.644.024.132,00)	(1.425.986.682,00)
135111	Aset Tetap Renovasi	0,00	(20.065.190.986,00)	(20.065.190.986,00)
135121	Aset Tetap Lainnya	11.401.750,00	(805.102.412,00)	(793.700.662,00)
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	160.743.656.584,00	(218.806.583.170,00)	(58.062.926.586,00)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.140.516.574,00)	44.059.207.507,00	27.918.690.933,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59.886.014.246,00)	17.847.554.028,00	(42.038.460.218,00)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(737.338.150,00)	267.973.570,00	(469.364.580,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(40.944.600,00)	37.357.935,00	(3.586.665,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(125.693.334,00)	107.646.896,00	(18.046.438,00)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		1.181.754.006,00	1.181.754.006,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	72.430.198.704,00	(15.563.800.395,00)	56.866.398.309,00
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		(154.615.000,00)	(154.615.000,00)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	(53.008.660.586,00)	11.346.423.287,00	(41.662.237.299,00)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	(29.700.000,00)	154.215.000,00	124.515.000,00
	Koreksi Jurnal Manual GLP	448.961.048.550,00	0,00	448.961.048.550,00
	JUMLAH	1.040.002.578.295,00	(942.471.225.649,00)	97.531.352.646,00

Rincian penjelasan jurnal manual per Satuan Kerja atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar RP448.961.048.550,00 sebagaimana terlampir pada data Pendukung Laporan Keuangan.

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Kode Perkiraan	Jenis Aset Lainnya	Koreksi Nett		Jumlah
		Nett Tambah	Nett Kurang	
162151	Software	929.454.775,00	(1.133.876.044,00)	(204.421.269,00)
162161	Lisensi	75.302.000,00	(38.500.000,00)	36.802.000,00
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.101.743.885,00	0,00	1.101.743.885,00
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(326.817.211,00)	1.070.780.405,00	743.963.194,00
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(64.006.700,00)	34.375.000,00	(29.631.700,00)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	(1.067.918.885,00)	0,00	(1.067.918.885,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.552.159,00	0,00	1.552.159,00
	Jumlah	647.757.864,00	(77.220.639,00)	572.089.384,00

Jurnal koreksi jurnal manual pada modul GLP atas akun 391118 pada Satuan Kerja Badan Litbang Diklat Kumdil (005.06.610378) dikarenakan adanya koreksi

pengurangan aset tetap lainnya berupa *software* atas pengembalian belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) tahun 2021 sebesar Rp1.552.159,00.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Koreksi Lain-lain
(Rp271.426.058,00).

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir ppada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp271.426.058,00) dan Rp289.778.732,00 Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Nilai Koreksi Lain-lain

Uraian	Jumlah Koreksi
Koreksi Kewajiban	(6.189.730,00)
Koreksi Beban	(265.236.328,00)
Jumlah	(271.426.058,00)

Rincian Nilai Koreksi Per Akun

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(909.810,00)
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	9.261.680,00
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	(14.541.600,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.659.600,00
511111	Beban Gaji Pokok PNS	(12.153.947,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	(490,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	240.820,00
511122	Beban Tunj. Anaki PNS	60.964,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	(540.000,00)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	(1.400.000,00)
511129	Beban Uang Makan PNS	2.791.000,00
521111	Beban Keperluan Perkantoran	(20.321.500,00)
522111	Beban Langganan Listrik	(232.171.766,00)
522112	Beban Langganan Telepon	5.293.976,00
522113	Beban Langganan Air	969.515,00
522141	Belanja Sewa	(29.700.000,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(55.000,00)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(4.909.500,00)
JUMLAH		(271.426.058,00)

Koreksi Lain-lain terdapat pada 34 Satuan Kerja, rincian penjelasan per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Koreksi Lain-lain	Keterangan
1	005.01.097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	973.635,00	Koreksi kurang catat beban langganan air
2	005.01.400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	432.520,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon
3	005.01.097709	Pengadilan Negeri Kuningan	13.000.000,00	Koreksi kurang catat beban keperluan perkantoran (internet) bulan desember 2021
8	005.01.401180	Pengadilan Agama Surakarta	(119.565,00)	koreksi lebih catat beban langganan telepon
9	005.01.401381	Pengadilan Agama Tulungagung	(9.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik sebesar Rp.3.000 dan beban langganan telepon sebesar Rp.6.000
10	005.01.401390	Pengadilan Agama Trenggalek	(2.750,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
11	005.01.098146	Pengadilan Negeri Lamongan	976.262,00	Koreksi kurang catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.976.240, beban pembulatan gaji PNS sebesar Rp.22 yang tidak direalisasikan karena pegawai yang bersangkutan pindah sehingga tidak dimintakan SPM
12	005.01.098150	Pengadilan Negeri Gresik	(18.641.637,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik bulan desember 2021 sebesar Rp.18.538.278 dan beban langganan air sebesar Rp.103.359
13	005.01.403046	Pengadilan Agama Kediri	(500,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
14	005.01.401441	Pengadilan Agama Bangli	(3.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
15	005.01.098281	Pengadilan Negeri Malang	12.118.000,00	Koreksi kurang catat pendapatan sewa payment point BTN yang disetorkan pada tahun 2023 (lewat tahun) sebesar Rp.5.182.000, pendapatan sewa kantin yang disetorkan pada tahun 2023 (lewat tahun) sebesar Rp.6.936.000
16	005.01.663300	Pengadilan Miltter Tinggi III Di Surabaya	(5.836.000,00)	Koreksi lebih catat pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan beban keperluan perkantoran sebesar Rp871.500,00 pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp55.000,00 pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan akun beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp4.909.500,00
17	005.01.098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	3.809.005,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon
18	005.01.098530	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	2.791.000,00	Koreksi kurang catat beban uang makan
19	005.01.400395	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	1.572.860,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon karena ada kesalahan jurnal akrual pada tahun 2021, seharusnya pada tahun 2021 dilakukan jurnal koreksi beban karena jurnal akrual pada tahun 2020 senilai 1.572.860 dengan akun 522112 tetapi pada tahun 2021 direalisasikan dengan akun 521111
20	005.01.400461	Pengadilan Negeri Muaro	(540,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
21	005.01.098963	Pengadilan Negeri Baturaja	(3.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
22	005.01.400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(29.700.000,00)	Koreksi lebih catat beban sewa rumah Hakim tahun 2021 yang dibayarkan tahun 2022
23	005.01.099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	632.778,00	Koreksi kurang catat beban langganan listrik
24	005.01.401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(13.672.387,00)	Koreksi lebih catat beban gaji pokok PNS
25	005.01.477270	Pengadilan Negeri Nunukan	1.622.676,00	Koreksi kurang catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.1.423.400, beban tunjangan suami/istri sebesar Rp.142.340, dan beban tunjangan anak sebesar Rp.56.936
26	005.01.307729	Pengadilan Agama Bau-Bau	(6.173.920,00)	Jurnal eliminasi perbaikan saldo akrual akun beban barang yang masih harus dibayar
27	005.01.672931	Pengadilan Negeri Saumlaki	(22.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
28	005.01.401898	Pengadilan Agama Namlea	80,00	Koreksi kurang catat beban langganan air
29	005.01.663377	Pengadilan Miltter III - 18 Di Ambon	(23.715.825,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik sebesar Rp.2.315.520, dan beban keperluan perkantoran (internet) sebesar Rp.21.450.000, serta koreksi kurang catat beban langganan telepon sebesar Rp.49.695
30	005.01.400110	Pengadilan Negeri Bengkulu	(108.186,00)	Koreksi lebih catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.94.900, beban tunj. suami/istri PNS sebesar Rp.9.490, beban tunj. anak PNS sebesar Rp.3.796
31	005.01.440712	Pengadilan Tinggi Agama Banten	(26.245.225,00)	Koreksi lebih catat beban keperluan perkantoran (internet) sebesar Rp.11.181.230 dan beban langganan listrik sebesar Rp.15.063.995
32	005.01.097598	Pengadilan Negeri Tangerang	(56.698.680,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
33	005.01.400797	Pengadilan Agama Serang	(140.021.748,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik karena adanya kesalahan input/kelebihan 0 (nol), dicatat Rp.155.579.720, seharusnya Rp.15.557.972
34	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15.435.600,00	Koreksi kurang catat beban perjalanan biasa terkait tunggakan biaya mutasi tenaga teknis tahun 2020
Jumlah			(271.426.058,00)	

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp11.256.398.663 .322,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.256.012.869.720,00 dan Rp10.457.812.625.283,00 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	11.274.640.256.469,00	10.500.657.047.526,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(105.590.154.119,00)	(96.521.922.988,00)
313211	Transfer Keluar	(609.346.606.825,00)	(105.992.167.972,00)
313221	Transfer Masuk	607.164.620.871,00	83.895.895.509,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	70.284.339.793,00	61.711.086.461,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(1.989.293,00)	(111.785.000,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	18.862.402.824,00	14.174.471.747,00
JUMLAH		11.256.012.869.720,00	10.457.812.625.283,00

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*Diterima dari
Entitas
Lain/Ditagihkan
ke Entitas Lain*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja Mahkamah Agung yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar (Rp105.590.154.119,00) sedangkan DDEL sebesar Rp11.274.640.256.469,00.

Terdapat koreksi tambah akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) pada Pengadllan Negeri Mataram (005.01.099862) atas koreksi kesalahan pembentukan jurnal otomatis atas belanja Gaji Hakim AdHoc pada saat pencatatan SPM Nomor 00107T sebesar Rp140.775.000,00

Terdapat koreksi *Audited* akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) pada 2 satuan kerja yaitu:

1. Badan Urusan Administrasi (005.01.663157) terdapat koreksi tambah atas kesalahan penyeteroran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode satker inaktif sebesar Rp128.898.547,00
2. Pengadilan Agama Lolak (005.04.401996) terdapat koreksi kurang atas ralat PNBPN berupa akun 425913 ke 411211.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer Masuk/
Transfer Keluar*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp609.346.606.825,00) dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp607.164.620.871,00, terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp607.164.620.871,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Barang Konsumsi	9.049.003.335,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	224.213.565,00
3	Tanah	217.431.521.000,00
4	Peralatan dan Mesin	309.660.079.408,00
5	Gedung dan Bangunan	83.209.824.250,00
6	Aset Tetap Lainnya	198.924.000,00
7	Aset Tetap Renovasi	356.475.247,00
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.875.048.492,00)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(762.311.428,00)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(23.765.016,00)
11	Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	(6.548.162,00)
12	Belanja Persediaan konsumsi	82.442.728,00
13	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.130.436,00
14	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(386.320.000,00)
Jumlah		607.164.620.871,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp609.346.606.825,00) terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Barang Konsumsi	(9.263.119.533,00)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	(224.535.565,00)
3	Tanah	(217.076.534.000,00)
4	Peralatan dan Mesin	(309.660.079.408,00)
5	Gedung dan Bangunan	(77.196.015.996,00)
6	Aset Tetap Lainnya	(198.924.000,00)
7	Aset Tetap Renovasi	(8.696.931.454,00)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.875.048.492,00
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	962.071.443,00
10	Belanja Persediaan konsumsi	132.413.196,00
Jumlah		(609.346.606.825,00)

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas selisih transfer keluar dan transfer masuk sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada Wilayah yang menjadi sampling dan data atas transaksi pada aplikasi SAKTI, ditemukan dokumen sumber terkait proses Transfer Keluar dan Transfer masuk yang dilakukan yang menunjukkan semua pengiriman dan penerimaan dilakukan pada tahun 2023, melewati periode Pelaporan Keuangan dan BMN. Oleh karena itu kondisi yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI bahwa secara prosedur yang berlaku sesuai ketentuan, pencatatan BMN bahwa yang terjadi pada Mahkamah Agung RI tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena Mahkamah Agung RI melakukan proses Transfer Keluar sebelum asetnya dikirim ke satker tujuan dan untuk Transfer masuk oleh staker penerima dilakukan sebelum asetnya secara fisik diterima dan pastikan dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi.

Temuan tersebut secara detail sebagai berikut:

Nama barang	Jumlah satker	Jumlah Barang	Nilai barang
Scanner	909	1.236	24.534.600.000
Server	127	127	10.756.900.000
laptop	4	28	419.720.000
Total			35.711.220.000

Total nilai aset tersebut senilai Rp35.711.220.000,00 sangat material dan melahib batas toleransi untuk penentuan Opini atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nilai temuan tersebut sudah dilakukan koreksi pada aplikasi SAKTI.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah Langsung dan

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengembalian pengesahan

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp70.284.339.793,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp1.989.293,00).

Pengesahan Hibah Langsung (391131) sebesar Rp70.284.339.793,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 pada 35 Satuan Kerja yang telah selesai proses pengesahan hibah dan telah tersaji di Neraca sebagai Aset dan di LPE sebagai Ekuitas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun dalam pencatatan dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI, total hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) terdapat selisih antara total angka pada dokumen pengesahan hibah dengan aplikasi SAKTI senilai Rp206.429.393,00. Hal ini disebabkan karena ada angka debit dari PTUN Palembang yang berasal dari pengesahan pengembalian sisa hibah uang (SP3HL) yang seharusnya diinput pada kas lainnya, namun satker tersebut terpaksa menginput pada akun hibah sudah disahkan TAYL karena satker terkendala dalam melakukan penginputan pada aplikasi SAKTInya, sehingga ketika dijurnal muncul angka debit pada akun hibah sudah disahkan TAYL yang menyebabkan total angka hibah sudah disahkan TAYL berkurang.

Rincian pengesahan Hibah untuk per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	099010	2Z43A93A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	5.000.000,00
2	098963	2LLG1QGA	PN BATURAJA	BARANG	DN	46.500.000,00
3	099780	29SC2YPA	PN DENPASAR	BARANG	DN	19.690.000,00
4	099780	2234U9CA	PN DENPASAR	BARANG	DN	5.070.000,00
5	099780	23XRHVCA	PN DENPASAR	BARANG	DN	12.050.000,00
6	099780	26S1R88A	PN DENPASAR	BARANG	DN	12.050.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

7	099780	2H7B93JA	PN DENPASAR	BARANG	DN	64.050.000,00
8	662972	2DKK6DYA	PN BONTANG	BARANG	DN	277.503.459,00
9	400936	2ATRJ4LA	PA KENDAL	BARANG	DN	11.999.000,00
10	477380	2DC38Y7A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
11	477380	2D2D2HFA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
12	477380	2HMB554A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
13	477380	2ET7772A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
14	477380	2S6BLRSA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
15	477380	23J1PB8A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
16	099574	2GWF2ZJA	PN SINJAI	BARANG	DN	10.654.000,00
17	099574	2ZEWTQHA	PN SINJAI	BARANG	DN	2.375.150,00
18	307555	29USX7AA	PA SINJAI	BARANG	DN	21.500.000,00
19	099003	2PQG872A	PN SEKAYU	BARANG	DN	1.000.000,00
20	099450	2C6MQ7AA	PN BARRU	BARANG	DN	196.698.000,00
21	097780	2S1TTZEA	PN PEMALANG	BARANG	DN	34.000.000,00
22	401390	23A8EASA	PA TRENGGALEK	BARANG	DN	520.075.105,00
23	097624	2FBG4TYA	PN KARAWANG	BARANG	DN	191.725.000,00
24	663403	2DXS24ZA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	3.000.000,00
25	098061	21XG95EA	PN WATES	BARANG	DN	45.500.000,00
26	099003	2PWED99A	PN SEKAYU	BARANG	DN	4.000.000,00
27	401055	2N8R6P1A	PA KEBUMEN	BARANG	DN	10.000.000,00
28	400421	23GB5RYA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	32.750.000,00
29	400741	2Q8WQF6A	PA CIANJUR	BARANG	DN	175.000.000,00
30	099926	28S2L76A	PN KUPANG	BARANG	DN	5.000.000,00
31	099926	2SJUVQXA	PN KUPANG	BARANG	DN	5.000.000,00
32	098675	2T3AC8QA	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	118.891.650,00
33	663398	2N7XULWA	PT BANTEN	BARANG	DN	1.800.000,00
34	663398	2LLGV4LA	PT BANTEN	BARANG	DN	5.500.000,00
35	663398	23KVZ9VA	PT BANTEN	BARANG	DN	4.350.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

36	663398	234V9MEA	PT BANTEN	BARANG	DN	2.300.000,00
37	099162	2D81N5WA	PN BUNTOK	BARANG	DN	9.696.000,00
38	402191	25GXSJEA	PA MUARA BUNGO	BARANG	DN	138.000.000,00
39	099162	2LLWAGXA	PN BUNTOK	BARANG	DN	11.663.000,00
40	400772	2TEAZ86A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	2.138.000,00
41	400772	2Q2NV62A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	2.000.000,00
42	400772	2ZPRPNRA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	4.950.000,00
43	400772	2KMG37KA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	3.250.000,00
44	400772	2PK54JNA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	1.750.000,00
45	401915	2EUPPH2A	PN CIKARANG	BARANG	DN	1.603.619.000,00
46	401957	2TKNZQPA	PA SOREANG	BARANG	DN	72.348.600,00
47	099045	2H4RRTJA	PN METRO	BARANG	DN	199.743.000,00
48	097872	2R8NMWKA	PN BATANG	BARANG	DN	62.000.000,00
49	097577	251JJG4A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	179.602.500,00
50	401307	2C55Q4HA	PA BOJONEGORO	BARANG	DN	825.839.780,00
51	098544	2YATGQ5A	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	2.000.000,00
52	097577	2EAYNF9A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	7.650.000,00
53	098544	2HMQJNCA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	2.200.000,00
54	099162	27TK8KDA	PN BUNTOK	BARANG	DN	9.000.000,00
55	400678	265ZUGTA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	132.700.000,00
56	099176	2BL45Z7A	PN SAMPIT	BARANG	DN	4.785.000,00
57	097872	2XAZTM9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	170.348.000,00
58	097872	2TPQKGRA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	157.834.495,00
59	401488	2V5Q7LSA	PA MADIUN	BARANG	DN	28.000.000,00
60	099802	2EC8DFSA	PN NEGARA	BARANG	DN	30.657.000,00
61	401709	2N7PRCCA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	7.200.000,00
62	401910	22A3KDBA	PN MUKOMUKO	BARANG	DN	777.799.650,00
63	099820	2X7GYQJA	PN TABANAN	BARANG	DN	4.000.000,00
64	400704	2KX2Y12A	PA TASIKMALAYA	BARANG	DN	33.266.759,00
65	307907	2QFUPCHA	PA PRAYA	BARANG	DN	80.000.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

66	097912	2UDN2N1A	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	8.999.999,00
67	099286	2R78HMUA	PN SAMARINDA	BARANG	DN	9.800.000,00
68	401904	2PND2C3A	PN SUKA MAKMUE	BARANG	DN	187.450.000,00
69	097872	2LM7F59A	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	198.931.700,00
70	400421	2FQGFKCA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	45.000.000,00
71	098917	2HBDNGBA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	205.493.495,00
72	098917	2KBMWRRRA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	424.486.682,00
73	682150	2RXFN2MA	PA KOTA TASIKMALAYA	BARANG	DN	106.987.664,00
74	097755	2QF6VURA	PN KUDUS	BARANG	DN	424.800.000,00
75	670206	2M2HRJAA	PN BATULICIN	BARANG	DN	3.900.000,00
76	097886	2C3SA5WA	PN PURWOREJO	BARANG	DN	2.165.741.250,00
77	402101	229D8AHA	PA BANGKINANG	BARANG	DN	47.640.000,00
78	401271	238Y39AA	PA JOMBANG	BARANG	DN	661.400.000,00
79	402101	2VVFLD5A	PA BANGKINANG	BARANG	DN	150.000.000,00
80	578864	2L6REEGA	PTUN KENDARI	BARANG	DN	42.660.000,00
81	098874	2WQZUVEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	11.100.000,00
82	098938	2392TD4A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
83	098938	2HQWKY1A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
84	098938	23WCFMPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	10.000.000,00
85	098938	2GBPMB5A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
86	098938	2Z6E3LNA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.700.000,00
87	097908	27RGLNUA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	12.012.000,00
88	400891	2ET6BMMA	PA BREBES	BARANG	DN	200.000.000,00
89	099031	21THL5DA	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	12.000.000,00
90	098938	2RA7G8ZA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	4.400.000,00
91	098938	286KM9NA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.700.000,00
92	400327	2SR2PNGA	PN DUMAI	BARANG	DN	23.450.000,00
93	401375	213RHZEA	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	322.541.788,00
94	681422	2UEUSX7A	PN PASANGKAYU	BARANG	DN	197.411.966,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

95	097542	2UVHW84A	PN GARUT	BARANG	DN	5.750.000,00
96	097542	2VWDQDLA	PN GARUT	BARANG	DN	5.750.000,00
97	097603	2VEY2ECA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	39.050.000,00
98	401876	2KKWXGHA	PA KUALA KURUN	BARANG	DN	338.162.000,00
99	098310	2F4YN6BA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	5.000.000,00
100	098310	2F9TBSEA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	3.500.000,00
101	099024	21SAJ1AA	PN SUNGAILIAT	BARANG	DN	70.000.000,00
102	670227	2F25XX3A	PA SURAKARTA	BARANG	DN	6.000.000,00
103	559857	29RMM13A	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	29.000.000,00
104	400690	2U3C6V2A	PA CIAMIS	BARANG	DN	250.000.000,00
105	400415	2G8JCKVA	PN JANTHOI	BARANG	DN	520.561.080,00
106	400492	22PN216A	PT RIAU	BARANG	DN	52.100.000,00
107	672980	25U13T6A	PN PARIGI	BARANG	DN	449.200.000,00
108	097652	2HU2UJRA	PN SUKABUMI	BARANG	DN	35.780.000,00
109	099773	2L3QVBBA	PT DENPASAR	BARANG	DN	5.016.854.000,00
110	402468	289MT84A	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	4.550.000,00
111	307644	2GM1K39A	PA MAJENE	BARANG	DN	11.000.000,00
112	098310	24X1N5VA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	32.000.000,00
113	098874	27ZUDQFA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	200.000.000,00
114	400559	2458MQ2A	PT MATARAM	BARANG	DN	6.549.000,00
115	400559	21CBPCTA	PT MATARAM	BARANG	DN	12.550.000,00
116	099155	2J1137ZA	PN KUALA KAPUAS	BARANG	DN	35.400.000,00
117	662972	27A755DA	PN BONTANG	BARANG	DN	11.667.000,00
118	402519	28VPDLFA	PA MARTAPURA	BARANG	DN	181.309.150,00
119	098015	2U6W5GRA	PN CILACAP	BARANG	DN	24.500.000,00
120	400239	2WU22KVA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	800.000,00
121	400239	29F9R9MA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	3.000.000,00
122	097908	2QP8RQSA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	8.000.000,00
123	604723	2CJJH2UA	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	235.500.000,00
124	673013	25J4YG7A	PN MALILI	BARANG	DN	524.533.560,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

125	402302	23FDWSVA	PA PANGKAL PINANG	BARANG	DN	83.016.000,00
126	099439	2L64TBDA	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	45.850.000,00
127	099926	2CHUPMGA	PN KUPANG	BARANG	DN	3.000.000,00
128	477380	2863U8ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.000.000,00
129	477380	2JV32PXA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	4.050.000,00
130	670227	293811GA	PN SAMBAS	BARANG	DN	3.900.000,00
131	652123	23NLRY5A	PA BANGGAI	BARANG	DN	32.225.000,00
132	098942	2DNTQS7A	PN PALEMBANG	BARANG	DN	12.100.000,00
133	400126	2HHDQE9A	PN CURUP	BARANG	DN	7.000.000,00
134	400126	2G1SWB7A	PN CURUP	BARANG	DN	12.500.000,00
135	400126	26GFT7WA	PN CURUP	BARANG	DN	7.000.000,00
136	400512	24LQ3D8A	PT BENGKULU	BARANG	DN	4.000.000,00
137	401938	2CBAFAKA	PA TELUK KUANTAN	BARANG	DN	570.000.000,00
138	400735	2U25DZZA	PA SUKABUMI	BARANG	DN	24.894.000,00
139	400678	212LMLGA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	27.500.000,00
140	417657	2HPLP3WA	PA TANJUNG SELOR	BARANG	DN	1.370.294.550,00
141	099816	23AGR2AA	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	688.976.300,00
142	099340	2MMSRVJA	PN TAHUNA	BARANG	DN	54.490.000,00
143	098900	2THSDN6A	PN MUARA BUNGO	BARANG	DN	149.555.000,00
144	400832	212679TA	PA BEKASI	BARANG	DN	21.540.000,00
145	400832	21QBBV9A	PA BEKASI	BARANG	DN	69.750.000,00
146	099947	2GALK3VA	PN SO'E	BARANG	DN	35.000.000,00
147	098938	24FV3A7A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	2.240.000,00
148	098938	2SGNM2CA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	12.200.000,00
149	098938	2K275EVA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.750.000,00
150	098938	2KLH5LPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	5.925.000,00
151	098938	2ZZXQ7RA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	4.050.000,00
152	098938	2Y2MA4JA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	2.350.000,00
153	401936	2RTZK12A	PA PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	198.669.994,00
154	098942	2EVL9GLA	PN PALEMBANG	BARANG	DN	16.500.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

155	576274	28FQA32A	PTA BENGKULU	BARANG	DN	7.300.000,00
156	576274	2SY41AEA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	43.500.000,00
157	576274	2F2UR9EA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	28.500.000,00
158	576274	25ZUYHDA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	12.500.000,00
159	477249	2W628Y4A	PN ROTE NDAO	BARANG	DN	6.000.000,00
160	400512	224SBGXA	PT BENGKULU	BARANG	DN	7.300.000,00
161	099070	281GMZNA	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	65.000.000,00
162	402820	2JVYPNDA	PA SO'E	BARANG	DN	1.600.000,00
163	402820	2JGQCQJA	PA SO'E	BARANG	DN	1.400.000,00
164	402820	2PRV8G9A	PA SO'E	BARANG	DN	3.400.000,00
165	402820	2X8MPJQA	PA SO'E	BARANG	DN	5.400.000,00
166	402820	2NHAG8A	PA SO'E	BARANG	DN	5.400.000,00
167	402820	2FAVV4EA	PA SO'E	BARANG	DN	4.500.000,00
168	098959	2YBDB7QA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	255.912.200,00
169	663403	2CWNVALA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.000.000,00
170	663403	2KN4F76A	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.000.000,00
171	663403	2NRVC3GA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.500.000,00
172	099010	25LBHRLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	13.500.000,00
173	099010	2QETUP6A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	4.650.000,00
174	098938	2X177DFA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	3.300.000,00
175	307729	2D5QJU9A	PA BAU-BAU	BARANG	DN	16.000.000,00
176	477224	2GNGUTUA	PN UNAAHA	BARANG	DN	10.000.000,00
177	400141	2N2MH71A	PN BANGKINANG	BARANG	DN	311.687.534,00
178	099471	23R8V1AA	PN MAROS	BARANG	DN	177.534.246,00
179	417722	2GJNVE1A	PN TANJUNG SELOR	BARANG	DN	1.370.294.550,00
180	097872	2PVA4JTA	PN BATANG	BARANG	DN	439.202.000,00
181	400075	2Z4VMY5A	PN SORONG	BARANG	DN	299.580.000,00
182	400540	284BX3EA	PT KENDARI	BARANG	DN	539.078.000,00
183	097872	2SBSWDNA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	235.530.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

184	097872	21258K9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	280.282.420,00
185	097872	21PVS9RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	65.187.086,00
186	662986	2MRYTCKA	PN SANGATTA	BARANG	DN	10.200.000,00
187	662986	23AK2ELA	PN SANGATTA	BARANG	DN	6.600.000,00
188	098214	2FB4VC9A	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	22.800.000,00
189	400967	2TJSCEMA	PA PATI	BARANG	DN	475.000.000,00
190	559857	25XAVENA	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	25.400.000,00
191	307712	2RX33TPA	PA KENDARI	BARANG	DN	1.925.000,00
192	097500	2TG135BA	PT BANDUNG	BARANG	DN	200.000.000,00
193	097535	2S83Y8DA	PN TASIKMALAYA	BARANG	DN	134.462.500,00
194	402540	2XH5PPYA	PA BARABAI	BARANG	DN	6.000.000,00
195	402540	2QBNMJTA	PA BARABAI	BARANG	DN	7.700.000,00
196	098544	2DY4ZXKA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	149.105.000,00
197	307712	2V4WKRLA	PA KENDARI	BARANG	DN	6.000.000,00
198	307232	278J6DFA	PA KOTAMUBAGU	BARANG	DN	33.925.000,00
199	099638	2AT7UBQA	PN MAMUJU	BARANG	DN	162.000.000,00
200	098310	2WRQDQHA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	44.219.000,00
201	098310	2Z8LZ3YA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	4.500.000,00
202	098310	2T45PQUA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	13.325.000,00
203	402525	2LWCRFVA	PA RANTAU	BARANG	DN	117.500.000,00
204	402525	2KRRP9PA	PA RANTAU	BARANG	DN	4.800.000,00
205	098874	2AYMXHAA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	47.175.000,00
206	098874	2BKWLRNA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	175.844.000,00
207	098874	27HBVCUA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	175.778.000,00
208	477380	2GZLS6ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	1.787.146.700,00
209	400879	2T1ZPLCA	PA PEMALANG	BARANG	DN	33.750.000,00
210	400879	23TBNC5A	PA PEMALANG	BARANG	DN	29.117.000,00
211	099180	2YGE422A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	3.696.500,00
212	099180	23BHDD6A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	6.700.000,00
213	099752	2869FYCA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

214	099752	27JGB2DA	PN LABUHA	BARANG	DN	12.000.000,00
215	099752	2ZBF8PDA	PN LABUHA	BARANG	DN	7.000.000,00
216	401929	27187KPA	PN DOBO	BARANG	DN	6.750.000,00
217	401929	2PFAYAJA	PN DOBO	BARANG	DN	9.650.000,00
218	401929	2DSUPG7A	PN DOBO	BARANG	DN	3.850.000,00
219	401929	25PSLW4A	PN DOBO	BARANG	DN	419.872.006,00
220	098832	2YQP6Y6A	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	3.500.000,00
221	098832	235MPPTA	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	5.999.000,00
222	099752	22U38QVA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
223	099752	2L9D8M1A	PN LABUHA	BARANG	DN	7.000.000,00
224	099752	2YNSUJ3A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
225	099752	2FKDTF7A	PN LABUHA	BARANG	DN	26.500.000,00
226	099752	2S1M4CLA	PN LABUHA	BARANG	DN	43.000.000,00
227	099752	2GM28WHA	PN LABUHA	BARANG	DN	500.000,00
228	099752	29H7V5PA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
229	099752	2832ZE4A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
230	099752	2V3JBR8A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
231	099010	2QNDZYLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	4.200.000,00
232	099862	2DU5LHYA	PN MATARAM	BARANG	DN	1.690.000.000,00
233	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	214.525.150,00
234	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	356.400.000,00
235	400571	2D68V6KA	PN MUNGKID	BARANG	DN	4.900.000,00
236	400571	2K5B33HA	PN MUNGKID	BARANG	DN	3.300.000,00
237	400571	26GMWEAA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.050.000,00
238	400571	2PMRJ2YA	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.375.000,00
239	400571	28FVQSDA	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.750.000,00
240	400571	2UPD1MCA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.575.000,00
241	400571	2W3AAHTA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.575.000,00
242	400571	26FNR2LA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.700.000,00
243	400571	2MWL153A	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.350.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

244	099176	2N1CFU6A	PN SAMPIT	BARANG	DN	3.000.000,00
245	097598	23ZRCWYA	PN TANGERANG	BARANG	DN	6.747.393.420,00
246	401907	2F3AP18A	PN PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	198.010.000,00
247	099162	22ZVSDHA	PN BUNTOK	BARANG	DN	1.750.000,00
248	098959	21XVZSDA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	114.830.610,00
249	098959	2B68CY7A	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	144.107.000,00
250	098959	2U9SWKSA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	125.083.750,00
251	098959	293XUTJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	28.695.000,00
252	099752	2K2XRSXA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
253	097500	2PSAPAVA	PT BANDUNG	BARANG	DN	750.000.000,00
254	400492	23YMFCDA	PT RIAU	BARANG	DN	40.000.000,00
255	097691	2616N38A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	124.717.600,00
256	097890	2RKUAD3A	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.400.000,00
257	097890	2YN6RDMA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.500.000,00
258	097890	2PB6B6HA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.100.000,00
259	097890	26KJQR9A	PN MAGELANG	BARANG	DN	2.800.000,00
260	097890	2PDYBP7A	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.900.000,00
261	097890	26KBMLWA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.850.000,00
262	401884	2U1VZFEA	PA AMPANA	BARANG	DN	147.243.139,00
263	098881	2BYWNXDA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	924.688.000,00
264	098881	2AAEM6PA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	13.689.500,00
265	097908	2GYKFK1A	PN KEBUMEN	BARANG	DN	3.800.000,00
266	097598	2ZQ44BGA	PN TANGERANG	BARANG	DN	5.297.828.186,00
267	400126	2ZK8QRGA	PN CURUP	BARANG	DN	199.867.000,00
268	108309	2LCC52MA	PN BATAM	BARANG	DN	90.000.000,00
269	097691	2DA2NJ2A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	6.400.000,00
270	400239	2P6FF32A	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	302.894.027,00
271	477306	22Y38MLA	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	193.903.614,00
272	097691	29QN823A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	59.000.000,00
273	098192	2W6R8ZJA	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	13.000.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

274	400823	2W53PPPA	PA TANGERANG	BARANG	DN	4.500.000,00
275	400823	2PXF91MA	PA TANGERANG	BARANG	DN	3.500.000,00
276	098256	2D1JGX7A	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	10.450.000,00
277	097603	2UMC3WKA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	42.122.000,00
278	097603	2R5Q8X3A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	132.692.000,00
279	097603	23EMJ9DA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	10.000.000,00
280	097603	2JK5HPQA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	10.000.000,00
281	097603	2782DL5A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	9.400.000,00
282	097603	2ZKZH4XA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	9.400.000,00
283	672910	2BQA2LGA	PN BALIGE	BARANG	DN	30.600.000,00
284	401709	29KG64BA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	197.962.000,00
285	098959	2J44VDJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	593.834.460,00
286	559857	2QFJNACA	PTUN SAMARINDA	BARANG	DN	3.000.000,00
287	672910	2U8PTTVA	PN BALIGE	BARANG	DN	3.000.000,00
288	672910	2X5XXHLA	PN BALIGE	BARANG	DN	23.850.000,00
289	673062	23V3KT6A	PN SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	198.634.000,00
290	098874	29RU9UEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	199.851.000,00
291	098874	2JHP2P5A	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	151.620.000,00
292	097780	2VH6XLP A	PN PEMALANG	BARANG	DN	45.000.000,00
293	098743	2MDHA7BA	PT PADANG	BARANG	DN	718.529.500,00
294	098743	2D7618YA	PT PADANG	BARANG	DN	447.106.946,00
295	098722	22EQ8K1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
296	098061	2FY9M59A	PN WATES	BARANG	DN	68.000.000,00
297	099230	21Z88U4A	PN MARTAPURA	BARANG	DN	5.850.000,00
298	099230	232LG2XA	PN MARTAPURA	BARANG	DN	16.977.600,00
299	400421	2D79E5CA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	7.925.000,00
300	098860	2EW2HGLA	PN RENGAT	BARANG	DN	9.000.000,00
301	308021	2CPNVVZA	PA CURUP	BARANG	DN	4.749.000,00
302	401174	2V8PY87A	PA KARANGANYAR	BARANG	DN	290.711.900,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

303	097933	2TGSRWMA	PN SURAKARTA	BARANG	DN	237.994.000,00
304	400483	2ABYDBQA	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	479.436.473,00
305	099003	21JNHQGA	PN SEKAYU	BARANG	DN	739.470.000,00
306	663051	21APMVVA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	17.625.000,00
307	663051	2WDAXWNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	23.850.000,00
308	663051	2K9MEKNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	9.773.000,00
309	663051	21H1DZDA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	6.850.000,00
310	098881	2BKWC4GA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	34.854.000,00
311	098881	251G48FA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	349.560.508,00
312	400282	2Z4373RA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	4.950.000,00
313	400282	24PBJ4GA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	11.050.000,00
314	400282	2TRMR4JA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	27.500.000,00
315	097872	295282RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	250.000.000,00
316	097872	2UZ351AA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	250.000.000,00
317	097975	2SL1MW3A	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	10.500.000,00
318	097975	2HG2TCRA	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	409.000.000,00
319	099375	2Q9NDL3A	PN PALU	BARANG	DN	100.069.000,00
320	097762	2A9T9JQA	PN PATI	BARANG	DN	36.335.000,00
321	099663	213Y168A	PN BAU-BAU	BARANG	DN	19.088.000,00
322	099663	2WJ4N6MA	PN BAU-BAU	BARANG	DN	1.250.000,00
323	098132	2V22GQFA	PN TUBAN	BARANG	DN	258.445.400,00
324	097762	2L8M632A	PN PATI	BARANG	DN	199.500.000,00
325	097741	2Y1REXDA	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	10.000.000,00
326	099286	2R7A9W4A	PN SAMARINDA	BARANG	DN	907.442.400,00
327	613519	22QGNUA	PN CIBINONG	BARANG	DN	32.400.000,00
328	682164	27Q94EMA	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	47.419.000,00
329	663157	27Q94EMA	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	191.109.100,00
330	097598	2YWLTVZA	PN TANGERANG	JASA	DN	2.036.666.594,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

331	613519	2ENK2HKA	PN CIBINONG	UANG	DN	1.404.540.848,00
332	401971	2UGZN68A	PN DATARAN HUNIMOA	UANG	DN	50.000.000,00
333	526750	21FPKXHA	PTUN PALEMBANG	UANG	DN	2.186.000.000,00
334	097709	2HH6RWGA	PN KUNINGAN	UANG	DN	700.000.000,00
335	099070	27FDBQ1A	PN SINGKAWANG	UANG	DN	150.000.000,00
336	401915	2KS1A39A	PN CIKARANG	UANG	DN	6.000.000.000,00
TOTAL						70.284.339.793,00

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	401670	2SH4BU5A	MS IDI	BARANG	DN	652.252.212,00
2	576253	2U7EXF9A	PTA KENDARI	BARANG	DN	21.500.000,00
3	576253	2KCAJVUA	PTA KENDARI	BARANG	DN	4.000.000,00
4	098167	29ETE8VA	PN SIDOARJO	BARANG	DN	150.375.000,00
5	401878	22BZ8N6A	PA SENDAWAR	BARANG	DN	3.037.149.000,00
6	099471	21VU4W9A	PN MAROS	BARANG	DN	167.707.950,00
7	400477	2G9DTAZA	PN SUMBER	BARANG	DN	536.400.000,00
8	097802	2E8R9LAA	PN DEMAK	BARANG	DN	100.000.000,00
9	097802	2EH6T4YA	PN DEMAK	BARANG	DN	70.000.000,00
10	097802	26NJHFCA	PN DEMAK	BARANG	DN	524.281.000,00
11	097802	2PLHMHTA	PN DEMAK	BARANG	DN	171.882.967,00
12	097872	25Y8YJ2A	PN BATANG	BARANG	DN	3.000.000,00
13	402132	2GUDDWGA	PA SELAT PANJANG	BARANG	DN	384.000.000,00
14	400580	2WCLHECA	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	1.709.609.772,00
15	097577	2EKG53HA	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	259.025.000,00
16	477352	2E2SELYA	PN PASAMAN BARAT	BARANG	DN	196.612.000,00
17	098462	2GJX7CWA	PN SIGLI	BARANG	DN	399.077.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

18	400389	2XTD5Q5A	PN KISARAN	BARANG	DN	86.086.000,00
19	400389	2RR3NNEA	PN KISARAN	BARANG	DN	42.117.500,00
20	663026	2HD4WT2A	PN MENGGALA	BARANG	DN	500.000.000,00
21	402443	2RVBTMXA	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	1.068.000.000,00
22	098874	2C3HGTDA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	186.320.000,00
23	402468	2GR89PDA	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	5.850.000,00
24	400389	261BZGBA	PN KISARAN	BARANG	DN	282.139.990,00
25	664522	2M7V8YJA	PT MALUKU UTARA	BARANG	DN	678.732.000,00
26	400998	27WHZ6VA	PA REMBANG	BARANG	DN	87.840.500,00
27	097776	2KUKP49A	PN BREBES	BARANG	DN	7.000.000,00
28	400891	213G76NA	PA BREBES	BARANG	DN	201.473.000,00
29	400891	213M8GEA	PA BREBES	BARANG	DN	126.704.000,00
30	099769	2BQ23L9A	PN SOASIU	BARANG	DN	364.436.000,00
31	401909	2V7FM7DA	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	1.034.376.000,00
32	663026	2EUEGHXA	PN MENGGALA	BARANG	DN	810.000.000,00
33	097691	2CLXD1LA	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	299.378.000,00
34	401914	2PEPANCA	PN BANJAR	BARANG	DN	80.000.000,00
35	401715	25P8D66A	MS KOTACANE	BARANG	DN	90.895.000,00
36	402242	2KHKL67A	PA PALEMBANG	BARANG	DN	84.200.000,00
37	672910	2DFM7VGA	PN BALIGE	BARANG	DN	78.801.000,00
38	098608	25E1WPQA	PN SINGKIL	BARANG	DN	1.893.569.000,00
39	307491	27H2GSRA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	9.000.000,00
40	307491	2WBRC3GA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	11.000.000,00
41	682171	2FJTF4GA	PA AMURANG	BARANG	DN	2.476.737.326,00
42	098722	2ZCX12GA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
43	098722	2CALLBVA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
44	098722	23LPDNEA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
45	098722	28NL2B1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
46	098722	2TCK51TA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

47	098722	2EGMQ39A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
48	098310	24971ENA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	6.985.000,00
49	402097	2JLDNGCA	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	136.320.000,00
TOTAL						19.068.832.217,00

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL disajikan pada lampiran A3 Laporan Keuangan ini.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah *Rp30.525.686.275.992,00* masing-masing sebesar Rp30.525.686.275.992,00 dan Rp29.529.218.827.065,00. *5.992,00*



PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahunan Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

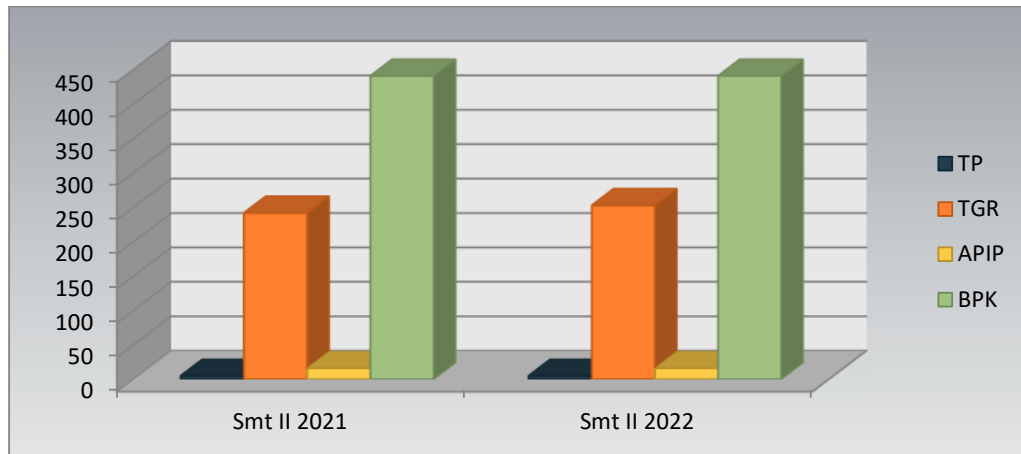
- Perkembangan kasus Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2022 ini kasus Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berjumlah 715 kasus Kerugian Negara, yang terdiri dari:

Tabel kerugian Negara Tahunan Tahun 2022

Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
A SUDAH PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2 TGR NON BENDAHARA	253	3.113.789.047,00	3.101.289.047,00	12.500.000,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
B PROSES PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2 TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C INFORMASI				
1 BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2 APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH	715	29.874.382.263,74	29.802.858.037,96	71.524.225,78

Rekapitulasi Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara**Pada Mahkamah Agung Di Jakarta****Posisi Tahun 2003 s.d. Tahunan Tahun 2022**

Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Pembebasan	Sisa Angsuran
A SUDAH PENETAPAN					
1 TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	303.824.891,00	810.422.059,00	0,00
2 TGR NON BENDAHARA	253	3.113.589.047,00	2.859.589.047,00	241.500.000,00	12.500.000,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B PROSES PENETAPAN					
1 TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	0,00	0,00	22.772.000,00
2 TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C INFORMASI					
1 BPK	441	25.105.030.304,98	23.642.832.340,69	1.462.197.964,29	0,00
2 APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	0,00	36.252.225,78
JUMLAH	715	29.874.182.263,74	27.288.538.014,67	2.514.120.023,29	71.524.225,78

Grafik Jumlah Kerugian Negara

Kasus Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 715 kasus, berupa kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP), kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan kasus Pihak Ketiga baik temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku APIP, maupun temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022. Kasus Kerugian Negara tersebut diperoleh dari:

- Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tingkat Lembaga, Wilayah, maupun Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI;
- Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ketika melakukan pemeriksaan regional secara rutin;
- Laporan Satuan Kerja yang mengalami kasus Kerugian Negara dan kegiatan monitoring, serta evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 terdapat beberapa pemutakhiran data atas Sisa Kerugian Negara yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara BPK sampai dengan Tahun 2022 pada Mahkamah Agung, antara lain:

No	Nama	Unit Kerja	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran	Sisa	Keterangan
1	Rohmawati (TP)	PA Pekalongan	22.772.000	-	22.772.000	-	Dokumen Penyelesaian Sudah Dilampirkan dengan Pertanggung jawaban UP tahun tersebut

Berdasarkan pemutakhiran data diatas, Kerugian Negara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
A SUDAH PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2 TGR NON BENDAHARA	253	3.113.589.047,00	3.101.089.047,00	12.500.000,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
B PROSES PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0,00
2 TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3 PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C INFORMASI				
1 BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2 APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH	715	29.874.182.263,74	29.825.430.037,96	48.752.225,78

2. Kendala Penyelesaian Kerugian Negara

Adapun beberapa kendala yang ditemukan, antara lain:

- Pihak Yang Merugikan melakukan wanprestasi pelunasan yang diakibatkan karena meninggal dunia, ahli waris tidak mampu melunasi, dan/atau Perseroaan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV) rekanan dinyatakan pailit dan masuk dalam daftar hitam (blacklist), tidak ada jaminan yang diserahkan/disita sehingga tidak dapat dilakukan pencairan/lelang jaminan;
- Piutang TP/TGR macet yang telah diberikan Surat Penagihan (SPn) ke-3 dan telah dialihkan pengurusan penagihan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum dapat ditagih/dilunasi;
- Penghapusan Piutang TP/TGR secara bersyarat memerlukan waktu 2 tahun untuk dapat diajukan penghapusan secara mutlak, dan membutuhkan 2 tahun Kembali untuk diajukan sebagai penghapusan mutlak.

3. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2022

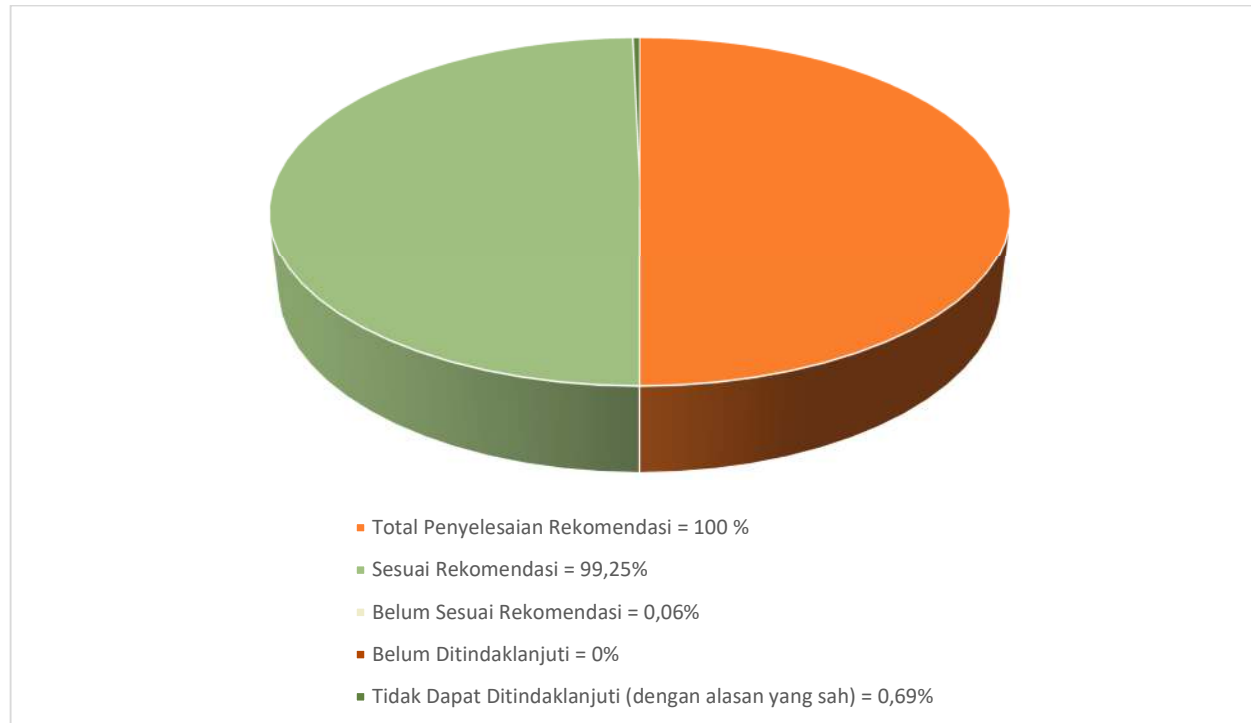
REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : AKN III
ENTITAS : MAHMAKAH AGUNG
TAHUN PEMERIKSAAN : TAHUNAN TAHUN 2022

(dalam Rupiah)

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2006	7	156,821,300.00	10	102,000,000.00	10	102,000,000.00	0	-	0	-	0	-	102,000,000.00
2007	30	1,987,903,852.50	30	545,051,826.98	22	285,298,757.35	0	-	0	-	8	259,753,069.63	285,298,757.35
2008	25	1,179,088,506.33	43	770,918,650.10	43	770,918,650.10	0	-	0	-	0	-	770,918,650.10
2009	40	3,038,087,057.41	72	679,878,497.41	71	679,878,497.41	0	-	0	-	1	-	679,878,497.41
2010	27	262,900,617.00	54	223,212,117.00	53	223,212,117.00	0	-	0	-	1	-	223,212,117.00
2011	54	3,653,976,655.88	93	2,407,310,465.36	93	2,178,440,465.36	0	-	0	-	0	228,870,000.00	2,178,440,465.36
2012	43	2,167,061,048.04	78	1,517,393,798.04	78	1,496,837,298.04	0	-	0	-	0	20,556,500.00	1,496,837,298.04
2013	67	1,813,091,023.43	109	1,813,091,023.43	109	1,813,091,023.43	0	-	0	-	0	-	1,813,091,023.43
2014	71	3,416,145,288.06	144	2,441,023,459.62	143	1,936,047,709.62	0	-	0	-	1	504,975,750.00	1,936,047,709.62
2015	25	8,214,492,976.92	72	7,357,200,084.30	72	7,172,355,990.99	0	-	0	-	0	184,844,093.31	7,172,355,990.99
2016	27	5,262,286,278.77	97	4,838,353,457.77	97	4,838,353,457.77	0	-	0	-	0	-	4,838,353,457.77
2017	33	8,006,124,606.67	91	7,061,976,186.19	91	5,617,136,771.07	0	-	0	-	0	1,444,839,415.12	5,617,136,771.07
2018	59	3,909,863,007.00	158	3,480,250,657.00	158	3,480,250,657.00	0	-	0	-	0	-	3,480,250,657.00
2019	35	2,120,302,977.86	110	1,588,924,414.86	110	1,588,924,414.86	0	-	0	-	0	-	1,588,924,414.86
2020	27	1,610,670,108.00	72	1,013,502,250.00	72	1,013,502,250.00	0	-	0	-	0	-	1,013,502,250.00
2021	86	5,274,816,676.00	298	3,122,716,846.00	298	3,069,458,476.00	0	-	0	-	0	-	2,038,330,221.00
2022	21	3,904,851,871.57	70	1,927,296,587.01	69	1,654,560,701.00	1	267,102,348.14	0	-	0	-	1,977,555,284.56
Jumlah	683	55,978,483,851.44	1,607	40,890,100,321.07	1,595	37,920,267,237.00	1	267,102,348.14	0	-	11	2,643,838,828.06	37,212,133,565.56

**GRAFIK HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK**



F.3. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah dan Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Rekening	Jumlah	Jenis	Saldo
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01	932	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 03	394	Rekening	3.733.000,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 04	428	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 05	55	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Unit Eselon 1 Pusat	24	Rekening	12.805.000,00
Rekening Bendahara Penerimaan	7	Rekening	10.000,00
Rekening Lainnya	889	Rekening	6.004.911.718.151,00
Penutupan Rekening Tahun 2022	133	Rekening	0,00
Jumlah	2862	Rekening	6.004.928.266.151,00

Jumlah rekening yang ditutup sampai dengan Akhir Tahun 2022 sebanyak 133 rekening (terlampir). Penutupan rekening tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga. Adapun rekening bendahara pengeluaran mengalami perubahan dari jenis rekening giro menjadi rekening virtual yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri.

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Bendahara Penerimaan, dan Rekening Pemerintah Lainnya biaya perkara serta Monitoring Penutupan Rekening Akhir Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

F.4. Pengungkapan Penting Lain-lain

F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara tata usaha negara yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

- Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah

- b. Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung RI.

Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung.

Sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya khususnya pada Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga, diberikan pengungkapan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Pengelolaan Biaya Proses

RINCIAN BIAYA PROSES/ATK/PEMBERKASAN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Januari	Saldo Awal	9.953.375.634,00			
		Koreksi Awal Tahun		-2.943.473.390,00		
		Penerimaan		5.838.717.429,00		
		Pengeluaran			5.217.090.426,00	
		Saldo Akhir				7.631.529.247,00
		Jumlah	9.953.375.634,00	2.895.244.039,00	5.217.090.426,00	7.631.529.247,00
2	Februari	Saldo Awal	7.631.529.247,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.806.735.452,00		
		Pengeluaran			4.661.382.641,00	
		Saldo Akhir				7.776.882.058,00
		Jumlah	7.631.529.247,00	4.806.735.452,00	4.661.382.641,00	7.776.882.058,00
3	Maret	Saldo Awal	7.776.882.058,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.022.407.950,00		
		Pengeluaran			5.872.205.873,00	
		Saldo Akhir				6.927.084.135,00
		Jumlah	7.776.882.058,00	5.022.407.950,00	5.872.205.873,00	6.927.084.135,00
4	April	Saldo Awal	6.927.084.135,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		3.343.801.890,00		
		Pengeluaran			3.935.570.269,00	
		Saldo Akhir				6.335.315.756,00
		Jumlah	6.927.084.135,00	3.343.801.890,00	3.935.570.269,00	6.335.315.756,00
5	Mei	Saldo Awal	6.335.315.756,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.400.466.892,00		
		Pengeluaran			4.419.466.658,00	
		Saldo Akhir				6.316.315.990,00
		Jumlah	6.335.315.756,00	4.400.466.892,00	4.419.466.658,00	6.316.315.990,00
6	Juni	Saldo Awal	6.316.315.990,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.747.409.150,00		
		Pengeluaran			5.325.342.554,00	
		Saldo Akhir				6.738.382.586,00
		Jumlah	6.316.315.990,00	5.747.409.150,00	5.325.342.554,00	6.738.382.586,00
7	Juli	Saldo Awal	6.738.382.586,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.002.960.425,00		
		Pengeluaran			5.147.234.224,00	
		Saldo Akhir				6.594.108.787,00
		Jumlah	6.738.382.586,00	5.002.960.425,00	5.147.234.224,00	6.594.108.787,00
8	Agustus	Saldo Awal	6.594.108.787,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.593.397.834,00		
		Pengeluaran			5.680.015.148,00	
		Saldo Akhir				6.507.491.473,00
		Jumlah	6.594.108.787,00	5.593.397.834,00	5.680.015.148,00	6.507.491.473,00
9	September	Saldo Awal	6.507.491.473,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.382.750.205,00		
		Pengeluaran			5.584.155.487,00	
		Saldo Akhir				6.306.086.191,00
		Jumlah	6.507.491.473,00	5.382.750.205,00	5.584.155.487,00	6.306.086.191,00
10	Oktober	Saldo Awal	6.306.086.191,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.272.972.334,00		
		Pengeluaran			5.455.322.190,00	
		Saldo Akhir				6.123.736.335,00
		Jumlah	6.306.086.191,00	5.272.972.334,00	5.455.322.190,00	6.123.736.335,00
11	November	Saldo Awal	6.123.736.335,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.154.325.744,00		
		Pengeluaran			5.409.553.480,00	
		Saldo Akhir				5.868.508.599,00
		Jumlah	6.123.736.335,00	5.154.325.744,00	5.409.553.480,00	5.868.508.599,00
12	Desember	Saldo Awal	5.868.508.599,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		3.473.551.250,00		
		Pengeluaran			5.261.433.149,00	
		Saldo Akhir				4.080.626.700,00
		Jumlah	5.868.508.599,00	3.473.551.250,00	5.261.433.149,00	4.080.626.700,00

b. Rekapitulasi Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

Adapun rekapitulasi uang titipan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	178.269.853.310,81	5.838.636.035,00	86.579.159.343,65	71.698.339.706,00	187.312.036.913,46	176.752.769.594,58	10.559.267.318,88
		Biaya Eksekusi	188.254.043.351,56	110.393.200,00	28.078.506.498,00	33.466.134.483,91	182.976.808.565,65	181.697.369.841,45	1.279.438.724,20
		Biaya Konsinyasi	5.153.036.495.232,51	-553.405.874,00	50.342.338.725,00	62.907.477.997,44	5.139.917.950.086,07	5.139.512.699.591,07	405.250.495,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.030.533.040,41	-162.109.400,00	425.500.000,00	666.852.000,00	20.627.071.640,41	20.617.071.640,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.604.251.551,00	0,00	1.213.908.719,90	512.297.293,00	9.305.862.977,90	8.917.133.274,06	388.729.703,84
	Jumlah	5.549.195.176.486,29	-6.443.758.109,00	166.639.413.286,55	169.251.101.480,35	5.540.139.730.183,49	5.527.497.043.941,57	12.642.686.241,92	
2	Februari	Biaya Perkara	187.312.036.913,46		63.019.547.459,00	60.184.963.563,00	190.146.620.809,46	178.897.253.655,29	11.249.367.154,17
		Biaya Eksekusi	182.976.808.565,65		23.673.345.745,60	25.479.258.845,00	181.170.895.466,25	179.997.259.482,05	1.173.635.984,20
		Biaya Konsinyasi	5.139.917.950.086,07		73.119.649.847,00	42.918.102.999,71	5.170.119.496.933,36	5.169.750.966.212,36	368.530.721,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.627.071.640,41		1.588.121.000,00	1.241.235.000,00	20.973.957.640,41	20.964.947.640,41	9.010.000,00
		PHI*)	9.305.862.977,90		1.038.716.027,00	839.240.085,00	9.505.338.919,00	9.037.379.095,06	467.959.824,94
	Jumlah	5.540.139.730.183,49		162.439.880.076,60	160.662.800.492,71	5.571.916.309.769,28	5.556.647.808.085,17	13.268.503.684,21	
3	Maret	Biaya Perkara	190.146.620.809,46		75.450.054.158,00	73.738.894.490,00	192.217.780.477,46	181.733.576.649,34	10.484.403.828,12
		Biaya Eksekusi	181.170.895.466,25		84.178.517.607,00	63.260.698.274,00	202.088.714.799,25	200.939.295.008,05	1.149.419.791,20
		Biaya Konsinyasi	5.170.119.496.933,36		27.833.935.992,00	113.199.112.704,00	5.084.754.320.221,36	5.084.380.160.326,36	374.159.895,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.973.957.640,41		1.522.002.099,00	802.203.600,00	21.693.756.139,41	21.693.756.139,41	0,00
		PHI*)	9.505.338.919,90		525.632.429,00	902.552.772,00	9.128.418.576,90	8.788.788.443,06	339.630.133,84
	Jumlah	5.571.916.309.769,28		189.510.142.285,00	251.543.461.840,00	5.509.882.990.214,38	5.497.535.376.566,22	12.347.613.648,16	
4	April	Biaya Perkara	192.217.780.477,46		46.837.634.502,00	58.791.192.934,00	180.264.222.045,46	170.005.952.397,34	10.258.269.648,12
		Biaya Eksekusi	202.088.714.799,25		78.874.420.778,00	26.001.998.278,00	254.961.137.299,25	253.797.667.215,05	1.163.770.084,20
		Biaya Konsinyasi	5.084.754.320.221,36		96.437.927.320,00	57.707.883.018,72	5.123.484.364.522,64	5.121.857.995.997,64	1.626.368.525,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.693.756.139,41		1.177.596.000,00	394.429.300,00	21.476.922.839,41	21.476.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.128.418.576,90		1.454.536.163,00	836.396.291,00	9.746.956.448,90	9.456.833.340,90	288.125.106,00
	Jumlah	5.509.882.990.214,38		223.782.214.763,00	143.731.899.821,72	5.589.933.609.185,64	5.576.597.071.790,24	13.286.533.265,23	
5	Mei	Biaya Perkara	180.264.222.045,46		63.536.832.431,00	52.101.523.241,00	191.699.531.235,46	180.812.520.141,97	10.887.011.093,49
		Biaya Eksekusi	254.961.137.299,25		22.419.288.921,50	42.677.580.410,34	234.702.845.810,41	233.426.095.551,21	1.276.750.259,20
		Biaya Konsinyasi	5.123.484.364.522,64		332.108.223.759,00	156.177.200.039,00	5.299.415.388.242,64	5.299.029.529.996,64	385.858.446,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.476.922.839,41		1.617.085.000,00	1.531.085.000,00	21.562.922.839,41	21.562.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.746.958.448,90		516.171.467,00	331.311.000,00	9.931.818.915,90	9.645.483.173,06	286.335.742,84
	Jumlah	5.589.933.605.155,66		420.187.601.578,50	252.818.699.690,34	5.757.312.507.043,82	5.744.476.551.502,29	12.835.955.541,53	
6	Juni	Biaya Perkara	191.699.531.235,46		82.215.006.282,94	81.732.049.957,00	192.182.487.561,40	181.480.500.509,67	10.701.987.051,73
		Biaya Eksekusi	234.702.845.810,41		16.369.172.888,00	29.364.162.908,00	221.707.855.790,41	220.480.376.656,21	1.227.479.134,20
		Biaya Konsinyasi	5.299.415.388.242,64		152.036.526.979,00	36.622.396.461,00	5.414.829.518.760,64	5.414.467.502.555,64	362.016.205,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.562.922.839,41		204.800.000,00	245.000.000,00	21.522.722.839,41	21.522.722.839,41	0,00
		PHI*)	9.931.818.915,90		549.638.000,00	1.385.466.817,00	9.995.390.090,90	9.783.123.815,06	213.266.288,84
	Jumlah	5.757.312.507.043,82		351.374.844.149,94	149.249.076.149,00	5.899.337.975.090,78	5.886.724.226.375,99	12.603.748.674,77	
7	Juli	Biaya Perkara	192.182.487.561,40		70.728.092.354,00	75.744.266.716,94	187.166.313.198,46	176.246.469.081,12	10.919.844.116,34
		Biaya Eksekusi	221.707.855.790,41		22.398.908.503,00	39.981.498.382,00	204.125.265.911,41	202.850.221.012,21	1.275.044.899,20
		Biaya Konsinyasi	5.414.829.518.760,64		159.719.381.152,88	74.283.050.042,00	5.500.265.849.871,52	5.499.970.946.934,52	294.902.937,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.522.722.839,41		300.428.500,00	1.884.312.346,00	19.938.838.993,41	19.938.838.993,41	0,00
		PHI*)	9.995.390.090,90		604.987.611,00	635.769.032,00	9.064.608.677,90	8.851.899.464,06	212.709.213,84
	Jumlah	5.859.337.975.050,76		253.751.798.120,88	192.528.896.518,94	5.920.560.876.652,70	5.907.858.375.485,72	12.702.501.166,98	
8	Agustus	Biaya Perkara	187.166.313.198,46		75.403.649.565,00	75.314.380.085,00	187.255.582.678,46	176.705.071.761,52	10.550.510.916,94
		Biaya Eksekusi	204.125.265.911,41		10.560.394.162,00	11.843.770.609,00	202.841.889.464,41	201.553.308.336,21	1.288.509.068,20
		Biaya Konsinyasi	5.500.265.849.871,52		64.158.122.685,00	78.853.511.872,91	5.485.570.460.683,61	5.485.255.851.312,61	314.609.371,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.938.838.993,41		586.599.231,00	1.235.025.349,00	19.290.412.875,41	19.290.412.875,41	0,00
		PHI*)	9.064.608.677,90		679.393.850,00	807.453.300,00	8.936.549.227,90	8.734.014.626,06	202.534.601,84
	Jumlah	5.920.560.876.652,70		151.388.159.489,00	168.054.141.215,91	5.903.894.894.929,78	5.891.538.720.871,81	12.356.163.957,98	
9	September	Biaya Perkara	187.255.582.678,46		73.590.523.685,00	73.528.618.001,00	187.317.488.362,46	177.065.440.366,13	10.252.047.996,33
		Biaya Eksekusi	202.841.889.464,41		20.327.051.366,59	17.137.135.839,90	206.031.804.991,10	204.931.300.128,90	1.100.504.862,20
		Biaya Konsinyasi	5.485.570.460.683,61		29.500.567.992,00	71.079.002.880,52	5.443.992.025.395,09	5.443.683.311.217,09	308.714.178,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.290.412.875,41		826.989.180,00	677.711.267,00	19.439.690.788,41	19.439.690.788,41	0,00
		PHI*)	8.936.549.227,90		468.906.000,00	1.063.262.730,00	8.342.192.497,90	8.217.331.814,06	124.860.683,84
	Jumlah	5.903.894.894.929,79		124.714.037.823,59	163.485.730.718,42	5.865.123.202.034,96	5.853.337.074.314,59	11.786.127.720,37	
10	Oktober	Biaya Perkara	187.317.488.362,46		70.665.151.990,00	74.628.131.260,00	183.354.509.092,46	172.417.952.649,67	10.936.556.442,79
		Biaya Eksekusi	206.031.804.991,10		14.454.586.825,00	6.857.625.580,00	213.628.766.236,10	212.364.808.273,90	1.263.957.962,20
		Biaya Konsinyasi	5.443.992.025.395,09		235.667.161.107,00	50.151.695.558,87	5.629.507.490.943,22	5.628.990.248.933,22	517.242.010,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.439.690.788,41		2.124.207.257,12	120.000.000,00	21.443.898.045,53	21.439.549.788,41	9.348.257,12
		PHI*)	8.342.192.497,90		1.451.085.818,00	1.820.664.049,00	7.972.614.265,90	7.789.181.733,06	183.422.533,84
	Jumlah	5.865.173.202.034,96		324.362.192.997,12	133.578.116.447,87	6.055.807.278.584,21	6.042.996.741.378,26	12.910.537.205,95	
11	November	Biaya Perkara	183.354.509.092,46		81.862.710.946,00	73.051.958.813,04	192.165.261.225,42	181.506.116.520,09	10.659.144.705,33
		Biaya Eksekusi	213.628.766.236,10		24.071.638.863,00	22.093.620.528,00	215.606.784.571,10	214.408.825.064,10	1.197.959.507,00
		Biaya Konsinyasi	5.629.507.490.943,22		148.754.718.960,00	145.033.867.184,00	5.633.228.342.719,22	5.633.023.363.367,22	204.979.352,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.443.898.045,53		495.000.000,00	2.647.143.680,12	19.291.754.365,41	19.281.754.365,41	10.000.000,00
		PHI*)	7.972.614.266,90		1.064.213.621,00	832.636.684,00	8.204.191.203,90	8.061.837.210,06	142.353.993,84
	Jumlah	6.055.907.278.584,21		256.248.282.390,00	243.659.226.889,16	6.068.496.334.085,05	6.056.281.896.526,88	12.214.437.558,17	
12	Desember	Biaya Perkara	192.165.261.225,42		54.760.069.165,00	80.115.811.265,00	166.809.519.125,42	157.679.295.866,54	9.130.223.256,88
		Biaya Eksekusi	215.606.784.571,10		130.758.653.401,94	34.305.896.862,94	312.059.541.110,10	311.139.204.066,90	920.337.043,20
		Biaya Konsinyasi	5.633.228.342.719,22		307.535.485.475,00	132.108.210.114,00	5.808.655.518.080,22	5.808.385.734.782,22	269.783.298,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.291.754.365,41		4.894.871.721,00	3.184.811.818,00	21.001.814.268,41	20.991.814.268,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.204.191.203,90		424.747.552,00	657.017.311,00	7.981.921.445,90	7.782.981.702,06	198.939.743,84
	Jumlah	6.068.496.334.085,05		498.383.827.315,94	250.371.847.309,94	6.316.508.314.030,05	6.305.979.030.688,19	10.529.283.341,91	

Sedangkan rincian rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 untuk masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (0199) Instansi Pusat
Satuan Kerja : Kepaniteraan

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Kas di Brankas	
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		Kas di Bank
1	Januari	Biaya Perkara	30.532.748.430,00		1.581.524.000,00	2.820.834.760,00	29.293.437.670,00	29.206.473.056,00	86.964.614,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	30.532.748.430,00	0,00	1.581.524.000,00	2.820.834.760,00	29.293.437.670,00	29.206.473.056,00	86.964.614,00
2	Februari	Biaya Perkara	29.293.437.670,00		2.341.024.000,00	1.149.686.902,00	30.484.774.768,00	30.381.003.354,00	103.771.414,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.293.437.670,00	0,00	2.341.024.000,00	1.149.686.902,00	30.484.774.768,00	30.381.003.354,00	103.771.414,00
3	Maret	Biaya Perkara	30.484.774.768,00		2.546.054.000,00	984.819.504,00	32.046.009.264,00	31.985.369.264,00	60.640.000,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	30.484.774.768,00	0,00	2.546.054.000,00	984.819.504,00	32.046.009.264,00	31.985.369.264,00	60.640.000,00
4	April	Biaya Perkara	32.046.009.264,00		1.181.539.000,00	3.850.270.698,00	29.377.277.566,00	29.311.393.843,00	65.883.723,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	32.046.009.264,00	0,00	1.181.539.000,00	3.850.270.698,00	29.377.277.566,00	29.311.393.843,00	65.883.723,00
5	Mei	Biaya Perkara	29.377.277.566,00		1.233.994.000,00	883.913.909,00	29.727.357.657,00	29.617.396.834,00	109.960.823,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.377.277.566,00	0,00	1.233.994.000,00	883.913.909,00	29.727.357.657,00	29.617.396.834,00	109.960.823,00
6	Juni	Biaya Perkara	29.727.357.657,00		2.117.556.500,00	744.451.610,00	31.100.462.547,00	31.014.545.815,00	85.916.732,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.727.357.657,00	0,00	2.117.556.500,00	744.451.610,00	31.100.462.547,00	31.014.545.815,00	85.916.732,00
7	Juli	Biaya Perkara	31.100.462.547,00		2.225.867.000,00	6.309.224.642,00	27.017.104.905,00	26.919.726.673,00	97.378.232,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	31.100.462.547,00	0,00	2.225.867.000,00	6.309.224.642,00	27.017.104.905,00	26.919.726.673,00	97.378.232,00
8	Agustus	Biaya Perkara	27.017.104.905,00		1.439.451.000,00	898.328.644,00	27.558.227.261,00	27.506.056.056,00	52.171.205,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	27.017.104.905,00	0,00	1.439.451.000,00	898.328.644,00	27.558.227.261,00	27.506.056.056,00	52.171.205,00
9	September	Biaya Perkara	27.558.227.261,00		1.997.492.700,00	1.538.209.066,00	28.017.510.895,00	27.926.809.621,00	90.701.274,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	27.558.227.261,00	0,00	1.997.492.700,00	1.538.209.066,00	28.017.510.895,00	27.926.809.621,00	90.701.274,00
10	Oktober	Biaya Perkara	28.017.510.895,00		2.075.526.500,00	4.669.984.134,00	25.423.053.261,00	25.304.805.217,00	118.248.044,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	28.017.510.895,00	0,00	2.075.526.500,00	4.669.984.134,00	25.423.053.261,00	25.304.805.217,00	118.248.044,00
11	November	Biaya Perkara	25.423.053.261,00		1.884.262.500,00	1.465.233.345,00	25.842.082.416,00	25.748.470.079,00	93.612.337,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	25.423.053.261,00	0,00	1.884.262.500,00	1.465.233.345,00	25.842.082.416,00	25.748.470.079,00	93.612.337,00
12	Desember	Biaya Perkara	25.842.082.416,00		3.857.536.000,00	1.474.637.400,00	28.224.981.016,00	28.187.425.068,00	37.555.948,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	25.842.082.416,00	0,00	3.857.536.000,00	1.474.637.400,00	28.224.981.016,00	28.187.425.068,00	37.555.948,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		
1	Januari	Biaya Perkara	119.475.241.738,81	(3.125.025.809,00)	16.160.362.688,65	15.515.261.728,00	116.995.316.890,46	113.528.872.599,58	3.466.444.290,88
		Biaya Eksekusi	183.731.209.801,56	623.100,00	26.938.083.498,00	32.841.434.283,91	177.828.482.115,65	177.229.071.891,45	599.410.224,20
		Biaya Konsiyasi	5.124.584.466.495,07	(11.174,00)	49.889.137.925,00	61.743.700.053,00	5.112.729.893.193,07	5.112.613.370.932,07	116.522.261,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.030.533.040,41	(162.109.400,00)	425.500.000,00	666.852.000,00	20.627.071.640,41	20.617.071.640,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.604.251.551,00	0,00	1.213.908.719,90	512.297.293,00	9.305.862.977,90	8.917.133.274,06	388.729.703,84
		Jumlah	5.457.425.702.626,85	(3.286.523.283,00)	94.626.992.831,55	111.279.545.357,91	5.437.486.626.817,49	5.432.905.520.337,57	4.581.106.479,92
2	Februari	Biaya Perkara	116.995.316.890,46		14.910.925.259,00	13.268.876.366,00	118.637.365.783,46	114.901.682.201,29	3.735.683.582,17
		Biaya Eksekusi	177.828.482.115,65		23.096.018.745,60	24.816.669.645,00	176.107.831.216,25	175.543.490.732,05	564.340.484,20
		Biaya Konsiyasi	5.112.729.893.193,07		72.931.299.847,00	38.340.372.499,71	5.147.320.820.540,36	5.147.199.623.053,36	121.197.487,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.627.071.640,41		1.588.121.000,00	1.241.235.000,00	20.973.957.640,41	20.964.947.640,41	9.010.000,00
		PHI*)	9.305.862.977,90		1.038.716.027,00	839.240.085,00	9.505.338.919,90	9.037.379.095,06	467.959.824,84
		Jumlah	5.437.486.626.817,49		113.565.080.878,60	78.506.393.595,71	5.472.545.314.100,38	5.467.647.122.722,17	4.898.191.378,21
3	Maret	Biaya Perkara	118.637.365.783,46		19.479.675.399,00	17.721.055.582,00	120.395.985.600,46	116.915.439.090,34	3.480.546.510,12
		Biaya Eksekusi	176.107.831.216,25		83.570.896.107,00	62.531.552.374,00	197.147.174.949,25	196.575.965.738,06	571.209.211,20
		Biaya Konsiyasi	5.147.320.820.540,36		25.862.617.966,00	112.260.603.385,00	5.060.922.835.121,36	5.060.769.623.660,36	153.211.461,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.973.957.640,41		1.522.002.099,00	802.203.600,00	21.693.756.139,41	21.693.756.139,41	0,00
		PHI*)	9.505.338.919,90		525.632.429,00	902.552.772,00	9.128.418.576,90	8.788.788.443,06	339.630.133,84
		Jumlah	5.472.545.314.100,38		130.960.824.000,00	194.217.967.713,00	5.409.288.170.387,38	5.404.743.573.071,22	4.544.597.316,16
4	April	Biaya Perkara	120.395.985.600,46		16.090.102.059,00	17.588.055.906,00	118.898.031.753,46	115.675.180.476,34	3.222.851.277,12
		Biaya Eksekusi	197.147.174.949,25		78.287.425.778,00	25.430.945.878,00	250.003.654.849,25	249.502.992.265,00	500.662.584,20
		Biaya Konsiyasi	5.060.922.835.121,36		96.118.367.320,00	56.219.355.688,72	5.100.821.846.752,64	5.099.428.372.461,64	1.393.474.291,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.693.756.139,41		1.777.596.000,00	394.429.300,00	21.476.922.839,41	21.476.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.128.418.576,90		1.454.936.163,00	836.396.291,00	9.746.958.448,90	9.458.833.340,90	288.125.108,00
		Jumlah	5.409.288.170.387,38		192.128.427.320,00	100.469.183.063,72	5.500.947.414.643,66	5.495.542.301.383,34	5.405.113.260,32
5	Mei	Biaya Perkara	118.898.031.753,46		12.622.859.409,00	12.929.556.382,00	118.591.334.780,46	114.920.980.631,97	3.670.354.148,49
		Biaya Eksekusi	250.003.654.849,25		21.427.357.067,50	42.307.964.910,34	229.123.047.006,41	228.511.161.347,21	611.885.659,20
		Biaya Konsiyasi	5.100.821.846.752,64		331.650.073.759,00	155.558.928.039,00	5.276.912.992.472,64	5.276.773.423.260,64	139.569.212,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.476.922.839,41		1.617.085.000,00	1.531.085.000,00	21.562.922.839,41	21.562.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.746.958.448,90		516.171.467,00	331.311.000,00	9.931.818.915,90	9.645.483.173,06	286.335.742,84
		Jumlah	5.500.947.414.643,66		367.833.546.702,50	212.658.845.331,34	5.656.122.116.014,82	5.651.413.971.252,29	4.708.144.762,53
6	Juni	Biaya Perkara	118.591.334.780,46		18.595.922.492,94	18.344.575.880,00	118.842.681.393,40	115.395.892.845,67	3.446.788.547,73
		Biaya Eksekusi	229.123.047.006,41		15.544.327.888,00	28.022.070.754,00	216.645.304.140,41	216.153.641.506,21	491.662.634,20
		Biaya Konsiyasi	5.276.912.992.472,64		151.127.780.879,00	35.028.768.361,00	5.393.012.004.990,64	5.392.861.978.019,64	150.026.971,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.562.922.839,41		204.800.000,00	245.000.000,00	21.522.722.839,41	21.522.722.839,41	0,00
		PHI*)	9.931.818.915,90		549.038.000,00	1.385.466.817,00	9.095.390.098,90	8.783.123.815,06	312.266.283,84
		Jumlah	5.656.122.116.014,82		186.021.869.259,94	83.025.881.812,00	5.759.118.103.462,76	5.754.717.359.025,99	4.400.744.436,77
7	Juli	Biaya Perkara	118.842.681.393,40		18.596.634.702,00	17.790.600.533,94	119.648.715.561,46	116.183.702.563,52	3.465.012.997,94
		Biaya Eksekusi	216.645.304.140,41		21.458.485.503,00	39.325.918.482,00	198.777.871.161,41	198.216.610.961,20	561.837.199,20
		Biaya Konsiyasi	5.393.012.004.990,64		159.085.371.172,88	73.655.420.160,00	5.478.441.956.003,52	5.478.323.766.500,52	118.189.503,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.522.722.839,41		300.428.500,00	1.884.312.346,00	19.938.838.993,41	19.938.838.993,41	0,00
		PHI*)	9.095.390.098,90		604.987.611,00	635.769.032,00	9.064.608.677,90	8.851.899.464,06	212.709.213,84
		Jumlah	5.759.118.103.462,76		200.045.907.488,88	133.292.020.553,94	5.825.871.990.397,70	5.821.514.241.483,72	4.357.748.913,98
8	Agustus	Biaya Perkara	119.648.715.561,46		19.236.675.542,00	18.835.738.242,00	120.049.652.861,46	116.624.617.904,52	3.425.034.956,94
		Biaya Eksekusi	198.777.871.161,41		9.494.147.162,00	11.097.504.659,00	197.174.513.664,41	196.603.190.796,21	571.322.868,20
		Biaya Konsiyasi	5.478.441.956.003,52		63.523.207.685,00	66.844.699.272,91	5.475.120.464.415,61	5.474.975.179.044,61	145.285.371,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.938.838.993,41		586.599.231,00	1.235.025.349,00	19.290.412.875,41	19.290.412.875,41	0,00
		PHI*)	9.064.608.677,90		679.393.850,00	807.453.300,00	8.936.549.227,90	8.734.014.626,06	202.534.601,84
		Jumlah	5.825.871.990.397,70		93.520.023.470,00	98.820.420.822,91	5.820.571.593.044,79	5.816.227.415.246,81	4.344.177.797,98
9	September	Biaya Perkara	120.049.652.861,46		20.258.843.766,00	20.296.138.156,00	120.012.358.471,46	116.803.579.370,13	3.208.779.101,33
		Biaya Eksekusi	197.174.513.664,41		19.618.821.866,59	16.392.316.939,90	200.401.018.591,10	199.914.694.220,90	486.324.362,20
		Biaya Konsiyasi	5.475.120.464.415,61		29.147.753.826,00	70.702.592.880,52	5.433.565.625.361,09	5.433.425.748.949,09	139.876.412,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.290.412.875,41		826.989.180,00	677.711.267,00	19.439.690.788,41	19.439.690.788,41	0,00
		PHI*)	8.936.549.227,90		468.906.000,00	1.063.262.730,00	8.342.192.497,90	8.217.331.814,06	124.860.683,84
		Jumlah	5.820.571.593.044,79		70.321.314.638,59	109.132.021.973,42	5.781.760.885.709,96	5.777.801.045.150,59	3.959.840.559,37
10	Oktober	Biaya Perkara	120.012.358.471,46		19.468.854.615,00	19.229.319.802,00	120.251.893.284,46	116.631.068.413,67	3.620.824.870,79
		Biaya Eksekusi	200.401.018.591,10		13.536.326.925,00	5.990.611.980,00	207.946.733.536,10	207.380.107.073,90	566.626.462,20
		Biaya Konsiyasi	5.433.565.625.361,09		234.719.460.107,00	49.518.031.774,87	5.618.767.053.693,22	5.618.507.999.445,22	259.054.244,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.439.690.788,41		2.124.207.257,12	120.000.000,00	21.443.898.045,53	21.434.549.788,41	9.348.257,12
		PHI*)	8.342.192.497,90		1.451.085.818,00	1.820.664.049,00	7.972.614.266,90	7.789.181.733,06	183.432.533,84
		Jumlah	5.781.760.885.709,96		271.299.934.722,12	76.678.627.605,87	5.976.382.192.826,21	5.971.742.906.458,26	4.639.286.367,95
11	November	Biaya Perkara	120.251.893.284,46		29.313.972.511,00	19.066.570.882,04	130.499.294.913,42	126.778.943.366,09	3.720.351.547,33
		Biaya Eksekusi	207.946.733.536,10		23.279.450.055,00	21.261.373.778,00	209.964.809.813,10	209.396.362.306,10	568.447.507,00
		Biaya Konsiyasi	5.618.767.053.693,22		148.458.832.770,00	143.987.865.484,00	5.623.238.020.979,22	5.623.146.152.693,22	91.868.286,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.443.898.045,53		495.000.000,00	2.647.143.680,12	19.291.754.365,41	19.281.754.365,41	10.000.000,00
		PHI*)	7.972.614.266,90		1.064.213.621,00	832.636.684,00	8.204.191.203,90	8.061.837.210,06	142.353.993,84
		Jumlah	5.976.382.192.826,21		202.611.468.957,00	187.795.590.508,16	5.991.198.071.275,05	5.986.665.049.940,88	4.533.021.334,17
12	Desember	Biaya Perkara	130.499.294.913,42		17.392.568.751,00	33.858.784.041,00	114.033.079.623,42	110.498.845.360,54	3.534.234.262,88
		Biaya Eksekusi	209.964.809.813,10		130.036.592.401,94	33.252.035.862,94	306.749.366.352,10	306.247.743.808,90	501.622.543,20
		Biaya Konsiyasi	5.623.238.020.979,22		307.423.448.475,00	130.858.492.048,00	5.799.802.977.406,22	5.799.634.898.108,22	168.079.298,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.291.754.365,41		4.894.871.721,00	3.184.811.818,00	21.001.814.268,41	20.991.814.268,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.204.191.203,90		434.747.553,00	657.017.311,00	7.981.921.445,90	7.782.981.702,06	198.939.743,84
		Jumlah	5.991.198.071.275,05		460.182.228.901,94	201.811.141.080,94	6.249.569.159.096,05	6.245.156.283.248,13	4.412.875.847,92

3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		
1	Januari	Biaya Perkara	25.763.965.766,00	(2.712.239.226,00)	68.223.843.455,00	52.791.160.518,00	38.484.409.477,00	31.827.095.656,00	6.657.313.821,00
		Biaya Eksekusi	4.466.906.250,00	109.770.100,00	1.139.073.000,00	622.472.000,00	5.093.277.350,00	4.413.248.850,00	680.028.500,00
		Biaya Konsinyasi	28.452.028.737,44	(553.394.700,00)	453.200.800,00	1.163.777.944,44	27.188.056.893,00	26.899.328.659,00	288.728.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	58.682.900.753,44	(3.155.863.826,00)	69.816.117.255,00	54.577.410.462,44	70.765.743.720,00	63.139.673.165,00	7.626.070.555,00
2	Februari	Biaya Perkara	38.484.409.477,00		45.231.265.900,00	45.250.619.750,00	38.465.055.627,00	31.366.423.477,00	7.098.632.150,00
		Biaya Eksekusi	5.093.277.350,00		573.827.000,00	660.698.000,00	5.006.406.350,00	4.397.110.850,00	609.295.500,00
		Biaya Konsinyasi	27.188.056.893,00		188.350.000,00	4.577.730.500,00	22.798.676.393,00	22.551.343.159,00	247.333.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	70.765.743.720,00		45.993.442.900,00	50.489.048.250,00	66.270.138.370,00	58.314.877.486,00	7.955.260.884,00
3	Maret	Biaya Perkara	38.465.055.627,00		52.711.362.759,00	53.968.032.754,00	37.208.385.632,00	30.560.154.272,00	6.648.231.360,00
		Biaya Eksekusi	5.006.406.350,00		603.371.500,00	727.080.400,00	4.882.697.450,00	4.306.206.870,00	576.490.580,00
		Biaya Konsinyasi	22.798.676.393,00		1.971.318.026,00	938.509.319,00	23.831.485.100,00	23.610.536.666,00	220.948.434,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	66.270.138.370,00		55.286.052.285,00	55.633.622.473,00	65.922.568.182,00	58.476.897.808,00	7.445.670.374,00
4	April	Biaya Perkara	37.208.385.632,00		29.048.599.543,00	36.781.022.005,00	29.475.963.170,00	22.818.275.180,00	6.657.687.990,00
		Biaya Eksekusi	4.882.697.450,00		585.495.000,00	569.114.000,00	4.899.078.450,00	4.237.590.350,00	661.487.100,00
		Biaya Konsinyasi	23.831.485.100,00		319.560.000,00	1.488.527.330,00	22.662.517.770,00	22.429.623.536,00	232.894.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	65.922.568.182,00		29.953.654.543,00	38.838.663.335,00	57.037.559.390,00	49.485.489.666,00	7.552.069.724,00
5	Mei	Biaya Perkara	29.475.963.170,00		49.128.711.172,00	37.832.921.622,00	40.771.752.720,00	34.020.722.003,00	6.751.030.717,00
		Biaya Eksekusi	4.899.078.450,00		983.281.854,00	361.135.900,00	5.521.224.404,00	4.859.865.804,00	661.358.600,00
		Biaya Konsinyasi	22.662.517.770,00		458.150.000,00	618.272.000,00	22.502.395.770,00	22.256.106.536,00	246.288.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	57.037.559.390,00		50.570.143.026,00	38.812.329.522,00	68.795.372.894,00	61.136.694.343,00	7.658.678.551,00
6	Juni	Biaya Perkara	40.771.752.720,00		60.658.192.440,00	61.795.718.192,00	39.634.226.968,00	32.816.840.626,00	6.817.386.342,00
		Biaya Eksekusi	5.521.224.404,00		816.783.000,00	1.336.696.554,00	5.001.310.850,00	4.267.308.350,00	734.002.500,00
		Biaya Konsinyasi	22.502.395.770,00		908.746.100,00	1.593.628.100,00	21.817.513.770,00	21.605.524.536,00	211.989.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	68.795.372.894,00		62.383.721.540,00	64.726.042.846,00	66.453.051.588,00	58.689.673.512,00	7.263.378.076,00
7	Juli	Biaya Perkara	39.634.226.968,00		49.223.030.402,00	50.877.769.091,00	37.879.488.279,00	30.818.554.908,00	7.060.933.371,00
		Biaya Eksekusi	5.001.310.850,00		938.643.000,00	654.210.900,00	5.285.742.950,00	4.575.711.250,00	710.031.700,00
		Biaya Konsinyasi	21.817.513.770,00		634.009.980,00	627.629.880,00	21.823.893.868,00	21.647.180.434,00	176.713.434,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	66.453.051.588,00		50.795.683.382,00	52.259.609.873,00	64.989.125.097,00	57.041.446.592,00	7.947.678.505,00
8	Agustus	Biaya Perkara	37.879.488.279,00		53.999.572.973,00	54.835.266.304,00	37.043.794.948,00	30.233.795.160,00	6.809.999.788,00
		Biaya Eksekusi	5.285.742.950,00		1.058.147.000,00	744.281.300,00	5.599.608.650,00	4.885.999.450,00	713.609.200,00
		Biaya Konsinyasi	21.823.893.868,00		624.915.000,00	12.008.812.600,00	10.449.996.268,00	10.280.672.268,00	169.324.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	64.989.125.097,00		55.692.634.973,00	67.588.360.204,00	53.093.399.866,00	45.400.466.876,00	7.692.932.988,00
9	September	Biaya Perkara	37.043.794.948,00		50.672.456.069,00	51.040.292.699,00	36.675.958.318,00	30.022.479.682,00	6.653.478.636,00
		Biaya Eksekusi	5.599.608.650,00		708.079.500,00	742.543.300,00	5.565.144.850,00	4.954.414.350,00	610.730.500,00
		Biaya Konsinyasi	10.449.996.268,00		352.813.766,00	376.410.000,00	10.426.400.024,00	10.257.562.268,00	168.837.766,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	53.093.399.866,00		51.733.349.335,00	52.159.245.999,00	52.667.503.202,00	45.234.456.300,00	7.433.046.902,00
10	Oktober	Biaya Perkara	36.675.958.318,00		48.495.922.575,00	50.144.771.460,00	35.027.109.433,00	28.134.073.070,00	6.893.036.354,00
		Biaya Eksekusi	5.565.144.850,00		914.552.100,00	859.187.600,00	5.620.509.350,00	4.924.597.850,00	695.911.500,00
		Biaya Konsinyasi	10.426.400.034,00		947.701.000,00	633.663.784,00	10.740.437.250,00	10.482.249.484,00	258.187.766,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	52.667.503.202,00		50.358.175.675,00	51.637.622.844,00	51.388.056.033,00	43.540.920.413,00	7.847.135.620,00
11	November	Biaya Perkara	35.027.109.433,00		49.832.422.727,00	51.666.380.334,00	33.193.151.826,00	26.576.975.409,00	6.616.176.417,00
		Biaya Eksekusi	5.620.509.350,00		790.353.000,00	828.690.900,00	5.582.171.450,00	4.954.079.450,00	628.092.000,00
		Biaya Konsinyasi	10.740.437.250,00		295.886.190,00	1.046.001.700,00	9.990.321.740,00	9.877.210.674,00	113.111.066,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	51.388.056.033,00		50.918.661.917,00	53.541.072.934,00	48.765.645.016,00	41.408.265.533,00	7.357.379.483,00
12	Desember	Biaya Perkara	33.193.151.826,00		32.568.886.364,00	43.909.544.074,00	21.852.494.116,00	16.518.865.526,00	5.333.628.590,00
		Biaya Eksekusi	5.582.171.450,00		718.494.000,00	1.050.966.000,00	5.249.689.450,00	4.830.974.950,00	418.714.500,00
		Biaya Konsinyasi	9.990.321.740,00		112.037.000,00	1.249.818.066,00	8.852.540.674,00	8.750.836.674,00	101.704.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	48.765.645.016,00		33.399.407.364,00	46.210.328.140,00	35.954.724.240,00	30.100.677.150,00	5.854.047.090,00

4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir		
1	Januari	Biaya Perkara	2.497.897.376,00	(1.371.000,00)	613.429.200,00	571.082.700,00	2.538.872.876,00	2.190.328.283,00	348.544.593,00
		Biaya Eksekusi	55.927.300,00	0,00	1.350.000,00	2.228.200,00	55.049.100,00	55.049.100,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.553.824.676,00	(1.371.000,00)	614.779.200,00	573.310.900,00	2.593.921.976,00	2.245.377.383,00	348.544.593,00
2	Februari	Biaya Perkara	2.538.872.876,00	0,00	536.332.300,00	515.780.545,00	2.559.424.631,00	2.248.144.623,00	311.280.008,00
		Biaya Eksekusi	55.049.100,00	0,00	3.500.000,00	1.891.200,00	56.657.900,00	56.657.900,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.593.921.976,00	0,00	539.832.300,00	517.671.745,00	2.616.082.531,00	2.304.802.523,00	311.280.008,00
3	Maret	Biaya Perkara	2.559.424.631,00	0,00	712.962.000,00	704.986.650,00	2.567.399.981,00	2.272.414.023,00	294.985.958,00
		Biaya Eksekusi	56.657.900,00	0,00	4.250.000,00	2.065.500,00	58.842.400,00	57.122.400,00	1.720.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.616.082.531,00	0,00	717.212.000,00	707.052.150,00	2.626.242.381,00	2.329.536.423,00	296.705.958,00
4	April	Biaya Perkara	2.567.399.981,00	0,00	517.393.900,00	571.844.325,00	2.512.949.556,00	2.201.102.898,00	311.846.658,00
		Biaya Eksekusi	58.842.400,00	0,00	1.500.000,00	1.938.400,00	58.404.000,00	56.784.000,00	1.620.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.626.242.381,00	0,00	518.893.900,00	573.782.725,00	2.571.353.556,00	2.257.886.898,00	313.466.658,00
5	Mei	Biaya Perkara	2.512.949.556,00	0,00	551.267.850,00	455.131.328,00	2.609.086.078,00	2.253.420.673,00	355.665.405,00
		Biaya Eksekusi	58.404.000,00	0,00	8.650.000,00	8.479.600,00	58.574.400,00	55.068.400,00	3.506.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.571.353.556,00	0,00	559.917.850,00	463.610.928,00	2.667.660.478,00	2.308.489.073,00	359.171.405,00
6	Juni	Biaya Perkara	2.609.086.078,00	0,00	843.334.850,00	847.304.275,00	2.605.116.653,00	2.253.221.223,00	351.895.430,00
		Biaya Eksekusi	58.574.400,00	0,00	8.062.000,00	5.395.600,00	61.240.800,00	59.426.800,00	1.814.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.667.660.478,00	0,00	851.396.850,00	852.699.875,00	2.666.357.453,00	2.312.648.023,00	353.709.430,00
7	Juli	Biaya Perkara	2.605.116.653,00	0,00	682.560.250,00	666.672.450,00	2.621.004.453,00	2.324.484.937,00	296.519.516,00
		Biaya Eksekusi	61.240.800,00	0,00	1.780.000,00	1.369.000,00	61.651.800,00	58.475.800,00	3.176.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.666.357.453,00	0,00	684.340.250,00	668.041.450,00	2.682.656.253,00	2.382.960.737,00	299.695.516,00
8	Agustus	Biaya Perkara	2.621.004.453,00	0,00	727.950.050,00	745.046.895,00	2.603.907.608,00	2.340.602.641,00	263.304.967,00
		Biaya Eksekusi	61.651.800,00	0,00	8.100.000,00	1.994.650,00	67.767.150,00	64.190.150,00	3.577.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.682.656.253,00	0,00	736.050.050,00	747.031.545,00	2.671.674.758,00	2.404.792.791,00	266.881.967,00
9	September	Biaya Perkara	2.603.907.608,00	0,00	661.731.150,00	653.978.080,00	2.611.660.678,00	2.312.571.693,00	299.088.985,00
		Biaya Eksekusi	67.767.150,00	0,00	150.000,00	2.275.600,00	65.641.550,00	62.191.550,00	3.450.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.671.674.758,00	0,00	661.881.150,00	656.253.680,00	2.677.302.228,00	2.374.763.243,00	302.538.985,00
10	Oktober	Biaya Perkara	2.611.660.678,00	0,00	624.848.300,00	584.055.864,00	2.652.453.114,00	2.348.005.940,00	304.447.174,00
		Biaya Eksekusi	65.641.550,00	0,00	3.707.800,00	7.826.000,00	61.523.350,00	60.103.350,00	1.420.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.677.302.228,00	0,00	628.556.100,00	591.881.864,00	2.713.976.464,00	2.408.109.290,00	305.867.174,00
11	November	Biaya Perkara	2.652.453.114,00	0,00	832.053.208,00	853.774.252,00	2.630.732.070,00	2.401.727.666,00	229.004.404,00
		Biaya Eksekusi	61.523.350,00	0,00	1.835.808,00	3.555.850,00	59.803.308,00	58.383.308,00	1.420.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.713.976.464,00	0,00	833.889.016,00	857.330.102,00	2.690.535.378,00	2.460.110.974,00	230.424.404,00
12	Desember	Biaya Perkara	2.630.732.070,00	0,00	941.078.050,00	872.845.750,00	2.698.964.370,00	2.474.159.914,00	224.804.456,00
		Biaya Eksekusi	59.803.308,00	0,00	3.577.000,00	2.895.000,00	60.485.308,00	60.485.308,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.690.535.378,00	0,00	944.655.050,00	875.740.750,00	2.759.449.678,00	2.534.645.222,00	224.804.456,00

Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam CaLK Mahkamah Agung dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

Adanya penyalahgunaan uang perkara sebesar Rp400.991.711,00 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor periode 2000 sampai dengan 2003 yang hingga kini statusnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian RI;

- a. Adanya penyalahgunaan uang perkara sebesar Rp605.515.577,55 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 1996 yang sudah meninggal dunia pada tanggal 5 November 1999 di rumah tahanan saat menjalani hukuman penjara atas perkara tersebut. Sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/J.A/8/1998 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran pengganti berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada para ahli warisnya yang sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi. Oleh karena itu, yang berwenang melakukan penyitaan pembayaran pengganti adalah Jaksa sehingga Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk melakukan penyitaan tersebut;
- b. Adanya penyalahgunaan uang perkara oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil sebesar Rp1.884.663.259,00 dan hingga kini yang bersangkutan sedang menjalani masa tahanan atas perkara tersebut;
- c. Terdapat koreksi saldo awal Tahun 2022 disebabkan kesalahan input oleh Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

RINCIAN KOREKSI SALDO AWAL TAHUN 2022

(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
1	PN Jakarta Timur	Terjadi kesalahan penginputan data, namun dalam pembukuan sudah benar	4.732.433.400,00	(16.644.363,00)	221.927.726,79	147.454.906.088,07	1.505.857.956,43	0,00	1.602.433.400,00	34.543.673,00	220.947.726,79	147.454.895.088,07	1.505.857.956,43	0,00
2	PN Sukabumi	BA KOREKSI AWAL TAHUN	77.787.000,00	0,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00	55.422.000,00	0,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PN Cibadak	Kesalahan penginputan Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara dan Biaya Sita/Jaminan/Eksekusi/Lelang	132.627.680,00	848.500,00	92.415.000,00	16.490.983.185,00	0,00	0,00	132.657.680,00	848.500,00	94.755.000,00	16.490.983.185,00	0,00	0,00
4	PN Tegal	Koreksi saldo awal Biaya Eksekusi	106.734.122,00	11.110.778,00	103.489.575,00	7.668.044,00	0,00	0,00	106.734.122,00	11.110.778,00	103.525.575,00	7.668.044,00	0,00	0,00
5	PN Banda Aceh	Kesalahan perhitungan pada buku kas	118.579.671,26	3.545.450,00	208.562.355,00	492.736.503,00	5.177.192.346,00	19.175.000,00	118.362.171,26	3.495.450,00	196.233.355,00	492.736.503,00	5.177.192.346,00	19.175.000,00
6	PN Padang Sidempuan	Kesalahan input pada data awal tahun	262.166.453,00	16.094.500,00	49.518.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	262.166.453,00	16.094.500,00	63.369.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7	PN Bangkinang	Saldo akhir 2021 beda dengan saldo awal 2022 karena ada kesalahan memasukkan nominal uang penerimaan pada panjar biaya perkara	149.715.900,00	0,00	259.272.500,00	8.543.965.853,00	18.000.000,00	0,00	170.825.900,00	0,00	259.272.500,00	8.543.965.853,00	18.000.000,00	0,00
8	PT Manado	Koreksi saldo awal 2022 dikarenakan untuk menindaklanjuti hasil temuan surveillance dari Direktorat Badan Peradilan Umum di Pengadilan Tinggi Manado terkait ketidaktepatan penginputan data	2.134.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi						
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	
		laporan keuangan perkara di KOMDANAS. Adapun Saldo Awal Tahun 2022 sebelum koreksi sejumlah Rp 2.134.377,00 dikoreksi menjadi sejumlah Rp 672.000,00. Untuk sumber data yang diinput sebelumnya dari Buku Bantu Biaya Proses yang seharusnya sumber data dari Buku Induk Keuangan Perkata Perdata													
9	PN Donggala	Saldo Awal Panjar Biaya Perkara di bulan Januari 2022 yakni Rp. 28.673.233,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bukan Rp. 28.673.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Adanya selisih tersebut diakibatkan oleh kesalahan pencatatan Panjar Biaya Perkara oleh Kasir di mana nilai Rp. 233,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehingga seolah ada kelebihan uang senilai Rp. 267,- (dua ratus enam	28.673.500,00	3.065.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.673.233,00	3.065.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		poluh tujuh rupiah) pada Kas Pembukuan												
10	PN Parigi	Koreksi biaya perkara, biaya eksekusi dan biaya ATK	31.509.000,00	1.783.500,00	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	31.804.000,00	557.500,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
11	PN Sunggumi nasa	Koreksi Awal Tahun Konsinyasi 2022	20.730.000,00	4.808.900,00	92.831.450,00	6.376.502.722,00	0,00	0,00	20.730.000,00	4.808.900,00	92.831.450,00	6.376.502.728,00	0,00	0,00
12	PN Masamba	Saldo awal untuk bulan januari pada laporan pemeriksaan bulan desember adalah Rp.26.475.500, namun saat ingin melakukan pelaporan bulan januari dikomdanas saldo awal berubah, sehingga dilakukan koreksi.	26.555.500,00	550.000,00	20.958.000,00	795.711.000,00	0,00	0,00	26.475.500,00	0,00	20.958.000,00	795.711.000,00	0,00	0,00
13	PN Ambon	Terjadi kesalahan hitung pada rekening koran	449.445.296,00	178.654.590,00	538.712.230,00	9.416.444.858,00	2.703.259.958,00	5.891.000,00	460.538.631,00	37.143,00	533.720.330,00	9.416.445.128,00	2.541.150.558,00	5.891.000,00
14	PT Denpasar	Karena saldo awal komdanas dengan saldo di laporan manual tidak sinkron	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PN Sumbawa Besar	Saldo akhir desember 2021 Rp60.814.444 di perbaiki karena ada salah penginputan menjadi Rp60.820.444	60.816.444,00	0,00	78.122.000,00	1.494.781.889,00	102.000,00	0,00	60.820.444,00	0,00	78.122.000,00	1.494.781.889,00	102.000,00	0,00
16	PA Jakarta Utara	Petugas input komdanas salah input dibulan november 2022	162.567.500,00	24.944.595,00	97.543.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00	153.477.500,00	24.944.595,00	97.543.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00
17	PA Bandung	Adanya perubahan saldo awal karena adanya kesalahan input pada SIPP	257.885.800,00	70.397.000,00	14.279.000,00	0,00	0,00	0,00	257.825.800,00	70.417,00	14.279.000,00	0,00	0,00	0,00
18	PA Sumedang	Perubahan saldo awal	398.378,00	642.305,70	23.056.000,00	0,00	0,00	0,00	379.766,00	76.205,40	23.056.000,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
19	PA Ciamis	Saldo eksekusi belum tercatat,	131.269.00 0,00	8.312.750, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.644.00 0,00	8.312.750 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	PA Garut	Terdapat kesalahan input saldo eksekusi sejumlah Rp 6.860.000, uang tak bertuan sejumlah Rp 4.128.500 (sudah disetor ke kas negara tanggal 1 Agustus 2022), serta pembulatan saldo ATK sejumlah Rp 34	122.332.70 0,00	17.298.334 0,00	1.260.000, 00	0,00	0,00	0,00	111.344.20 0,00	17.298.30 0,00	1.260.000, 00	0,00	0,00	0,00
21	PA Cirebon	Setelah dikoreksi ada penyesuaian saldo awal sebesar 3.353000,-	11.908.000, 00	4.128.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555.000,0 0	4.128.000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA Indramayu	Selisih 342.436.000 yang telah ditetapkan sebagai uang tidak bertuan dan telah di setor ke kas negara	658.202.80 0,00	49.962,00	22.005.000, 00	0,00	0,00	0,00	315.766.80 0,00	49.962,00	22.005.000, 00	0,00	0,00	0,00
23	PA Kuningan	Terdapat Kesalahan input tertulis 69.003.000 seharusnya 65.668.000	69.003.000, 00	16.444.500 0,00	3.335.000, 00	0,00	0,00	0,00	65.668.000, 00	16.444.50 0,00	3.335.000, 00	0,00	0,00	0,00
24	PA Bekasi	Berdasarkan penyisiran tim, kelebihan saldo sebesar Rp 173.098.000,-	528.987.80 0,00	12.000.000 0,00	33.529.000, 00	2.333.771.01 4,00	0,00	0,00	366.111.80 0,00	12.000.00 0,00	33.529.000, 00	2.333.771.01 4,00	0,00	0,00
25	PA Karawang	1.Penambahan uang tunai berdasarkan saldo awal e-keuangan 2.Selisih biaya ATK perkara eksekusi nomor 1315/Pdt.G/2020/PA .Krw sebesar Rp 50.000,00	36.773.600, 00	21.512.400 0,00	16.408.000, 00	0,00	0,00	0,00	75.747.750, 00	21.562.40 0,00	16.408.000, 00	0,00	0,00	0,00
26	PA Kota Cimahi	Koreksi awal tahun 2022	84.163.000, 00	1.415.976, 00	11.778.000, 00	2.484.945.84 1,00	0,00	0,00	33.189.000, 00	1.415.976 0,00	11.778.000, 00	2.484.945.84 1,00	0,00	0,00
27	PA Ngamprah	Terdapat selisih sebesar Rp. 595.100,- sebagai	114.073.10 0,00	3.073.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.478.00 0,00	3.073.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		uang yang tidak diketahui pemiliknya												
28	PA Cibadak	Koreksi Rp. 500,- pada biaya perkara karena kesalahan input/pencatatan pada Komdanas	49.896.500,00	9.173.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00	9.173.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
29	PA Sumber	Kesalahan input saldo	231.453.000,00	5.796.500,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	235.429.000,00	5.896.500,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
30	PA Cibinong	Terdapat selisih sebesar Rp 146.147.000 dikarenakan salah input	628.204.400,00	61.724.500,00	23.318.900,00	26.640.000,00	0,00	0,00	482.057.400,00	61.724.500,00	23.318.900,00	26.640.000,00	0,00	0,00
31	PA Cikarang	Kesalahan Input pada bulan Oktober tahun 2021 dan November	417.594.500,00	10.841.800,00	68.864.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	230.983.500,00	11.341.800,00	68.474.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00
32	PA Kota Tasik	Terdapat selisih Rp. 873.000 disebabkan oleh salah input.	32.928.000,00	2.067.500,00	6.069.000,00	0,00	0,00	0,00	32.055.000,00	2.067.500,00	6.069.000,00	0,00	0,00	0,00
33	PA Pematang	Selesih di Saldo Awal	196.646.000,00	13.112.109,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	192.186.000,00	13.112.109,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00
34	PA Demak	Kesalahan dalam penginputan di komdanas	96.085.000,00	68.321.250,00	0,00	56.750.000,00	0,00	0,00	94.675.000,00	68.321.250,00	0,00	56.750.000,00	0,00	0,00
35	PA Purwodadi	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan pada Perkara Eksekusi bulan Agustus Tahun 2021 dengan perkara nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pwd tidak masuk dalam kolom Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	75.406.000,00	5.994.984,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	75.406.000,00	6.069.984,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00
36	PA Pati	BERITA ACARA KOREKSI SALDO AWAL	198.288.000,00	43.588.500,00	0,00	34.900.000,00	0,00	0,00	102.020.000,00	43.588.500,00	96.268.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
37	PA Rembang	- Saldo Awal tahun 2022 sejumlah Rp 42.770.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) bercampur dengan Keuangan	42.770.000,00	10.598.000,00	14.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.395.000,00	10.598.000,00	14.375.000,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal					Saldo Awal Koreksi						
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Perkara Eksekusi yakni sejumlah Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).sehingga nilai saldo awal yang benar adalah sejumlah Rp. 28.395.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).												
38	PA Magelang	Terdapat selisih pada saldo Eksekusi sebesar Rp. 45.561.000,00 yang di input dua kali yaitu pada menu biaya perkara/panjar biaya perkara dan menu biaya sita jaminan/eksekusi/lelang	69.330.300,00	0,00	45.561.000,00	0,00	0,00	0,00	23.769.300,00	0,00	45.561.000,00	0,00	0,00	0,00
39	PA Wonosobo	Adanya pemisahan saldo di aplikasi E Keuangan badilag, di Biaya Perkara dan Biaya Eksekusi yang sebelumnya di gabung di saldo uang biaya perkara	91.791.900,00	14.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.901.900,00	14.632.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00
40	PA Purwokerto	Ada selisish saldo awal pada biaya perkara karena biaya keuangan Perkara dan keuangan eksekusi di masukan dalam satu form keuangan dan selisih sebesar Rp.25.158.000	133.796.500,00	82.276.850,00	24.976.000,00	0,00	0,00	0,00	108.046.500,00	82.276.650,00	25.158.000,00	0,00	0,00	0,00
41	PA Klaten	Ada kesalahan penginputan	66.422.000,00	661.000,00	53.235.000,00	0,00	0,00	0,00	67.442.000,00	1.111.000,00	53.235.000,00	0,00	0,00	0,00
42	PA Boyolali	Salah pemahaman penginputan pada Kolom Biaya Perkara	287.403.100,00	14.366.300,00	128.380.100,00	0,00	0,00	0,00	159.023.000,00	14.366.300,00	128.380.100,00	0,00	0,00	0,00
43	PA Sragen	Ada transaksi pembelanjaan ATK	193.532.800,00	15.892.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.532.800,00	13.213.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		yang belum diinput di komdanas sebesar Rp 2.779.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).												
44	PA Karanganyar	Selisih 39.735.000 merupakan keuangan eksekusi yang digabung dengan keuangan perkara	100.379.000,00	9.940.000,00	39.735.000,00	0,00	0,00	0,00	60.644.000,00	9.940.000,00	39.735.000,00	0,00	0,00	0,00
45	PA Surakarta	Koreksi data disesuaikan dengan data pada aplikasi aps badilag	42.265.000,00	4.674.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	40.005.000,00	4.674.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
46	PA Kajen	Koreksi saldo awal di bulan Januari Tahun 2022 menyesuaikan data dari pencatatan di e-Keuangan Badilag.	36.616.000,00	8.578.500,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	37.301.000,00	8.653.500,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
47	PA Yogyakarta	Telah dilakukan perbaikan pada sipp dan telah di audit kembali serta mengoreksi pada sipp dan aps_badilag (E Keuangan)	41.824.300,00	11.132.800,00	39.376.950,00	9.226.789.884,00	0,00	0,00	47.098.000,00	6.690.250,00	39.311.950,00	9.226.789.884,00	0,00	0,00
48	PA Sleman	Telah dilakukan audit oleh satker	86.943.500,00	13.367.980,00	182.056.000,00	0,00	0,00	0,00	85.804.000,00	13.367.980,00	183.280.000,00	0,00	0,00	0,00
49	PA Bantul	Telah dilakukan audit oleh satker	90.602.000,00	16.235.265,00	47.042.000,00	0,00	0,00	0,00	90.740.000,00	15.604.765,00	46.904.000,00	0,00	0,00	0,00
50	PA Wonosari	Penyesuaian saldo awal pada E-Keuangan Badilag yang dimana Biaya Transaksi Lain-Lain tidak terinput pada BIKP E-Keuangan APS Badilag	45.595.000,00	28.114.285,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	42.096.000,00	28.114.285,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
51	PA Surabaya	KESALAHAN PENGHITUNGAN PADA SALDO AWAL	632.466.200,00	3.081.412,00	125.320.700,00	93.000.000,00	0,00	0,00	817.954.700,00	3.081.412,00	139.622.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
52	PA Sidoarjo	Pembenahan keuangan dengan Aplikasi APS	400.339.10 0,00	20.922.311 ,00	157.429.50 0,00	173.309.000, 00	0,00	0,00	406.049.10 0,00	0,00	157.429.50 0,00	173.309.000, 00	0,00	0,00
53	PA Jombang	Tidak ada selisih SALDO AWAL	0,00	16.185.597 ,00	8.580.000, 00	0,00	0,00	0,00	149.801.00 0,00	16.185.59 7,00	8.580.000, 00	0,00	0,00	0,00
54	PA Gresik	Pembulatan uang kecil	106.357.22 3,00	1.256.250, 00	14.750.000 ,00	0,00	0,00	0,00	106.357.25 0,00	1.256.250 ,00	14.750.000 ,00	0,00	0,00	0,00
55	PA Tulungag ung	Saldo awal biaya perkara tercampur dengan saldo awal biaya eksekusi	328.364.00 0,00	1.650.685, 00	1.936.000, 00	0,00	0,00	0,00	326.428.00 0,00	1.650.685 ,00	1.936.000, 00	0,00	0,00	0,00
56	PA Malang	Rp. 107.972.400 Merupakan saldo lebih yang tidak bertuan	381.492.00 0,00	18.439.511 ,00	116.056.00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.519.60 0,00	18.439.51 1,00	116.056.00 0,00	0,00	0,00	0,00
57	PA Kraksaan	Terdapat selisih sebesar RP. 6.341.000 Karena kesalahan input data	146.142.00 0,00	12.908.350 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801.00 0,00	12.908.35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PA Kediri	Terdapat Selisih pada Keuanagn Perkara Senilai : 7.006.022 yang disebabkan oleh adanya sisa panjar tak bertuan sebesar Rp 7.006.000.- dan kesulitan memperoleh pecahan Rp 22.- sedangkan pada Keuangan Biaya ATK terdapat selisih lebih Rp. 99,- karena kesulitan memperoleh pecahan Rp. 1 ,.-.	48.565.000, 00	3.572.401, 00	33.264.000 ,00	0,00	0,00	0,00	41.559.000, 00	3.572.500 ,00	33.264.000 ,00	0,00	0,00	0,00
59	PA Kab. Malang	Penyesuaian angka berdasarkan pembukuan keuangan perkara	780.079.40 0,00	43.689.500 ,00	13.641.000 ,00	105.750.000, 00	0,00	0,00	767.239.40 0,00	43.689.50 0,00	2.330.000, 00	105.750.000, 00	0,00	0,00
60	PA Gunung Sitoli	Perbedaan dalam penetapan saldo BKU	4.794.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PA Sei Rampah	Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 8 September 2022 menerangkan bahwa	32.210.000, 00	23.060.000 ,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	32.210.000, 00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi						
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	
		telah terjadi kesalahan penginputan biaya Proses/Alat Tulis Kantor (ATK) di aplikasi Komdanas pada tahun 2021 sejumlah Rp.23.060.000,- yang seharusnya saldo akhir biaya Proses/Alat Tulis Kantor (ATK) pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 0,- (Nihil).													
62	PA Solok	Saldo keuangan Perkara pada Komdanas sebelumnya digabung dengan saldo biaya keuangan eksekusi sedangkan pada aplikasi e-keuangan dipisah	4.810.000,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.312.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	PA Batusangkar	Karena adanya selisih antara buku induk keuangan manual dengan data yang ada pada SIPP, yang benarnya saldo pada SIPP	8.212.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	PA Padang	Koreksi Saldo Awal yang terdapat pada Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara dan Saldo Awal Biaya Proses/ATK/Pemberkasan serta Saldo Awal Biaya Eksekusi	101.206.722,00	35.362.100,00	51.041.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	78.850.000,00	22.309.650,00	32.703.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
65	PA Koto Baru	Perbaikan saldo awal tahun 2022, disebabkan ada kesalahan mengimput jumlah penerimaan laporan keuangan perkara di E-Keuangan dengan	10.843.000,00	3.393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833.000,00	3.393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Komdanas, sehingga terjadi perbedaan saldo akhir Laporan keuangan perkara												
66	PA Lubuk Sikaping	Adanya kelebihan pengembalian sisa panjar pada tahun 2021 sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PA Talu	Salah catat pada BIK	19.505.000,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.505.000,00	0,00	15.285.000,00	0,00	0,00	0,00
68	PA Payakumbuh	Koreksi karena kesalahan penginputan saldo awal pada aplikasi e-keuangan	12.117.185,00	1.250.000,00	25.946.500,00	0,00	0,00	0,00	12.141.500,00	1.250.000,00	25.946.500,00	0,00	0,00	0,00
69	PA Tanjung Pati	Adanya pengembalian sisa panjar ke negara sebanyak Rp13.006.550	8.258.000,00	(3.443.900,00)	38.284.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	36.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00
70	PA Siak Sri Indrapura	Tercampurnya saldo Biaya Eksekusi (LIPA7b) dengan saldo biaya perkara/panjar Biaya Perkara (LIPA7a) sejumlah Rp4.095.000,00 (empat sembilan puluh lima ribu rupiah)	47.703.000,00	2.370.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	43.558.000,00	2.370.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
71	PA Teluk Kuantan	Ada kesalahan pengisian di saldo bank dan tunai akhir tahun 2021	973.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PA. Pasir Pangarayan	Terdapat selisih antara saldo di komdanas dengan saldo di e-keuangan dan sudah dikoreksi.	16.818.203,00	2.148.550,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	20.554.000,00	2.148.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
73	PA Pangkalan Kerinci		13.528.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PA Bangko	Terdapat Pembulatan Rp 10	4.420.000,00	527.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	527.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PTA Jambi	Tidak terdapat koreksi saldo untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		saldo awal tahun 2022												
76	PA Pangkalan Balai	Sesuai dengan saldo biaya perkara pada aplikasi pendukung keuangan perkara	16.215.000,00	5.935.500,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	17.240.200,00	5.935.500,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
77	PA Pagaralam	Koreksi Awal Tahun 2022	4.800.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PA Palembang	Integrasi Aplikasi E-Kuangan	179.498.000,00	26.079.275,00	35.542.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	148.272.000,00	0,00	36.436.000,00	0,00	0,00	0,00
79	PA Baturaja	Koreksi saldo awal menjadi 20.274.500, karena ada biaya eksekusi hak tanggungan sebesar 62.185.000 yang sebelumnya tergabung dalam biaya perkara, dan sudah dimasukkan ke biaya sita jaminan/eksekusi	88.723.500,00	42.000,00	6.060.000,00	750.000,00	0,00	0,00	20.274.500,00	42.000,00	68.245.000,00	750.000,00	0,00	0,00
80	PA Lubuk Linggau	Terjadi kekeliruan dalam penginputan data	25.425.000,00	6.600.000,00	7.770.000,00	6.104.000,00	0,00	0,00	25.425.000,00	6.600.000,00	7.770.000,00	6.104.000,00	0,00	0,00
81	PA Sekayu	Tidak ada selisih di saldo awal tahun 2022	46.392.000,00	784.500,00	5.860.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	40.532.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00	0,00	0,00
82	PA Sukadana	Biaya proses atau ATK yang tadi nya 0 sudah dirubah menjadi senilaidiatas.	53.220.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.220.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PA Nanga Pinoh	Tidak ada selisih dan koreksi di PA Nanga Pinoh	2.424.000,00	7.563.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	7.563.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PA Ketapang	Saldo Awal Tahun 2022	18.865.000,00	4.128.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865.000,00	4.128.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PA Sanggau	Salah input data biaya eksekusi	9.860.000,00	4.619.400,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860.000,00	4.619.400,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
86	PA Sintang	Koreksi dilaksanakan karena kesalahan input pengeluaran pada saldo akhir 2021	11.087.700,00	68.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.700,00	68.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PA Nanga Bulik	Berdasarkan hasil rapat koordinasi	1.565.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka saldo keuangan perkara disesuaikan dengan saldo BKU agar tidak terdapat selisih pada saldo awal tahun 2022.												
88	PA Tamiang Layang	Terjadi Kesalahan Input Saldo Awal Tahun	120.000,00	11.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PA Kuala Kurun	Terjadi kesalahan input nominal saldo awal tahun pada poin biaya proses/atk	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PA Palangkaraya	Uang sisa panjar eksekusi telah dikembalikan ke pemohon eksekusi pada 10 Desember 2021 dan telah dicatat di SIPP	18.443.500,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PA Muara Teweh	Kesalahan infut saldo biaya proses yang seharusnya 0 terinfut 4.500	7.155.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PA Sampit	Berita acara revisi saldo awal biaya perkara bulan januari 2022 yang semula Rp. 2.024.000 menjadi Rp. 40.477.000,serta revisi saldo awal pada biaya proses/ATK pada bulan Januari 2022 yang semula Rp. 416.330.00 menjadi Rp. 14.380.00	2.024.000,00	416.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477.000,00	416.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PA Pelaihari	Terdapat kekurangan input pengeluaran Biaya Proses/ATK sebesar Rp.35.000,- pada bulan Nopember tahun 2021, dan	7.195.000,00	10.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.000,00	6.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi						
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	
		sebesar Rp.4.885.000,- pada bulan Desember tahun 2021 sehingga saldo akhir Biaya Proses/ATK pada bulan Desember tahun 2021 tidak sama dengan saldo pada e-keuangan APS Badilag yaitu sebesar Rp.10.966.300,- yang seharusnya adalah sebesar Rp.6.046.300,-													
94	PA Kandanga n	Berdasarkan Hasil Laporan Pengelolaan Biaya Proses Bulan Desember 2021	5.043.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.000,00	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	PA Tenggaro ng	Koreksi awal tahun 2022	47.343.000,00	1.524.180,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	46.912.000,00	1.524.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	
96	PA Samarinda	Saldo awal menyesuaikan aps dikarenakan saldo awal telah di tambahkan dengan saldo awal esekusi	97.415.900,00	6.922.125,00	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00	94.974.900,00	6.922.125,00	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00	
97	PA Tanah Grogot	Saldo Awal 15.992.000	17.996.900,00	50.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	14.682.000,00	50.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
98	PA Tanjung Redep	Koreksi Saldo Awal dan Saldo ATK, Saldo Biaya Eksekusi	33.492.400,00	3.434.550,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	28.542.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	PA Nunukan	Terjadi kesalahan input	21.917.000,00	3.145.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	20.582.000,00	3.145.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	PA Boroko	Telah dilakukan Revisi Saldo Awal Biaya Proses/ATK Tahun 2022 dikarenakan terdapat perbedaan antara saldo akhir Biaya Proses / ATK riil yang sejumlah Rp. 0 dengan saldo keuangan komdanas yang masih tercatat sebesar 652.700,-	3.100.000,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
101	PA Jenepono	Berdasarkan LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPA7 PERIODE 01/01/2022 S/D 31/01/2022 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO yang diupdate pada aplikasi SIPP	26.297.000,00	1.200.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00	26.297.000,00	1.200.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00
102	PA Barru	Terjadi salah penginputan pada sub panggilan dan ATK perkara pada bulan November 2021	30.414.000,00	375.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	30.214.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
103	PA Sungguminasa	Koreksi saldo awal biaya proses/ATK	54.571.500,00	13.309.150,00	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00	54.571.500,00	4.759.500,00	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00
104	PA Sengkang	Koreksi saldo awal tercantum 56.236.000 seharusnya 55.456.000 dan eksekusi dari 3.885.000 seharusnya 940.000	56.236.000,00	0,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	55.456.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
105	PA Watan Soppeng	Terjadi kesalahan penginputan pada saldo awal	14.927.500,00	3.990.975,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00	14.927.500,00	0,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00
106	PA Bantaeng	Adanya perbedaan saldo awal Biaya Proses karena salah inputan pada aplikasi Komdanas	19.970.000,00	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PA Bulukumba	Salah input data di saldo awal akhir tahun 2021	29.766.000,00	0,00	14.100.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	29.766.000,00	578.000,00	14.100.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00
108	PA Enrekang	Adanya kelebihan biaya perkara sebesar Rp. 8.960.000 yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya	19.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
109	PA Sidenreng	Koreksi saldo awal tahun 2022	41.009.000,00	(22.586.750,00)	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	40.994.000,00	401.850,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00
110	PA Palopo	Sisa saldo ATK tahun 2021 sebesar Rp.350.000	6.006.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PA Kendari	Penyesuaian laporan keuangan dengan yang terbaca pada aplikasi e-keuangan badilag	44.911.500,00	721.650,00	8.525.000,00	0,00	0,00	0,00	36.356.500,00	0,00	8.555.000,00	0,00	0,00	0,00
112	PA Ambon	Hasil Pemeriksaan sesuai dengan aplikasi e keuangan RP, 37.009.950,00.	37.009.950,00	3.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009.950,00	3.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	PA Mataram	Koreksi Perubahan Berdasarkan BA Koreksi Saldo Awal 2022 No W22-A1/1344/HK.05/VIII/2022	57.670.000,00	39.550,00	85.261.000,00	163.322.000,00	0,00	0,00	63.081.000,00	0,00	78.900.000,00	163.322.000,00	0,00	0,00
114	PA Selong	Saldo tahun 2021Saldo tahun 2021Saldo tahun 2021	241.180,00	50.725.250,00	19.993.000,00	0,00	0,00	0,00	225.406,00	66.300,00	19.993.000,00	0,00	0,00	0,00
115	PA Bima	Koreksi Saldo awal sesuai Aplikasi e-Keuangan Badilag.	138.286,44	42.366.645,00	43.419.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	125.695,00	42.366,60	57.010.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
116	PA Taliwang	Perubahan saldo awal terjadi dikarenakan dilakukan setting awal BKU di E-keuangan pada bulan Juni 2022 berkaitan dengan validasi di Kinstatker. Pada awalnya uang sejumlah Rp.4.665.000,- terinput sebagai saldo eksekusi, namun setelah dilakukan setting awal saldo tersebut diinput sebagai saldo panjar eksekusi untuk perkara kewarisan	10.196.459,00	1.050.000,00	4.665.000,00	0,00	0,00	0,00	12.157.000,00	0,00	4.665.000,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
117	PA Kupang	0019/Pdt.G/2017/PA .Tlg Pada hari ini Senin tanggal 3 Januari 2022, telah diketahui terjadi kesalahan pembukuan atas saldo awal Tahun 2022 sejumlah Rp. 10.965.700 (sepuluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada aplikasi Komdanas, ATK Perkara sejumlah Rp. 2.403.000 dan perkara eksekusi yang di terima pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 2.000.000 yang tidak terinput pada aplikasi KOMDANAS pada bulan Januari 2022 (awal tahun 2022) . Dimana seharusnya saldo awal tahun 2022 sejumlah Rp. 3.963.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan ATK perkara pada awal tahun 2022 sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dan saldo awal perkara eksekusi sejumlah Rp 1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan aplikasi SIPP dan aplikasi APS BADILAG pada awal tahun 2022.	10.965.700,00	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.000,00	100.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumen sumber koreksi saldo awal pada tahun 2022 pada Aplikasi KOMDANAS.												
118	PA Kalabahi	Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi ditemukan Selisih Panjar Biaya Perkara sebesar Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada Bulan Desember 2021. Hal ini dikarenakan tidak diinputnya biaya lain-lain sebesar Rp. 184.000 tersebut. Mohon untuk diperbaharui	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PA Ende	Perubahan Saldo awal terjadi karena ada transaksi di tahun 2021 yang tidak terinput di sipp dan E keuangan.	28.531.500,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861.500,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA Manna	Kekurangan biaya perkara dari biaya sumber sebesar Rp. 135.000 kelebihan biaya Eksekusi dari biaya sumber sebesar Rp. 135.000 Kekurangan Biaya Proses sebesar Rp. 75.000	3.317.200,00	883.600,00	10.878.500,00	8.072.000,00	0,00	0,00	3.452.200,00	958.600,00	10.743.500,00	8.072.000,00	0,00	0,00
121	PA Pangkal Pinang	Data biaya proses/ATK/Pember kasan	7.760.000,00	6.852.500,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760.000,00	6.852.500,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
122	PA Mentok	Koreksi saldo awal uang proses	21.598.000,00	107.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PA Gorontalo	Terdapat selisih sebesar 266.000	28.454.000,00	1.595.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	28.720.000,00	1.595.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00
124	PTTUN Medan	Laporan Keuangan Perkara tingkat banding pada bulan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Desember terdapat kesalahan dalam penjumlahan perkara												
125	PTUN Samarinda	Koreksi Saldo Biaya ATK dilakukan karena adanya kesalahan input data oleh Kasir pada periode bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Koreksi terlampir.	38.493.659,00	48.087.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PTUN Bengkulu	Terjadi penuploadan dua kali Biaya Eksekusi	47.946.850,00	4.832.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	47.325.850,00	4.832.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00

F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri

F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI

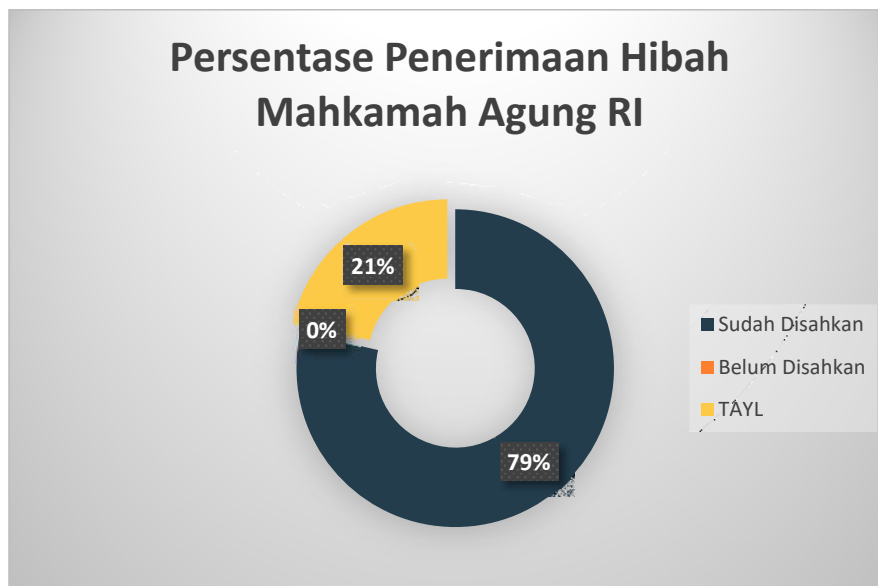
Penerimaan hibah Mahkamah Agung RI adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan. Penerimaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 atau periode Semester II ini mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri yang sudah disahkan sejumlah Rp70.284.339.793,00 ditambah dengan hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp19.068.832.217,00 sehingga jika ditotal, nilai perolehan hibah Semester II tahun 2022 sebesar Rp89.353.172.010,00 (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah*).

Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH
Hibah Sudah Disahkan	168	343	Rp 70.284.339.793,00
Hibah TAYL	35	49	Rp 19.068.832.217,00
TOTAL	203	392	Rp 89.353.172.010,00

Persentase Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI



Jika dikelompokkan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang dan hibah jasa yang terdapat pada 203 satuan kerja dengan 392 dokumen pengesahan hibah yang dapat dijelaskan berikut ini:

Hibah Menurut Bentuknya Semester II Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH
Hibah Barang	196	378	Rp 76.825.964.568,00
Hibah Uang	6	13	Rp 10.490.540.848
Hibah Jasa	1	1	Rp 2.036.666.594
TOTAL	203	392	Rp 89.353.172.010,00

Lebih lanjut jika dikelompokkan menurut sumber asal hibahnya, secara umum satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menerima hibah yang bersumber dari dalam negeri baik berasal dari individu atau perseorangan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten), lembaga perbankan atau keuangan dan juga organisasi dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Menurut Sumber Asal Hibahnya Semester II Tahun 2022

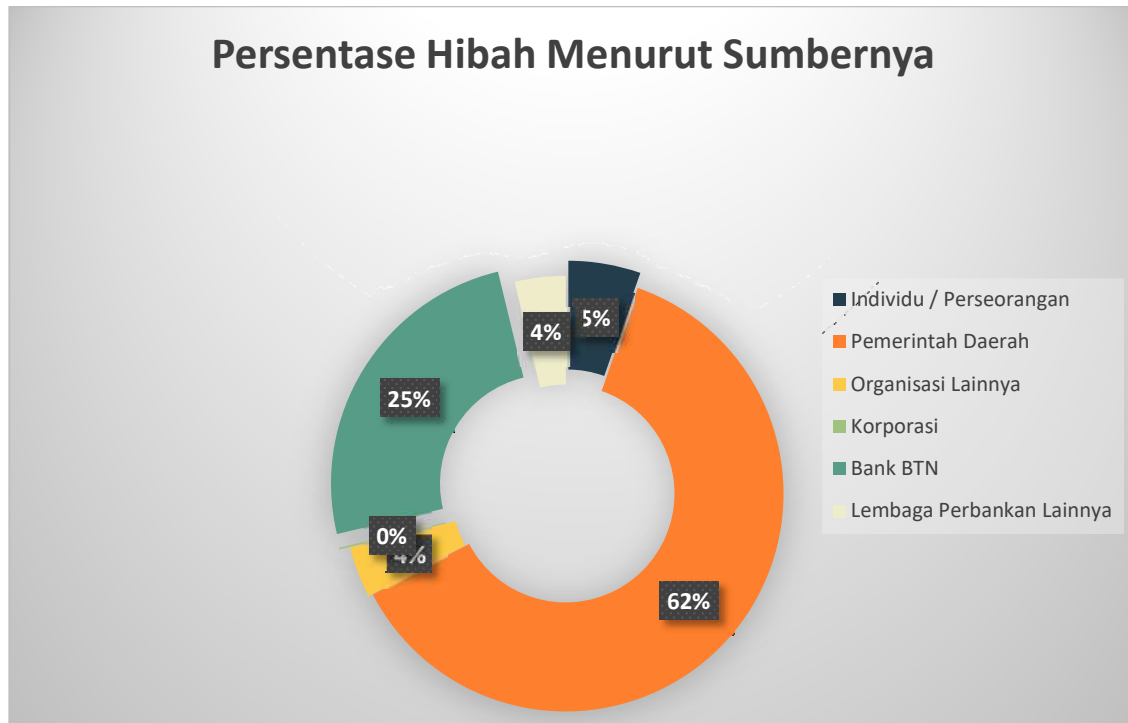
NO	ASAL HIBAH	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	PERSENTASE (%)
1	Individu / Perseorangan	164	Rp 4.800.831.576,00	5,37%
2	Pemerintah Daerah	96	Rp 55.355.984.106,00	61,95%
3	Organisasi Lainnya	28	Rp 3.409.444.164,00	3,82%
4	Korporasi	7	Rp 110.599.759,00	0,12%
5	Bank BTN	57	Rp 22.314.127.659,00	24,97%
6	Lembaga Perbankan Lainnya	40	Rp 3.362.184.746,00	3,76%
TOTAL		392	Rp 89.353.172.010,00	100%

Jika dilihat dari persentase diatas, tahun ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya masih menerima hibah yang berasal dari Bank BTN yang sudah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat di catatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan nilai perolehan hibah yang cukup besar, yakni 11,62% dari total penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut

ini:

Penerimaan Hibah dari Bank BTN Triwulan III Tahun 2022



Jika dilihat dari persentase diatas, tahun 2022 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menerima hibah dari Bank BTN yang sudah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat di catatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan total nilai perolehan hibah ke dua terbesar setelah hibah dari Pemerintah Daerah, yakni 24,97% dari total persentase penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut:

Penerimaan Hibah dari Bank BTN Semester II Tahun 2022

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
1	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Laptop Fujitsu	Rp 19.690.000	Rp 19.690.000,00	NPH.NO: 001/NPH/BCSU/DPS.II/I/2022 Tanggal : 31 Januari 2022	29SC2YPA
2	PN DENPASAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pos Jaga/Keamanan Lengkap	Rp 64.050.000	Rp 64.050.000,00	NPH.NO: 002/NPH/BCSU/DPS.II/I/2022 Tanggal: 3 Januari 2022	2H7B93JA
3	PN SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	Lemari + Backdrop Uk. 5,8m	Rp 38.600.000	Rp 150.375.000,00	BAST.NO: 2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
			Meja Uk. 2m	Rp 4.700.000			
			Backdrop TV Uk. 4m	Rp 15.300.000			
			Lantai Vinyl Uk. 64m	Rp 13.500.000			
			Bongkar Pasang Plafon Uk. 64m	Rp 10.175.000			
			Lampu Plafon + Kabel	Rp 4.750.000			
			Cat Plafon Uk. 64m	Rp 4.750.000			
			Penambahan Kusen 2 Plong + Pintu	Rp 10.000.000			
			Wallpaper Uk. 45m	Rp 3.700.000			
			Partisi Dinding Tinggi 120 x 17 m	Rp 7.800.000			
			Sofa 5 Sit + Meja + Nakas 2 Buah	Rp 10.000.000			
			Gorden	Rp 5.000.000			
			Lampu	Rp 600.000			
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembuatan Kamar Mandi Ukuran 120x180	Rp 21.500.000			
4	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	Lenovo AIO A340 i3	Rp 11.200.000	Rp 34.000.000,00	NPH.NO: 53/PKS/PKL.III/FSU/IV/2022 Tanggal: 14 April 2022	2S1TTZEA
			TV TCL P615 Android	Rp 11.150.000			
			Bracket TV Standing	Rp 2.600.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Screen LCD Proyektor Motorized	Rp 3.750.000			
			Bracket LCD Gantung	Rp 500.000			
			Webcam Logitech Brio	Rp 4.800.000			
5	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Tunggu Pengunjung 4 Seat	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000,00	BAST.NO: 71/HIBAH/YYK.II/III/2022 & W13- U3/873a/PL.04/3/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	21XG95EA
6	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	UPS 6 KVA	Rp 20.000.000	Rp 167.707.950,00	BAST.NO: W22.U4/2191.a/UM/XII/20 21 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
			PC Komputer	Rp 10.000.000			
			Laptop	Rp 30.000.000			
			Televisi	Rp 13.100.000			
			Batery Charger	Rp 4.000.000			
			Charger Batery	Rp 500.000			
			Smartphone Tablet	Rp 23.750.000			
			Speaker Videotron	Rp 800.000			
			Printer	Rp 7.000.000			
			Printer Scanner	Rp 3.500.000			
			AC Split 0,5 PK	Rp 3.500.000			
			Hard Disk External 1 TB	Rp 800.000			
			Brangkas	Rp 9.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 5.000.000			
			Mic Wireless	Rp 3.257.950			
			Box Arsip	Rp 13.500.000			
			Interior Ruangan	Rp 20.000.000			
7	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop Aula utama Kayu	Rp 28.000.000	Rp 100.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/107/PL.04/12/20	2E8R9LAA
			Meja Kursi Kayu Majelis PP, Jaksa	Rp 18.000.000			
			Backdrop Teleconference Kayu	Rp 21.000.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Type	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			TV LED 32" Sharp	Rp 3.000.000		21 Tanggal: 8 Desember 2021	
			Komputer PC ASUS	Rp 17.000.000			
			Printer Scanner Folio HP	Rp 5.000.000			
			Speaker Dinding TOA	Rp 8.000.000			
8	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Kayu Tunggu Besi Stainless Steel	Rp 17.800.000	Rp 70.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/874/PL.04/8/2021 1 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
			Wastafel Batu Alam	Rp 2.800.000			
			Meja Meeting Finishing HPL	Rp 17.750.000			
			Smart TV Samsung 55"	Rp 8.795.000			
			Smart TV Samsung 50"	Rp 7.775.000			
			Smart TV Samsung 40"	Rp 4.940.000			
			Bracket TV Standing Samsung	Rp 2.000.000			
			Bracket TV Universal Samsung	Rp 300.000			
			Tong Sampah Stainless Kotak	Rp 2.140.000			
			Kursi dan Meja Tamu Kayu Jati	Rp 5.700.000			
9	PN BATANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penutupan Tembok Bagian Depan dan Belakang dengan Triplek	Rp 57.720.000	Rp 62.000.000,00	BAST.NO: 02/PKS/PKL.III/BCSU/I/2022 2 Tanggal: 13 Januari 2022	2R8NMWKA
			Lemari	Rp 2.000.000			
			Backdrop	Rp 2.280.000			
10	PN BATANG	PERALATAN DAN MESIN	Dispenser, Almari dan Rak Besi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000,00	NPH.NO: 39/PKS/PKL.III/BCSU/VIII/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A
11	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Mesin Antrian Sidang	Rp 15.400.000	Rp 179.602.500,00	NPH.NO: W29.U3/324/UK.01.10/II/2022 & 36/BAST/047/II/2022 Tanggal: 2 Februari 2022	251JJG4A
			Lemari Locker	Rp 8.002.500			
			Printer	Rp 34.650.000			
			AC Split 2 PK	Rp 17.600.000			
			AC Split 1 PK	Rp 22.000.000			
			Scanner	Rp 13.200.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Loudspeaker	Rp 30.800.000			
			Kursi Besi/Metal	Rp 5.500.000			
			CCTV	Rp 5.500.000			
			HardDisk 1 Tera	Rp 2.750.000			
			Meja Kerja Kayu	Rp 11.000.000			
			Gordyn	Rp 11.000.000			
			Kabel UTP cat 6	Rp 2.200.000			
12	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop PTSP	Rp 165.275.000	Rp 259.025.000,00	BAST.NO: 114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/II/2 021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
			Bangku Panjang Besi Metal	Rp 4.000.000			
			Kursi Besi Metal	Rp 21.000.000			
			Meja Resepsionis	Rp 57.750.000			
			AC Split 2 PK	Rp 11.000.000			
13	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Ruang Pengacara dan Jaksa PN Sumedang	Rp 170.348.000	Rp 170.348.000,00	NPH.NO: 0204/S/BDT/BCSU/I/2022 & W11.U13/221.a/PL.09/01/2 022 Tanggal: 21 Januari 2022	2XAZTM9A
14	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Pimpinan PN Sumedang	Rp 157.834.495	Rp 157.834.495,00	NPH.NO: 462/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U13/526.a/PL.09/3/20 22 Tanggal: 4 Maret 2022	2TPQKGRA
15	PN TEMANGGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Layar Tripod 96"	Rp 2.000.000	Rp 8.999.999,00	NPH.NO: 12/PKS/MGL.III/III/2022 & W.12.U27/376/UM.09/3/20 22 Tanggal: 24 Maret 2022	2UDN2N1A
			Camera Canon EOS M6 KIT	Rp 6.999.999			
16	PN KISARAN		Sofa Victoria/Milano	Rp 4.600.000	Rp 86.086.000,00		2XTD5Q5A

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
		PERALATAN DAN MESIN	Sofa Grandic	Rp 12.500.000		BAST.NO: W2.U11/2003/BAST/3/202 1 Tanggal: 22 Maret 2021	
			Meja Sofa	Rp 1.200.000			
			Kursi Airpot (Duduk 3 Orang)	Rp 1.600.000			
			Kursi Teras Kayu Santai	Rp 1.200.000			
			Rak Buku	Rp 1.600.000			
			Meja+Kursi Tempahan	Rp 4.600.000			
			Lemari Kabinet Buku	Rp 5.200.000			
			Meja Granie Untuk Sofa	Rp 5.200.000			
			Lemari Baju Gantung tempahan	Rp 4.900.000			
			TV LED 70' Sharp	Rp 18.500.000			
			AC Samsung 2 PK	Rp 7.750.000			
			Pembelian Karpet	Rp 3.261.000			
			Pembayaran Wallpaper	Rp 13.975.000			
17	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 34.963.977	Rp 42.117.500,00	BAST.NO: 02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
		PERALATAN DAN MESIN	TV Sharp 32 Inch	Rp 2.600.000			
			Refurbish Meja PTSP	Rp 846.381			
			Downlight	Rp 1.168.005			
			Lampu Strip	Rp 1.805.612			
			Lampu Sorot	Rp 733.530			
18	PN JANTHOI	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Toyota Haice M/T	Rp 520.561.080	Rp 520.561.080,00	NPH.NO: W1.U18/94A/NPHD/2022 Tanggal: 10 Januari 2022	2G8JCKVA
19	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	A. Ruang Lobby		Rp 282.139.990,00	BAST.NO: W2.U11/6422/UM.01.10/12 / 2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
			Pekerjaan Dinding dan Pintu				
			Pemasangan dinding partisi gypsum 2 sisi+cat	Rp 15.848.250			
			Pemasangan Partisi dan Pintu UPVC	Rp 41.098.750			
			Pemasangan Furniture Dinding	Rp 27.297.600			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Type	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Pemasanga Plint	Rp 2.805.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 2.344.980			
			Pemasangan Akses Card Pintu	Rp 6.270.000			
			Pekerjaan Furniture Lapis Dinding	Rp 4.950.000			
			Pekerjaan pintu UPVC uk.2,30x0,8m	Rp 5.280.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Alumunium	Rp 2.310.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Akses	Rp 1.430.000			
			Pekerjaan Plafond	Rp -			
			Pemasangan Plafond Gypsum	Rp 20.858.750			
			Pekerjaan pengecatan	Rp -			
			Pengecatan Plafond Gypsum	Rp 2.931.500			
			Pekerjaan Listrik	Rp -			
			Instalasi lampi+switch	Rp 3.866.500			
			Pemasangan Lampu LED	Rp 3.135.000			
			Pekerjaan Pagar dan Kanopi	Rp -			
			Pemasangan pagar pembatas	Rp 18.835.575			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 20.571.760			
			B. Ruang Menyusui	Rp -			
			Pekerjaan Dinding dan Meja	Rp -			
			Pemasangan partisi dinding triplek	Rp 6.286.500			
			Pemasangan meja Lapis HPL	Rp 5.335.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 3.010.645			
			C . Ruang Tunggu Samping	Rp -			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pasangan Keramik lantai Uk.40x40cm	Rp 28.156.700			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 26.077.480			
			C . Ruang Ketua dan Panitera	Rp -			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Type	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Pekerjaan Instalasi Listrik dan Asesoris	Rp -			
			Pemasangan Instalasi Wifi	Rp 1.980.000			
			Pemasangan Instalasi CCTV	Rp 2.530.000			
			Pemasangan AC 1 PK + Asesoris	Rp 12.100.000			
			Pemasangan Kipas Standing	Rp 1.980.000			
			Pengadaan + Pemasangan TV 45"	Rp 14.850.000			
20	PN CILACAP	PERALATAN DAN MESIN	CCTV HIK Vision 8 Channel	Rp 8.500.000	Rp 24.500.000,00	NPH.NO: 12.A/PKS/PWK/FSU/II/202 2 & W12.U7/463/PL.07/3/2022 Tanggal: 15 Februari 2022	2U6W5GRA
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 7.151.000			
			Laptop HP 14s	Rp 6.499.000			
			Printer Canon G3010	Rp 2.350.000			
21	PN KLUNGKUNG	PERALATAN DAN MESIN	Printer wifi/LAN merk Epson	Rp 47.502.000	Rp 688.976.300,00	BAST.NO: 28/BAST/DPS.II/BCSU/IV/2 022 Tanggal: 5 April 2022	23AGR2AA
			Scanner Epson	Rp 81.606.000			
			Samsung Smart TV 55 Inch	Rp 114.999.500			
			Pemasangan CCTV 2 Titik	Rp 6.600.000			
			Laptop ASUS Warna Grey Dan Lillac	Rp 120.277.500			
			Kursi Leather Ichiko back high rest	Rp 8.635.000			
			Kursi Atria High Office Chair	Rp 42.240.000			
			AC Standar 2 PK Merk Daikin	Rp 29.341.620			
			AC Standar 1 PK Merk Daikin	Rp 17.774.680			
			Logitech Camrea PTZ Pro 2	Rp 10.600.000			
			TV LED LG 70 Inch	Rp 19.700.000			
			TOA BS 301 Campak Stalite Speker	Rp 9.200.000			
			Digital Clock Omegastar	Rp 1.500.000			
			Wireless Microsound 1 Rec 4 Mic	Rp 3.750.000			
			Amplifier BMB DA 3000 Pro	Rp 6.000.000			
			Ruang Command Center	Rp 169.250.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
22	PN TANGERANG	JASA	Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik	Rp 2.036.666.594	Rp 2.036.666.594,00	NPH.NO: W29.U4/5435/PL.01.03/VII/2022 & 70/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	2YWLVVZA
23	PTA BENGKULU	PERALATAN DAN MESIN	Laptop HP 14s	Rp 9.400.000	Rp 28.500.000,00	NPH.NO: W7-A/2106/PL.04/8/2022 Tanggal: 9 Agustus 2022	2F2UR9EA
			SmarTV Samsung 32 Inch	Rp 6.100.000			
			AC Split Sharp 2 PK	Rp 13.000.000			
24	PN SINGKAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Layanan PTSP	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000,00	NPH.NO: W17-U2/348/KU.06/02/2022 & 060/PKS/042/II/2022 Tanggal: 18 Februari 2022	281GMZNA
25	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson Jurusita	Rp 2.000.000	Rp 177.534.246,00	NPH.NO: 008/BAST/MKS/FSU/V/2022 & W22.U4/863/UM/V/2022 Tanggal: 20 Mei 2022	23R8V1AA
			Pinter Epson PP	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Perdata	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Loby	Rp 2.000.000			
			Printer Epson PTIP	Rp 2.000.000			
			Prinler Scan Pidana	Rp 5.500.000			
			Kurs Hakim	Rp 38.918.000			
			Meja Pelan6kan	Rp 4.000.000			
			Meja Tanda Tangan Absen	Rp 3.200.000			
			Meja Buffet HPL	Rp 4.500.000			
			Meja Komputer Anjungan Mandiri	Rp 3.300.000			
			Akses Poin	Rp 8.400.000			
			Hardisk Server	Rp 3.000.000			
			AC Split 2 PK	Rp 25.500.000			
			Running Teks Loby	Rp 15.716.246			
Video wall	Rp 42.000.000						

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Kursi Tinggi Anjungan Mandri	Rp 4.000.000			
			MIC	Rp 3.500.000			
			Box	Rp 1.800.000			
			Digital TV 43 Inch	Rp 4.200.000			
26	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kegiatan Pejeraan Perbaikan dan Pemeliharaan Instalasi Gedung	Rp 253.530.000	Rp 235.530.000,00	NPH.NO: W11.U13/691.a/PL.09/4/20 22 Tanggal 1 April 2022	2SBSWDNA
27	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Digital AD Display Floorstand 49' Touchscreen	Rp 37.242.400	Rp 280.282.420,00	NPH.NO: W11.U13/811.a/PL.09/4/20 22 Tanggal 26 April 2022	21258K9A
			Touchscreen Monitor 49"	Rp 25.480.000			
			Controller Box -Software ADS Touchscreen	Rp 8.106.000			
			Vesa (mm) 300x400	Rp 300.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 72.000.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 16.048.000			
			Mini PC, i3*4GB SSD 120	Rp 10.120.000			
			Bracket Floorstand (add on roda-custom)	Rp 3.600.000			
			Camera Logitech BCC950	Rp 7.788.000			
			Power Mixer "AUDETPRO" AP-908PM USB, 8 Channel rekam	Rp 17.550.000			
			Sett Speaker Pasif "Auderpro" AP-08KX, 8 Inch KX-Wireless	Rp 5.850.000			
			AUDERPRO' AP-949WMT-4CH (1 set=6mic meja)	Rp 41.216.000			
			Sett Stand Tripod Spk "Renxa" RZ-520ST/Bracket RZ-320WB	Rp 660.000			
			Kabel peaker AUDEERPRO AP-280CS (35 Meter)	Rp 841.800			
			Jasa Pengiriman, Akomodasi, Transport, Setting, Testing, Commisioning, 1st Deploy Content, Training	Rp 8.000.000			
			PPN 10%	Rp 25.480.220			
28	PN SUMEDANG		Smart TV 50", Briket, Cabeling	Rp 13.293.967	Rp 65.187.086,00		21PVS9RA

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
		PERALATAN DAN MESIN	Smart TV 42-43", Briket, Cabeling	Rp 30.039.702		NPH.NO: W11.U13/524.a/PL.09/3/20 22 Tanggal 4 Maret 2022	
			Web Cam	Rp 2.417.792			
			Pemasangan, Perbaikan CCTV dan DVR	Rp 19.435.625			
29	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	Kipas Angin Maspion	Rp 2.025.000	Rp 22.800.000,00	NPH.NO: 287/PKS/BWI.III/FSU/X/20 22 & W14.U16/2410/HM.01/10/2 022 Tanggal: 13 Oktober 2022	2FB4VC9A
			AC Standing Daikin 3 PK	Rp 19.000.000			
			Kaca Film 40% + Pemasangan	Rp 1.775.000			
30	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang pada Pengadilan Tinggi Bandung	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000,00	NPH.NO: 464/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U/1526/KU.06/04/202 2 Tanggal: 4 Maret 2022	2TG135BA
31	PN TANGERANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 6.747.393.420	Rp 6.747.393.420,00	NPH.NO: W29.U4/7107/PL.01.03/VII /2022 & 100/TGR.I/PKS/FSU/VII/20 22 Tanggal: 1 Juli 2022	23ZRCWYA
32	PN KAYU AGUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Interior Ruang Ramah Anak dan Ruang Panitera	Rp 114.830.610	Rp 114.830.610,00	NPH.NO: W6- U2/123/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	21XVZSDA
33	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Server PC Asus RS520-E9 Intel Xeon	Rp 97.528.000	Rp 144.107.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/XI/20 22 & W6.U2/939.a/OT.01.1/11/2 022 Tanggal: 15 November 2022	2B68CY7A
			PC Intel Core i5-10500T	Rp 19.209.000			
			Stabilizer Ica Ferro Resonant	Rp 25.600.000			
			Ica Online Sinewave UPS	Rp 1.770.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
34	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Elise Coffe Table Rect White	Rp 2.421.750	Rp 125.083.750,00	NPH.NO: W6-U2/125/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	2U9SWKSA
			Langley Sofa 2s Grey	Rp 6.099.000			
			PC Lenovo AIO A340	Rp 11.763.000			
			AC Split Panasonic 0,5 PK	Rp 5.100.000			
			Kulkas Panasonic	Rp 2.100.000			
			Notebook Asus ROG	Rp 44.600.000			
			Notebook HP Pavilion	Rp 32.600.000			
			Mixer Analog Yamaha	Rp 3.800.000			
			Scanner Brother ADS-2400N	Rp 9.900.000			
			Scanner Brother ADS-2200	Rp 6.700.000			
35	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Shield Task Chair Black	Rp 25.441.000	Rp 28.695.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/VI/2022 & W6-U2/401.a/OT.01.1/06/2022 Tanggal: 7 Juni 2022	293XUTJA
			Stacy Stool Roud Light Grey	Rp 1.049.000			
			Stacy Stool Roud Dark Grey	Rp 1.049.000			
			Plan Stand SH9 Black	Rp 1.156.000			
36	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Biaya atas Pekerjaan ME Ruang Pusat Kendali dan Pekerjaan Penataan Interior Ruang Command Centre	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000,00	NPH.NO: 1956/S/BDT/BCSU/XI/2022 & W11.U/6563/KU.06/11/2022 2 Tanggal: 1 November 2022	2PSAPAVA
37	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Rumah Genset	Rp 40.800.000	Rp 124.717.600,00	NPH.NO: 004/BA/CRB/I/2022 & W11.U14/01/BAST/I/2022 Tanggal: 25 Januari 2022	2616N38A
			Penambahan Daya Listrik	Rp 18.002.600			
			Laptop Asus Vivobook i5 K413	Rp 12.500.000			
			AC Split Panasonic 1 PK	Rp 22.715.000			
			SmartTV Samsung 4K 50 Inch	Rp 7.700.000			
			SmartTV Samsung	Rp 7.800.000			
			Printer Epson L3150	Rp 15.200.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
38	PN TANJUNG PINANG	PERALATAN DAN MESIN	LED Running Text	Rp 13.689.500	Rp 13.689.500,00	NPH.NO:W4.U2/149/KS.01/1/2022 & 003/PKS/148/I/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	2AAEM6PA
39	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 5.297.828.186	Rp 5.297.828.186,00	NPH.NO: W29.U4/5434/PL.01.03/VII/2022 & 69/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	2ZQ44BGA
40	PN BATAM	PERALATAN DAN MESIN	Meja Ruang Tamu Terbuka	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000,00	NPH.NO: 80/BAST/BTM/IV/2022 & W4.U8/1479/UM.01.10/IV/2022 Tanggal: 5 April 2022	2LCC52MA
			AC Split Ruang PTSP	Rp 11.270.000			
			Meja Teleconference	Rp 5.500.000			
			Kursi Teleconference	Rp 3.690.000			
			Kursi Kerja Pimpinan	Rp 17.640.000			
			Microphone Wireless	Rp 1.900.000			
			Meja Majelis Hakim	Rp 10.200.000			
			Meja Panitera Pengganti	Rp 4.000.000			
			Meja Para Pihak	Rp 10.000.000			
			Kursi Ruang Sidang Kayu Jati	Rp 16.800.000			
41	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Router Wi-Fi	Rp 6.400.000	Rp 6.400.000,00	NPH.NO: 250/BA/CRB/III/2022 & W11.U14/01/PL.07/III/2022 Tanggal: 1 Maret 2022	2DA2NJ2A
42	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	UPS	Rp 7.000.000	Rp 59.000.000,00	NPH.NO: 253/BA/CRB/XI/2022 & W11.U14/03/PL.07/XI/2022 Tanggal: 30 November 2022	29QN823A
			CCTV	Rp 18.000.000			
			SmartTV Samsung 50 Inch	Rp 8.000.000			
			Kursi Direksi	Rp 10.000.000			
			Meja Kerja 1/2 Biro	Rp 8.000.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Kursi Besi Pengunjung	Rp 3.000.000			
			Sice	Rp 5.000.000			
43	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Rapat	Rp 8.580.000	Rp 42.122.000,00	NPH.NO: W11.U7/1730/PL.04/12/20 22 Tanggal: 5 Desember 2022	2UMC3WKA
			Kursi Besi / Metal	Rp 4.596.000			
			Kursi Putar Fiber Glass	Rp 3.596.000			
			Bangku Panjang Kayu	Rp 5.850.000			
			AC Split	Rp 11.000.000			
			Mini PC	Rp 8.500.000			
44	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 92.756.000	Rp 132.692.000,00	NPH.NO: W11.U7/1732/PL.04/12/20 22 Tanggal: 5 Desember 2022	2R5Q8X3A
			Renovasi Ruang Perpustakaan	Rp 39.936.000			
45	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Ruang Kerja Pengadilan Negeri Kayu Agung	Rp 593.834.460	Rp 593.834.460,00	NPH.NO: 07/PLB.II/PKS/BFSU/XII/20 22 & W6- U2/312.a/OT.01.07/04/202 2 Tanggal: 28 April 2022	2J44VDJA
46	PN BALIGE	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Kabinet Buku	Rp 12.250.000	Rp 23.850.000,00	NPH.NO: 01/PKS/STR/BCSU/II/2022 & W2.U18/372/PL.04/2/2022 Tanggal: 22 Februari 2022	2X5XXHLA
			Meja Acrylic	Rp 7.000.000			
			SmartTV LED 43 Inch	Rp 4.600.000			
47	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	PC AIO Asus V222GAK	Rp 8.000.000	Rp 45.000.000,00	NPH.NO: 172/PKS/PKL.III/BFSU/XI/2 022 Tanggal: 29 November 2022	2VH6XLPA
			Printer HP Tank 315	Rp 8.000.000			
			SmartTV Samsung 43 Inch	Rp 13.000.000			
			Mini PC Beelink GK35	Rp 6.600.000			
			Dispenser Sanken	Rp 1.900.000			
			Kursi Tamu	Rp 7.500.000			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (Audited)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
48	PN SURAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Speaker Aktif	Rp 18.000.000	Rp 237.994.000,00	NPH.NO: W12-U2/1104/PL.03/12/2022 & 47A/PKS/SLO.II/FSU/XII/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2TGSRWMA
			Mixer	Rp 9.000.000			
			Microphone Wireless	Rp 5.500.000			
			Microphone Clip On	Rp 2.500.000			
			Stand Microphone	Rp 2.000.000			
			Stand Speaker	Rp 2.000.000			
			Meja Kerja	Rp 14.000.000			
			Lemari Berkas	Rp 18.000.000			
			Komputer All In One	Rp 40.000.000			
			Printer	Rp 18.000.000			
			Rak Arsip	Rp 10.000.000			
			Kamera Mirrorless	Rp 15.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 6.000.000			
			Meja Oval	Rp 2.500.000			
			Meja Pelayanan PTSP	Rp 19.550.000			
			Meja Credensa	Rp 9.224.000			
			Meja Satpam	Rp 12.905.000			
			Meja Kasir	Rp 3.000.000			
			Lemari Penghargaan	Rp 4.700.000			
			Lemari Difabel	Rp 6.502.500			
Lemari Buku	Rp 6.912.000						
Sofa Tamu	Rp 4.400.000						
Lampu Hias	Rp 8.300.000						
49	PN BALE BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung PTSP	Rp 479.436.473	Rp 479.436.473,00	BAST.NO: 01/BAST/091/BFSU/I/2022 & W11.U6/1091/PL.01/3/2022 Tanggal: 17 Januari 2022	2ABYDBQA

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
50	PN LUMAJANG	PERALATAN DAN MESIN	SmartTV Changhong 58 Inch 4K UHD	Rp 5.874.000	Rp 6.985.000,00	NPH.NO: W14.U14/1368/UM.01/X/20 20 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2 020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA
			Mic Shure Beta 99	Rp 312.000			
			Polytron Pas 22	Rp 799.000			
51	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kursi Council Chair High Back	Rp 61.397.140	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2387/S/BDT/BFSU/XII/202 2 & W11.U13/2708/PL.09/12/2 022 Tanggal: 23 Desember 2022	295282RA
			Kursi Council Chair Low Back	Rp 73.086.940			
			Kursi President Dire	Rp 14.086.192			
			Kursi Susun	Rp 9.329.650			
			Meja Staff	Rp 92.100.078			
52	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Atap dan Plafon Ruang Kantor pada PN Sumedang	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2354/S/BDT/BFSU/XII/202 2 & W11.U13/2669/PL.09/12/2 022 Tanggal: 19 Desember 2022	2UZ351AA
53	PN KARANGANYAR	PERALATAN DAN MESIN	Printer Canon G3010	Rp 6.000.000	Rp 10.500.000,00	NPH.NO: 47/PKS/SLO.II/FSU/XII/202 2 & W12.U31/3452/PL.09/12/2 022 Tanggal: 1 Desember 2022	2SL1MW3A
			AC Split Sharp 1 PK	Rp 4.500.000			
54	PN TUBAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Desktop Core i5/ RAM 4GB	Rp 47.775.000	Rp 258.445.400,00	NPH.NO: 93/GRS.III/PKS/IX/2022 & W14.U29/1697/HM.01.01/I	2V22GQFA
			Laptop Dell Inspiron	Rp 15.185.000			
			Printer Epson L1210	Rp 24.000.000			
			Team SSD M.2 512 GB	Rp 1.524.600			

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Scanner Plustek Smart PS3140U	Rp 59.270.400		X/2022 Tanggal: 6 September 2022	
			SmartTV Aquos 32 Inch	Rp 3.467.100			
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 6.600.000			
			AC Split FTC 1 PK	Rp 24.543.750			
			Kipas Angin Tornado 3 in 1	Rp 877.800			
			Standing Dispenser Sharp	Rp 3.045.000			
			Brankas Urban Guard	Rp 27.195.000			
			Brankas Truesafes Size 2	Rp 20.700.000			
			Lemari Arsip Besi Filling	Rp 1.655.000			
			Lemari Arsip 4 Door	Rp 1.622.500			
			Meja Makan Kaca Bulat	Rp 4.184.250			
			Kamera Nikon Coolpix P1000	Rp 16.800.000			
55	PN PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson L3110	Rp 7.275.000	Rp 10.000.000,00	NPH.NO: 10/PKS/PKL.III/BCSU/II/2022 & W12.U4/215/UM.01.01/1/2022 Tanggal: 4 Februari 2022	2Y1REXDA
			Showcase Sharp	Rp 2.725.000			
56	PN CIBINONG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson Workforce DS-410	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000,00	BAST.NO: 039.a/BA/CBN.III/BFSU/II/2022 Tanggal: 10 Februari 2022	22QGNUSA
57	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PERALATAN DAN MESIN	Proyektor Epson EB-L200X 3LCD XGA	Rp 42.400.000	Rp 191.109.100,00	NPH.NO: 25/PKS/IFD/XI/2022 & 292/BUA.1/OT.01.01/11/2022 Tanggal: 29 November 2022	27Q94EMA
			Apple Macbook Pro 13 Inch M2 8/512	Rp 138.000.000			
			SmartTV Samsung QA55Q60BAKXXD 4K QLED HDR	Rp 10.709.100			
TOTAL PEROLEHAN HIBAH DARI BANK BTN						Rp 22.314.127.659	

F.4.2.1.1. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan

Mahkamah Agung RI menerima hibah langsung dari dalam negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya baik yang disahkan pada tahun berjalan maupun yang sudah lewat tahun, dengan bentuk hibah berupa:

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa uang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp10.490.540.848,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdapat pada 6 satuan kerja dengan 13 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah dalam negeri berupa uang:

Hibah Dalam Negeri Berupa Uang dan Aset Yang Telah Dibelanjakan

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
1	PN CIBINONG	PEMKAB. BOGOR	Meubelair Ruang Kantor (Rp.229.235.738)	Pertama	Belanja	Rp 78.840.000	Rp 1.404.540.848,00	NPH.NO: 978.4/054-Bakesbangpol/IX/2022 & W11-U20/4713/Hib.PL.04.05/9/2022 Tanggal: 20 September 2022
			Alat Pengolah Data Persidangan (Rp.275.350.000)	Kedua	Belanja	Rp 261.208.000		
			Perangkat Ruang Sidang Elektronik (Rp.839.995.110)	Ketiga	Belanja	Rp 901.234.500		
			Pengelolaan Operasional Kegiatan (Rp.60.000.000)	Keempat	Belanja	Rp 161.269.355		
				Kelima	Pengembalian	Rp 1.988.993		
2	PN DATARAN HUNIMOA	PEMKAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Barang Konsumsi	Pertama	Belanja	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000,00	NPH.NO: 061/311/NPHD/2022 & W27-U8/206/HM.01.1/04/2022 Tanggal: 25 April 2022
3	PTUN PALEMBANG	PEMPROV. SUMATERA SELATAN	Biaya Penimbunan Tanah 5.000 m2 (Rp.1.759.500.000)	Pertama	Belanja	Rp 1.979.570.607	Rp 2.186.000.000,00	NPH.NO: 060/NPHD/I/2022 & W1-TUN2/1188/PL.02/X/2022 Tanggal: 10 Oktober 2022
			Biaya Perencanaan Konstruksi (Rp.202.520.000)					
			Biaya Pengawasan Kontruksi (Rp.126.960.000)					
			Biaya Pengelolaan Kegiatan (97.020.000)					
				Pertama	Pengembalian	Rp 206.429.393		

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
4	PN KUNINGAN	PEMKAB. KUNINGAN	PC AIO	17	Unit	Rp 255.255.000	Rp 700.000.000,00	NPH.NO: NPHD/900/227-Bakesbangpol/2022 & W11-U16/327/KU.01/02/2022 Tanggal: 17 Februari 2022
			Laptop i5-1135G7 14" 256GB SSD Intel Iris XE	1	Unit	Rp 11.508.025		
			Printer	12	Unit	Rp 48.600.000		
			AC	7	Unit	Rp 63.830.000		
			Scanner	5	Unit	Rp 40.377.500		
			LED TV	9	Unit	Rp 79.110.000		
			Kamera	4	Unit	Rp 52.404.850		
			Bracket	4	Unit	Rp 2.020.000		
			Mixer	2	Paket	Rp 13.000.000		
			Speaker	5	Unit	Rp 19.490.625		
			Microphone	4	Unit	Rp 5.728.000		
			Kursi Kerja	40	Unit	Rp 79.176.000		
			Meja Kerja	3	Unit	Rp 25.000.000		
			Lemari Kayu	2	Unit	Rp 4.500.000		
5	PN SINGKAWANG	PEMKOT. SINGKAWANG	AC Floor Standing 5 PK Changhong	1	Unit	Rp 26.500.000	Rp 150.000.000,00	NPH.NO: 400/156/SETDA.KESRA-C & W17-U2/2109/KU.06/11/2022 Tanggal: 22 November 2022
			AC Split Panasonic 2 PK	2	Unit	Rp 21.000.000		
			Smart TV 55 Inch Changhong	3	Unit	Rp 24.840.000		
			Smart TV 50 Inch Changhong	2	Unit	Rp 12.960.000		
			Kursi Pengunjung Ruang Sidang	8	Unit	Rp 19.600.000		
			Kursi Hadap	16	Unit	Rp 25.600.000		
			Meja Rapat	1	Unit	Rp 19.000.000		
			Honorarium Pejabat PBJ	1	Paket	Rp 500.000		
6	PN CIKARANG			Pertama	Belanja	Rp 4.690.000	Rp 6.000.000.000,00	

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
		PEMKAB. BEKASI	Bantuan Keuangan Pengadaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang	Sisa	Saldo	Rp 5.995.310.000		NPH.NO: PM.01.02/2913/Bakesbangpol/ 2022 & W11.U23/4206/ KU.01.07/XI/2022 Tanggal: 22 November 2022
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN HIBAH UANG								Rp 10.490.540.848,00

Terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung dengan rincian sebagai berikut:

AKUN : 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	300
2	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	19.88.993
TOTAL			19.89.293

F.4.2.1.1.1. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 baik penerimaan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu (TAYL) sejumlah **Rp76.825.964.568,00** (*tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdapat pada 196 satuan kerja dengan 378 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah dalam negeri berupa barang:

Hibah Dalam Negeri Berupa Barang Per Jenis Aset Sudah Disahkan

NO	ASET YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH
1	Tanah	26	Rp 20.823.908.359,00
2	Gedung dan Bangunan	74	Rp 35.915.121.408,00
3	Kendaraan Roda 4	8	Rp 3.965.284.630,00
4	Kendaraan Roda 2	1	Rp 118.891.650,00
5	Peralatan dan Mesin	269	Rp 16.002.758.521,00
TOTAL		378	Rp 76.825.964.568,00

F.4.2.1.1.2. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 hanya diterima oleh 1 satuan kerja yakni Pengadilan Negeri Tangerang yang berasal dari Bank BTN berupa Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik senilai **Rp2.036.666.594,00** (*dua milyar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*).

F.4.2.1.1.3. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan hibah langsung yang diterima pada tahun 2021 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang Naskah Perjanjian Hibah atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Dalam pelaksanaan tata kelola hibah yang baik di Mahkamah Agung, satker harus memastikan semua penerimaan hibah harus tercatat dan terkelola administrasinya secara akuntabel. Jika tidak, akan berpotensi menjadi temuan oleh BPK. Oleh sebab itu, masih terdapat satker yang mengajukan permohonan registrasi atas hibah langsung yang diterima pada TAYL dan belum dicatat pada laporan keuangan.

Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dengan dilampiri hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan

hibah langsung bentuk uang/barang/jasa. Mekanisme review atas penerimaan hibah tahun anggaran yang lalu sepenuhnya ke APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Dari total hibah langsung dalam negeri berupa barang sesuai pada tabel 2.2, di dalamnya terdapat hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar **Rp19.068.832.217,00** (*sembilan belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah*) pada 35 satuan kerja dengan 49 dokumen pengesahan hibah yang Naskah Perjanjian Hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya tertanggal sudah lewat tahun berjalan. Secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Hibah Barang Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
1	MS IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	TANAH	Rp652.252.212,00	590/10492/2021 Tanggal: 27 Oktober 2021	2SH4BU5A
2	PTA KENDARI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp21.500.000,00	W21-A/1693.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 3 Desember 2021	2U7EXF9A
3	PTA KENDARI	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp4.000.000,00	W21.A/1598.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 9 November 2021	2KCAJVUA
4	PN SIDOARJO	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp150.375.000,00	2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
5	PA SENDAWAR	PEMKAB. KUTAI BARAT	TANAH	Rp3.037.149.000,00	130/1932/HK-TU.P/XI/2021 dan W17-A12/1056.a/PL.02/11/2021 Tanggal: 2 November 2021	22BZ8N6A
6	PN MAROS	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp167.707.950,00	W22.U4/2191.a/UM/XII/2021 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
7	PN SUMBER	PEMKAB. CIREBON	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp536.400.000,00	978/1062/Bakesbangpol/2021 dan W11.U19/2367/PL.06/VIII/2021 Tanggal: 23 Agustus 2021	2G9DTAZA
8	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp100.000.000,00	W12.U23/107/PL.04/12/2021 Tanggal: 8 Desember 2021	2E8R9LAA
9	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp70.000.000,00	W12.U23/874/PL.04/8/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
10	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp524.281.000,00	031/2597Tanggal: 23 Desember 2021	26NJHFCA
11	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Rp171.882.967,00	028/873.1/2021 Tanggal: 30 Desember 2021	2PLHMHTA
12	PN BATANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.000.000,00	39/PKS/PKL.III/BCSU/VIII/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
13	PA SELAT PANJANG	PEMKAB. BENGKALIS	TANAH	Rp384.000.000,00	940/NHBMD/2021/03 Tanggal: 13 September 2021	2GUDDWGA
14	PN KAB. KEDIRI	PEMKAB. KEDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp1.709.609.772,00	641/9615/418.32/2020 Tanggal: 30 Desember 2020	2WCLHECA
15	PN RANGKAS BITUNG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp259.025.000,00	114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/II/2021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
16	PN PASAMAN BARAT	BANK BRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp196.612.000,00	B.1326.KC.III/LYI/07/2021 Tanggal: 16 Juli 2021	2E2SELYA
17	PN SIGLI	PEMKAB. PIDIE	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp399.077.000,00	645/761/NPHD/PRKP/2021 Tanggal: 15 November 2021	2GJX7CWA
18	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp86.086.000,00	W2.U11/2003/BAST/3/2021 Tanggal: 22 Maret 2021	2XTD5Q5A
19	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp42.117.500,00	02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
20	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp500.000.000,00	W9.UG/1257/HK.02/VIII/2021 Tanggal: 25 Agustus 2021	2HD4WT2A
21	PA MUARA TEWE	PEMKAB. MURUNG RAYA	TANAH	Rp1.068.000.000,00	027/230/DPRKPP/2021 Tanggal: 5 November 2021	2RVBTMXA
22	PN TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp186.320.000,00	43/BKBP-SET/XI/2021 Tanggal: 2 November 2021	2C3HGTDA
23	PA KUALA KAPUAS	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp5.850.000,00	01/Pos.LKBHFasya/01/2021 Tanggal: 14 Januari 2021	2GR89PDA
24	PN KISARAN	BANK BTN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp282.139.990,00	W2.U11/6422/UM.01.10/12/ 2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
25	PT MALUKU UTARA	PEMKAB. PULAU MURUTAI	TANAH	Rp678.732.000,00	W28-U/1058/OT.01.1/9/2019 Tanggal: 20 September 2019	2M7V8YJA

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
26	PA REMBANG	PEMKAB. REMBANG	PERALATAN DAN MESIN	Rp87.840.500,00	030/2568/2021 & W11-A18/2236/HM.01.1/XII/2021 Tanggal: 16 Desember 2021	27WHZ6VA
27	PN BREBES	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp7.000.000,00	01/V/2020 Tanggal: 27 Mei 2020	2KUKP49A
28	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp201.473.000,00	050/43475 & W11-A2/3510/PL.01/X/2020 Tanggal: 12 Oktober 2020	213G76NA
29	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp126.704.000,00	050/11484 & W11-A2/1284/PL.01/III/2020 Tanggal: 18 Maret 2020	213M8GEA
30	PN SOASIU	PEMKAB. HALMAHERA TIMUR	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp364.436.000,00	035/82/06/2020 & W28-U1/893/PL.01/IX/2020 Tanggal: 19 Juni 2020	2BQ23L9A
31	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp1.034.376.000,00	1059/NPHD/BPKAD/2020 & W6.U10/1151/PL.06/XII/2020 Tanggal: 7 Desember 2020	2V7FM7DA
32	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp810.000.000,00	BSJ.R02.Ar.BDL/ATF.309/2020 Tanggal: 20 Juli 2020	2EUEGHXA
33	PN MAJALENGKA	PEMKAB. MAJALENGKA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp299.378.000,00	978/1716.B/DPUTR Tanggal: 5 November 2021	2CLXD1LA
34	PN BANJAR	BANK BRI	PERALATAN DAN MESIN	Rp80.000.000,00	B.12451.e-LYI/10/2020 & W11.U22/783.a/KU.06/10/2022 Tanggal: 30 September 2020	2PEPANCA
35	MS KOTACANE	PEMKAB. ACEH TENGGARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp90.895.000,00	600/568.1/NPHD/PUPR-AGR/2021 & W1.A7/858/PL.01/IX/2021 Tanggal: 20 September 2021	25P8D66A
36	PA PALEMBANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp84.200.000,00	W6-A1/1857a/PL.07/VIII/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2KHKL67A

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
37	PN BALIGE	PEMPROV. SUMATERA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Rp78.801.000,00	041/3064/DPA/III/2019 Tanggal: 7 Agustus 2019	2DFM7VGA
38	PN SINGKIL	PEMKOT. SUBULUSSALAM	TANAH	Rp1.893.569.000,00	424/032/2021 & W1.U11/924/PL.02/VII/2021 Tanggal: 28 Juli 2021	25E1WPQA
39	PA SUNGGUMINASA	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp9.000.000,00	217/SKU/MGM/XI/2021 Tanggal: 25 November 2021	27H2GSRA
40	PA SUNGGUMINASA	BANK BSI	PERALATAN DAN MESIN	Rp11.000.000,00	01/008/440/XI Tanggal: 25 November 2021	2WBRC3GA
41	PA AMURANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN + TANAH	Rp2.476.737.326,00	W18-A6/528/PL.02/09/2022 Tanggal: 12 September 2019	2FJTF4GA
42	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/578/PL.01.10/IV/2019 Tanggal: 10 April 2019	2ZCX12GA
43	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/445/PL.01.10/III/2020 Tanggal: 16 Maret 2020	2CALLBVA
44	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/583.A/PL.01.10/III/2021 Tanggal: 19 Maret 2021	23LPDNEA
45	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/560/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 7 April 2020	28NL2B1A
46	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/603/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 15 April 2020	2TCK51TA
47	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/296.a/PL.01.10/II/2021 Tanggal: 15 Februari 2021	2EGMQ39A
48	PN LUMAJANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.985.000,00	W14.U14/1368/UM.01/X/2020 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 (*Audited*)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
49	PA TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	TANAH	Rp136.320.000,00	W4-A4/192.a/KU.01.1/II/2018 Tanggal: 7 Februari 2018	2JLDNGCA
TOTAL				Rp19.068.832.217,00		

Namun dalam pencatatan dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI, total hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 (*delapan belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) terdapat selisih antara total angka pada dokumen pengesahan hibah dengan aplikasi SAKTI senilai Rp206.429.393,00. Hal ini disebabkan karena ada angka debit dari PTUN Palembang yang berasal dari pengesahan pengembalian sisa hibah uang (SP3HL) yang seharusnya diinput pada kas lainnya, namun satker tersebut diberi petunjuk dari HAI DJPB melalui email disarankan mengubah hibah Tahun Anggaran Berjalan (TAB) ke Hibah hibah sudah disahkan TAYL karena satker terkendala dalam melakukan penginputan pada aplikasi SAKTInya agar dapat melakukan proses pembuatan SPM SP4HL hibah, sehingga ketika diinput muncul angka debit pada akun hibah sudah disahkan TAYL yang menyebabkan total angka hibah sudah disahkan TAYL berkurang.

**DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D 31 DESEMBER 2022**

AKUN : 391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	(259.025.000,)
0.0	005.01.097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	(299.378.000,)
0.0	005.01.097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	(7.000.000,)
0.0	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	(866.163.967,)
0.0	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	(3.000.000,)
0.0	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	(150.375.000,)
0.0	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	(6.985.000,)
0.0	005.01.098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	(399.077.000,)
0.0	005.01.098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	(1.893.569.000,)
0.0	005.01.098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	(34.000.000,)
0.0	005.01.098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	(186.320.000,)
0.0	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	(167.707.950,)
0.0	005.01.099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(364.436.000,)
0.0	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	(20.000.000,)
0.0	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	(410.343.490,)
0.0	005.01.400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	(536.400.000,)
0.0	005.01.400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	(1.709.609.772,)
0.0	005.01.400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	(328.177.000,)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	(87.840.500,)
0.0	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	(652.252.212,)
0.0	005.01.401715	MAHKAMAH SYAR'YAH KOTACANE	(90.895.000,)
0.0	005.01.401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	(3.037.149.000,)
0.0	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	(1.034.376.000,)
0.0	005.01.401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	(80.000.000,)
0.0	005.01.402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	(136.320.000,)
0.0	005.01.402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	(384.000.000,)
0.0	005.01.402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	(84.200.000,)
0.0	005.01.402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	(1.068.000.000,)
0.0	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	(5.850.000,)
0.0	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	(196.612.000,)
0.0	005.01.526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	206.429.393,
0.0	005.01.576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	(25.500.000,)
0.0	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	(1.310.000.000,)
0.0	005.01.664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	(678.732.000,)
0.0	005.01.672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	(78.801.000,)
0.0	005.01.682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	(2.476.737.326,)
TOTAL			(18.862.402.824,)

F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Belum Disahkan

Dalam proses penatausahaan hibah per tanggal 31 Desember 2022 atau selama periode SAKTI Mahkamah Agung Semester II ini tutup, tidak terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung yang belum melakukan proses pengajuan pengesahan hibah ke KPPN atau baru memulai mengajukan nomor register hibah ke Kanwil DJPB setempat.



**LAMPIRAN A1
PENYUSUTAN ASET TETAP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
131111	Tanah	8.047.595,00	19.986.074.179.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986.074.179.582,00
20101	TANAH PERSIL	7.936.066,00	19.820.791.330.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820.791.330.995,00
20102	TANAH NON PERSIL	110.670,00	163.893.541.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.893.541.837,00
20103	LAPANGAN	859,00	1.389.306.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.306.750,00
132111	Peralatan dan Mesin	609.547,00	4.462.524.660.536,00	(3.031.872.114.535,00)	(345.621.115.721,00)	0,00	(3.377.493.230.256,00)	1.085.031.430.280,00
30101	ALAT BESAR DARAT	17,00	87.713.000,00	(23.000.000,00)	(3.235.650,00)	0,00	(26.235.650,00)	61.477.350,00
30103	ALAT BANTU	1.117,00	135.862.858.933,00	(97.319.170.190,00)	(12.422.552.801,00)	0,00	(109.741.722.991,00)	26.121.135.942,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7.450,00	581.957.761.035,00	(511.192.886.356,00)	(8.640.279.013,00)	0,00	(519.833.165.369,00)	62.124.595.666,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	853,00	2.041.113.828,00	(1.325.211.651,00)	(294.293.235,00)	0,00	(1.619.504.886,00)	421.608.942,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	85,00	10.302.547.121,00	(9.803.806.472,00)	(92.328.964,00)	0,00	(9.896.135.436,00)	406.411.685,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	357,00	842.905.918,00	(755.050.370,00)	(16.793.815,00)	0,00	(771.844.185,00)	71.061.733,00
30303	ALAT UKUR	482,00	2.879.020.142,00	(2.344.912.524,00)	(166.327.893,00)	0,00	(2.511.240.417,00)	367.779.725,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	1.074,00	4.827.150.936,00	(3.829.487.218,00)	(174.545.480,00)	0,00	(4.004.032.698,00)	823.118.238,00
30501	ALAT KANTOR	93.182,00	499.340.117.232,00	(425.303.780.529,00)	(22.058.373.846,00)	0,00	(447.362.154.375,00)	51.977.962.857,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	361.343,00	1.167.977.114.081,00	(894.344.523.434,00)	(58.959.488.311,00)	0,00	(953.304.011.745,00)	214.673.102.336,00
30601	ALAT STUDIO	18.982,00	180.695.950.228,00	(95.068.319.740,00)	(17.231.685.481,00)	0,00	(112.300.005.221,00)	68.395.945.007,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	8.491,00	50.284.428.265,00	(40.575.809.112,00)	(1.356.105.043,00)	0,00	(41.931.914.155,00)	8.352.514.110,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.091,00	106.291.679.674,00	(37.112.741.214,00)	(7.768.784.053,00)	0,00	(44.881.525.267,00)	61.410.154.407,00
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	13,00	135.022.941,00	(103.083.819,00)	(8.903.712,00)	0,00	(111.987.531,00)	23.035.410,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	2.487,00	10.998.481.971,00	(7.666.121.618,00)	(631.007.027,00)	0,00	(8.297.128.645,00)	2.701.353.326,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	136,00	1.049.491.236,00	(587.413.322,00)	76.391.116,00	0,00	(511.022.206,00)	538.469.030,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.869,00	18.951.972.547,00	(5.599.605.988,00)	(1.866.466.485,00)	0,00	(7.466.072.473,00)	11.485.900.074,00
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	20,00	176.934.616,00	(78.922.372,00)	4.850.629,00	0,00	(74.071.743,00)	102.862.873,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	378,00	1.811.467.537,00	(481.862.446,00)	(74.366.451,00)	0,00	(556.228.897,00)	1.255.238.640,00
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8,00	759.650.700,00	(113.118.750,00)	(65.615.275,00)	0,00	(178.734.025,00)	580.916.675,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	11,00	44.618.878,00	(42.353.122,00)	(1.510.504,00)	0,00	(43.863.626,00)	755.252,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	17,00	1.487.052.840,00	(531.628.751,00)	(99.136.858,00)	0,00	(630.765.609,00)	856.287.231,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	21,00	167.349.000,00	(43.511.850,00)	(8.739.200,00)	0,00	(52.251.050,00)	115.097.950,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	70,00	7.050.687.779,00	(6.508.705.979,00)	(194.744.913,00)	0,00	(6.703.450.892,00)	347.236.887,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	258,00	2.270.892.730,00	(1.047.691.750,00)	(296.128.363,00)	0,00	(1.343.820.113,00)	927.072.617,00
31001	KOMPUTER UNIT	67.682,00	887.101.556.005,00	(541.858.189.798,00)	(90.149.596.194,00)	0,00	(632.007.785.992,00)	255.093.770.013,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	40.594,00	747.952.408.282,00	(332.556.419.707,00)	(120.335.788.322,00)	0,00	(452.892.208.029,00)	295.060.200.253,00
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	3,00	8.426.920,00	(4.576.920,00)	(1.925.000,00)	0,00	(6.501.920,00)	1.925.000,00
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	11,00	303.380.109,00	(79.158.695,00)	(23.656.991,00)	0,00	(102.815.686,00)	200.564.423,00
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	9,00	56.290.000,00	(5.050.000,00)	(4.847.000,00)	0,00	(9.897.000,00)	46.393.000,00
31301	SUMUR	17,00	384.987.059,00	(252.032.885,00)	(32.072.983,00)	0,00	(284.105.868,00)	100.881.191,00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	14,00	6.459.000,00	(4.667.088,00)	(398.208,00)	0,00	(5.065.296,00)	1.393.704,00
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18,00	17.655.000,00	(17.655.000,00)	0,00	0,00	(17.655.000,00)	0,00
31501	ALAT DETEKSI	6,00	148.020.000,00	(1.500.000,00)	(14.652.000,00)	0,00	(16.152.000,00)	131.868.000,00
31502	ALAT PELINDUNG	9,00	3.290.450,00	(3.290.450,00)	0,00	0,00	(3.290.450,00)	0,00
31503	ALAT SAR	19,00	1.533.086.350,00	(1.523.614.700,00)	(2.650.413,00)	0,00	(1.526.265.113,00)	6.821.237,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.073,00	29.120.342.363,00	(7.070.919.685,00)	(2.404.249.628,00)	0,00	(9.475.169.313,00)	19.645.173.050,00
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	45,00	297.828.145,00	(94.564.709,00)	(24.336.388,00)	0,00	(118.901.097,00)	178.927.048,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	54,00	585.008.789,00	(361.703.283,00)	(45.479.529,00)	0,00	(407.182.812,00)	177.825.977,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21,00	5.659.063.168,00	(5.610.026.046,00)	(4.622.880,00)	0,00	(5.614.648.926,00)	44.414.242,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	160,00	1.052.875.728,00	(626.026.992,00)	(226.669.557,00)	0,00	(852.696.549,00)	200.179.179,00
133111	Gedung dan Bangunan	8.795,00	10.461.107.316.949,00	(1.521.889.706.225,00)	(383.669.171.787,00)	0,00	(1.905.558.878.012,00)	8.555.548.438.937,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3.351,00	9.044.466.385.894,00	(1.262.579.233.422,00)	(322.091.392.352,00)	0,00	(1.584.670.625.774,00)	7.459.795.760.120,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4.696,00	1.193.025.967.463,00	(237.737.609.265,00)	(56.515.307.563,00)	0,00	(294.252.916.828,00)	898.773.050.635,00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2,00	418.676.000,00	(33.939.610,00)	(9.624.736,00)	0,00	(43.564.346,00)	375.111.654,00
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	8,00	2.322.448.084,00	(287.695.026,00)	(71.401.945,00)	0,00	(359.096.971,00)	1.963.351.113,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	738,00	220.873.839.508,00	(21.251.228.022,00)	(4.981.445.191,00)	0,00	(26.232.674.093,00)	194.641.165.415,00
134111	Jalan dan Jembatan	139.624,00	40.210.658.512,00	(14.728.197.277,00)	(3.813.451.876,00)	0,00	(18.541.649.153,00)	21.669.009.359,00
50101	JALAN	139.437,00	36.059.488.412,00	(14.337.191.138,00)	(3.727.875.881,00)	0,00	(18.065.067.019,00)	17.994.421.393,00
50102	JEMBATAN	187,00	4.151.170.100,00	(391.006.139,00)	(85.575.995,00)	0,00	(476.582.134,00)	3.674.587.966,00
134112	Irigasi	277,00	23.980.707.438,00	(4.480.972.181,00)	(1.440.317.003,00)	0,00	(5.921.289.184,00)	18.059.418.254,00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	23,00	2.095.568.000,00	(214.459.543,00)	(51.324.709,00)	0,00	(265.784.252,00)	1.829.783.748,00
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	3,00	749.697.588,00	(25.366.463,00)	(11.078.691,00)	0,00	(36.445.154,00)	713.252.434,00
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3,00	54.719.000,00	(13.377.610,00)	(3.330.722,00)	0,00	(16.708.332,00)	38.010.668,00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	15,00	3.949.620.681,00	(1.756.936.618,00)	(680.692.806,00)	0,00	(2.437.629.424,00)	1.511.991.257,00
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	92,00	6.407.606.112,00	(1.136.293.291,00)	(267.540.118,00)	0,00	(1.403.833.409,00)	5.003.772.703,00

50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	100.00	5.744.456.057.00	(778.148.180.00)	(171.018.145.00)	0,00	(949.166.325.00)	4.795.289.732.00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	41.00	4.979.040.000.00	(556.390.476.00)	(255.331.812.00)	0,00	(811.722.288.00)	4.167.317.712.00
134113	Jaringan	1.348.00	198.121.492.187.00	(85.164.476.772.00)	(4.891.456.581.00)	0,00	(90.055.933.353.00)	108.065.558.834.00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	83.00	13.159.509.383.00	(4.381.936.466.00)	(438.844.785.00)	0,00	(4.820.781.251.00)	8.338.728.132.00
50302	INSTALASI AIR KOTOR	30.00	4.609.393.349.00	(1.407.372.864.00)	(153.646.449.00)	0,00	(1.561.019.313.00)	3.048.374.036.00
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3.00	590.680.659.00	(590.680.659.00)	0,00	0,00	(590.680.659.00)	0,00
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	11.00	377.496.350.00	(111.550.709.00)	(9.431.158.00)	0,00	(120.981.867.00)	256.514.483.00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	139.00	78.753.857.921.00	(19.102.065.450.00)	(1.971.837.280.00)	0,00	(21.073.903.280.00)	57.679.954.641.00
50307	INSTALASI PERTAHANAN	10.00	74.886.000.00	(25.692.298.00)	(2.580.087.00)	0,00	(28.272.385.00)	46.613.615.00
50309	INSTALASI PENGAMAN	26.00	401.902.915.00	(197.316.836.00)	(20.020.146.00)	0,00	(217.336.982.00)	184.565.933.00
50310	INSTALASI LAIN	306.00	43.805.802.474.00	(42.977.240.211.00)	(553.046.394.00)	0,00	(43.530.286.605.00)	275.515.869.00
50401	JARINGAN AIR MINUM	26.00	1.260.921.549.00	(447.956.150.00)	(43.308.013.00)	0,00	(491.264.163.00)	769.657.386.00
50402	JARINGAN LISTRIK	381.00	42.604.476.922.00	(10.459.299.622.00)	(1.009.846.920.00)	0,00	(11.469.146.542.00)	31.135.330.380.00
50403	JARINGAN TELEPON	331.00	8.915.423.665.00	(3.513.455.461.00)	(568.533.430.00)	0,00	(4.081.988.891.00)	4.833.434.774.00
50404	JARINGAN GAS	2.00	3.567.141.000.00	(1.949.910.046.00)	(120.361.369.00)	0,00	(2.070.271.415.00)	1.496.869.585.00
135111	Aset Tetap Renovasi	5.00	3.151.159.400.00	(1.046.358.598.00)	1.041.591.931.00	0,00	(4.766.667.00)	3.146.392.733.00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0.00	0,00	(19.995.000.00)	19.995.000.00	0,00	0,00	0,00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3.00	541.875.400.00	(1.026.363.598.00)	1.021.596.931.00	0,00	(4.766.667.00)	537.108.733.00
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2.00	2.609.284.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.284.000.00
135121	Aset Tetap Lainnya	1.076.299.00	48.939.236.176.00	(532.030.618.00)	(32.049.028.00)	0,00	(564.079.646.00)	48.375.156.530.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.074.179.00	35.924.970.145.00	(2.683.400.00)	0,00	0,00	(2.683.400.00)	35.922.286.745.00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK	38.00	7.882.158.518.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882.158.518.00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	723.00	2.236.821.379.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.821.379.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	456.00	2.270.360.917.00	(529.347.218.00)	(32.049.028.00)	0,00	(561.396.246.00)	1.708.964.671.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	381.00	579.160.267.00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.160.267.00
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	522.00	45.764.950.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.764.950.00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	75.294.00	145.364.364.071.00	(144.747.342.209.00)	12.453.016.443.00	0,00	(132.294.325.766.00)	13.070.038.305.00
20101	TANAH PERSIL	840.00	268.783.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.783.000.00
30101	ALAT BESAR DARAT	1.00	100.000.00	(10.096.244.00)	9.996.244.00	0,00	(100.000.00)	0,00
30103	ALAT BANTU	67.00	2.230.448.480.00	(2.680.075.924.00)	449.627.444.00	0,00	(2.230.448.480.00)	0,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	532.00	11.164.314.505.00	(9.187.676.231.00)	(1.975.566.846.00)	0,00	(11.163.243.077.00)	1.071.428.00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	39.00	13.373.200.00	(13.961.200.00)	588.000.00	0,00	(13.373.200.00)	0,00
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2.00	623.405.000.00	(623.405.000.00)	0,00	0,00	(623.405.000.00)	0,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0.00	0,00	(4.906.000.00)	4.906.000.00	0,00	0,00	0,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	21.00	78.984.700.00	(87.535.370.00)	8.550.670.00	0,00	(78.984.700.00)	0,00
30303	ALAT UKUR	25.00	97.267.570.00	(104.374.040.00)	7.106.470.00	0,00	(97.267.570.00)	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	76.00	240.070.762.00	(208.495.761.00)	(31.575.001.00)	0,00	(240.070.762.00)	0,00
30501	ALAT KANTOR	9.438.00	16.521.802.209.00	(17.563.091.643.00)	1.064.964.514.00	0,00	(16.498.127.129.00)	23.675.080.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	29.040.00	38.286.243.654.00	(34.093.395.568.00)	(4.122.301.694.00)	0,00	(38.215.697.262.00)	70.546.392.00
30601	ALAT STUDIO	703.00	1.951.380.093.00	(10.886.481.632.00)	8.943.184.981.00	0,00	(1.943.296.651.00)	8.083.442.00
30602	ALAT KOMUNIKASI	1.021.00	1.931.503.480.00	(2.180.160.969.00)	249.407.189.00	0,00	(1.930.753.780.00)	749.700.00
30603	PERALATAN PEMANCAR	63.00	1.201.627.609.00	(1.279.771.162.00)	129.369.563.00	0,00	(1.150.401.599.00)	51.226.010.00
30701	ALAT KEDOKTERAN	96.00	280.274.667.00	(830.702.667.00)	550.428.000.00	0,00	(280.274.667.00)	0,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	26.00	539.853.500.00	(20.791.000.00)	(294.332.500.00)	0,00	(315.123.500.00)	224.730.000.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	48.00	282.378.148.00	(470.196.040.00)	187.817.892.00	0,00	(282.378.148.00)	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	26.00	146.107.750.00	(50.107.163.00)	(79.976.088.00)	0,00	(130.083.251.00)	16.024.499.00
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1.00	350.000.00	(350.000.00)	0,00	0,00	(350.000.00)	0,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.00	7.000.000.00	(7.919.333.00)	919.333.00	0,00	(7.000.000.00)	0,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3.00	4.426.001.00	(4.426.001.00)	0,00	0,00	(4.426.001.00)	0,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2.00	44.488.950.00	(11.000.000.00)	(33.488.950.00)	0,00	(44.488.950.00)	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	3.891.00	40.137.812.168.00	(47.170.368.247.00)	7.075.208.038.00	0,00	(40.095.160.209.00)	42.651.959.00
31002	PERALATAN KOMPUTER	2.844.00	7.012.799.490.00	(7.653.134.703.00)	653.073.463.00	0,00	(7.000.061.240.00)	12.738.250.00
31301	SUMUR	1.00	3.500.000.00	(3.500.000.00)	0,00	0,00	(3.500.000.00)	0,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7.00	99.105.000.00	(56.861.504.00)	(41.466.496.00)	0,00	(98.328.000.00)	777.000.00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10.00	37.344.650.00	(43.443.650.00)	6.099.000.00	0,00	(37.344.650.00)	0,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2.00	520.000.00	(500.000.00)	(20.000.00)	0,00	(520.000.00)	0,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	30.00	19.115.924.00	(23.948.875.00)	4.832.951.00	0,00	(19.115.924.00)	0,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	47.00	15.103.961.871.00	(5.546.952.715.00)	(1.930.058.558.00)	0,00	(7.477.011.273.00)	7.626.950.598.00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	59.00	5.014.827.910.00	(2.923.342.624.00)	944.537.377.00	0,00	(1.978.805.247.00)	3.036.022.663.00
40401	TUGU/TANDA BATAS	3.00	169.979.000.00	(76.037.685.00)	15.159.891.00	0,00	(60.877.794.00)	109.101.206.00
50101	JALAN	357.00	62.900.000.00	(718.841.500.00)	655.941.500.00	0,00	(62.900.000.00)	0,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2.00	22.145.001.00	(9.464.699.00)	(10.032.334.00)	0,00	(10.032.334.00)	12.112.667.00
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1.00	5.000.000.00	(1.937.500.00)	(125.000.00)	0,00	(2.062.500.00)	2.937.500.00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2.00	57.632.000.00	(20.075.050.00)	(1.440.800.00)	0,00	(21.515.850.00)	36.116.150.00
50310	INSTALASI LAIN	11.00	49.878.600.00	(44.828.600.00)	(5.050.000.00)	0,00	(49.878.600.00)	0,00
50401	JARINGAN AIR MINUM	1.00	144.010.00	(144.010.00)	0,00	0,00	(144.010.00)	0,00
50402	JARINGAN LISTRIK	1.00	64.205.595.00	(20.866.815.00)	(1.605.140.00)	0,00	(22.471.955.00)	41.733.640.00
50403	JARINGAN TELEPON	18.00	119.547.290.00	(90.763.279.00)	8.872.631.00	0,00	(81.890.648.00)	37.656.642.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	25.755.00	1.321.579.440.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.579.440.00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK	2.00	350.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	17.00	119.668.999.00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.668.999.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	7.00	23.701.805.00	(23.411.805.00)	0,00	0,00	(23.411.805.00)	290.000.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	25.00	1.647.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000.00
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	130.00	2.815.040.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.040.00
	JUMLAH	9.958.784,00	35.369.473.774.851,00	(4.804.461.198.415,00)	(725.972.953.622,00)	0,00	(5.530.434.152.037,00)	29.839.039.622.814,00



LAMPIRAN A2
TABEL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR SATUAN KERJA YANG TERDAPAT KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Presentasi Pengerjaan	Sub Nilai KDP	Total Nilai KDP	Status KDP			Keterangan			
									Dilanjutkan	Dihentikan	Dihentikan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	SALDO AWAL							√			Pembangunan Gedung Kantor Baru		
			Perencanaan	W16-	931.800.000	28%	254.127.272						Uang Muka jasa Konsultansi Kontruksi		
						51%	207.325.500							Pembayaran Termin II	
						75%	207.325.500							PembayaranTermin III	
						90%	138.679.228							PembayaranTermin IV	
						100%	87.422.500							Termin I (Lanjutan dari Termin IV)	
			Total							894.880.000,00					
			Pelaksanaan	W16/A7/596/PL.00/VI/2	21.500.925.330	8%	1.075.046.267								Uang Muka
						30%	3.063.881.859								Termin I
						52%	3.063.881.859								Termin II
						73%	3.063.881.859								Termin III
						100%	3.706.447.156								Termin IV
			Total							13.973.139.000,00					
			Pengawasan	W16-	719.546.400	100%	447.452.000								Termin I
			Total							447.452.000,00					
			Pengelola							2.737.600					
						208.131.000	17%	34.710.080							W16-A7/186/PL.00/II/2022
							28%	23.856.400							W16-A7/497/PL.00/III/2022
							51%	47.320.070							W16-A7/530/PL.00/IV/2022
							70%	39.926.937							W16-A7/547/PL.00/VI/2022
							71%	2.990.000							W16-A7/625/PL.00/VII/2022
				79%	15.700.000							W16-A7/710/PL.00/IX/2022			
				80%	2.280.000							W16-A7/824/PL.00/X/2022			
				95%	32.695.985							W16-A7/658/PL.00/XI/2022			
				100%	8.651.528							W16-A7/959/PL.00/XII/2022			
								208.131.000,00							
			TOTAL KDP					15.523.602.000,00							
2	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	Saldo awal						-	√			Pembangunan Gedung Kantor Baru		
			Perencanaan	08/Kontrak/PRC-	918.405.600	#REF!	734.724.480								
									45.920.280						
									75.217.419						
									7.439.085						
			Total							863.301.264					
			Pelaksanaan 2	05/KONTRAK/FISIK-	23.016.762.961	#REF!	2.762.011.556								
									2.762.011.556						
									2.762.011.556						
									2.762.011.556						
									1.553.017.277						
									1.270.650.499						
			Total Pelaksana								13.871.714.000,00				
			Pengawasan 1	04/PWS-PA.Ksn/VI/2022	962.469.900	60%	433.111.455								
									92.397.110						
						51.973.375									
Total								577.481.940,00							
Pengelola	Pengelola Kegiatan	239.802.000	100%	3.715.875								Pembangunan Gedung Satker Baru/			
						3.715.875						Pembangunan Gedung Satker Baru/			
						5.208.000						Pembangunan Gedung Satker Baru/			
						5.239.518						Pembangunan Gedung Satker Baru/			
						5.035.240						Pembangunan Gedung Satker Baru/			
						5.254.518						Pembangunan Gedung Satker Baru/			

3	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	SALDO AWAL					27.508.714.594	✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru		
			Perencanaan	No.W23-	28.123.696	100%	Rp 28.123.696						
			Total						28.123.696,00				
			Pelaksanaan	No.W23-	6.363.217.400	100%	1.431.723.915						
							1.431.723.915						
							1.908.965.220						
							1.590.804.350						
			Total						6.363.217.400,00				
			Pengawasan	No.W23-	187.408.600	100%	93.704.300						
							84.333.870						
							9.370.430						
			Total						187.408.600,00				
			Pengelola		78.330.000	100%	18.278.840						
							2.647.000						
							11.890.000						
							17.970.779						
							11.628.098						
							3.099.800						
							1.599.800						
							1.599.801						
				2.534.200									
				7.000.000									
Total Pengelola						78.248.318,00							
TOTAL KDP							34.165.712.608,00						
4	401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	SALDO AWAL						✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru		
			Perencanaan	W30-	871.881.554	100%	392.960.700				Termin 1		
							392.960.700				Termin 2		
							49.120.088				Termin 3		
							36.840.066				Termin 4		
			Total						871.881.554,00				
			Pelaksanaan	W30-	12.993.282.737	100%	8.293.584.726					Pembayaran Uang Muka	
							4.699.698.011					Termin 1	
			Total						12.993.282.737,00				
			Pengawasan	W30-	252.500.025	100%	151.500.015					Pembayaran Uang Muka	
							25.250.003					Termin 1	
							25.250.002					Termin 2	
							25.250.003					Termin 3	
							25.250.002					Termin 4	
Total						252.500.025,00							
Pengelola		304.003.000	97%	294.897.124									
Total Pengelola						294.897.124,00							
TOTAL KDP							14.412.561.440,00						
5	099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	SALDO AWAL						✓		Renovasi Gedung Kantor Lanjut TA		
			Perencanaan	W22.U1/17/PPK/PL.01/6	724.625.000	100%	72.462.500				Termin 1 Perencanaan		
							144.925.000				Termin 2 Perencanaan		
							181.156.250				Termin 3 Perencanaan		
							181.156.250				Termin 4 Perencanaan		
							36.231.250				Termin 5 Perencanaan		
							108.693.750				Termin 6 Perencanaan		
			Total						724.625.000,00				
			Pelaksanaan	W22.U1/103/PPK/PL.01/	8.866.500.000	100%	2.191.625.000					Termin 1 Pelaksanaan	
							3.944.925.000					Termin 2 Pelaksanaan	
							2.511.554.000					Termin 3 Pelaksanaan	
							218.396.000					Bank Garansi Pelaksanaan	
			Total						8.866.500.000,00				
			Pengawasan	W22.U1/102/PPK/PL.01/	422.500.000	100%	359.125.000					Pengawasan	
				63.375.000					Bank Garansi Pengawasan				

			Total				422.500.000,00				
			Pengelola		123.217.529,00	100%	3.060.000				Bayar honorarium kelompok kerja
							5.254.800				Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630				Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630				Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630				Melakukan konsultasi dan asistensi
							5.340.000				Bayar honorarium kelompok kerja
							2.550.000				Bayar honorarium kelompok kerja
							7.643.700				Melakukan koordinasi lanjutan ke Biro
							5.499.400				Memenuhi undangan permintaan
							2.587.300				Memenuhi undangan permintaan
							5.665.813				Memenuhi undangan permintaan
							5.092.313				Memenuhi undangan permintaan
							4.681.813				Memenuhi undangan permintaan
							578.500				Beli atk untuk keperluan pekerjaan
							23.680.000				Bayar honorarium pengelola teknis,
							19.980.000				Pembayaran Belanja Modal berupa
							900.000				Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.500.000				Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.500.000				Pembayaran Belanja Modal berupa
							300.000				Pembayaran Belanja Modal berupa
			Total Pengelola					123.217.529,00			
			Jumlah					10.136.842.529,00			
			KOREKSI NILAI					218.396.000,00			terdapat selisih dari nilai realisasi dan
			TOTAL KDP					9.918.446.529,			
6	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	SALDO AWAL					23.391.099.652	✓		
			Perencanaan	W26-	59.996.000	100%	59.996.000				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Total					59.996.000			
			Pelaksanaan	W26-	1.439.172.746	100%	1.439.172.746				
			Total					1.439.172.746			
			Pengawasan	W26-	89.523.000	100%	89.523.000				
			Total					89.523.000			
			Pengelola					49.956.200			
			Total Pengelolaan					49.956.200			
			TOTAL KDP					25.029.747.598,00			
7	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	SALDO AWAL					26.465.416.633	✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W16-	28.115.052	100%	28.115.052				
			Total					28.115.052			
			Pelaksanaan	W16-	6.080.635.500	100%	6.080.635.500				
			Total					6.080.635.500			
			Pengawasan	W16-	184.081.845	100%	184.081.845				
			Total					184.081.845			
			Pengelola					53.855.807			
			Total Pengelola					53.855.807			
			Perencanaan	W16-	8.940.000	100%	8.940.000				
			Total					8.940.000			
			Pelaksanaan	W16-	180.300.000	100%	180.300.000				
			Total					180.300.000			
			Pengawasan	W16-	6.999.640	100%	6.999.640				
			Total					6.999.640			
			Pengelola					1.440.000			
			Total Pengelola					1.440.000			
			TOTAL KDP					33.009.784.477			
8	401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	SALDO AWAL						✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W23-U8/10/PERC.FNSH-	29.754.000	100%	29.754.000				
			Total					29.754.000			
			Pelaksanaan	W23-U8/08/KONST.FG-	1.001.834.000	100%	1.001.834.000				

			Total				1.001.834.000			
			Pengawasan	W23-U8/14/PWS-	59.584.800	100%	59.584.800			
			Total				59.584.800			
			Pengelola		37.722.034	100%	37.722.034			
			Total Pengelola				37.722.034			
			Perencanaan	W23-	99.895.000	100%	99.895.000			
			Total				99.895.000			
			Pelaksanaan	W23-U8/08/	3.741.617.000	100%	3.741.617.000			
			Total				3.741.617.000			
			Pengawasan	W23-U8/14/PWS-	89.688.000	100%	89.688.000			
			Total				89.688.000			
			Pengelola		39.731.602	100%	39.731.602			
			Jumlah				5.060.094.834,00			
			KOREKSI NILAI				1.210.360.338,			Selisih di karenakan untuk
			TOTAL KDP				3.849.734.496,			
9	099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	SALDO AWAL					✓		Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W22.U12/737/PPK/IV/20	919.820.000	100%	919.820.000			
			Total				919.820.000			
			Pelaksanaan	W22-	8.365.590.000	61%	8.365.590.000			
			Total				5.097.990.546			
			Pengawasan	W22-	358.457.000	90%	358.457.000			
			Total				322.611.300			
			Pengelola		152.696.000	100%	152.696.000			
			Total Pengelola				152.695.084			
			Jumlah				6.493.116.930			
			KOREKSI NILAI				3.236.000			Selisih pencatatan Pengembalian
			TOTAL KDP				6.489.880.930,			
10	578850	PTUN PALU	Saldo awal					✓		Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W4-	1.851.725.000	100%	1.851.725.000			
			Total				1.851.725.000			
			Pelaksanaan	W4-	5.593.893.000	100%	5.593.893.000			
			Total				5.593.893.000			
			Pengawasan	W4-	204.969.825	100%	204.969.825			
			Total				204.969.825			
			Pengelola		224.007.000	100%	212.837.550			
			Total Pengelola				224.007.000			
			Pengurusan				99.700.000			
			TOTAL KDP				7.974.294.825			
11	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	Saldo awal					✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W14-	24.878.430.000	20%	2.985.411.600			Uang Muka Kerja
							6.965.960.400			Pembayaran termin ke-1
							4.975.686.000			Pembayaran termin ke-2
			Total				14.927.058.000			
			Pelaksanaan	W14-	868.533.325	80%	616.658.661			Pembayaran termin ke-1
							38.541.166			Pembayaran termin ke-2 (tahap
							115.623.499			Pembayaran termin ke-3 (tahap
			Total				770.823.326			
			Pengawasan	W16-	649.531.074	20%	116.915.593			Uang Muka Kerja
							142.896.836			Pembayaran termin ke-1
							129.906.214			Pembayaran termin ke-2
			Total				389.718.643			
			Pengelola				6.560.000			Honor Pokja dan Perjadin dalam
							36.945.891			Perjadin dan konsumsi rapat dalam
							11.545.800			Perjadin dalam rangka pembangunan
							18.431.000			Perjadin dalam rangka pembangunan
							12.283.983			Perjadin, konsumsi rapat dan cetak
							13.259.000			Perjadin, konsumsi rapat, sewa
							4.345.000			Perjadin, konsumsi rapat dalam

						6.180.000					Perjadin dalam rangka pembangunan
						35.124.412					Honor Pokja dan Perjadin dalam
						32.588.064					Perjadin dalam rangka pembangunan
			Total Pengelola					177.263.150			
			TOTAL					16.264.863.119			
12	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	Saldo awal							✓	Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-A8/127/PKP/ADD-	998.091.600	93%	930.720.417				
			Pelaksanaan	W21-A8/125.A/PKK/ADD-	23.280.000.000	55%	12.799.620.000				
			Pengawasan	W21-A8/128/PKP/ADD-	993.948.000	55%	546.671.400				
			Pengelola		214.783.971	100%	214.783.971				
			TOTAL					14.491.795.788			
13	099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	Saldo awal							✓	Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W15.U8/586/PL.01/07/202	980.005.400	100%	784.004.320				
							49.000.270				
							147.000.810				
			Total					980.005.400,00			
			Pelaksanaan	W15.U8/1526/PL.01/08/20	6.393.506.381	100%	1.278.701.276				
				W15.U8/2062/PL.01/11/20	6.492.500.000		2.606.899.362				
							2.282.274.362				
							324.625.000				
			Total					6.492.500.000			
			Pengawasan	W15.U8/1535/PL.01/08/20	209.000.000	100%	104.500.000				
							104.500.000				
			Total					209.000.000,00			
			Pengelola				85.516.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							11.547.500				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							16.518.700				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							39.055.050				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							9.188.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							8.080.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							11.300.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							1.915.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							7.400.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							4.810.000				Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
			Total Pengelola					195.330.250,00			
			TOTAL					7.876.835.650			
14	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Saldo awal							✓	Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W16-	49.900.000	100%	49.900.000				
			Pelaksanaan	W16-	3.153.900.000	100%	3.187.900.000				
			Pengawasan	W16-	99.000.000	100%	99.000.000				
			Pengelola		37.497.200	100%	37.497.200				
			TOTAL					3.374.297.200			
15	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	Saldo awal							✓	
			Perencanaan	W18-	767.456.465	100%	613.965.172				
				W18-			38.372.823				
							115.118.470				
			Total					767.456.465			
			Pelaksanaan	W18-	8.738.690.300	100%	2.621.607.090				Renovasi dan Perluasan Gedung
							2.140.979.124				
							2.140.979.124				
							1.398.190.448				
							436.934.514				
			Total					8.738.690.300			
			Pengawasan	W18-	370.051.562	100%	74.010.312				
							129.518.047				

							129.518.047					
							37.005.156					
			Total					370.051.562				
			Pengelola				42.000.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							25.000.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							3.900.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							3.660.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							82.175.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							750.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							11.440.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							5.600.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
							5.600.000					Pembayaran Administrasi Renovasi
			Total Pengelola					180.125.000				
			TOTAL					10.056.323.327				
16	401868	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	Saldo awal							✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-	553.371.500	80%	442.042.268					
			Pelaksanaan	W21-	16.046.768.493	29%	4.630.291.535					
			Pengawasan	W21-	399.083.850	32%	127.972.350					
			Pengelola			100%	186.142.262					
			TOTAL					5.386.448.415				
17	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Saldo awal							✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W18-	98.235.000	100%	98.235.000					
			Pelaksanaan	W18-	4.750.738.282	100%	4.750.738.282					
			Pengawasan	W18-	89.177.300	100%	89.177.300					
			Pengelola		48.701.732	100%	48.701.732					
			TOTAL					4.986.852.314				
18	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	Saldo awal							✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	22/PPK-	99.924.000	100%	99.924.000					
			Pelaksanaan	29/PPK-	2.610.177.000	100%	2.610.177.000					
			Pengawasan	28/PPK-	89.797.000	100%	89.797.000					
			Pengelola	xxxxxx	194.936.000	100%	194.936.000					
			TOTAL					2.994.834.000				
19	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Saldo awal					17.936.727.725		✓		seharusnya telah definitif pada tahun anggaran 2022. tetapi baru didefinitifkan pada aplikasi sakti tahun anggaran 2023
			Perencanaan	W16-	498.000.000	100%	498.000.000					
			Pelaksanaan	W16-	12.900.000.000	100%	12.900.000.000					
			Pengawasan	W16-	297.901.800	100%	297.901.800					
			Pengelola	xxxxxx	94.470.399	100%	94.470.399					
			TOTAL					31.727.099.924				
20	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	Saldo awal							✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-	1.978.265.000	88%	1.738.265.000					
			Pelaksanaan	W21-	10.480.000.000	100%	10.480.000.000					
			Pengawasan	W21-	1.399.809.000	20%	279.703.000					
			Penyusunan	W21-	99.700.000	100%	99.700.000					
			Penyusunan	W21-	98.397.000	100%	98.397.000					
			Pengelola	xxxxxx	143.764.154	100%	143.764.154					
			TOTAL					12.839.829.154				
21	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Saldo awal							✓		Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	02/SP-PRC/PPK/03/2022	994.830.000	89%	882.913.000					
			Pelaksanaan	04/SP.ONS/PPK/10/2022	7.239.000.000	100%	7.239.000.000					
			Pengawasan	03B/SP.PWS/PPK/10/2022	230.590.000	100%	230.590.000					
			Pengelola		312.944.000	86%	267.979.698					
			TOTAL					8.620.482.698				
22	401785	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	Saldo awal							✓		

Perencanaan	W16-	925.360.400	60%	740.288.320				Pembayaran Termin ke - 1	
	W16-			46.268.020				Pembayaran Termin ke - 2	
	W16-			83.282.436				Pembayaran Pembangunan Gedung	
Total					869.838.776,00				
Pelaksanaan	W16-	24.440.000.700	60%	2.932.800.084				Uang Muka Kerja	
	W16-			2.932.800.084				Pembayaran Termin ke - 2	
	W16-			2.932.800.084				Pembayaran Termin ke - 3	
	W16-		14.664.000.420		2.932.800.084				Pembayaran Termin ke - 1
	W16-				2.932.800.084				Pembayaran Pembangunan Gedung
Total					14.664.000.420,00				
Pengawasan	W16-	774.025.200		116.103.780				Pembayaran Termin ke - 1	
	W16-	774.025.200		232.207.560				Pembayaran Termin ke - 2	
	W16-	774.025.200		116.103.780				Pembayaran Termin ke - 3	
Total					464.415.120,00				
Pengelola		226.099.000		9.897.796				Perjadin Pembangunan Gedung	
				9.662.447				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.534.741				Perjadin Pembangunan Gedung	
				8.611.055				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.315.500				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.114.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				1.650.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.200.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				5.525.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.517.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.447.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.557.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				12.524.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				11.933.977				Perjadin Pembangunan Gedung	
				5.861.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.499.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				12.868.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.087.197				Perjadin Pembangunan Gedung	
				5.873.697				Perjadin Pembangunan Gedung	
				5.939.697				Perjadin Pembangunan Gedung	
				1.020.000				Pembangunan Gedung Satker	
				1.020.000				Pembangunan Gedung Satker	
				1.020.000				Pembangunan Gedung Satker	
				1.020.000				Pembangunan Gedung Satker	
				6.230.500				Perjadin Pembangunan Gedung	
				5.869.400				Perjadin Pembangunan Gedung	
				6.573.400				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.434.100				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.082.900				Perjadin Pembangunan Gedung	
				4.834.500				Perjadin Pembangunan Gedung	
				1.100.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.140.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
				3.140.000				Perjadin Pembangunan Gedung	
		3.140.000				Perjadin Pembangunan Gedung			
		3.140.000				Perjadin Pembangunan Gedung			
		3.900.000				Perjadin Pembangunan Gedung			
		3.900.000				Perjadin Pembangunan Gedung			
		3.850.000				Perjadin Pembangunan Gedung			
Total Pengelola					205.192.907,00				
TOTAL					16.203.447.223				
23	401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	Saldo awal				✓		
			Perencanaan	W28-	1.235.432.000	88.87 %	296.503.680	Termin 1	
							691.841.920	Termin 2	

						61.715.400				Termin 3
			Total				1.050.061.000			
			Pelaksanaan	W28-	21.232.590.000	100%	7.878.739.768			Termin 1
							6.676.925.132			Termin 2
							5.615.295.600			Termin 3
							1.061.629.500			Termin 4
			Total				21.232.590.000			
			Pengawasan	W28-	1.243.477.000	100%	398.400.000			Termin 1
							265.600.000			Termin 2
			Total				664.000.000			
			Pengelola		325.000.000	83.43 %	14.970.311			
							14.532.500			
							14.597.825			
							14.935.900			
							14.957.418			
							14.975.879			
							13.063.200			
							13.548.000			
							14.874.600			
							14.587.566			
							15.000.000			
							15.000.000			
							14.758.000			
							14.580.000			
							15.000.000			
							14.910.000			
							14.919.800			
							14.571.750			
							7.372.250			
			Total Pengelola				271.154.999			
			TOTAL				23.217.805.999			
24	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	RENOVASI ATAP	W11.U3/1215/SPK.FISIK.P	545.500.000		146.937.000		✓	Pembayaran Belanja Modal sesuai SPK
							27.275.000			Pembayaran Blanja Modal sesuai
							371.288.000			Pembayaran Belanja modal sesuai
			Total Renovasi				545.500.000			
			PERENCANA		55.500.000		55.500.000			Pertanggung jawaban tambahan Uang
			Total				55.500.000			
			Pengawasan	W11.U3/9/SPK.PWS-PN-	48.700.000		48.700.000			Pembayaran Belanja Modal
			Total				48.700.000			
			Administrasi		36.081.500		14.221.500			Pertanggung jawaban Tambahan Uang
							21.860.000			Pertanggung jawaban Tambahan Uang
			Total Administrasi				36.081.500			
			TOTAL				685.781.500			
25	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Administrasi		4.690.000		4.690.000		✓	
			Total Administrasi				4.690.000			
			TOTAL				4.690.000			
26	097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	Rumah Dinas Ketua	W12.U12/14/PL.01/6/2022	546.957.400		346.957.400		✓	Pembayaran Belanja Modal berupa UM
							200.000.000			Pembayaran Belanja Modal Termin-1
			Total Rumah				546.957.400			
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	426.957.400		146.957.400			Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							280.000.000			Pembayaran Belanja Modal Termin-2
			Total Rumah				426.957.400			
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	563.914.800		66.957.400			Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							346.957.400			Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							150.000.000			Pbyrn blj Mdl T-4 renov RumDin PN
			Total Rumah Dinas				563.914.800			
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	299.699.000		207.822.570			Pbyrn blj Mdl T-4 renov RumDin PN
							91.876.430			Pembayaran belanja modal T-5 SPK

			Total Rumah Dinas				299.699.000			
			Perencanaan	W12.U12/6/PL.01/3/2022	240.112.000		204.095.200			Pembayaran Belanja Modal Termin ke 1
							36.016.800			Pembayaran belanja modal T-2 (100%)
			Total Perencanaan				240.112.000			
			Pengawasan		147.250.000		29.450.000			Pembayaran Belanja Modal berupa UM
							29.450.000			Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							29.450.000			Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							29.450.000			Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							22.087.500			Pembayaran Belanja Modal Termin-4
							7.362.500			Pembayaran Belanja Modal Termin-5
			Total Pengawasan				147.250.000			
			Administrasi	-	132.522.647		7.766.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			3.471.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			7.890.501			Penggantian uang persediaan untuk
				-			13.710.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			11.250.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			13.200.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			7.160.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			8.790.146			Penggantian uang persediaan untuk
				-			12.705.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			18.500.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.200.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			3.700.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			2.220.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			2.960.000			Penggantian uang persediaan untuk
			Total Administrasi				132.522.647			
			TOTAL				2.357.413.247			
27	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID nilai kdp 19.400.000	Pengadaan Sarana	W11-	30.000.000		30.000.000		✓	Pembayaran Pengadaan Prasarana
			Total Pengadaan				30.000.000			
			Konstruksi Fisik	W11-	198.000.000		198.000.000			Pembayaran Renovasi Ruang Tunggu
			Total Konstruksi				198.000.000			
			Perencanaan	W11-A1/1060.a/PL.04/II/	15.000.000		12.000.000			Pembayaran Perencanaan Gedung Ruang
							3.000.000			PEMBAYARAN PERENCANAAN
			Total Perencanaan				15.000.000			
			Pengawasan	W11-	10.000.000		10.000.000			Pembayaran Pengawasan Renovasi
			Total Pengawasan				10.000.000			
			Administrasi	-	4.400.000		982.500			Pengganti Uang Persediaan Untuk
				-			2.197.500			Pembayaran Belanja Modal
				-			1.220.000			Pertanggungjawaban Pengganti Uang
			Total Administrasi				4.400.000			
			Tambah Daya	-	194.933.000		194.933.000			PEMBAYARAN PENGADAAN TAMBAH
			Total Tambah Daya				194.933.000			
			TOTAL				452333000			
28	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Konstruksi Fisik	W1.U/3526/PL.01/VIII/202	7.456.969.000		2.161.499.700		✓	Pembayaran Belanja Modal sesuai SPK
							2.215.179.382			Pembayaran Belanja Modal Termin II
							1.476.786.255			Pembayaran Belanja Modal Termin III
							1.230.655.213			Pembayaran Belanja Modal Termin IV
							372.848.450			Pembayaran Belanja Modal Retensi
			Total Konstruksi				7.456.969.000			
			Perencanaan	W1.U/722/PL.01/II/2022	1.298.886.000		259.777.200			Pembayaran Belanja Modal Jasa
							389.665.800			Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-2
							454.610.100			Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-3
							194.832.900			Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-3
			Total Perencanaan				1.298.886.000			
			Pengawasan	W1.U/3814/PL.01/IX/2022	319.157.000		63.831.400			Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							95.747.100			Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							95.747.100			Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							63.831.400			Pembayaran Belanja Modal Termin-4
			Total Pengawasan				319.157.000			

			Administrasi	-	137.632.266	4.550.000				Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-		25.268.900				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		16.437.382				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		43.910.700				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		886.800				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-		12.250.000				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-		30.328.484				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-		4.000.000				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Administrasi				137.632.266			
			TOTAL				9.212.644.266			
29	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	Honor Pokja		-				✓	
			Honor Pokja	-	3.000.000	3.000.000				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Honor Pokja				3.000.000			
			Konstruksi Fisik	WI-	11.670.277.000	3.501.083.100				Pembayaran Belanja Modal Uang Muka
						2.450.758.170				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						2.450.758.170				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						2.684.163.710				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						583.513.850				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Konstruksi				11.670.277.000			
			Perencanaan	W1.U1/1067/PL.08/II/2022	1.418.008.800	280.836.160				Pembayaran Belanja Modal Termin ke 1
						337.003.392				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						337.003.392				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						168.501.696				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						6.914.000				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
						6.914.000				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
						280.836.160				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Perencanaan				1.418.008.800			
			Pengawasan	W1-	310.895.700	93.268.710				Pembayaran Belanja Modal Uang Muka
						108.813.495				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						77.723.925				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						31.089.570				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Pengawasan				310.895.700			
			Administrasi	-	89.850.000	41.599.200				Penggantian Uang Persediaan (RM)
				-		9.350.400				Penggantian Uang Persediaan (RM)
				-		38.900.400				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Administrasi				89.850.000			
			Honor Pokja Fisik	-	10.600.000	10.600.000				Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Honor Pokja				10.600.000			
			TOTAL				13.502.631.500			
30	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	Fisik	W1-	8.627.112.000	5.059.350.000			✓	Pembayaran Belanja Modal berupa
						3.567.762.000				
			Total Fisik				8.627.112.000			
			Perencanaan	W1-U21/310/PL.01/2/2022	750.225.226	706.094.330				Pembayaran Belanja Modal Termin ke 1
						44.130.896				Pembayaran Belanja Modal berupa Pengad
			Total Perencanaan				750.225.226			
			Pengawasan	W1-U21/1591/PL.01/12/202	294.000.000	176.400.000				Pembayaran Belanja Modal
						117.600.000				
			Total Pengawasan				294.000.000			
			Pengelola Kegiatan	-	140.899.072	57.416.152				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		17.973.400				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		18.480.520				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-		19.656.000				Penggantian uang persediaan rupiah
				-		27.373.000				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola				140.899.072			
			TOTAL				9.812.236.298			
31	401965	MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE	Fisik	W1-A21/754/PL.01/06/2022	29.104.560.000	1.819.035.000			✓	PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						2.273.793.750				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
						2.273.793.750				PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN

						1.046.547.200			
		Total Pengawasan							
		Pengelola Kegiatan	-	317.849.600		7.600.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			6.640.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			1.820.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.780.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			5.340.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			5.330.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			3.140.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			2.730.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			15.127.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
			-			10.460.400			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			12.860.400			Penggantian Uang Persediaan untuk
			-			16.293.800			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			8.325.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			6.900.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			7.295.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			6.400.000			Pembayaran Belanja Modal berupa
			-			14.450.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			4.550.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			15.500.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			15.500.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			8.300.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			5.980.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.990.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.860.000			Pembayaran Modal Berupa Perjalanan
			-			2.030.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.400.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			4.560.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk
			-			17.096.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.400.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.400.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			3.200.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			8.335.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			21.039.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			-			2.400.000			Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			-			62.818.000			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
		Total Pengelola	-				317.849.600		
		TOTAL					35.020.078.700		
33	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	Pembangunan	W1-U19/1225/PL.01/VI/20	670.829.399	182.969.837		✓	Pembayaran Belanja Modal Berupa
						106.732.404			Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
						106.732.404			Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
						106.732.404			Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4
						134.117.880			Pembayaran Belanja Modal Termin ke-5
						33.544.470			Pembayaran Belanja Modal Termin Ke-6
			Total				670.829.399		
			Perencanaan	-	23.863.600	23.183.600			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		680.000			Pembayaran Belanja Barang Berupa
			Total Perencanaan	-			23.863.600		
			Pengawasan	W1-U19/1233/PL.01/VI/202	22.291.700	680.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
						21.611.700			Pembayaran Belanja Modal Berupa
			Total Pengawasan				22.291.700		
			Pengelola Kegiatan	-	8.140.000	680.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa Honor
				-		720.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		720.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		720.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		680.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		1.960.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		1.440.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		150.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-		1.070.000			Penggantian Uang Persediaan Untuk

			Total Pengelola	-			8.140.000			
			Renovasi Pos	W1-U19/2368.a/PL.01/XI/2	63.900.000		32.000.000			Pembayaran Belanja Modal Berupa
				W1-			31.900.000			Pembayaran Belanja Modal
			Total Renovasi Pos				63.900.000			
			TOTAL				789.024.699			
34	401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	Fisik	U20/10-1/PK-Gdg/PPK/08/2	10.767.921.000		2.153.584.200		✓	Pby blj mdl brp UM (20%)Pek jasa
							3.661.093.140			Pby blj mdl berupa Termin I(Progress
							2.584.301.040			Pby blj mdl brp Termin II (progres
							2.368.942.620			Pby blj mdl brp termin III (Progres
			Total Fisik				10.767.921.000			
			Perencanaan	W2.U20/5/PPK/3/2022	933.807.088					
							841.741.600			Pembayaran belanja modal berupa
							52.608.850			Pembayaran belanja modal berupa
							39.456.638			Pby blj mdl brp termin III (Progress
			Total Perencanaan				933.807.088			
			Pengawasan	W2-U20/09-1/PWS-	225.400.000		45.080.000			Pby blj mdl brp UM (20%)pek jasa
							76.636.000			Pby blj mdl brp Termin I (40%)pek jasa
							54.096.000			Pby blj mdl brp termin II (Progress 30%)
							49.588.000			Pby blj mdl brp termin III (Progress 22%)
			Total Pengawasan				225.400.000			
			Pengelola Kegiatan	-	221.757.000		20.300.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			25.398.023			Penggantian uang persediaan untuk
				-			16.197.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			29.951.195			Penggantian uang persediaan untuk
				-			15.482.278			Penggantian uang persediaan untuk
				-			15.739.200			Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.748.000			Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.617.612			Penggantian uang Persediaan untuk
				-			17.569.127			Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.998.565			Penggantian uang persediaan untuk
				-			21.756.000			Penggantian uang persediaan untuk
			Total Pengelola	-			221.757.000			
			TOTAL				12.148.885.088			
35	401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	Fisik	W2-A22/728/PL.01/VIII/202	7.956.383.000		1.591.276.600		✓	Pby Blj Mdl brp UM (20%)Pek Jasa
							1.790.186.175			Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.790.186.175			Pembayaran Belanja Modal berupa
							2.784.734.050			Pembayaran Belanja Modal berupa
			Total Fisik				7.956.383.000			
			Perencanaan	W2-A22/256/2022	815.708.350		183.821.600			Pby Blj Mdl brp UM (20%)Pek Jasa
							183.821.600			Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							367.643.200			Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							45.955.400			Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							34.466.550			Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
			Total Perencanaan				815.708.350			
			Pengawasan	W2-A22/732/PL.01/VIII/202	233.400.000		70.020.000			Pby Blj Modal berupa UM (30%)Pek Jasa
							91.026.000			Pembayaran Belanja Modal berupa Pek
							72.354.000			Pby Belanja Modal berupa pekerjaan
			Total Pengawasan				233.400.000			
			Pengelola Kegiatan	-	177.782.044		22.490.403			Penggantian Uang Persediaan Untuk
							20.439.744			Penggantian uang Persediaan untuk
							24.468.948			Penggantian Uang Persediaan Untuk
							23.179.943			Penggantian Uang Persediaan Untuk
							16.358.112			Penggantian uang Persediaan untuk
							29.229.665			Penggantian uang Persediaan untuk
							20.235.229			Penggantian uang Persediaan untuk
							21.380.000			Penggantian uang Persediaan untuk
			Total Pengelola	-			177.782.044			
			TOTAL				9.183.273.394			

36	401907	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	Fisik	TRAK/PK-SRG-GDG/PPK-Plj/	21.542.478.000	580.511.267	✓		Pembayaran Belanja Modal Termyn I
						580.511.267			Pembayaran Belanja Modal Termyn II
						580.511.267			Pembayaran Belanja Modal Termyn III
						863.666.199			Pembayaran Belanja Modal Termyn IV
						601.200.000			Pembayaran Belanja Modal Termyn V
						601.200.000			Pembayaran Belanja Modal Termyn VI
						200.400.000			Pembayaran Belanja Modal Termyn VII
				08/KONTRAK/PK-		3.368.337.840			Paket Pekerjaan Kontruksi Pengadaan
				08/KONTRAK/PK-		14.166.140.160			Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
			Total Fisik				21.542.478.000		
			Pengawas	04/PGS.Srg.Gdg/PPK-	939.505.000	99.563.000			Pembayaran Belanja Modal 100%
				09/Kontrak/PWS-Gdg/PPK-		176.387.820			Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
				09/Kontrak/PWS-Gdg/PPK-		663.554.180			Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
			Total Pengawas				939.505.000		
			Perencana	04/Perc.Srg.Gdg/PPK-	832.114.000	84.713.550			Pembayaran Belanja Modal Termyn I
						14.949.450			Pembayaran Belanja Modal Termyn II
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		585.960.800			Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		36.622.550			Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		109.867.650			Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
			Total Perencana				832.114.000		
			Pengelola Kegiatan		476.990.707	16.586.840			Penggantian Uang Persediaan untuk
						4.323.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
						24.507.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
						14.045.900			Penggantian Uang Persediaan untuk
						17.010.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
						2.240.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
						4.300.000			Penggantian Uang Persediaan untuk
			16.102.000			Penggantian Uang Persediaan untuk			
			223.876.681			Pengelola Kegiatan untuk pekerjaan			
			153.999.286			Pengelola Kegiatan untuk pekerjaan			
Total Pengelola				476.990.707					
TOTAL				23.791.087.707					
37		PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	Fisik	11/Kontrak/PK-Gdg/PPK-	25.061.142.000	1.007.426.500	✓		Pembayaran belanja modal Termin ke I
						1.007.426.500			Pembayaran belanja modal Termin ke II
						1.208.911.800			Pembayaran belanja modal Termin ke III
						205.487.500			Pembayaran Belanja Modal Termin ke V
						680.497.700			Pembayaran Belanja modal Termin ke IV
				07/Kontrak/PK-Gdg/PPK-		4.724.000.000			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
				07/Kontrak/PK-Gdg/PPK-		16.227.392.000			Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
			Total Fisik				25.061.142.000		
			Perencanaan	04/Perc.Gdg/PPK.PN.Plj/VI	1.039.050.000	84.719.500			Pembayaran belanja modal sesuai
						14.950.500			Pembayaran Belanja Modal Termin ke II
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		751.504.000			Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		46.969.000			Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-		140.907.000			Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
			Total Perencanaan				1.039.050.000		
			Pengawasan	04/Kontrak/Pgws.Gdg/PPK-	911.916.000	99.751.000			Pembayaran Belanja Modal sesuai
				05/Kontrak/Was-Gdg/PPK-		190.858.775			PEKERJAAN KONSULTANSI
				05/Kontrak/Was-Gdg/PPK-		621.306.225			PEKERJAAN KONSULTANSI
			Total Pengawasan				911.916.000		
			pengelola Kegiatan		214.337.531	4.180.000			
						6.897.054			Penggantian uang persediaan untuk
			630.000			Penggantian uang persediaan KKP untuk			
			3.450.000			Penggantian uang persediaan untuk			
			11.730.000			Penggantian uang persediaan dana			
	GU ADM PROYEK 2021		760.000			Pertanggungjawaban tambahan uang			
			380.000			Penggantian uang persediaan			
			14.146.190			Penggantian uang persediaan			
			5.820.000			Penggantian uang persediaan			
			10.251.998			Penggantian uang persediaan			

						3.420.000				Penggantian uang persediaan	
						5.040.000				Penggantian uang persediaan	
						1.010.000				Penggantian uang persediaan	
						1.160.000				Penggantian uang persediaan	
						1.910.000				Penggantian uang persediaan	
						380.000				Penggantian uang persediaan	
						960.000				Penggantian uang persediaan	
						5.160.000				Penggantian uang persediaan	
		GU ADM PROYEK 2020				9.188.600				Penggantian uang persediaan	
						10.029.775				Penggantian uang persediaan	
						9.490.800				Penggantian uang persediaan	
						11.620.709				Penggantian uang persediaan	
						15.016.034				Penggantian uang persediaan	
						17.466.970				Penggantian uang persediaan	
						4.904.903				Penggantian uang persediaan	
						2.375.000				Penggantian uang persediaan	
						5.658.407				Penggantian uang persediaan	
						580.000				Penggantian uang persediaan	
						10.798.197				Penggantian uang persediaan	
						22.634.894				Penggantian uang persediaan	
						7.250.000				Penggantian uang persediaan	
						10.715.000				Penggantian uang persediaan	
						-677.000				Penggantian uang persediaan	
		Total pengelola						214.337.531		Pengembalian Uang Pengelola Kegiatan	
		TOTAL						27.226.445.531			
38	401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	Fisik	W7-A6/999/PL.01/8/2022	4.619.084.736			1.319.738.496		✓	Pembayaran belanja modal Uang Muka
								1.649.673.120			Pembayaran belanja Modal Termin ke-1
								1.649.673.120			Pembayaran belanja modal termin ke-2
			Total Fisik						4.619.084.736		
			Perencanaan	W7-A6/285/PL.01/2/2022	634.830.459			214.590.578			Pembayaran belanja modal termin ke-1
								357.650.963			Pembayaran belanja modal termin ke-2
								35.765.097			Pembayaran belanja modal termin ke III
								26.823.821			Pembayaran belanja modal termin ke IV
			Total Perencanaan						634.830.459		
			Pengawasan	W7-A6/998/PL.01/8/2022	52.682.695			52.682.695			Pembayaran belanja modal Uang Muka
			Total Pengawasan						52.682.695		
			Pengelola Kegiatan		147.166.350			33.195.000			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
								37.746.800			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
								14.510.400			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
								8.660.000			Penggantian uang persediaan untuk
								11.699.400			Penggantian uang persediaan untuk
								3.801.000			Penggantian uang persediaan untuk
								3.120.000			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
								34.433.750			Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola						147.166.350		
		TOTAL							5.453.764.240		
39	401940		Fisik	W7-A7/1148/PL.01/8/2022	11.140.778.000,00			1.052.184.600		✓	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 1
								1.578.276.900			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								3.765.170.805			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								2.063.107.500			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								2.682.038.195			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Fisik						11.140.778.000,00		
			Perencanaan	W7-A7/347/PL.01/2/2022	516.987.000			167.558.985			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								279.264.975			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								27.926.498			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								42.236.542			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Perencanaan						516.987.000		
			Pengawasan	W7-A7/1045/PL.01/7/2022	210.816.000			63.244.800			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								105.408.000			Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan

		PENGADILAN AGAMA BINTUHAN				42.163.200					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							210.816.000				
			Pengelola Kegiatan		132.343.221	13.206.600					Penggantian Uang Persediaan untuk
						29.043.146					Penggantian Uang Persediaan untuk
						2.880.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						20.966.600					Penggantian Uang Persediaan untuk
						300.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						4.820.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						13.993.481					Penggantian Uang Persediaan untuk
						12.440.918					Penggantian Uang Persediaan untuk
						10.880.000					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						3.410.000					Penggantian Uang Persediaan untk
						900.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						15.827.476					Penggantian Uang Persediaan untuk
						480.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						1.420.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						1.775.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola				132.343.221				
			TOTAL				12.000.924.221				
40	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	Fisik	W7-A8/1077/PL.01/8/2022	12.291.162.030,00	2.341.173.720				✓	Pembayaran Belanja Modal berupa
						2.926.467.150					Pembayaran Belanja Modal berupa
						3.024.016.055					Pembayaran Belanja Modal berupa
						3.999.505.105					Pembayaran Belanja Modal Termin 3
			Total Fisik					12.291.162.030,00			
			Perencana	W7-A8/373/PL.01/2/2022	950.553.300	301.922.700					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
						503.204.500					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
						31.450.282					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
						113.975.818					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Perencana					950.553.300			
			Pengawas	W7-A8/1078/PL.01/8/2022	368.665.290	70.221.960					Pembayaran Belanja Modal berupa
						87.777.450					Pembayaran Belanja Modal Termin
						90.703.365					Pembayaran Belanja Modal Termin 2
						119.962.515					Pembayaran Belanja Modal Termin 3
								368.665.290			
			Pengelola Kegiatan		169.291.700	7.850.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
						5.650.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
						54.390.540					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
						16.657.800					Penggantian uang Persediaan Rupiah
						19.055.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
						6.250.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
						4.832.160					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
						23.950.000					Pertanggungjawaban tambahan Uang
						30.656.200					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola Kegiatan					169.291.700			
			TOTAL					13.779.672.320			
41	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	Fisik	K.PPK/Fsk-Gdg/PA.MPR/VII	5.405.281.000	2.702.640.500				✓	Pembayaran Belanja Modal sesuai
						2.702.640.500					Pembayaran Belanja Modal sesuai
			Total Fisik					5.405.281.000			
			Perencana	K.PPK/RNC-GDG/PA.MPR/II	1.200.106.000	96.078.500					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
						192.157.000					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
						240.196.250					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
						240.196.250					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4
						23.932.100					Pembayaran Belanja Modal sesuai
						47.864.200					Pembayaran Belanja Modal sesuai
						59.830.250					Pembayaran Belanja Modal sesuai
						59.830.250					Pembayaran Belanja Modal sesuai
						60.005.300					Pembayaran Belanja Modal sesuai

				180.015.900					Pembayaran Belanja Modal sesuai
Total Perencana					1.200.106.000				
Pengawas	K.PPK/Fsk-Gdg/PA.MPR/VII	281.600.000		140.800.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
					140.800.000				Pembayaran Belanja Modal sesuai
Total Pengawas					281.600.000				
Pengelola Kegiatan		148.233.452		25.117.729					Penggantian uang persediaan untuk
				21.956.717					Penggantian uang persediaan untuk
				19.126.730					Penggantian uang persediaan untuk
				7.681.362					Penggantian uang persediaan untuk
				10.668.888					Penggantian uang persediaan untuk
				17.219.667					Penggantian uang persediaan untuk
				10.992.496					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
				13.561.446					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
				4.275.000					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
				17.633.417					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
Total Pengelola Kegiatan					148.233.452				
Pengadaan	W6-A9/2011/KU.01/XI/2022	9.000.000		9.000.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
Total Pengadaan Sertifikat Tanah					9.000.000				
TOTAL					7.044.220.452				

42	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	Fisik	W8-A10/0763/PL.01/05/2022	22.245.471.000,00		2.186.034.960		✓		Pembayaran belanja modal sesuai No.
							1.748.827.968				Pembayaran belanja modal sesuai
							1.748.827.968				Pembayaran belanja modal sesuai
							3.423.503.288				Pembayaran belanja modal sesuai
							3.423.503.288				Pembayaran belanja modal sesuai
							3.860.710.280				Pembayaran belanja modal sesuai
							4.105.235.280				Pembayaran belanja modal sesuai No.
			Total Fisik					22.245.471.000,00			
			Perencana	W8-A10/407/PL.01/3/2022	745.461.875		231.900.000				Pembayaran belanja modal sesuai
							386.500.000				Pembayaran belanja modal sesuai
							34.301.875				Pembayaran belanja modal sesuai
							92.760.000				Pembayaran belanja modal sesuai
			Total Perencana					745.461.875			
			Pengawasan	A10/0760/Add-02/PL.01/8/2022	758.148.000		303.259.200				Pembayaran belanja modal sesuai
							454.888.800				Pembayaran belanja modal sesuai No.
			Total Pengawasan					758.148.000			
			Pengelola Kegiatan		288.396.429		84.403.000				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							1.500.000				Penggantian uang persediaan untuk
							28.486.280				Penggantian uang persediaan untuk
							30.776.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.377.449				Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.236.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							7.300.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							9.690.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							28.820.200				Penggantian Uang Persediaan untuk
							21.327.500				Penggantian Uang Persediaan untuk
							19.230.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							24.250.000				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola					288.396.429			
			TOTAL					24.037.477.304			

43	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	Fisik	U10/49/KONTRAK-FISIK/X/2	25.174.158.235		1.147.416.450		✓		Pembayaran Belanja Modal berupa		
							879.685.945				Pembayaran Belanja Modal berupa		
							803.191.515					Pembayaran Belanja Modal berupa	
							994.427.590					Pembayaran Belanja Modal Berupa	
							1.384.145.250					Pembayaran Belanja Modal Berupa	
							2.828.487.750					Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang	
				W6-			16.435.320.000					W6-	
				W6-			701.483.735					W6-U10/874/SPK/KONS.PENG/X/2020	
			Total Fisik					25.174.158.235					
			Perencanaan	W6-U10/136/PL.01/II/2020	958.109.000			66.777.600					Pembayaran Belanja Modal berupa
								16.694.400					Pembayaran Belanja Modal berupa
								174.927.400					Pembayaran Uang Muka Belanja Modal
								279.883.840					Pembayaran belanja modal berupa
								279.705.554					Pembayaran belanja modal berupa
								140.120.206					W6 U10/136/PL.01/II/2020
			Total Perencanaan						958.109.000				
			Pengawasan	W6-U10/52/KU.01/10/2022	295.747.000			89.210.700					Pembayaran Belanja Modal berupa
								9.912.300					Pembayaran Belanja Modal berupa
								73.772.800					Pembayaran Belanja Modal Berupa
								122.851.200					Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang
			Total Pengawasan						295.747.000				
			Pengelola Kegiatan		320.818.053,00			4.197.300					Penggantian Uang Persediaan untuk
								4.006.048					Penggantian Uang Persediaan untuk
								15.300.322					Penggantian Uang Persediaan untuk
								20.863.500					Penggantian Uang Persediaan untuk
								2.895.002					Penggantian Uang Persediaan untuk
								12.648.300					Penggantian Uang Persediaan untuk
								1.204.100					Pengesahan atas Pertanggungjawaban
								2.255.200					Penggantian uang persediaan untuk
								28.735.082					Penggantian uang persediaan untuk
								22.239.785					Penggantian uang persediaan untuk
								30.183.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
								10.392.954					Penggantian Uang Persediaan untuk
								10.600.000					Penggantian uang persediaan untuk
					4.019.500					Penggantian uang persediaan untuk			
					3.477.800					Penggantian uang persediaan untuk			
					16.497.500					Penggantian uang persediaan untuk			
					18.138.300					Penggantian uang persediaan untuk			
					5.342.524					Penggantian uang persediaan untuk			
					10.565.000					Penggantian uang persediaan untuk			
					5.357.600					Penggantian uang persediaan untuk			
					18.536.400					Penggantian uang persediaan untuk			
					8.576.250					Penggantian uang persediaan untuk			
					4.473.200					Penggantian uang persediaan untuk			
					14.138.649					Penggantian uang persediaan untuk			
					13.949.834					Penggantian uang persediaan untuk			
					24.365.148					Penggantian uang persediaan untuk			
					7.859.755					Penggantian uang persediaan untuk			
Total Pengelola						320.818.053,00							
TOTAL						26.748.832.288							
44	401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	Fisik	W6-A8/927/PL.01/VI/2022	19.024.926.463		3.082.432.350		✓		Pembayaran Belanja Modal berupa		
							2.928.310.732				Pembayaran Belanja Modal berupa		
							2.465.945.880				Pembayaran Belanja Modal Paket		
							4.285.674.019				Pembayaran Belanja Modal Paket		
							4.285.674.018				Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2		
							668.761.071				Pembayaran Belanja Modal untuk Jasa		
							41.797.567				Pembayaran Belanja Modal Jasa		
							207.339.479				Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3		
							227.969.500				Pembayaran Belanja Modal berupa		

						205.172.550					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
						314.857.950					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
						24.477.550					Penggantian Uang Persediaan untuk
						31.992.632					Penggantian Uang Persediaan untuk
						18.784.555					Penggantian Uang Persediaan untuk
						16.654.484					Penggantian Uang Persediaan untuk
						29.704.236					Penggantian Uang Persediaan untuk
						30.273.319					Penggantian Uang Persediaan untuk
						16.713.575					Penggantian Uang Persediaan untuk
						28.676.319					Penggantian Uang Persediaan untuk
						113.714.677					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
									19.024.926.463		
									19.024.926.463		
45	401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	Fisik	W6-A10/1163/PL.01/VIII/202	4.924.596.000,00		984.919.200			✓	Pembayaran Belanja Modal (53) sesuai
							2.462.298.000				Pembayaran Belanja Modal (53) sesuai
							1.477.378.800				Pembayaran Belanja Modal (53) sesuai
			Total Fisik						4.924.596.000,00		
			Perencana	W6-A10/332/PL.01/III/2022	1.128.223.000		508.495.200				Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
							508.495.200				Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
							63.561.600				Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
							47.671.000				Pembayaran Belanja Modal (53) Sesuai
			Total Perencana						1.128.223.000		
			Pengawasan	W6-A10/332/PL.01/III/2022	206.034.000		82.413.600				Pembayaran Belanja Modal (53) sesuai
							123.620.400				Pembayaran Belanja Modal (53) sesuai
			Total Pengawasan						206.034.000		
			Pengelola Kegiatan		113.571.634		17.604.632				Penggantian uang persediaan untuk
							19.991.127				Penggantian uang persediaan untuk
							16.260.333				Penggantian uang persediaan untuk
							2.717.703				Penggantian uang persediaan untuk
							15.700.000				Penggantian uang persediaan untuk
							1.701.000				Penggantian uang persediaan untuk
							5.844.852				Penggantian uang persediaan untuk
							6.600.000				Penggantian uang persediaan untuk
							5.334.500				Penggantian uang persediaan untuk
							12.200.000				Penggantian uang persediaan untuk
							9.617.487				Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola Kegiatan						113.571.634		
			TOTAL						6.372.424.634		
46	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	Fisik		6.211.011.011		6.211.011.011			✓	Paket Pekerjaan Konstruksi
			Total Fisik						6.211.011.011		
			Perencana		968.233.213		109.096.700				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							218.193.400				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							272.741.750				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							242.058.303				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							48.411.660				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							77.731.400				Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
									968.233.213		
			Pengawas		254.943.750		254.943.750				Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi
			Total Pengawas						254.943.750		
			Pengelola Kegiatan		184.647.214		7.830.391				Penggantian Uang Persediaan Untuk
							15.660.001				Penggantian Uang Persediaan untuk
							11.527.974				Penggantian Uang Persediaan untuk
							11.391.527				Penggantian Uang Persediaan untuk
							7.854.000				Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.132.135				Penggantian Uang Persediaan untuk
							12.067.474				Penggantian Uang Persediaan untuk
							5.678.900				Penggantian Uang Persediaan untuk
							6.856.230				Penggantian Uang Persediaan untuk
							11.862.272				Penggantian Uang Persediaan untuk

						16.800.547					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						5.629.370					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						6.850.047					Penggantian Uang Persediaan untuk
						4.800.046					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						1.985.000					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						7.952.400					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						2.738.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						3.890.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
						8.696.350					Penggantian Uang Persediaan untuk
						10.863.200					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						5.946.350					Penggantian Uang Persediaan Untuk
						1.635.000					Penggantian Uang Persediaan (RM)
			Total Pengelola					184.647.214			
			TOTAL					7.618.835.188,			
47	477306	PENGADILAN NEGERI	TOTAL					437.898.000,		✓	mangkrak akan dilakukan
48	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	TOTAL					36.460.994.468,		✓	kdp masih berlangsung



**LAMPIRAN A3
HIBAH**

Lampiran A3 :Hibah Tahun Anggaran Berjalan Yang Sudah
Disahkan – Semesrer II TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	099010	2Z43A93A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
2	098963	2LLG1QGA	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp 46.500.000,00
3	099780	29SC2YPA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 19.690.000,00
4	099780	2234U9CA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.070.000,00
5	099780	23XRHVCA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
6	099780	26S1R88A	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
7	099780	2H7B93JA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 64.050.000,00
8	662972	2DKK6DYA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 277.503.459,00
9	400936	2ATRJ4LA	PA KENDAL	BARANG	DN	Rp 11.999.000,00
10	477380	2DC38Y7A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
11	477380	2D2D2HFA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
12	477380	2HMB554A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
13	477380	2ET7772A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
14	477380	2S6BLRSA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
15	477380	23J1PB8A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
16	099574	2GWF2ZJA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 10.654.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	099574	2ZEWTQHA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 2.375.150,00
18	307555	29USX7AA	PA SINJAI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
19	099003	2PQG872A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 1.000.000,00
20	099450	2C6MQ7AA	PN BARRU	BARANG	DN	Rp 196.698.000,00
21	097780	2S1TTZEA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 34.000.000,00
22	401390	23A8EASA	PA TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp 520.075.105,00
23	097624	2FBG4TYA	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp 191.725.000,00
24	663403	2DXS24ZA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
25	098061	21XG95EA	PN WATES	BARANG	DN	Rp 45.500.000,00
26	099003	2PWED99A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
27	401055	2N8R6P1A	PA KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
28	400421	23GB5RYA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 32.750.000,00
29	400741	2Q8WQF6A	PA CIANJUR	BARANG	DN	Rp 175.000.000,00
30	099926	28S2L76A	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
31	099926	2SJUVQXA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
32	098675	2T3AC8QA	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 118.891.650,00
33	663398	2N7XULWA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 1.800.000,00
34	663398	2LLGV4LA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 5.500.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	663398	23KVZ9VA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 4.350.000,00
36	663398	234V9MEA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 2.300.000,00
37	099162	2D81N5WA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.696.000,00
38	402191	25GXSJEA	PA MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 138.000.000,00
39	099162	2LLWAGXA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 11.663.000,00
40	400772	2TEAZ86A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.138.000,00
41	400772	2Q2NV62A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
42	400772	2ZPRPNRA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
43	400772	2KMG37KA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 3.250.000,00
44	400772	2PK54JNA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
45	401915	2EUPPH2A	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp 1.603.619.000,00
46	401957	2TKNZQPA	PA SOREANG	BARANG	DN	Rp 72.348.600,00
47	099045	2H4RRTJA	PN METRO	BARANG	DN	Rp 199.743.000,00
48	097872	2R8NMWKA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 62.000.000,00
49	097577	251JJG4A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 179.602.500,00
50	401307	2C55Q4HA	PA BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp 825.839.780,00
51	098544	2YATGQ5A	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
52	097577	2EAYNF9A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 7.650.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
53	098544	2HMQJNCA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.200.000,00
54	099162	27TK8KDA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
55	400678	265ZUGTA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 132.700.000,00
56	099176	2BL45Z7A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 4.785.000,00
57	097872	2XAZTM9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 170.348.000,00
58	097872	2TPQKGRA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 157.834.495,00
59	401488	2V5Q7LSA	PA MADIUN	BARANG	DN	Rp 28.000.000,00
60	099802	2EC8DFSA	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp 30.657.000,00
61	401709	2N7PRCCA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 7.200.000,00
62	401910	22A3KDBA	PN MUKOMUKO	BARANG	DN	Rp 777.799.650,00
63	099820	2X7GYQJA	PN TABANAN	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
64	400704	2KX2Y12A	PA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 33.266.759,00
65	307907	2QFUPCHA	PA PRAYA	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00
66	097912	2UDN2N1A	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp 8.999.999,00
67	099286	2R78HMUA	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 9.800.000,00
68	401904	2PND2C3A	PN SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp 187.450.000,00
69	097872	2LM7FS9A	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 198.931.700,00
70	400421	2FQGFCKA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
71	098917	2HBDNGBA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 205.493.495,00
72	098917	2KBMWRA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 424.486.682,00
73	682150	2RXFN2MA	PA KOTA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 106.987.664,00
74	097755	2QF6VJRA	PN KUDUS	BARANG	DN	Rp 424.800.000,00
75	670206	2M2HRJAA	PN BATULICIN	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
76	097886	2C3SA5WA	PN PURWOREJO	BARANG	DN	Rp 2.165.741.250,00
77	402101	229D8AHA	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 47.640.000,00
78	401271	238Y39AA	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp 661.400.000,00
79	402101	2VVFLD5A	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 150.000.000,00
80	578864	2L6REEGA	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp 42.660.000,00
81	098874	2WQZUVEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 11.100.000,00
82	098938	2392TD4A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
83	098938	2HQWKY1A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
84	098938	23WCFMPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
85	098938	2GBPMB5A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
86	098938	2Z6E3LNA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
87	097908	27RGLNUA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 12.012.000,00
88	400891	2ET6BMMA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
89	099031	21THL5DA	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00
90	098938	2RA7G8ZA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.400.000,00
91	098938	286KM9NA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
92	400327	2SR2PNGA	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp 23.450.000,00
93	401375	213RHZEA	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 322.541.788,00
94	681422	2UEUSX7A	PN PASANGKAYU	BARANG	DN	Rp 197.411.966,00
95	097542	2UVHW84A	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
96	097542	2VWDQDLA	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
97	097603	2VEY2ECA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 39.050.000,00
98	401876	2KKWXGHA	PA KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp 338.162.000,00
99	098310	2F4YN6BA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
100	098310	2F9TBSEA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
101	099024	21SAJ1AA	PN SUNGAILIAT	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
102	670227	2F25XX3A	PA SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
103	559857	29RMM13A	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 29.000.000,00
104	400690	2U3C6V2A	PA CIAMIS	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
105	400415	2G8JCKVA	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp 520.561.080,00
106	400492	22PN216A	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 52.100.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
107	672980	25U13T6A	PN PARIGI	BARANG	DN	Rp 449.200.000,00
108	097652	2HU2UJRA	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 35.780.000,00
109	099773	2L3QVBBA	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.016.854.000,00
110	402468	289MT84A	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 4.550.000,00
111	307644	2GM1K39A	PA MAJENE	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
112	098310	24X1N5VA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 32.000.000,00
113	098874	27ZUDQFA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
114	400559	2458MQ2A	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 6.549.000,00
115	400559	21CBPCTA	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 12.550.000,00
116	099155	2J1137ZA	PN KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 35.400.000,00
117	662972	27A755DA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 11.667.000,00
118	402519	28VPDLFA	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 181.309.150,00
119	098015	2U6W5GRA	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp 24.500.000,00
120	400239	2WU22KVA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 800.000,00
121	400239	29F9R9MA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
122	097908	2QP8RQSA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 8.000.000,00
123	604723	2CJJHDUA	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp 235.500.000,00
124	673013	25J4YG7A	PN MALILI	BARANG	DN	Rp 524.533.560,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
125	402302	23FDWSVA	PA PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 83.016.000,00
126	099439	2L64TBDA	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 45.850.000,00
127	099926	2CHUPMGA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
128	477380	2863U8ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
129	477380	2JV32PXA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
130	670227	293811GA	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
131	652123	23NLRY5A	PA BANGGAI	BARANG	DN	Rp 32.225.000,00
132	098942	2DNTQS7A	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.100.000,00
133	400126	2HHDQE9A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
134	400126	2G1SWB7A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
135	400126	26GFT7WA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
136	400512	24LQ3D8A	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
137	401938	2CBAFAKA	PA TELUK KUANTAN	BARANG	DN	Rp 570.000.000,00
138	400735	2U25DZZA	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 24.894.000,00
139	400678	212LMLGA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
140	417657	2HPLP3WA	PA TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
141	099816	23AGR2AA	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp 688.976.300,00
142	099340	2MMSRVJA	PN TAHUNA	BARANG	DN	Rp 54.490.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
143	098900	2THSDN6A	PN MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 149.555.000,00
144	400832	212679TA	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 21.540.000,00
145	400832	21QBBV9A	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 69.750.000,00
146	099947	2GALK3VA	PN SO'E	BARANG	DN	Rp 35.000.000,00
147	098938	24FV3A7A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.240.000,00
148	098938	2SGNM2CA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.200.000,00
149	098938	2K275EVA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
150	098938	2KLH5LPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 5.925.000,00
151	098938	2Z2XQ7RA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
152	098938	2Y2MA4JA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.350.000,00
153	401936	2RTZK12A	PA PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.669.994,00
154	098942	2EVL9GLA	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 16.500.000,00
155	576274	28FQA32A	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00
156	576274	2SY41AEA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 43.500.000,00
157	576274	2F2UR9EA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 28.500.000,00
158	576274	25ZUYHDA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
159	477249	2W628Y4A	PN ROTE NDAO	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
160	400512	224SBGXA	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
161	099070	281GMZNA	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp 65.000.000,00
162	402820	2JVYPNDA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.600.000,00
163	402820	2JGQCQJA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.400.000,00
164	402820	2PRV8G9A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
165	402820	2X8MPJQA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
166	402820	2NHHAG8A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
167	402820	2FAVV4EA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
168	098959	2YBDB7QA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 255.912.200,00
169	663403	2CWNVALA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
170	663403	2KN4F76A	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
171	663403	2NRVC3GA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.500.000,00
172	099010	25LBHRLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 13.500.000,00
173	099010	2QETUP6A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.650.000,00
174	098938	2X177DFA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
175	307729	2D5QJU9A	PA BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 16.000.000,00
176	477224	2GNGUTUA	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
177	400141	2N2MH71A	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 311.687.534,00
178	099471	23R8V1AA	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 177.534.246,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
179	417722	2GJNVE1A	PN TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
180	097872	2PVA4JTA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 439.202.000,00
181	400075	2Z4VMY5A	PN SORONG	BARANG	DN	Rp 299.580.000,00
182	400540	284BX3EA	PT KENDARI	BARANG	DN	Rp 539.078.000,00
183	097872	2SBSWDNA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 235.530.000,00
184	097872	21258K9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 280.282.420,00
185	097872	21PVS9RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 65.187.086,00
186	662986	2MRYTCKA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 10.200.000,00
187	662986	23AK2ELA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 6.600.000,00
188	098214	2FB4VC9A	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp 22.800.000,00
189	400967	2TJSCEMA	PA PATI	BARANG	DN	Rp 475.000.000,00
190	559857	25XAVENA	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 25.400.000,00
191	307712	2RX33TPA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 1.925.000,00
192	097500	2TG135BA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
193	097535	2S83Y8DA	PN TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 134.462.500,00
194	402540	2XH5PPYA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
195	402540	2QBNMJTA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 7.700.000,00
196	098544	2DY4ZXKA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 149.105.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
197	307712	2V4WKRLA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
198	307232	278J6DFA	PA KOTAMUBAGU	BARANG	DN	Rp 33.925.000,00
199	099638	2AT7UBQA	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp 162.000.000,00
200	098310	2WRQDQHA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 44.219.000,00
201	098310	2Z8LZ3YA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
202	098310	2T45PQUA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 13.325.000,00
203	402525	2LWCRFVA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 117.500.000,00
204	402525	2KRRP9PA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 4.800.000,00
205	098874	2AYMXHAA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 47.175.000,00
206	098874	2BKWLRNA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.844.000,00
207	098874	27HBVCUA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.778.000,00
208	477380	2GZLS6ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 1.787.146.700,00
209	400879	2T1ZPLCA	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 33.750.000,00
210	400879	23TBNC5A	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 29.117.000,00
211	099180	2YGE422A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 3.696.500,00
212	099180	23BHDD6A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 6.700.000,00
213	099752	2869FYCA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
214	099752	27JGB2DA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
215	099752	2ZBF8PDA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
216	401929	27187KPA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 6.750.000,00
217	401929	2PFAYAJA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 9.650.000,00
218	401929	2DSUPG7A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
219	401929	25PSLW4A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 419.872.006,00
220	098832	2YQP6Y6A	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
221	098832	235MPPTA	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 5.999.000,00
222	099752	22U38QVA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
223	099752	2L9D8M1A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
224	099752	2YNSUJ3A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
225	099752	2FKDTF7A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 26.500.000,00
226	099752	2S1M4CLA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 43.000.000,00
227	099752	2GM28WHA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 500.000,00
228	099752	29H7V5PA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
229	099752	2832ZE4A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
230	099752	2V3JBR8A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
231	099010	2QNDZYLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.200.000,00
232	099862	2DU5LHYA	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp 1.690.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
233	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 214.525.150,00
234	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 356.400.000,00
235	400571	2D68V6KA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 4.900.000,00
236	400571	2K5B33HA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
237	400571	26GMWEAA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.050.000,00
238	400571	2PMRJ2YA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.375.000,00
239	400571	28FVQSDA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
240	400571	2UPD1MCA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
241	400571	2W3AAHTA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
242	400571	26FNR2LA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.700.000,00
243	400571	2MWL153A	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.350.000,00
244	099176	2N1CFU6A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
245	097598	23ZRCWYA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 6.747.393.420,00
246	401907	2F3AP18A	PN PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.010.000,00
247	099162	22ZVSDHA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
248	098959	21XVZSDA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 114.830.610,00
249	098959	2B68CY7A	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 144.107.000,00
250	098959	2U9SWKSA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 125.083.750,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
251	098959	293XUTJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 28.695.000,00
252	099752	2K2XRSXA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
253	097500	2PSAPAVA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 750.000.000,00
254	400492	23YMFCDA	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 40.000.000,00
255	097691	2616N38A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 124.717.600,00
256	097890	2RKUAD3A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
257	097890	2YN6RDMA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
258	097890	2PB6B6HA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.100.000,00
259	097890	26KJQR9A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 2.800.000,00
260	097890	2PDYBP7A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
261	097890	26KBMLWA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
262	401884	2U1VZFEA	PA AMPANA	BARANG	DN	Rp 147.243.139,00
263	098881	2BYWNXDA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 924.688.000,00
264	098881	2AAEM6PA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 13.689.500,00
265	097908	2GYKFK1A	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 3.800.000,00
266	097598	2ZQ44BGA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 5.297.828.186,00
267	400126	2ZK8QRGA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 199.867.000,00
268	108309	2LCC52MA	PN BATAM	BARANG	DN	Rp 90.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
269	097691	2DA2NJ2A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 6.400.000,00
270	400239	2P6FF32A	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 302.894.027,00
271	477306	22Y38MLA	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp 193.903.614,00
272	097691	29QN823A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 59.000.000,00
273	098192	2W6R8ZJA	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp 13.000.000,00
274	400823	2W53PPPA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
275	400823	2PXF91MA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
276	098256	2D1JGX7A	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp 10.450.000,00
277	097603	2UMC3WKA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 42.122.000,00
278	097603	2R5Q8X3A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 132.692.000,00
279	097603	23EMJ9DA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
280	097603	2JK5HPQA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
281	097603	2782DL5A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
282	097603	2ZKZH4XA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
283	672910	2BQA2LGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 30.600.000,00
284	401709	29KG64BA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 197.962.000,00
285	098959	2J44VDJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 593.834.460,00
286	559857	2QFJNACA	PTUN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
287	672910	2U8PTTVA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
288	672910	2X5XXHLA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
289	673062	23V3KT6A	PN SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp 198.634.000,00
290	098874	29RU9UEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 199.851.000,00
291	098874	2JHP2P5A	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 151.620.000,00
292	097780	2VH6XLPA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00
293	098743	2MDHA7BA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 718.529.500,00
294	098743	2D7618YA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 447.106.946,00
295	098722	22EQ8K1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
296	098061	2FY9M59A	PN WATES	BARANG	DN	Rp 68.000.000,00
297	099230	21Z88U4A	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
298	099230	232LG2XA	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 16.977.600,00
299	400421	2D79E5CA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 7.925.000,00
300	098860	2EW2HGLA	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
301	308021	2CPNYVZA	PA CURUP	BARANG	DN	Rp 4.749.000,00
302	401174	2V8PY87A	PA KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 290.711.900,00
303	097933	2TGSRWMA	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 237.994.000,00
304	400483	2ABYDBQA	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp 479.436.473,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
305	099003	21JNHQGA	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 739.470.000,00
306	663051	21APMVVA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 17.625.000,00
307	663051	2WDAXWNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
308	663051	2K9MEKNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 9.773.000,00
309	663051	21H1DZDA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 6.850.000,00
310	098881	2BKWC4GA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 34.854.000,00
311	098881	251G48FA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 349.560.508,00
312	400282	2Z4373RA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
313	400282	24PBJ4GA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 11.050.000,00
314	400282	2TRMR4JA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
315	097872	295282RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
316	097872	2UZ351AA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
317	097975	2SL1MW3A	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 10.500.000,00
318	097975	2HG2TCRA	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 409.000.000,00
319	099375	2Q9NDL3A	PN PALU	BARANG	DN	Rp 100.069.000,00
320	097762	2A9T9JQA	PN PATI	BARANG	DN	Rp 36.335.000,00
321	099663	213Y168A	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 19.088.000,00
322	099663	2WJ4N6MA	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 1.250.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
323	098132	2V22GQFA	PN TUBAN	BARANG	DN	Rp 258.445.400,00
324	097762	2L8M632A	PN PATI	BARANG	DN	Rp 199.500.000,00
325	097741	2Y1REXDA	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
326	099286	2R7A9W4A	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 907.442.400,00
327	613519	22QGNUSA	PN CIBINONG	BARANG	DN	Rp 32.400.000,00
328	682164	27Q94EMA	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp 47.419.000,00
329	663157	27Q94EMA	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp 191.109.100,00
330	097598	2YWLVVZA	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp 2.036.666.594,00
331	613519	2ENK2HKA	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp 1.404.540.848,00
332	401971	2UGZN68A	PN DATARAN HUNIMOA	UANG	DN	Rp 50.000.000,00
333	526750	21FPKXHA	PTUN PALEMBANG	UANG	DN	Rp 2.186.000.000,00
334	097709	2HH6RWGA	PN KUNINGAN	UANG	DN	Rp 700.000.000,00
335	099070	27FDBQ1A	PN SINGKAWANG	UANG	DN	Rp 150.000.000,00
336	401915	2KS1A39A	PN CIKARANG	UANG	DN	Rp 6.000.000.000,00
TOTAL						Rp 70.284.339.793,00

Lampiran A3 :Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Sudah
Disahkan – Semester II TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	401670	2SH4BU5A	MS IDI	BARANG	DN	Rp 652.252.212,00
2	576253	2U7EXF9A	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
3	576253	2KCAJVUA	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
4	098167	29ETE8VA	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp 150.375.000,00
5	401878	22BZ8N6A	PA SENDAWAR	BARANG	DN	Rp 3.037.149.000,00
6	099471	21VU4W9A	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 167.707.950,00
7	400477	2G9DTAZA	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp 536.400.000,00
8	097802	2E8R9LAA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 100.000.000,00
9	097802	2EH6T4YA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
10	097802	26NJHFCA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 524.281.000,00
11	097802	2PLHMHTA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 171.882.967,00
12	097872	25Y8YJ2A	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
13	402132	2GUDDWGA	PA SELAT PANJANG	BARANG	DN	Rp 384.000.000,00
14	400580	2WCLHECA	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 1.709.609.772,00
15	097577	2EKG53HA	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 259.025.000,00
16	477352	2E2SELYA	PN PASAMAN BARAT	BARANG	DN	Rp 196.612.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	098462	2GJX7CWA	PN SIGLI	BARANG	DN	Rp 399.077.000,00
18	400389	2XTD5Q5A	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 86.086.000,00
19	400389	2RR3NNEA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 42.117.500,00
20	663026	2HD4WT2A	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 500.000.000,00
21	402443	2RVBTMXA	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp 1.068.000.000,00
22	098874	2C3HGTDA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 186.320.000,00
23	402468	2GR89PDA	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
24	400389	261BZGBA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 282.139.990,00
25	664522	2M7V8YJA	PT MALUKU UTARA	BARANG	DN	Rp 678.732.000,00
26	400998	27WHZ6VA	PA REMBANG	BARANG	DN	Rp 87.840.500,00
27	097776	2KUKP49A	PN BREBES	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
28	400891	213G76NA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 201.473.000,00
29	400891	213M8GEA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 126.704.000,00
30	099769	2BQ23L9A	PN SOASIU	BARANG	DN	Rp 364.436.000,00
31	401909	2V7FM7DA	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp 1.034.376.000,00
32	663026	2EUJEGHXA	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 810.000.000,00
33	097691	2CLXD1LA	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 299.378.000,00
34	401914	2PEPANCA	PN BANJAR	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	401715	25P8D66A	MS KOTACANE	BARANG	DN	Rp 90.895.000,00
36	402242	2KHKL67A	PA PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 84.200.000,00
37	672910	2DFM7VGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 78.801.000,00
38	098608	25E1WPQA	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp 1.893.569.000,00
39	307491	27H2GSRA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
40	307491	2WBRC3GA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
41	682171	2FJTF4GA	PA AMURANG	BARANG	DN	Rp 2.476.737.326,00
42	098722	2ZCX12GA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
43	098722	2CALLBVA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
44	098722	23LPDNEA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
45	098722	28NL2B1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
46	098722	2TCK51TA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
47	098722	2EGMQ39A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
48	098310	24971ENA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 6.985.000,00
49	402097	2JLDNGCA	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 136.320.000,00
TOTAL						Rp 19.068.832.217,00